

**BAB 4**  
**WACANA NASIONALISME INDONESIA**  
**DALAM PERSPEKTIF MASYARAKAT LOKAL**

**4.A. “Aceh Masih Mungkin Pisah”<sup>1</sup>**

Gejolak di Aceh sudah sangat lama berlangsung. Akumulasi dari berbagai persoalan yang tidak dapat dipecahkan dengan baik (paling tidak hingga Agustus 2005 yaitu saat terjadinya kesepakatan bersama MoU antara GAM dengan Pemerintah RI di Helsinki) telah menyebabkan gejolak di Serambi Mekah itu semakin membesar. Yang sangat menarik untuk dilihat dalam sejarah konflik berkepanjangan antara pemerintah RI dan GAM adalah bahwa di luar konfrontasi fisik berdarah yang mengerikan, juga terjadi proses konstruksi (mungkin lebih tepatnya *counter* konstruksi, konstruksi tandingan) di dalam ranah produksi pengetahuan. Dalam berbagai literatur sejarah, Aceh selalu digambarkan sebagai bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Anggapan yang sudah sedemikian mapan ini ditepis oleh seorang penulis (warga Aceh) dengan mengatakan bahwa tidak ada landasan historis dan konstitusional yang kuat untuk menyatakan bahwa Aceh adalah bagian dari Indonesia. Dalam sebuah tulisan berjudul “Aceh Masih Mungkin Pisah” (dihimpun dalam Bouchier dan Hadiz, 2006), penulis juga menyangsikan adanya keterlibatan orang Aceh di dalam Sumpah Pemuda tahun 1928 yang dianggap sebagai titik tolak perjuangan kemerdekaan dan semangat persatuan di dalam masyarakat Indonesia. Berikut beberapa petikan penting berkaitan dengan pewacanaan makna nasionalisme antara ke-Acehan dan ke-Indonesiaan yang dilukiskan dengan penuh ketegangan.

Mengkaji ulang untai sejarah kelahiran Negara RI mestilah kita menelaah kembali peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum RI diproklamakan pada tahun 1945. Kajiannya dapat didekati secara historis dan konstitusional. *Pertama*, secara historis, perlu diteliti dari

---

<sup>1</sup> Ini adalah judul sebuah tulisan yang dibuat oleh Mohammad Daud Yoesoef, dosen Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala di Banda Aceh. Pada waktu artikel ini muncul di surat kabar terbitan Banda Aceh pada 7 Maret 1999, kampanye menuntut referendum untuk kemerdekaan di Aceh tengah berlangsung. Sumber: David Bouchier dan Vedy R. Hadiz, *Pemikiran Sosial dan Politik Indonesia Periode 1965-1999*, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2006. Hal. 350-352

suku-suku mana saja di Nusantara ini wakil-wakil yang hadir dalam pertemuan akbar, yang kemudian melahirkan Sumpah Pemuda 1928. Menurut data sejarah tidak ada satu orang Aceh pun yang mewakili bangsanya pada waktu itu dalam even sumpah pemuda tersebut.

Dalam proses pembentukan UUD 1945 pun hanya satu orang Aceh yang diikutsertakan dalam PPKI, yaitu Mr. Teuku Muhammad Hasan (almarhum). Tapi harap dicatat, ia tidak dapat dikatakan sebagai wakil bangsa Aceh, karena kedudukannya sebagai anggota PPKI hanya kebetulan saja, lantaran pada masa penjajahan Belanda ia berdomisili di Batavia dalam rangka sekolah. Ia mendapat kesempatan untuk itu atas dasar keturunan dari salah seorang penguasa daerah di Aceh yang diangkat oleh Belanda.

Bahkan ia juga menganggap bahwa sejarah Indonesia sangat lekat dengan sejarah kolonialisme, hingga menyebabkan beberapa elemen mendasar dalam negara Indonesia juga merupakan sisa-sisa dan kelanjutan dari rezim kolonialisme. Filosofi dasar di balik UUD 1945, dan sistem ketatanegaraan yang dipakai oleh Indonesia pun di bangun atas dasar pengaruh kolonialisme. Hal itu menurutnya menjadi sesuatu yang wajar karena para elite politik Indonesia memiliki hubungan yang erat dengan orang-orang Belanda, dan mereka pun menjadi pemimpin dan intelektual berkat pendidikan yang ia peroleh dari negeri Belanda. Ia mengatakan:

*Kedua*, secara konstitusional, UUD 1945 apabila ditelaah filosofi kelahirannya, tidak dapat dipisahkan dari pengaruh kolonialisme. Hal ini tercermin pada pemberian kekuasaan yang sangat besar kepada presiden. Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif juga memegang kekuasaan legislatif dan masih dapat mencampuri urusan-urusan yang masuk wewenang yudikatif. Kekuasaan presiden yang sangat luas, menurut UUD 1945, itu tidak terlepas dari sisa pengaruh kekuasaan Gubernur Jendral masa Hindia Belanda. Pada masa itu dimaklumi bahwa hubungan antara negeri Belanda dan Hindia Belanda sangat jauh dan komunikasinya sangat sulit. Konsekuensinya, pemerintah di Negeri Belanda menyerahkan kekuasaan yang sangat besar kepada Gubernur Jendral di Hindia Belanda. ...Di samping pengaruh tersebut, juga dapat dikatakan bahwa sebagian besar Panitia perumus UUD adalah mereka-mereka yang memperoleh pendidikan dari Belanda.

Argumentasi lain yang dikemukakan dalam teks tersebut adalah bahwa di dalam UUD 1945 tidak disebutkan secara jelas mana-mana daerah yang termasuk di dalam wilayah kedautan Republik Indonesia. Berdasarkan fakta

tersebut di atas, maka daerah-daerah di luar Jawa pada masa sekarang ini dapat menuntut pemisahannya dari Negara RI yang sejak tahun 1945 telah memasukkannya sebagai wilayah Negara Kesatuan RI. Apalagi pemerintah Indonesia selama ini tidak pernah mengindahkan aspirasi mayoritas rakyat di daerah-daerah di luar Jawa. Ia meyakini bahwa UUD 1945 itu sesungguhnya dibuat atas dasar kepentingan Pulau Jawa dengan mengabaikan kepentingan-kepentingan daerah-daerah lainnya. Oleh karenanya, menurut Yoesoef, penolakan atau tuntutan perubahan terhadap UUD 1945 adalah wajar dan merupakan hak dari rakyat di daerah-daerah luar pulau Jawa. Khususnya Aceh yang telah dieksploitasi berpuluh-puluh tahun, bahkan rakyatnya ditindas secara biadab selama DOM. Berikut pernyataan Yoesoef:

... suatu UUD/konstitusi haruslah, selain memuat ketentuan-ketentuan pokok mengenai badan-badan pemerintahan beserta tugas-tugas pokoknya, menentukan dasar-dasar negara dan hak-hak warga negara/HAM, juga menentukan wilayah negaranya. Dengan kata lain, di dalam UUD itu disebutkan daerah-daerah mana saja yang termasuk dalam kedaulatan wilayahnya (*territorial sovereignty*). Ketentuan seperti itu dapat kita lihat dalam UUD/Grondwet Negeri Belanda, Konstitusi Malaysia, Filipina dan lain-lain.

Tapi, ketentuan mengenai daerah-daerah mana yang masuk dalam wilayah Negara RI tidak disebutkan dengan tegas dan jelas dalam UUD 1945, baik dalam batang tubuh maupun penjelasannya. Hanya dalam penjelasan Pasal 18 UUD 1945 ada disebutkan contoh desa di Jawa dan Bali; Nagari di Minangkabau; dusun dan marga di Palembang. Jadi wilayah Negara RI sebenarnya tidak jelas meliputi daerah-daerah mana saja yang merupakan kedaulatan wilayahnya. Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka daerah-daerah di luar Jawa pada masa sekarang ini dapat menuntut pemisahannya dari Negara RI yang sejak tahun 1945 telah memasukkannya sebagai wilayah Negara Kesatuan RI dengan tidak mengindahkan aspirasi mayoritas rakyat di daerah-daerah di luar Jawa. Sesungguhnya, UUD 1945 itu dibuat atas dasar kepentingan Pulau Jawa dengan mengabaikan kepentingan-kepentingan daerah-daerah lainnya. Oleh karenanya, penolakan atau tuntutan perubahan terhadap UUD 1945 adalah wajar dan merupakan hak dari rakyat di daerah-daerah luar pulau Jawa. Khususnya Aceh yang telah dieksploitasi berpuluh-puluh tahun, bahkan rakyatnya ditindas secara biadab selama DOM, sahlah menuntut pemisahan dari Negara Kesatuan RI. Sah pula menuntut penentuan nasib sendiri (*self determination*) melalui referendum, atau pun selemah-lemahnya semangat, hanya menuntut negara federasi.

Nada kemarahan di dalam teks tersebut juga terasa sangat kuat, terutama dipicu oleh kekerasan dan kebiadaban tentara Indonesia terhadap masyarakat Aceh khususnya ketika diberlakukannya status DOM di wilayah tersebut. Mereka merasa dihancurkan dan diinjak-injak martabatnya oleh tentara. Sebagai kesimpulannya, ia kembali lagi ke argumentasi historis, yuridis dan konstitusional, yang menurutnya memang sangat memungkinkan Aceh untuk berdiri sendiri sebagai sebuah negara dan bangsa yang berdaulat di luar NKRI. Berikut pernyataan Yoesoef;

Tuntutan-tuntutan seperti tersebut di atas, bagi Aceh adalah hal yang mutlak. Oleh karena pemerintah pusat, khususnya pimpinan ABRI, selama ini tidak menampakkan *political will*-nya untuk menyelesaikan kasus-kasus Aceh selama DOM dan Pasca-DOM. Pemerintah menutup mata dan telinga terhadap jeritan hati rakyat Aceh. Padahal mereka mungkin sadar, bahwa rakyat Aceh tetap memiliki *survival instinct*, untuk tetap hidup secara manusiawi. Rakyat Aceh memiliki martabat yang selama ini telah diinjak-injak oleh ABRI. Oleh karenanya, demi martabatnya (*national prestige*), apapun rela dikorbankan selama pemerintahan tidak memberikan jalan keluar, alias tidak membuka *fase-saving exit* untuk menjawab nestapa dan ketertindasan Aceh selama ini.

Artinya, ditinjau dari segi apapun—historis dan konstitusional—apalagi dilihat dari spirit dan tekad Aceh yang sudah mengkristal saat ini, tidak ada kendala yang begitu berarti bagi Aceh untuk pisah dari Republik Indonesia, sebagaimana halnya Timtim. Dan, kalau Timtim bisa, kenapa Aceh tidak? Cuma, masalahnya, relakah republik melepaskan Aceh yang selama ini secara ekonomi sudah sangat menggemukkan pusat?

Dari teks di atas dapat ditangkap paling tidak dua hal penting berkaitan dengan konstruksi wacana nasionalisme Indonesia. *Pertama*, bahwa nasionalisme Indonesia tidak pernah ada di Aceh. Baik atas landasan historis, yuridis maupun konstitusional tidak ada justifikasi bagi Aceh untuk menjadi bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Kedua*, ketiadaan nasionalisme Indonesia di kalangan masyarakat Aceh juga diperkuat oleh praktik-praktik kekerasan yang dilakukan oleh tentara terhadap masyarakat Aceh, khususnya ketika berlangsung status DOM di wilayah tersebut.

Jika ditinjau dari perspektif Michel Foucault, maka akan tampak bahwa di dalam teks tersebut sebenarnya sedang berlangsung proses *counter* wacana (atau bisa juga dikatakan sebagai perebutan wacana) terhadap apa-apa yang sudah diproduksi oleh Orde Baru, khususnya yang berkaitan dengan pemaknaan nasionalisme, ke-Indonesiaan dan juga ‘ke-Acehan’. Bila diurai lebih lanjut menurut konsep Foucault, maka setidaknya ada 6 (enam) dimensi konseptual yang terlibat dalam perebutan wacana tersebut, yakni; *power, knowledge, games of truth, discourse, counter history, episteme*.<sup>2</sup> Pada dimensi ‘power’ misalnya, tampak terjadi proses ‘legitimasi’ *versus* ‘deligitimasi’ kekuasaan. Ketika Orde Baru berusaha menjelaskan keterlibatannya di Aceh sebagai upaya menjaga integritas NKRI, untuk menjaga stabilitas, yang antara lain dipraktikkan dengan penerapan Aceh sebagai Daerah Operasi Militer (DOM), maka di dalam teks yang diproduksi oleh masyarakat Aceh tersebut, digambarkan bahwa yang terjadi hanyalah praktik-praktik melawan nilai-nilai kemanusiaan, yaitu berupa ‘...eksploitasi, pembantaian, penindasan...’ dan lain-lain.

Demikian pula pada dimensi ‘knowledge’, sementara Orde Baru membangun wacana bahwa kehadirannya di panggung kekuasaan adalah untuk melakukan ‘Pembangunan nasional, Pembaharuan dan modernisasi masyarakat’, maka di dalam teks yang diproduksi oleh masyarakat Aceh digambarkan bahwa yang terjadi sesungguhnya adalah justru proses perusakan nilai-nilai masyarakat Aceh khususnya oleh tentara (‘...martabat Rakyat Aceh sudah diinjak-injak oleh ABRI’). Terjadi pula proses perebutan makna kebenaran (*games of truth*) di dalam teks tersebut. Hal itu tampak misalnya ketika Orde Baru mendefinisikan kehadiran dirinya di panggung kekuasaan adalah dalam rangka ‘...Melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, Demokrasi Pancasila, kepentingan rakyat di atas segalanya’, maka di dalam teks yang diproduksi masyarakat Aceh digambarkan, bahwa dengan berpijak pada landasan yang sama yaitu Pancasila dan UUD 1945, Aceh dan beberapa daerah lain di luar Jawa justru berhak menuntut kemerdekaan, karena dalam dua landasan negara tersebut

---

<sup>2</sup> Beberapa konsep turunan dari teori yang dikembangkan oleh Michel Foucault yang lain, menurut Kenneth Allan adalah; Order, archeology, historical rupture, subject objectification, panopticon, human disciplines, governmentality, microphysics of power, sexuality and subjectivity. (Allan, 2006: 290)

tidak pernah secara jelas dan detil dikatakan bahwa Aceh merupakan bagian dari Indonesia (...‘Berdasarkan UUD 1945, daerah-daerah luar Jawa sekarang ini dapat menuntut pemisahan dari NKRI’).

Pada dimensi ‘discourse’ Orde Baru telah membuat sejumlah kategori tertentu untuk menempatkan orang-orang atau sekelompok orang yang dipandang melawan negara sebagai OPM (Organisasi Papua Merdeka), GPK (Gerakan Pengacau Keamanan), PKI (Partai Komunis Indonesia), GAM (Gerakan Aceh Merdeka), dan juga ‘gerakan separatis’. Semua kategori ini memiliki implikasi yang berat bagi pihak-pihak yang dianggap sebagai bagian di dalamnya. Masyarakat Aceh yang tidak tahu menahu tentang GAM misalnya, setiap saat dihantui oleh ketakutan akan sebutan ini. Karena, begitu disebut sebagai bagian dari GAM, maka setiap saat nasibnya bisa terancam. Di dalam teks yang diproduksi masyarakat Aceh digambarkan bahwa yang ada di Aceh sebenarnya bukanlah kategori-kategori yang dibuat Orde Baru, melainkan keinginan suatu warga untuk menentukan nasib sendiri (‘Tuntutan penentuan nasib sendiri (*self determination*) merupakan hak warga Aceh...’), bukan GAM, PKI, GPK atau yang lain-lainnya.

Tampak jelas pula bahwa di sini ada satu permainan perebutan makna kebenaran, *games of truth*, sekaligus juga perebutan pembacaan sejarah (‘history’ versus ‘counter-history’). Yaitu ketika Orde Baru sudah mengatakan bahwa bentuk ‘NKRI adalah final’ di mana termasuk di dalamnya Aceh, di dalam teks yang diproduksi masyarakat Aceh tersebut justru dikatakan bahwa tidak ada landasan historis dan konstitusional yang kuat bahwa Aceh adalah bagian dari Indonesia (*‘Baik secara historis maupun konstitusional tidak ada landasan yang kuat bahwa Aceh merupakan bagian integral dari NKRI’*). Sementara itu pada dimensi ‘Episteme’, tampak terjadi perebutan makna yang tajam. Ketika Orde Baru meletakkan landasan kenegaraan yang dibangunnya di atas asas kekeluargaan, teks yang diproduksi masyarakat Aceh justru mengatakan bahwa pemerintahan yang ditawarkan Orde Baru tidak memberikan jalan keluar apa pun bagi penderitaan masyarakat Aceh, yang terjadi justru sebaliknya, Orde Baru telah mengorbankan dan menindas

masyarakat Aceh. Jika dibuat suatu tabel perebutan makna tersebut, akan tampak sebagai berikut:

| FOUCAULT'S CONCEPTS | WACANA ORBA   | WACANA DI ACEH  |
|---------------------|---|---|
| Power               | 'DOM, Menjaga Integritas NKRI, stabilitas politik,  | '...eksploitasi, pembantaian, penindasan'   |
| Knowledge           | 'Pembangunan nasional, Pembaharuan dan modernisasi masyarakat'  | '...martabat Rakyat Aceh sudah diinjak-injak oleh ABRI'   |
| Games of Truth      | 'Melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, Demokrasi Pancasila, kepentingan rakyat di atas segalanya' | 'Berdasarkan UUD 1945, daerah-daerah luar Jawa sekarang ini dapat menuntut pemisahan dari NKRI'   |
| Discourse           | 'OPM, GPK, PKI, GAM, Gerakan Separatis'   | 'Tuntutan penentuan nasib sendiri ( <i>self determination</i> ) merupakan hak warga Aceh...'  |
| Counter-history     | 'NKRI Final'  | 'Baik secara historis maupun konstitusional tidak ada landasan yang kuat bahwa Aceh merupakan bagian integral dari NKRI'  |
| Episteme            | '...; massa mengambang, Negara kekeluargaan'  | '...demi martabatnya, apapun akan rela dikorbankan rakyat aceh selama pemerintahan tidak memberikan jalan keluar untuk menjawab nestapa dan ketertindasan Aceh selama ini.' |

Namun pembacaan terhadap teks di atas, akan lebih baik jika kita membaca konteks sejarah, sosial, politik dan kebudayaan yang lebih luas. Secara historis, Aceh telah mencatatkan sejarah dirinya dengan tinta emas, tentang kejayaan masa lalunya yang heroik, sebagai bangsa yang tak pernah takluk oleh kolonialisme Belanda. Orang Aceh memiliki kebanggaan yang besar terhadap kejayaan masa silam ini. Cerita tentang kejayaan Sultan Iskandar Muda, atau kerajaan Peureulak dan Samudera Pasai, atau pun tentang kegigihan rakyat Aceh melawan Belanda dalam perang Aceh yang meletus tahun 1873, yang berlangsung selama 80 tahun, selalu menjadi catatan yang muncul dalam buku-buku sejarah Aceh.<sup>3</sup>

<sup>3</sup> Contoh untuk ini adalah buku yang diedit oleh Ismail Suny, *Bunga Rampai Aceh* (Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1980). Dalam buku ini terkumpul 14 karya tentang Aceh. Salah satunya ditulis oleh Prof. Osman Raliby, berjudul 'Aceh, Sejarah dan Kebudayaan'. Raliby mencatat bahwa Raja yang pertama beragama Islam adalah Sultan Malik Al-Saleh dari

Menurut Abdullah Ali (1999) kebanggaan orang Aceh itu memang memiliki alasan yang kuat. Diantaranya ialah alasan historis dimana Islam masuk ke Nusantara pada sekitar tahun 700 masehi tak lain melalui Aceh ini. Kerajaan Islam pertama di kepulauan Nusantara adalah kerajaan Peureulak di pesisir tenggara Aceh yang didirikan pada tahun 804. Selanjutnya pada abad ke 16 dan 17, pelabuhan Aceh (dan beberapa pelabuhan lain di Indonesia) menempati posisi yang strategis saat terjadi pertikaian dengan kekuatan Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris dalam kompetisi untuk meraih dominasi perdagangan rempah-rempah Nusantara. Kedudukan Sultan Aceh dalam pertikaian itu amat menonjol, karena bersama-sama Sultan Malaka merupakan pemegang kendali jalur perdagangan di Selat Malaka.

Catatan penting lain dalam sejarah Aceh ialah ditandatanganinya Traktat London antara Belanda dan Inggris. Melalui perjanjian itu kedaulatan Inggris di Sumatera diserahkan kepada Belanda, dan sebaliknya Belanda menyerahkan jajahannya di India dan Singapura kepada Inggris. Tetapi Aceh menolak menjadi daerah jajahan. Belanda mengumumkan perang kepada Aceh pada tahun 1873. Perang yang disebut sebagai 'Perang Delapan Puluh Tahun' ini telah menimbulkan kerugian besar bagi rakyat Aceh dan juga bagi Belanda. Perang tersebut telah menanamkan perasaan kebencian rakyat Aceh yang mendalam kepada Belanda. Bahkan, menurut Ali (1999) kebencian tersebut diwariskan turun-temurun kepada beberapa generasi hingga saat ini, misalnya tampak di desa-desa para ibu meninabobokkan bayinya di ayunan dengan nyanyian perang yang mengisahkan semangat perang Aceh, dengan tujuan untuk mendidik anak-anak untuk tetap membenci Belanda.

Perang Aceh adalah perang termahal dan terlama yang pernah dialami Belanda. Dalam perang itu Belanda kehilangan lebih dari 12.000 tentara dan dua orang jenderal.<sup>4</sup> Kuburan Belanda di Taman Peucut, Banda Aceh

---

Samudra Pasai (1270-1297) dan raja yang pertama beragama Islam dari Aceh adalah Ali Muchayat Syah (1514-1528). Raja Ali inilah yang pertama mengambil prakarsa dan kemudian dilanjutkan pengganti-penggantinya untuk mempersatukan semua kerajaan kecil yang ada di pantai barat di utara Aceh menjadi suatu Negara Islam yang kuat di Asia tenggara yang kemudian dikenal dalam sejarah sebagai Kerajaan Islam Aceh. (Suny, 1980: 27-44)

<sup>4</sup> Salah satunya adalah Jendral Mayor JHR Kohler, yang makamnya berada di Banda Aceh. Kohler adalah Panglima Angkatan Perang Belanda dalam Agresi Pertama, mendarat di

menjadi saksi monumental tentang akibat Perang Aceh itu. Di pihak Aceh, 70.000 orang menjadi korban dalam peperangan itu. Sebagian ahli sejarah menyatakan bahwa perang tersebut berakhir pada tahun 1903, namun kegiatan gerilya Aceh terhadap pasukan Belanda masih berlangsung hingga 1914. Ada pula ahli sejarah yang memperkirakan bahwa perang itu baru berakhir ketika Jepang masuk ke Indonesia tahun 1942. Itu disebabkan karena suatu fenomena yang disebut 'Aceh Moord', yaitu pembunuhan politik oleh gerilya Aceh terhadap pejabat-pejabat Belanda masih terus berlangsung secara sporadis hingga saat pemerintahan Belanda meninggalkan kepulauan Nusantara, ketika balatentara Jepang masuk kembali ke Indonesia pada Perang Dunia Kedua.

Kebanggaan lain yang sangat menonjol di kalangan rakyat Aceh ialah peranan yang diambil secara proaktif dalam Perang Kemerdekaan RI. Ketika kekuatan rezim militer Jepang menyerah kepada kekuatan sekutu pada tahun 1945, seluruh rakyat Aceh menyatakan bersatu padu berada di bawah naungan Republik Indonesia. Menurut fatwa ulama Aceh, peran serta rakyat Aceh dalam perang Kemerdekaan Indonesia identik dengan '*fi sabilillah*' atau 'perang sabil' atau berjihad di jalan Allah. Orang yang mati di dalamnya karena berjuang akan memperoleh pahala 'syahid' dan imbalanya adalah 'syurga jannatunnaim'. Kebanggaan masyarakat Aceh terhadap kegemilangan sejarah perjuangan masa lalu inilah, menurut Ali, yang merupakan sumber motivasi dan semangat dalam perjuangan menegakkan kemerdekaan Indonesia. (Jakobi, 1998: 5)

Ketika seluruh wilayah Hindia Belanda telah berhasil ditundukkan oleh Belanda, Aceh menjadi satu-satunya wilayah yang utuh, bahkan menjadi basis bagi keberlanjutan perjuangan Indonesia di masa-masa selanjutnya. Pengakuan mengenai hal ini disampaikan langsung oleh Bung Karno dalam sebuah pidato pada tanggal 17 Juni 1948, di depan ratusan ribu rakyat yang melimpah di jalan raya di depan Markas Divisi di Biruen. Saat itu ia mengatakan:

---

Pante Ceuremen-Ulhee Lheue, 6 April 1873. Setelah empat hari bertempur, Masjid Raya Bayt ar-Rahman (Banda Aceh) direbut Belanda, 10 April 1873. Tetapi malam itu juga terpaksa dilepas karena serangan gencar pasukan Aceh. Tanggal 14 April dengan mengerahkan seluruh kekuatannya Belanda merebut lagi Bayt ar-Rahman, tetapi tembakan pembidik Aceh telah merenggut nyawa Kohler, sehingga rencana penyerangan selanjutnya diurungkan. Seraya mengusung jenazah sang panglima Belanda terpaksa mundur ke arah pantai. (Jakobi, 1998: vi)

“...Saya ingin bertemu muka dengan rakyat Aceh yang selalu menjadi kenanganku. Bagi seluruh rakyat Indonesia, rakyat Aceh cukup dikenal, bahkan oleh seluruh dunia, sebagai rakyat yang tidak mau dijajah Belanda. Rakyat Aceh yang telah mengalahkan beberapa bagian tentara Belanda; rakyat Aceh yang telah mengadakan perjuangan mati-matian, bertempur, menolak, dan menahan imperialisme Belanda masuk ke daerah Aceh, sehingga karenanya Aceh menjadi Daerah Modal Republik Indonesia...Rakyat Aceh menjadi inspirasi untuk mengobarkan semangat bangsa Indonesia...” (Jakobi, 1998: vii)

Penyebutan Aceh sebagai Daerah Modal Republik Indonesia oleh Bung Karno tidaklah berlebihan. Aceh tidak hanya telah memberikan dukungan moril bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia, namun juga menyumbangkan sejumlah materi yang sangat dibutuhkan Indonesia. Dalam sebuah pertemuan dengan para pemimpin masyarakat dan pejuang Aceh di Aceh Hotel pada pertengahan Juni 1948, Bung Karno mengharapkan malam itu dapat terkumpul sejumlah dana perjuangan untuk membeli pesawat terbang, yang sangat diperlukan dalam perjuangan kemerdekaan saat itu. “*Saya tidak makan malam ini, kalau dana untuk itu belum terkumpul,*” ucap Bung Karno. Menghadapi tantangan tersebut, para hadirin saling melirik—siapa yang harus memulai. Tanggapan pertama datang dari seorang pemuda berusia 30 tahun, bernama M. Djuned Joesoef. Ia adalah seorang pengusaha besar yang kebetulan menjabat sebagai Ketua GASIDA (Gabungan Saudagar Indonesia Daerah Aceh). Langkah M. Djuned itu diikuti oleh pengusaha lainnya, sehingga terkumpul dana cukup besar, yaitu 12.000 dollar Malaysia dan emas 20 kilogram.

Dana itu cukup untuk membeli dua pesawat terbang jenis Dakota. Di dalamnya sudah termasuk sumbangan dari pemerintah daerah Aceh, yang diberikan oleh Residen Teuku Chik Mohamad Daudsyah dan mantan Wakil Residen Teuku Mohammad Ali Panglima Polim. Dari dana yang tersedia sebagian masih bisa dialokasikan untuk membiayai kegiatan duta-duta dan kantor perwakilan RI di luar negeri. Diantaranya Singapura, Penang, India, Manila, perwakilan di PBB, dan biaya duta keliling H. Agus Salim ke Timur Tengah, serta biaya konferensi Asia di New Delhi India. (Jakobi, 1998: 277)

Bung Karno secara khusus memberi nama pesawat sumbangan rakyat Aceh itu “Seulawah RI-001”, sebagai penghormatan untuk masyarakat Aceh

yang secara ikhlas dan tulus telah memberikan sumbangan berharga pada situasi perjuangan yang genting. Pesawat pertama tiba di tanah air pada akhir Oktober 1948, ketika tanah air sedang mengalami kepungan politik blokade ekonomi dan militer dari pihak Belanda. Pesawat perintis yang menjadi kekuatan pertama armada TNI-AU itu telah berjasa besar dalam menerobos blokade Belanda. Antara lain sebagai jembatan yang menghubungkan Pemerintah Pusat di Yogyakarta dengan Pemerintah Darurat di Suliki dan Kutaraja.

Di samping menyumbang dua pesawat terbang, Aceh juga menyumbang kapal *speed boat* No, PPB 58 LB—dengan bobot mati seberat 100 ton yang merupakan sumbangan *Central Trading Cooperation* (CTC) kepada Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI). Keberadaan kapal ini di perairan Aceh banyak membantu upaya melakukan perdagangan barter untuk memperoleh senjata yang dibutuhkan oleh Indonesia. Operasi barter di Aceh dikoordinasikan oleh Mayor Osman Adami, sebagai pimpinan *Aceh Trading Company* (ATC), cabang CTC di Aceh yang ditunjuk oleh Letkol. Teuku Hamid Azwar yang menjabat Direktur CTC di Bukittinggi. Salah satu hasil barter yang berhasil dikoordinasikan oleh Mayor Osman Adami tersebut adalah seperangkat peralatan radio dengan kekuatan 350 watt telegrafi dan 300 watt telefoni. Perangkat radio ini mempunyai daya jangkauan siaran sampai Singapura dan Malaya.

Menurut Bustanil Arifin SH, yang merupakan salah seorang pelaku sejarah dalam Perang Kemerdekaan RI di daerah Aceh, terdapat sejumlah faktor yang mendorong pimpinan perjuangan saat itu untuk mendirikan pemancar radio yang kuat dan mampu menjangkau pendengarnya sampai ke Penang, Kuala Lumpur dan Singapura di Malaya. Mereka yakin bila siaran sampai di Malaya, pesan-pesan yang ingin disampaikan akan menyebar ke seluruh dunia. Dari segi politis, penyiaran ini sekaligus meng-*counter* suara radio Belanda yang dipancarkan dari Medan dan Sabang, yang hampir setiap malam melancarkan '*psy war*' (perang urat syaraf) terhadap para pejuang dan penduduk di daerah Republik di Aceh dan Sumatra Utara. 'Duel' di udara radio "Rimba Raya" yang kadang-kadang menamakan dirinya 'Suara Indonesia Merdeka' dengan radio Belanda di Medan, "Radio Batavia" dan "Radio

Hilversium' di Holland terus berlangsung. Semula 'Rimba Raya' dipancarkan dari desa Krueng Simpur dekat Bireuen.

Debat ini dipantau oleh Kepala Perwakilan RI di India, Dr. Sudarsono melalui radio Penang di Malaya. Ia meneruskannya kepada Kepala Perwakilan RI di PBB, Mr. LN. Palar. Karena laporan inilah, Belanda berusaha memburu pemancar radio tersebut untuk dihancurkan. Karena itu, pemancar radio 'Rimba Raya' berpindah-pindah. Dari Desa Krueng Simpur, pimpinan Aceh, Gubernur Militer Teungku Mohammad Daud Beureueh memerintahkan untuk ditarik ke Pegunungan Cot Gue di Aceh Besar. Ternyata di sini pun pemancar ini tidak aman. Akhirnya diinstruksikan lagi untuk diamankan di pegunungan 'Rimba Raya' yang terkenal strategis dan berhutan lebat yang sulit ditembus pesawat terbang Belanda.

Dengan dipilihnya dataran tinggi Pegunungan Gayo, Aceh Tengah/Tenggara sebagai markas gerilya jangka panjang, diperlukan pemancar yang kuat dan dapat diandalkan. Sementara itu, siaran RRI tidak terdengar lagi ketika seluruh ibukota Propinsi di seluruh Pulau Jawa dan Sumatera diduduki oleh Belanda. Hanya radio 'Rimba Raya' di Aceh yang masih mampu berfungsi sebagai alat perjuangan, menyalurkan aspirasi nasional sampai ke luar negeri. Dengan demikian kevakuman siaran RRI segera diisi, sehingga rakyat Indonesia tidak mudah diombang-ambingkan oleh isu-isu yang menafikan perjuangan Republik, baik di dalam maupun di luar negeri. Oleh sebab itu 'Rimba Raya' melibatkan penyiar yang mahir berbahasa Inggris, Urdu, Arab, Belanda, Cina dan bahasa Indonesia. Dalam bukunya *Laporan dari Banaran* (Penerbit PT. Pembangunan, Jakarta: 1959) Jendral (Purn) TB. Simatupang mengatakan bahwa selain pemancar yang ada di Wonosari, Jawa Tengah, masih terdapat pemancar radio yang kuat di Sumatera, yaitu di Kutaraja. 'Rimba Raya' dapat terus memelihara kontak komunikasi dengan pimpinan pusat perjuangan gerilya di sekitar pedalaman Yogyakarta dan Surakarta. Pada masa tersebut hanya ada tiga pemancar gerilya yang masih bisa beroperasi secara terbuka. Ketiga siaran tersebut adalah siaran Republik di hutan-hutan Surakarta, siaran Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di luar negeri dan Ketua PDRI di Sumatera Barat. Siaran-siaran ini dapat mengimbangi siaran radio 'Batavia' dan radio

‘Hilversium’ yang mengatakan bahwa perjuangan RI sudah lumpuh dan para pemimpinnya sudah ditangkap.

Melalui siaran radio ‘Rimba Raya’ di Takengon Aceh Tengah, komunikasi dan informasi timbal balik tiga arah terus berlangsung antara radio ‘Rimba Raya’ Aceh dengan radio pejuang di hutan-hutan Jawa Tengah; radio ‘Rimba Raya’ Aceh dengan PDRI di Sumatera Barat; dan radio ‘Rimba Raya’ Aceh dengan Dubes Dr. Sudarsono (Perwakilan RI di Luar Negeri). Informasi timbal balik tiga arah itu berhasil menyampaikan berita perjuangan dengan tujuan: kedalam, meninggikan moral rakyat serta TNI yang sedang bergerilya dan mendukung perjuangan yang dilaksanakan oleh para diplomat Indonesia di PBB dan forum internasional, dan keluar, menunjukkan kepada dunia internasional bahwa TNI mempunyai kekuatan yang mampu mengadakan aksi ofensif dan mematahkan tekanan pasukan Belanda.

Melalui siaran radio dalam dan luar negeri, rakyat Aceh mengetahui agresi kedua. Presiden, Wakil Presiden serta sejumlah pemimpin negara lainnya telah ditawan dan diasingkan. Diketahui pula bahwa Mr. Syafruddin Prawiranegara telah membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di pedalaman Sumatera Tengah. Untuk memperlancar roda pemerintah baik sipil maupun militer, di Sumatera dibentuk 3 daerah Komisaris Pemerintah dan 5 daerah Gubernur Militer. Diantaranya Gubernur Militer untuk daerah Aceh, Langkat dan Tanah Karo di bawah pimpinan Teungku Mohammad Daud Beureueh.

Suasana di Banda Aceh—saat itu bernama Kutaraja—serta di seluruh daerah Aceh mulai menghangat. Persiapan-persiapan latihan perang ditingkatkan dimana-mana sehingga keadaan seperti dalam keadaan perang. Banda Aceh telah dipersiapkan untuk sewaktu-waktu dapat dijadikan ‘Ibukota Darurat’ bagi Republik Indonesia. Dalam perkembangannya Belanda tidak sanggup lagi melanjutkan perang. Belanda terpaksa menerima penyelesaian melalui meja perundingan. Selama Agresi Militer Belanda II, Aceh tetap merupakan wilayah Republik Indonesia yang utuh. Kabinet Presidentil Kedelapan dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1949 dan mantan Ketua PDRI, Mr. Syafruddin Prawiranegara diangkat menjadi Wakil Perdana Menteri dengan kedudukan di Banda Aceh. Jadi, Banda Aceh memang dipersiapkan menjadi

Ibukota RI kedua atau Ibukota Darurat bagi Republik Indonesia. Pada tanggal 23 Agustus 1949, Konferensi Meja Bundar dibuka dengan resmi di Den Haag, Belanda. Dalam delegasi Republik Indonesia, duduk seorang anggota dari Aceh, yaitu Residen Aceh, Teuku Chik Mohammad Daudsyah. Tepat pada hari dimulainya Konferensi Meja Bundar, Wakil Perdana Menteri, Mr. Syafruddin Prawiranegara dan Menteri Agama Kiai Masykur tiba di Banda Aceh dengan diantar kapal perang Belanda dari Sabang.

Wakil Perdana Menteri akan menetap di Aceh dan membuka Kantor Pemerintah di Banda Aceh. Segala persiapan dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan gagalnya perundingan di negeri Belanda dan peperangan antara Belanda dan Indonesia pecah lagi. Ketika Kantor Wakil Perdana Menteri/Pemerintah Pusat dibuka di Banda Aceh, Banda Aceh (Kutaraja) telah dipersiapkan sebagai Ibukota Kedua RI. Tugas Wakil Perdana Menteri di Aceh selesai bila KMB yang berlangsung di Den Haag berhasil dengan baik. Kalau KMB mengalami kegagalan dan pecah perang lagi, Wakil Perdana Menteri telah membentuk Kabinet Perang yang berkedudukan di Banda Aceh sebagai ibukota Kedua RI, selama keadaan perang. Pada waktu itu diperkirakan Belanda akan merebut kembali Yogyakarta dan daerah-daerah lain di Republik Indonesia. Dalam sejarah sepuluh tahun kemudian, pada tanggal 26 Mei 1959 oleh pemerintah pusat, Aceh ditetapkan secara resmi menjadi Daerah Istimewa Aceh, berdasarkan Keputusan Perdana Menteri RI No. 1/Missi-1959.

Begitu menyatu jiwa Aceh dengan Indonesia dalam sejarah perjuangan bersama mencapai kemerdekaan dari penjajah kolonial. Hingga pada tahun 1950, seorang penyair Aceh Cut Nyak Manyak Keumala Putrie membuat bait puisi akan kebanggaan dan rasa patriotisme membela tanah air bersama, tanah air Indonesia, yang diberi judul; “Mari Bersatu Maju Bersama”: *Membasmi musuh/ Membina negara/ Sekalipun bahaya/ Tetap kutantang/ Demi negara dan/ Bangsa kita/ Ku tetap berjuang/ Di garis depan/ Membunuh musuh/ Satu persatu/ Negara utuh/ Tetap kupertahankan/ Membunuh musuh/ Membela negara/ Indonesia/ Pusaka bunda/ Mari bersatu/ Hidup bersama/ Gugur pahlawan/ Dalam pelukan bunda/ Jangan takut/ Dan jangan ragu/ Indonesia satu milik bersama.* (Jakobi, 1998: 286-287)

#### 4.A.1. Kekecewaan dan Ketidakpuasan

Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa Aceh adalah salah satu bagian penting yang membidani lahirnya Republik Indonesia. Orang Aceh sangat menyadari hal ini. Bertrand (2004: 163) mencatat bahwa integrasi Aceh ke Republik Indonesia menunjukkan dua hal sekaligus; pada satu sisi menunjukkan tingkat penerimaan dan dukungan yang diberikan oleh Aceh terhadap konsep mengenai bangsa Indonesia, dan pada sisi lain menunjukkan kuatnya identitas daerah Aceh itu sendiri. Bergabungnya Aceh dengan Republik Indonesia memiliki sejarah awal yang berbeda dibanding dengan daerah lain di Indonesia. Aceh memiliki satu bentuk komunitas yang unik karena masa lalu mereka yang memiliki kekuatan besar, yang ditunjukkan dalam perlawanannya terhadap Belanda, dan juga karena kuatnya identitas ke-Islaman mereka. Meski demikian para tokoh Aceh yang memiliki kekuatan dan dukungan yang kuat dari masyarakatnya setelah usainya masa kolonialisme Belanda dan penjajahan Jepang, memilih untuk berkomitmen dalam membangun Republik Indonesia. Ketika pemerintah Republik Indonesia terdesak oleh kembalinya Belanda, Aceh sudah memiliki satu pemerintahan daerah yang kuat, dan mereka menunjukkan diri sebagai satu pendukung kuat Republik Indonesia.

Dalam sejarahnya, sebagaimana dicatat Ahmad (1999) di Aceh memang pernah muncul ajakan mendirikan 'Negara Federal Sumatera', sebagai hak bagi suku bangsa-suku bangsa di Sumatera. Ajakan itu disampaikan oleh Dr. Teuku Mansur tanggal 17 Maret 1949. Namun ajakan ini ditolak oleh Aceh. Dalam sidang staf Gubernur Militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo tanggal 20 Maret 1949, muncul 3 pendapat: Pertama, menerima ajakan Dr. Teuku Mansur. Kedua, memproklamasikan Aceh sebagai negara yang berdiri sendiri. Ketiga, menjadi bagian dari negara Republik Indonesia. Sidang yang dipimpin Tgk. Muhammad Daud Beureueh sepakat menetapkan pilihan ketiga, yaitu bahwa Aceh tetap merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Ahmad, 1999: 39) Keterlibatan Aceh dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia sangat mendalam. Karena di Aceh ini pulalah dibentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI), di bawah Mr. Syafruddin Prawiranegara,

ketika para pemimpin bangsa Soekarno-Hatta Syahrir ditangkap Belanda sebagai upaya penyelamatan republik.<sup>5</sup>

Meski demikian dalam perjalanan sejarah, perasaan masyarakat Aceh mulai terusik dan berubah menjadi rasa kecewa dan merasa diperlakukan secara tidak adil oleh Jakarta. Tahun 1949, berdasarkan sebuah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Aceh sebenarnya telah berstatus provinsi otonom. Mula-mula rasa kecewa terhadap pemerintah pusat disebabkan karena Aceh tidak dikukuhkan statusnya menjadi sebuah provinsi dengan otonomi luas, yang amat diharapkan para pemimpin dan masyarakat Aceh dan malah status provinsinya dicabut. Daerah Aceh diminimalisasikan statusnya menjadi sebuah karesidenan yang tunduk di bawah Provinsi Sumatera Utara yang beribukota di Medan. Keputusan ini ditentang para alim ulama Aceh karena pengurusan Agama Islam, kebudayaan dan adat istiadat di Aceh dinilai akan mengalami kesulitan.

Audrey Kahin (2005) yang banyak mendalami sejarah integrasi Sumatera Barat dan politik Indonesia dari tahun 1926-1998, juga memberikan catatan khusus mengenai Aceh. Menurutnya, Aceh dari semula memang merupakan pusat kegelisahan dalam perjalanan Indonesia merdeka. Penggabungan Aceh dalam Propinsi Sumatera Utara kebalikan dari maklumat yang dibuat oleh Wakil Perdana Menteri Sjafruddin Prawiranegara pada bulan Desember 1949, yang telah mengakui keunikan sejarah Aceh dan kepentingan serta kesetiiaannya kepada Republik selama revolusi dengan mendirikan propinsi yang terpisah di bawah pemerintahan yang dipimpin oleh Ketua Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) Tgk. Muhammad Daud Beureueh, yang telah menjadi gubernur militer Aceh selama tahun-tahun akhir revolusi.

Daud Beureueh dan kelompok Islam, marah merasa terhina ketika pada bulan Agustus pemerintah akan memasukkan Aceh ke dalam Propinsi Sumatera Utara, padahal sebelumnya Daud Beureueh telah membentuk dewan perwakilan sementara untuk daerahnya, dengan anggota yang dipilih terutama dari kalangan

---

<sup>5</sup> Peristiwa heroik juga ditunjukkan masyarakat Aceh ketika rakyat di Sumatera Utara terkepung oleh Belanda di sekitar Sungai Ular. Sekitar 3.000 rakyat Aceh, berangkat ke Sumatera untuk melebur dalam kancah perang 'Medan Area', hanya bersenjatakan rencong dan beberapa senjata tua. Hampir 1.000 masyarakat Aceh gugur di medan perang tersebut. (Ahmad, 1999: 39)

ulama. Karena itu Beureueh bersama para elite Aceh langsung menyatakan penolakannya atas rencana itu. Sejumlah tokoh penting pemerintahan pusat pun langsung mendatangi Aceh, dan meminta agar Aceh menerima penggabungan tersebut. Tokoh-tokoh tersebut adalah Sjafruddin Prawiranegara, Menteri Dalam Negeri Assat, Wakil Presiden Muhammad Hatta, dan Perdana Menteri M. Natsir. Menteri-menteri ini khawatir apabila Aceh berhasil mempertahankan status propinsinya, tuntutan yang sama akan muncul dari seluruh nusantara. Selama kunjungannya ke daerah itu bulan Januari 1951, Natsir menyampaikan pidato di radio dimana dia mengingatkan kembali kesetiaan Aceh selama masa revolusi dan mengingatkan rakyatnya terhadap ancaman yang dihadapi Republik semenjak penyerahan kedaulatan oleh pemberontakan pro-Belanda. “Hanyalah berkat kepribadian Natsir sebagai pemimpin Islam, yang akhirnya dapat meyakinkan PUSA untuk menarik tuntutannya dengan berat hati agar Aceh tetap sebagai sebuah propinsi,” tulis Kahin. (Kahin, 2005: 260)

Tercetusnya pemberontakan DI/TII di Aceh pada 21 September 1953 adalah juga akibat dari kekecewaan dan rasa ketidakadilan para pemimpin dan masyarakat Aceh terhadap berbagai tindakan pemerintah pusat. Peristiwa pemberontakan yang berlangsung selama delapan tahun itu menelan banyak korban jiwa. Konflik politik dan persenjataan antara Aceh dengan pemerintah pusat tersebut berakhir tahun 1959 dengan persetujuan yang disebut ‘penyelesaian secara prinsipil dan bijaksana’. Dalam penyelesaian itu, DI/TII tidak dianggap menyerah, dan Aceh diberikan status Provinsi Daerah Istimewa melalui suatu Keputusan Wakil Perdana Menteri RI. Isi dan wujud Provinsi Daerah Istimewa Aceh memperoleh keistimewaan dalam bidang Agama, adat istiadat, dan pendidikan. Status provinsi daerah istimewa itu dikukuhkan dengan Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 1965 tentang pemerintahan daerah.

Diantara ketiga keistimewaan ini, yang paling menonjol implementasinya ialah keistimewaan di bidang pendidikan. Atas prakarsa dan usaha seluruh lapisan masyarakat dan pemimpin formal serta tokoh-tokoh masyarakat Aceh sendiri, maka dalam tahun 1959 berdirilah di pinggiran kota Banda Aceh sebuah kampus pendidikan tinggi yang diberi nama ‘Darussalam’ dan yang diberi gelar ‘Jantung Hati Rakyat Aceh’. Sejak itu di sana berdiri

Universitas Syiah Kuala dan tidak lama kemudian diikuti oleh berdirinya IAIN Ar-Raniry. Sebagai upaya menerapkan UU Nomor 18 Tahun 1965, itu DPRDGR (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong). Daerah Istimewa Aceh pernah mengajukan sebuah rancangan pemerintah tentang 'berlakunya syariat Islam bagi pemeluknya' di Daerah Istimewa Aceh kepada pemerintah pusat. Tetapi rancangan UU itu ditangguhkan pembicaraannya dan untuk selanjutnya tidak diketengahkan lagi di pusat. Pada tahun 1974 DPR RI mengeluarkan UU No. 5 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah yang belaku di seluruh Indonesia. Dengan keluarnya undang-undang ini, maka otomatis UU No. 18 Tahun 1965 gugur, tidak berlaku lagi. Dalam UU itu antara lain, dicantumkan, daerah Aceh masih berhak menggunakan sebutan daerah istimewa tetapi hanya sebagai sebutan saja. Namun, butir keputusan ini masih ditafsirkan banyak pemuka masyarakat di Aceh bahwa hak istimewa itu masih ada. Sedangkan hal yang sebenarnya tidak lagi demikian. Ini semua makin menimbulkan rasa kekecewaan di kalangan masyarakat para pemimpin Aceh.

Situasi konflik antara masyarakat Aceh dengan Pemerintah Pusat semakin meningkat ketika pada akhir tahun 1960-an, ditemukan sebuah ladang gas alam, di kawasan permukiman masyarakat di Arun, Kabupaten Aceh Utara, pesisir timur Aceh, yang depositnya diperkirakan dapat dieksploitasi selama lebih dari 30 tahun. Di bawah kontrak antara PN Pertamina dan Mobile Oil Indonesia, Inc., sumber daya gas alam itu dieksploitasi dengan 85 persen keuntungan untuk pemerintah dan 15 persen untuk Mobil Oil. Maka sebuah kilang raksasa dengan beberapa *train* untuk memisahkan LNG dari kondensat LPG butan dan propan pun dibangun. Melalui proses penyulingan, gas alam itu dikondensasikan menjadi cair dengan bantuan zat nitrogen dicairkan pada suhu yang sangat rendah melalui prinsip kreogenik. Kilang itu dioperasikan di bawah manajemen PT. Arun.

Hasil eksploitasi gas alam itu sangat besar. Menurut perkiraan kasar, sebagaimana yang diungkapkan Ahmad (1998), setiap tahun, rata-rata hasil kotor ladang Arun itu mencapai US\$ 2,1 miliar atau kurang lebih US\$ 6 juta perhari. Sejak saat itu Aceh berkembang sebagai kawasan zona industri kimia dasar, dan menjadi propinsi penghasil devisa untuk negara di samping

Kalimantan Timur dan Riau. Kilang gas Arun sejak beroperasi 1977, menghasilkan empat produk utama, yaitu (data informasi per Agustus 1998):

1. Condensate (minyak mentah), telah diekspor 1.679 kapal atau 673.402.340 bbls. Hitungan harga per bbls US\$ 12-US\$ 18
2. LNG (gas alam cair), telah diekspor 3.135 kapal atau 389.309.390 m<sup>3</sup>. Hitungan harga perkapal rata-rata US\$ 6.000.000 – US\$ 9.000.000.
3. LPG Propane, telah diekspor 344 kapal atau 7.225.422 metrik ton. Hitungan harga per kapal rata-rata US\$ 2.700.000.
4. LPG Butane, telah diekspor 348 kapal atau 6.731.689 metrik tons. Hitungan harga per kapal rata-rata US\$ 2.700.000.

Keempat produk ini bernilai rata-rata US\$ 2,6 juta pertahun atau jika dikonvensi dengan nilai US\$, pada Desember 1997, berarti Rp 30 triliun. Jika dijumlahkan dengan nilai penjualan PT. Pupuk Iskandar Muda tahun 1997 sebesar Rp 223,82 miliar, PT AAF sebesar Rp 284,47 miliar dan PT Kraft Aceh sebagai industri hilir, maka penghasilan negara dari Zona Industri Lhokseumawe mencapai lebih kurang Rp 30,7 triliun. Jika penghasilan ini ditambah produksi hutan Rp 1,1 triliun, maka penghasilan Aceh dari sumber daya alamnya mencapai 31,7 triliun per tahun. Tetapi ironisnya, di tengah kekayaan yang begitu melimpah, APBD Provinsi Daerah Istimewa Aceh 1997/1998 hanya sekitar Rp 150 miliar saja.

Aceh juga mempunyai kekayaan hutan yang sangat besar. Luas kawasan hutan 4.130.000 hektar. Seluruh hutan produksi Aceh telah dikapling oleh Jakarta dalam bentuk HPH, IPK, dan HTI. Terdapat 19 perusahaan HPH yang beroperasi di Aceh. Dari sektor kehutanan, Aceh memberi penghasilan negara dalam kurun waktu lima tahun terakhir, Rp 225 miliar dalam bentuk IHH dan dalam bentuk Dana Revisasi US\$ 420 juta atau sekitar Rp 5,5 triliun atau lebih Rp 1,1 triliun per tahun. Bob Hasan, memiliki konsesi HPH seluas 160.000 hektar hutan pinus di Aceh Tengah atas nama PT. Alas Heleu, telah menguasai 25 persen saham PT Kertas Kraft Aceh. Saham tersebut, pada tahun 1985,

dinilai Rp 85 miliar. Padahal hutan pinus ini, sebenarnya, milik adat/hutan adat masyarakat Gayo. (Ahmad, 1998: 40-42)<sup>6</sup>

Masyarakat Aceh merasa sangat kecewa, karena mereka hanya diberi bagian yang sangat kecil dari hasil tambang gas itu dibandingkan hasil yang dikeluarkan Aceh. Semua itu tercermin dari dana APBN yang kembali ke Aceh setiap tahun hanya sekitar Rp 700 miliar atau kira-kira US\$ 82 juta. Pada waktu itu, rakyat di sekitar industri vital (proyek vital atau provita), merasa tidak banyak memperoleh manfaat langsung. Masyarakat, termasuk di sekitar provita, tetap susah mencari kerja. Dengan pembagian hasil sumber daya alam yang dirasakan sangat tidak adil, berbagai protes masyarakat telah mulai bermunculan. Salah satunya ialah akibat dari limbah industri sebuah pabrik pupuk urea yang memanfaatkan gas alam cair, yang dirasakan masyarakat telah mencemarkan berbagai lingkungan biota, termasuk terhambatnya produksi tambak udang.

Berbagai kekecewaan masyarakat yang lahir dari rasa perlakuan tidak adil itu menimbulkan keinginan di kalangan masyarakat Aceh untuk meningkatkan kembali upaya memperjuangkan perolehan otonomi yang seluas-luasnya dari pemerintah pusat. Usaha ini pernah diupayakan pada tahun 1974, tetapi terbatas pada tujuan memperoleh primbangan keuangan yang lebih memadai bagi Daerah Istimewa Aceh dari pemerintah pusat. Perimbangan keuangan itu berkenaan dengan pendapatan negara yang diperoleh dari eksploitasi sumber daya alam yang berasal dari Daerah Istimewa Aceh, khususnya yang bersumber dari migas. Tetapi, perjuangan itu tidak mewujudkan kemajuan yang berarti.

---

<sup>6</sup> Sejumlah keprihatinan terhadap kondisi alam Aceh yang rusak sudah banyak diungkapkan, termasuk oleh para pejabat pemerintah pusat sendiri. Menteri Kehutanan Ir. Djamiluddin Suryohadikusumo, misalnya, setelah meninjau ekosistem Leuser Juli 1997, menyampaikan kepada jajaran Departemen Kehutanan, "*Saya sangat kecewa dengan keadaan hutan kita di Kawasan Ekosistem Leuser. Bagaimana saya harus bertanggungjawab kepada Tuhan? Bagaimana saya harus bertanggungjawab kepada hati nurani saya sendiri?*". Setahun kemudian Menteri Kehutanan, Dr. Ir. Muslimin Nasution, setelah mengelilingi Kawasan Ekosistem Leuser dari udara tanggal 4-5 Juli 1998, juga merasa sangat kecewa. Menteri meminta kepada Gubernur supaya menyampaikan rekomendasi kepada beliau guna peninjauan ulang keberadaan semua HPH, HTI, dan HGU di Kawasan ekosistem Leuser. Kepada pers, Menteri mengatakan, akan mengkaji ulang sistem pengelolaan hutan/HPH. (Ahmad, 1998: 42)

#### 4.A.2. Kekerasan dan Pembantaian

Kekecewaan demi kekecewaan terhadap pemerintah pusat Indonesia dirasakan semakin menggunung oleh kalangan masyarakat Aceh. Berbagai gejala pun muncul di tengah masyarakat, dan mulai mengganggu ketenteraman hidup masyarakat Aceh. Muncul aksi-aksi penyerangan kepada petugas keamanan, yang kemudian dibalas dengan aksi kekerasan pula. Pada penghujung tahun 1980-an, masyarakat dikejutkan oleh peristiwa penyerangan beberapa pos polisi oleh masyarakat setelah ladang ganja besar ditemukan Samapta Polri di pedalaman Aceh. Menurut petugas keamanan ladang tersebut merupakan sumber logistik Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Berbagai konflik kekerasan ini rupanya mengawali satu kebijakan pemerintah pusat yang eksekusinya sangat memilukan bagi masyarakat Aceh, yaitu pemberlakuan Aceh sebagai wilayah Daerah Operasi Militer (DOM).<sup>7</sup>

Maraknya pelanggaran HAM dimulai dengan kekerasan politik pada Pemilu 1987. Ishak menuturkan pengalamannya:

Dua pekan lalu, ketika berada di Tiro, Pidie, saya bertanya, apakah selama krisis moneter ini ada pembagian sembako? 'Ada, tapi sedikit, yang banyak pembagian *boh soh* (tinju). Kami sudah bosan makan *boh soh*. Bapak bisa bayangkan, kalau keluar rumah tanpa memakai kaos atau baju kuning, makan dapat *boh soh*, walap (wajib lapor), dan cap GPK.' Pelanggaran HAM oleh militer pada salah satu desa di Tiro berawal tahun 1990-an. Suatu malam, rombongan Pak Kumis (lima orang) datang ke rumah yang dihuni perempuan tua (60-an tahun, yung sudah sakit-sakitan) dan anak perempuannya yang sedang hamil tujuh bulan, tanpa salam sebagaimana lazimnya adat Aceh. Mereka langsung mengobrak-abrik isi rumah. Setelah membentak-bentak dan memukul dengan senter, perempuan hamil itu disuruh buka

---

<sup>7</sup> Gagasan DOM menurut Ishak (1999), bermula dari sebuah pertemuan di Anjong Mon Mata, ABRI tidak mau menyebut AM karena berarti mengakui eksistensinya, sehingga disebutlah GPK (Gerombolan Pengacau Keamanan). Operasi itu bukanlah operasi tempur, tetapi operasi intelijen guna menemukan rantainya dan operasi teritorial untuk menarik simati masyarakat. Operasi itu dibantu 20 anggota Kopassus. Namun menurut Sudaryanto, Pangdam 1995-1997, kebijakan itu dinyatakan untuk menghindari sorotan dunia internasional. Djoko menyampaikan hal itu—dengan pemandu Ibrahim Hasan—di hadapan Ketua MUI (AH), Ketua DPRD TKI/Ketua Golkar (AM), Ketua PPP (KS), Ketua PDI (ZA), Ketua KNPI (AHH), Ketua FKPP (KM), Ketua Kadin (LB), PWI, pimpinan perguruan tinggi, dan wakil pesantren (IY). Semua elite itu dianggap mewakili golongannya, yang pada prinsipnya mendukung operasi yang dimaksudkan Djoko Pramono. Jadi berbeda dengan operasi militer Belanda dulu, operasi militer Orde Baru mendapat dukungan elite Aceh sendiri.

baju (mau diperkosa), tapi ia membanting lampu teploknya dan berteriak, “saya punya suami!”.

Lalu Pak Kumis mendatangi suaminya di pos jaga malam, menyeretnya ke rumahnya, dan mengambil ibu mertuanya yang sedang sakit. Mereka diikat menjadi satu. Di mobil keduanya ditelanjangi. Lalu masyarakat, termasuk anak-anak, dikumpulkan di pos jaga. Pukul 06.00. suaminya diseret dengan mobil dan digiling-giling. Akhirnya laki-laki itu ditembak di kemaluannya. Sedangkan ibunya ditembak dari belakang di tengkuk (berkali-kali) hingga kepalanya putus dan menggeling. Selang tujuh hari, Pak Kumis memprovokasi orang kampung untuk membakar rumah perempuan yang sedang hamil dan duka itu hingga punah hartanya. Kini anaknya sudah bersekolah dan histeris bila dipotret, apalagi melihat baju loreng hijau bersenjata.

Ada pula kisah janda beranak satu, berusia 24 tahun, di desa itu juga. Ia ‘diamankan’ dari rumahnya sekitar pukul 06.00. Lalu ia disiksa dan ditelanjangi di pos jaga. Penduduk disuruh berkumpul di halaman masjid. Perempuan itu mencoba menutupi tubuhnya dengan kedua tangannya, tetapi kedua tangannya ditendang dan dipukul dengan senjata. Semua orang dipaksa dengan pukulan dan tendangan untuk menyaksikan penyiksaan itu. Masyarakat menuturkan, celana wanita itu diturunkan dengan sepatu lars dan payudaranya ditendang hingga lebam. Perempuan itu berteriak, “tembak saja saya!”. Permintaan itu pun segera dipenuhi. Disaksikan khalayak, ia ditembak di lobang telinganya dengan pistol. (Ishak, 1998: 32-35)

Kisah lain seputar kekerasan militer terhadap masyarakat Aceh di masa pemberlakuan status DOM, antara lain diceritakan oleh Teungku Ayub.

Laki-laki ini hampir tak mempercayai penglihatannya sendiri. Lututnya gemetar melihat ratusan jenazah bergelimpangan di dalam satu lubang di hadapannya. “Mayat itu dikubur bertumpuk-tumpuk seperti bangkai tikus,” kata Ayub. Belum lama habis rasa kagetnya, aparat keamanan membawanya menyuruh Ayub dan teman-temannya menguburkan dan meratakan tanah kuburan massal itu. Ayub makin ketakutan ketika seorang petugas melakukan eksekusi terhadap seorang penduduk yang masih hidup. Penduduk desa berumur sekitar 40 tahun tersebut diikat pada sebatang pohon dan ditembak saat itu juga. “Setelah tewas, mayatnya dibiarkan begitu saja membusuk di batang pohon kayu itu,” tutur Ayub. (Widjanarko, 1998: 226-235)

Peristiwa mengerikan itulah yang dialami Ayub ketika ia diajak aparat keamanan ke *Buket Tangkurak* atau Bukit Tengkorak pada 1990. Pengalaman itu masih menghantuinya sampai sekarang. Awalnya, Ayub bersama empat temannya—semuanya warga Seureuke, Kecamatan Jambo Aye, Aceh Utara—

diperintahkan aparat keamanan yang bertugas di kawasan itu untuk berjaga malam di kampungnya. Namun saat berjaga malam itu, Ayub dan teman-temannya tertidur lelap. Sebagai hukuman, esoknya, kelima peronda yang tertidur tersebut digiring ke Bukit Tengkorak, sebuah bukit berhutan lebat sekitar empat kilometer dari desanya. Mendengar nama Bukit Tengkorak, Ayub dan teman-temannya langsung ketakutan. Sebab, melalui kabar dari mulut ke mulut, ia sudah mendengar bukit tempat pembantaian anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) atau penduduk yang dianggap membantu kelompok itu. “Saya pikir, saya mau dibunuh waktu itu,” kata Ayub. Ternyata, Ayub dan teman-temannya memperoleh tugas menguburkan korban-korban yang menurut petugas adalah anggota dan simpatisan GAM. Kisah tentang Bukit Tengkorak telah banyak menjadi sorotan. Kawasan berbukit-bukit yang terletak di desa Seureuke itu dulu bernama Tanah Merah. Namun, sejak ditemukannya ratusan kerangka manusia tersebut, kawasan itu pun berganti nama menjadi Bukit Tengkorak. Bukit yang penuh dengan pepohonan dan semak itu lalu menjadi tempat pembuangan limbah PT. Arun. Namun, buat orang Aceh, tempat itu menjadi menyeramkan. Bahkan, orang setempat pun enggan mendatangi kawasan Bukit Tengkorak.<sup>8</sup>

Meski demikian Bukit Tengkorak bukan satu-satunya ladang pembantaian di Aceh. Laporan tentang adanya *the killing field* lain di Aceh itu

---

<sup>8</sup> Ayub bukan satu-satunya saksi mata tentang ladang pembantaian di Bukit Tengkorak. Adnan Kelana, warga Desa Menye VII, Kecamatan Matang Kulit, cukup akrab dengan kawasan pembuangan mayat di sekitar Bukit Tengkorak. Keterlibatannya berawal dari diciduknya Bemprang, ayah Adnan oleh aparat pada 1990. Sebelum diciduk, Bemprang bersama tujuh warga Menye lainnya dianiaya terlebih dahulu di depan anak dan istrinya. Ayah Adnan, yang ketika itu berumur 55 tahun, disuruh merayap-rayap di tepi sumur. Esoknya para pesakitan itu diberi makan dalam satu baskom beramai-ramai. Setelah itu, mata Bemprang ditutup dengan sobekan kain sarung, lalu ia dinaikkan ke mobil toyota kijang dan dibawa ke sebuah markas di Blok B. Sejak saat itu, nasib Bemprang dan tujuh warga Menye tersebut tak terdengar lagi rimbanya. Setahun kemudian, Adnan yang ketika itu bekerja di pengeboran minyak PT. Osaka, Lho’sukon, mulai menyusuri jejak ayahnya. Niatnya hanya satu, jika ayahnya telah terbunuh, ia ingin menguburkan kerangka ayahnya itu dengan layak. Maka, setiap hari libur, Adnan pun mendatangi lokasi pembuangan jenazah Bukit Tengkorak. Tanpa menghiraukan bau bangkai yang menyengat, Adnan menggali ladang pembantaian itu. Sebagian jenazah yang ditemukan Adnan masih berdaging, sebagian lagi cuma tinggal tulang belulang. Jenazah yang berdaging umumnya sudah terceret-berai diacak-acak anjing hutan. Andan malah pernah menemukan tubuh manusia yang diseret-seret anjing sampai ke tepi jalan. Satu persatu jenazah itu dicermatinya. Ia mencari kerangka dengan cincin di jari manis, satu-satunya tanda untuk mengenali jasad ayahnya. Walau sudah berkali-kali mencari, Adnan tak berhasil menemukan jenazah ayahnya di tempat itu.

pernah ditulis *Reuters* pada Oktober 1990. Kala itu, *Reuters* memberitakan tentang ditemukannya sebuah ladang berisi 200 mayat di Alue Ie Mirah, Aceh Timur. Namun pihak ABRI ketika itu membantah. Untuk mencari fakta di lapangan, pada saat itu, juga bukan hal yang gampang, sebab keluarga korban umumnya memilih menutup mulut. “Kami harus menyelamatkan diri masing-masing. Biarlah orang lain diganggu, asalkan kami tak diganggu,” kata Aman Israh, Kepala Desa Rengkam, Aceh Utara. Israh sendiri pernah ditangkap dan digebuki di pekarangan sekolah dasar hingga muntah darah karena dicurigai bersahabat dengan gerombolan pengacau keamanan (GPK). Jadi, jangankan menuntut keadilan, untuk menanyakan dimana keberadaan suaminya atau ayahnya yang hilang itu pun masih tabu. Sebab, salah bertindak, diri sendiri yang tak selamat. Maka, berita *Reuters* itu pun kemudian terkubur, nyaris hilang ditelan waktu. Menurut *Shock Therapy* yang diterbitkan Amnesty International, dalam operasi pemulihan keamanan di Aceh pada periode 1989-1993 ini, telah terjadi eksekusi terhadap 2.000 penduduk sipil dan tersangka GAM, tanpa melalui pengadilan. (Widjanarko, 1998: 232)

Aparat keamanan semasa DOM di Aceh ternyata tak hanya membantai penduduk sipil. Menurut hasil penemuan Tim Pencari Fakta (TPF) HAM dan Rehabilitasi, bentukan Pemerintah Dati II Aceh Utara, yang diungkapkan 7 Oktober 1999, aparat keamanan juga merampok harta benda warga dan membakar ratusan rumah penduduk. Selama operasi Jaring Merah 1989-1998 di Aceh Utara, tercatat 430 warga tewas akibat kekerasan dan 320 lainnya masih hilang. Tak hanya itu, aparat militer juga merampas 455 *mayam* emas (1 *mayam* = 33,3 gram) dan uang tunai Rp 599.644.000. Selama pendataan sejak 11 September 1998, TPF juga mencatat 14 mobil, 108 ekor lembu, tanah kebun serta sawah milik warga dilego oleh aparat dengan memakai tenaga *cuwak* (preman yang menjadi mata-mata militer). Belum lagi ratusan unit rumah dan harta benda lainnya yang dibakar. “Data ini diperoleh langsung dari korban atau keluarganya serta warga masyarakat setempat yang mengetahui peristiwa itu,” ujar Koordinator Tim B TPF HAM, TS. Sani.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Salah satu korban adalah Abdul Jalil (47), warga desa Geudumbak, Kecamatan Tanah Jambo Aye. Ia ditangkap dan uang tunai Rp 8 juta miliknya serta satu mobil Super Kijang

Menurut catatan Nur Alamsyah & Hendra (dalam Widjanarko, 1998: 92-95) bentuk tindakan kekerasan/penyiksaan fisik yang dihadapi oleh rakyat Aceh juga dapat dilihat dari penderitaan seorang anak yatim piatu bernama M Yusuf (12 tahun) penduduk Desa Blangtalon Kuta Makmur, Aceh Utara, yang pada saat berumur 6 tahun. Ayahnya, Mustafa disiksa oleh tiga petugas berpakaian loreng hitam, di mana kulit kepala sang ayah dikoyak, kemudian dicampakkan begitu saja ke dalam kendaraan kijang. Begitu juga halnya yang dialami seorang ibu bernama Nyak Meneh Abdullah (35), selain diperkosa, mendapat siksaan dengan cara payudara dan kemaluannya disetrum, serta ditahan beberapa hari di pos Pinti I Tiro. Hal sama dialami M. Jalil, penduduk desa Maneh, Kecamatan Geumpang, Pidie, yang telah ditembak petugas dan kepalanya ditebas hingga terpisah dengan badannya, sebagaimana diuraikan oleh istrinya, Saodah Saleh (41). Tindakan kekerasan/penyiksaan juga dialami seorang Kepala Desa Rengkam, Aceh Utara, yaitu Aman Ismail, yang pernah ditangkap dan digebuki di pekarangan suatu sekolah dasar, hingga mengalami muntah-muntah.<sup>10</sup> Contoh-contoh di atas hanya sekelumit penderitaan rakyat Aceh yang mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan tidak manusiawi selama berlangsungnya Operasi Jaring Merah, dan kemungkinan banyak lagi hal-hal yang pasti dialami oleh rakyat Aceh itu sendiri.

Sementara itu Tim Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang dikirim ke Aceh dalam jumpa pers di Jakarta mengumumkan, korban tewas tindak kekerasan selama penerapan Daerah Operasi Militer (DOM) sejak 1989-1998 di Aceh tercatat 781 orang. Jumlah kuburan massal korban DOM yang sudah bisa dipastikan sebanyak sembilan tempat. Sedang

---

bernomor polisi BK 9050 AL dirampas oleh oknum petugas. Masih di Tanah jambo Aye, mantan Kepala Desa Padang Meuria bernama Tgk Samidan (65) mengaku bisa selamat setelah permintaan aparat dipenuhi dengan istilah 'tebusan nyawa' Rp 4,5 juta. Kepala Desa Beuracun, Kecamatan Matang Kuli, M. Husen Ali (40) mengaku ditangkap oknum aparat dengan tuduhan mendukung Gerakan Pengacau Liar. Setelah beberapa malam menjalani aneka macam siksaan, korban dilepaskan dengan janji 'uang tebusan nyawa' sebanyak Rp 3 juta. Namun Husen Ali hanya mampu membayar Rp 1,5 juta. Aparat pun lalu mempreteli perhiasan istri Husein sebesar 5 mayam (166 gram). (Widjanarko, 1998: 291-294)

<sup>10</sup> Sangat banyak kisah pedih yang dialami oleh masyarakat Aceh khususnya selama berlangsungnya status Daerah Operasi Militer (DOM) 1989-1998. Diantara buku yang mencatat kisah tersebut adalah Otto Syamsuddin Ishak, *Dari Maaf ke Panik Aceh: Sebuah Sketsa Sosiologi Politik 1 & 2*, Jakarta: Yappika-LSPP-Cordova, 2000

korban orang hilang 163 orang, korban penganiayaan 368 orang, dan korban perkosaan 102 orang. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Sekjen Komnas HAM yang sekaligus juga Ketua Tim Aceh Komnas HAM, Baharuddin Lopa, di Jakarta. Turut hadir dalam pertemuan tersebut anggota Komnas HAM, yaitu Koesparmono Irsan, Soegiri, M. Salim, serta Bambang W. Soeharto. “Ini baru merupakan hasil pemantauan Tim Komnas HAM ke Aceh, jadi belum resmi merupakan pernyataan Komnas HAM. Sewaktu-waktu ada data baru ditemukan, maka data itu akan melengkapi data yang sudah ada sekarang,” jelas Lopa.

Selama tiga hari di Aceh, menurut Lopa, tim menyaksikan pembongkaran kuburan massal di Kuala Tari, Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie. Di sana ditemukan dua mayat. Di halaman rumah geudong (tempat penahanan dan penganiayaan) di Bili Arong, Gelumpang Tiga, Pidie, ditemukan dua mayat yang dikubur dalam satu lubang. Di Daya Tumama, Trieng Gadeng, Pidie, diangkat satu mayat dari lima mayat yang dikubur secara berurutan. Lokasi lainnya di Alue bukit, Lhoksukon, Aceh Utara, di halaman bekas posko aparat keamanan ditemukan satu mayat. Di Bukit Sentang, Lhoksukon, Aceh Utara, dari satu lubang ditemukan 12 jenazah. Setiap pembongkaran jenazah disaksikan Ketua Presidium Forum LSM Aceh Abdul Gani Nurdin, aparat kepolisian, wakil pemda, di beberapa tempat ada anggota Marinir, dan dokter forensik dari beberapa rumah sakit serta Puskesmas. Tentang adanya sanggahan pejabat militer yang menyatakan korban di kuburan massal adalah korban dari GPK (Gerakan Pengacau Keamanan), Lopa tidak mengenyampingkan kemungkinan itu. “Cobalah mereka (militer) juga membuktikan bahwa orang-orang itu dibunuh GPK. Sebab pada waktu kami menggali kuburan ini, kami disertai janda-janda yang jadi korban operasi militer. Kalau ada bukti itu korban GPK, kita bersyukur kalau mampu dibuktikan, karena kita ini mencari kebenaran obyektif seakurat mungkin,” tegasnya. Lopa juga menegaskan, Tim Aceh Komnas HAM belum sampai pada analisis, melihat aspek politis atau aspek lainnya, dari data yang sudah diperoleh itu. “Analisis dan usul konkret yang lebih luas dari Komnas HAM akan

disampaikan sesudah rapat pleno Komnas HAM nanti,” ungkapnya. Berikut data temuan Komnas HAM:

| No. | Keterangan                                | Jumlah              |
|-----|---|---------------------|
| 1   | Meninggal akibat tindak kekerasan         | 781 orang           |
| 2   | Hilang (belum ada berita sampai sekarang) | 163 orang           |
| 3   | Dianiaya                                  | 368 orang           |
| 4   | Pemeriksaan                               | 102 orang           |
| 5   | Janda akibat suami terbunuh atau hilang   | 3.000 orang         |
| 6   | Anak yatim akibat peristiwa Aceh          | 15.000-20.000 orang |
| 7   | Bangunan dibakar                          | 102 bangunan        |

Sumber: Hasil Pemantauan Tim Aceh, Komnas HAM

Bupati Aceh Utara, Tarmizi A. Karim, juga memerintahkan kepala desa di kabupaten Aceh Utara yang berjumlah 1.546 melakukan pendataan tentang korban tewas, korban pelanggaran HAM, korban pemerkosaan, dan korban tindak kekerasan eks operasi keamanan, yang harus diisi lengkap dalam formulir yang dikeluarkan Tim Pencari Fakta Pemda. Tujuan pendataan lengkap itu untuk mengetahui jumlah korban yang sebenarnya.

Sementara itu dari laporan tertulis yang dibuat oleh Direktorat Sosial Politik Dati I Propinsi Aceh sampai dengan akhir Desember 1998, adalah sebagai berikut:

|                      | PIDIE | ACEH UTARA | ACEH TIMUR | TOTAL |
|----------------------|-------|------------|------------|-------|
| Korban Tewas         | 405   | 346        | 270        | 1.021 |
| Korban Hilang        | 163   | 494        | 207        | 864   |
| Wanita menjadi janda | 431   | 577        | 365        | 1.376 |
| Anak yatim           | 1.262 | 1.891      | 1.368      | 4.521 |
| Rumah terbakar       | 227   | 272        | 181        | 680   |
| Cacat                |       |            |            | 375   |

Sumber: Widjanarko, 1998: 355

Pada awal 1999, dalam suatu pertempuran yang dipimpin Gubernur Aceh di Banda Aceh, para sesepuh Aceh menilai, Aceh sudah sampai ke titik yang paling kritis. Mereka yang hadir dalam pertemuan itu adalah orang-orang tua yang pernah memegang berbagai posisi kunci pemerintah daerah di zamannya, termasuk gubernur, ketua DPRD, ketua Majelis Ulama, Ketua Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh, ulama, cendekiawan, pimpinan

perguruan tinggi dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Pertemuan itu menyimpulkan, kelambanan pemerintah dalam menanggapi persoalan Aceh telah menimbulkan kekecewaan berantai, yang mereka ibaratkan sebagai benang kusut. Mereka pun menilai, sementara situasi keamanan di Aceh sekarang sangat mencekam, suara-suara referendum, negara federasi, dan tuntutan otonomi seluas-luasnya, berikut tuntutan-tuntutan lain sedang dikembangkan oleh masyarakat. Hal ini, menurut mereka, tidak lagi dapat dianggap sebagai sesuatu yang bisa ditolelir. Pada pertemuan yang dihadiri unsur-unsur Muspida tersebut, para sesepuh itu berpendapat, pemerintah pusat harus serius menyelesaikannya, dengan cara kembali ke akar masalah. Diantara buah pikiran penting yang disampaikan dalam penyelesaian masalah kritis yang dihadapi masyarakat Aceh sekarang ialah: (1) segera mungkin, menangani penegakan hukum terhadap para pelaku pelanggaran HAM di Aceh, (2) pemerintah dan masyarakat bahu-membahu, bekerja sama dalam menciptakan rasa aman masyarakat, (3) meningkatkan upaya pemberian santunan kepada anak yatim dan para janda korban eksekusi DOM, sehingga kehidupan mereka dapat direhabilitasikan. (Widjanarko, 1998: 12-13)

Berbagai tindak kekerasan dan pembantaian yang berlangsung selama diberlakukan DOM antara tahun 1989-1998, menyisakan kemarahan dan ketidakpercayaan masyarakat Aceh terhadap pemerintah pusat. Aceh tidak saja merasa telah dikhianati, tetapi juga merasa telah dilecehkan, dieksploitasi dan dihancurkan oleh Jakarta. Untuk itu, tidak ada pilihan lain bagi Aceh kecuali melepaskan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia. Ini semualah yang menjadi latar belakang gagasan mengenai separatisme dalam tulisan Mohammad Daud Yoesoef yang sudah di bahas di atas.

Pandangan senada dengan Yoesoef juga muncul dari masyarakat Aceh yang tinggal di Malaysia. Dalam sebuah forum yang menamakan dirinya Panitia Persiapan Musyawarah Rakyat Aceh, di Kuala Lumpur 17 Februari 1999, mereka mengeluarkan sebuah pernyataan sikap yang diberi nama 'Resolusi Masyarakat Aceh Malaysia.' Dalam pernyataannya, mereka menghimbau, antara lain agar:

*Pertama*, Rakyat Aceh harus menyadari sepenuhnya bahwa bangsa Aceh telah tertipu oleh Indonesia semenjak hari pertama Republik Indonesia terbentuk. Pemimpin Indonesia yang datang ke Aceh dengan janji kosong di waktu itu sudah tak terhitung jumlahnya, mulai dari Ir. Soekarno, M.Natsir, M.Hatta, Juanda, M.Hardi dan lain-lain. Sekarang ini muncul pula seperti Amien Rais, Gus Dur, Megawati, dan lainnya. *Kedua*, Rakyat Aceh jangan terpengaruh dengan janji-janji otonomi maupun federasi dari Jakarta, karena Jakarta selalu berusaha untuk menipu rakyat Aceh dalam berbagai segi sampai hari ini dengan cara yang cukup licik dengan politik putar belit. *Ketiga*, Rakyat Aceh wajib menjaga marwah dan harga diri jangan mengemis kepada Jakarta sehingga menghilangkan digniti yang luhur. Kita harus tegas dan sudah waktunya untuk lebih tegas. Hak kita mesti kita sendiri yang menjaga dan pertahankan. *Keempat*, Rakyat Aceh harus menyadari bahwa tidak akan ada keadilan bagi kita selagi masih di bawah pemerintahan Jakarta. Selama 54 tahun Aceh tergabung dengan Indonesia (rela atau terpaksa), Jakarta tidak akan pernah berhenti memeras, merampas, menganiaya, memperkosa Aceh serta rakyatnya. Malah lebih menyedihkan lagi, agama Islam telah dihancurkan dan nyawa orang Aceh dijadikan mainan. *Kelima*, Rakyat Aceh harus menyadari bahwa tidak akan ada kedamaian dan ketenteraman serta tidak akan berakhir penyiksaan dan pembunuhan di tanah Aceh selama Indonesia masih mengatur Aceh. (Widjanarko, 1998: 457-458)

#### 4.A.3. Upaya-upaya Penyelesaian

Berbagai upaya penyelesaian masalah Aceh secara damai ditempuh oleh pemerintah pusat. Pada tahun 2000 Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menunjukkan inisiatif pribadinya untuk mendekati masalah Aceh melalui perundingan dengan mengirimkan pejabat Sekretaris Negara Bondan Gunawan untuk menemui pimpinan GAM Abdullah Sja'fii di hutan belantara Aceh. Gus Dur juga mengambil inisiatif untuk menghentikan kekerasan dan permusuhan dengan mengadakan perjanjian perdamaian yang dikenal sebagai 'jeda kemanusiaan'. Dengan difasilitasi oleh Henry Dunant Center (HDC), penandatanganan perjanjian *Kesepahaman Kemanusiaan atau Jeda Kemanusiaan* antara GAM dan RI dilakukan di Jenewa pada 12 Mei 2000, yang kemudian diberlakukan secara efektif sejak 2 Juni 2000, selama tiga bulan. Banyak pihak di Jakarta yang mengecam kebijakan Gus Dur ini karena dianggap sebagai bentuk pengakuan terhadap eksistensi GAM. Namun banyak juga yang melihat hal itu secara positif, sebagai jalan untuk mengakhiri konflik

berkepanjangan di Aceh. Otto Syamsuddin Ishak, dosen Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh dan juga seorang aktivis LSM, menilai Jeda Kemanusiaan secara positif, sebagai momentum awal bagi masyarakat Aceh untuk menjawab tantangan zamannya. Menurutnya, momentum ini harus digunakan oleh seluruh komponen masyarakat sipil untuk mengkonstruksi Aceh sebagai sebuah modalitas kemanusiaan bagi bangsa-bangsa di Nusantara dan dunia. “Keberhasilan dan kegagalan atas momentum ini akan menunjukkan kualitas generasi Aceh sekarang, dan martabat generasi yang akan datang...Jeda kemanusiaan bukanlah sekadar Jeda Brutalitas negara terhadap rakyat Aceh,” tulisnya. (Ishak, 2001: 166)

Apa yang terjadi di lapangan, berbeda dari yang diharapkan dari semangat ‘Jeda Kemanusiaan’ tersebut. Berbagai aksi kekerasan terus terjadi di Aceh. Situasi ini semakin memburuk dengan dimulainya kembali operasi militer pada bulan April 2001. Di Jakarta sendiri, keputusan untuk melancarkan kembali operasi militer dipengaruhi oleh melemahnya posisi Gus Dur, sehingga memberi kesempatan kepada pihak militer untuk memegang kembali kendali di Aceh. Memburuknya keadaan di Aceh dan ketidakmampuan pemerintah mencapai persetujuan dengan GAM tentang proses demiliterisasi membuka kesempatan bagi dimulainya kembali operasi militer. Pada akhir masa jabatannya sebagai presiden, sebelum digantikan oleh Megawati, Gus Dur mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 4, dimana dia memberi izin terhadap pelaksanaan operasi militer di Aceh dan membatalkan semua perjanjian dengan GAM. (Aguswandi, dalam Abubakar & Bamualim, 2005: 34)

Pada Juni 2001, Gus Dur dijatuhkan dari kursi kepresidenan oleh parlemen, dan Megawati naik menjadi Presiden RI. Di masa pemerintahan Megawati nuansa militeristik terasa lebih mengemuka dalam penyelesaian masalah Aceh. Berbagai upaya perundingan selalu gagal. Penyebab mandulnya upaya damai ditengarai karena tidak efektifnya kesepakatan yang dicapai pemerintah RI dan GAM untuk diterapkan di lapangan. Baik RI maupun GAM sama-sama memasang “penawaran tinggi” dalam memutuskan hasil akhir, sementara pasukan TNI dengan GAM terus saling menyerang. Akibatnya, dua

kali penyelesaian konflik melalui Jeda Kemanusiaan (2000-2001) dan Kesepakatan Penghentian Permusuhan (2002-2003) tak mampu berjalan efektif. Hingga Mei, perundingan yang dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan masalah GAM sudah berlangsung empat kali.

Pada masa pemerintahan Megawati, sejumlah inisiatif bernuansa ‘mobilisasi pernyataan’, muncul di Aceh. Hal itu tampak antara lain dengan munculnya ‘ikrar kesetiaan’ kepada NKRI yang cukup marak di Aceh.<sup>11</sup> Ikrar serupa juga dilakukan ratusan PNS di Aceh Utara, pada awal Juni 2003. Sekitar 500 pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Kabupaten Aceh Utara, melaksanakan apel kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Apel tersebut dilakukan di halaman Kantor Bupati Aceh Utara, dipimpin Bupati Aceh Utara, Tarmizi Halim dan dihadiri jajaran musyawarah pimpinan kota. Dalam apel tersebut, Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia (Korpri), Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Ikatan Dokter Indonesia

---

<sup>11</sup> KCM (*Kompas Cyber Media*) misalnya, pada akhir Juli 2001, memberitakan: sekitar 6.000 warga Kecamatan Lhong, Kabupaten Aceh Besar, menyatakan kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ikrar kesetiaan yang diawali tradisi *peusijuek* (tepungtawar) kepada 10 wakil warga itu berlangsung di Lapangan PSBP, Desa Blang Mee, Kecamatan Lhong, sekitar 70 km dari pusat Kota Banda Aceh, disaksikan Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar Drs. Baswedan Yunus dan Komandan Kodim 0101/Aceh Besar Letkol (Czi) Beta Insan. Hadir pula dalam peserta ikrar itu mantan tokoh pembaiat Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Teungku Budiman serta Tgk Alamsyah, Ketua Sagoe Delapan. Dikatakan bahwa, warga dari 28 desa di Kecamatan Lhong itu menyatakan ikrar kesetiaan kepada NKRI atas kesadaran sendiri tanpa paksaan dari mana pun. Kendati hujan gerimis membasahi lapangan upacara, namun tidak membuat warga peserta ikrar bergeming dari tempat upacara. Dalam ikrar kesetiaan yang dibacakan Muhadi dan diikuti segenap peserta warga Kecamatan Lhong itu, disebutkan antara lain bahwa warga Kecamatan Lhong menyadari sepenuhnya Gerakan Aceh Merdeka adalah gerakan yang bertentangan dengan cita-cita luhur perjuangan para pahlawan Aceh. Komandan Kodim 0101/ Aceh Besar Letkol (Czi) Beta Insan menyatakan menyambut gembira kesadaran yang tumbuh di kalangan masyarakat untuk kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. "Niat tulus untuk setia kepada NKRI adalah suatu berkah dari Yang Maha Kuasa yang patut disyukuri, karena kita akan segera dapat mewujudkan cita-cita luhur perjuangan para pahlawan Aceh," katanya. Apabila hal positif ini diikuti warga masyarakat Aceh lainnya, kata Beta Insan, Insya Allah harapan akan kedamaian di daerah ini akan segera terwujud. Ikrar kesetiaan kepada NKRI ini bermula dari menyerahnya 10 orang anggota Gerakan Separatis Aceh (GSA) dipimpin Tgk Alamsyah (47), Ketua Sagoe Delapan GSA, ke pos Kompi Yonif 112/DJ yang dipimpin Mayor Inf Poetro. "Ke-10 mantan anggota GSA itu kemudian mengajak rekan-rekan lainnya untuk menyerah," kata Komandan Tim-B Satgas Penerangan Kolaops TNI Mayor (CHJ) Sulistiadie. Sementara itu, Tgk Alamsyah mengatakan, masyarakat Lhong kini sudah bosan menjadi anggota dan simpatisan untuk membantu GSA yang tidak jelas arahnya itu. "Apa yang selama ini dijanjikan oleh para petinggi GSA hanyalah omong kosong dan tidak sesuai kenyataan. Yang enak mereka yang mengaku pimpinan, sedangkan anggotanya di lapangan terus menderita, sengsara, serta hidup tak menentu," kata Sulistiadie mengutip tokoh GSA yang menyerah itu. (KCM, 31 Juli 2001)

(IDI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Persatuan Perawat Indonesia dan Dharma Wanita Kabupaten Aceh Utara menyatakan kesetiaan mereka kepada Pancasila, UUD 1945 dan mendukung tegaknya NKRI.

Dalam amanatnya, Bupati Aceh Utara menegaskan agar para PNS dituntut untuk menunjukkan komitmen mereka kepada masyarakat di tengah situasi konflik karena gerakan separatis Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Menurut Tarmizi, GAM telah menyengsarakan masyarakat dengan melakukan intimidasi, teror dan pembunuhan. Oleh karena itu langkah pemerintah melakukan operasi terpadu dengan menetapkan Aceh dalam status darurat militer adalah langkah tepat yang harus didukung sepenuhnya oleh PNS. Dalam hal ini, lanjut Tarmizi, PNS harus meningkatkan kewibawaan, kredibilitas dan integritas. "Saya berharap mulai hari ini di setiap instansi dilakukan apel pagi, tidak boleh ada yang absen, dan melakukan pelayanan ke desa-desa, dan jangan lalai menjalankan birokrasi pemerintahan," ucap Tarmizi. (KCM, 2 Juni 2003)

Ikrar setia NKRI juga dilakukan oleh masyarakat Bireuen pada akhir Juni 2003. Mengutip *Serambi Indonesia*, KCM memberitakan bahwa, ribuan masyarakat Kecamatan Peusangan dan Jangka Kabupaten Bireuen, Sabtu (28/6), menyampaikan ikrar bersama dan sumpah setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Acara yang mengikutsertakan kalangan pelajar, mahasiswa, pegawai, pejabat, dan tokoh masyarakat kedua kecamatan tersebut, dipusatkan di Lapangan Kota Matang Glumpangdua. Pada kesempatan yang disaksikan petinggi TNI/Polri itu, warga menyampaikan delapan butir pernyataan yang intinya mengutuk tindakan GAM. Secara serempak, warga juga bersumpah akan selalu setia dan kukuh dalam pendirian untuk melawan setiap upaya pemberontak GAM yang ingin memisahkan rakyat dan tanah Aceh dengan sesama saudaranya dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Camat Peusangan, Drs. A Madjid, dalam laporan singkatnya menguraikan berbagai kesengsaraan masyarakat akibat pembunuhan, pemerasan, dan lain-lain yang dilakukan kelompok GAM di daerah ini. Dikatakan, GAM masih berkeliaran di desa-desa dan melakukan intimidasi serta pemerasan. Karenanya, Madjid atas nama masyarakat Peusangan dan

Jangka meminta Danrem 011/LW agar dapat menambah pos-pos aparat keamanan di sejumlah desa sehingga masyarakat bisa hidup tenang. Dengan demikian, masalah pendidikan dan kehidupan ekonomi sosial masyarakat kembali berjalan lancar. (KCM, 29 Juni 2003)

Awal Agustus 2003, terjadi kembali 'Ikrar Kesetiaan NKRI' di Banda Aceh, kali ini dilakukan oleh WNI Keturunan Tionghoa. Mengutip *Antara*, KCM memberitakan bahwa sedikitnya 5.000 Warga Negara Indonesia (WNI) keturunan Tionghoa di Banda Aceh, menyatakan siap menumpas kelompok Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Pernyataan masyarakat keturunan Tionghoa yang sudah puluhan tahun tinggal di Provinsi NAD tersebut disampaikan saat mengikuti apel kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di lapangan Blang Padang, Banda Aceh, Senin (4/8/2003). Dalam apel bersama itu, WNI keturunan menggunakan pakaian seragam baju putih dan celana hitam dengan membawa bendera merah putih dan pada lengan mereka tampak terikat pita merah putih. Bersamaan masyarakat Tionghoa yang mengikuti ikrar kesetiaan kepada NKRI tersebut, juga terlihat kalangan pedagang, pelajar dan pengusaha. Apel bersama yang dihadiri sekitar 15.000 warga kota Banda Aceh itu, dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) Ir. Azwar Abubakar. Sementara, suasana di pusat-pusat pasar Peunayung dan Kampung Baru kota Banda Aceh, terlihat sepi dan sejumlah pertokoan tutup, karena WNI keturunan bergabung dengan warga kota mengikuti apel kesetiaan kepada NKRI. (KCM, 4 Agustus 2003).

Sebelumnya, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Ryamizard Ryacudu mengatakan diterapkan atau tidak keadaan darurat di Aceh bukan urusan militer, sebab tugas TNI berdasarkan undang-undang (UU) adalah mempertahankan kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan risiko apapun. "Jadi kalau ada yang mengganggu keutuhan NKRI maka otomatis TNI bertugas untuk mengatasinya," kata KSAD saat mengunjungi Batalyon Infanteri Yonif 111 dan Kodim Langsa Aceh Timur, 18 September 2002. Menurut Ryamizard, TNI bertugas menegakkan keutuhan NKRI, sehingga siapapun yang mencoba memisahkan diri dengan

NKRI, otomatis TNI akan mengatasi dengan risiko apapun. (KCM, 18 September 2002)

Dari dunia internasional, pada awal Mei 2003, Amerika Serikat (AS) dan Rusia menegaskan sikapnya untuk tetap memegang kebijakan mendukung integritas negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Karena itu, dalam kasus Aceh, AS menegaskan bahwa Aceh merupakan masalah dalam negeri Indonesia. Sedangkan Rusia tidak pernah menyetujui campur tangan asing dalam NKRI. Pernyataan itu diungkapkan secara terpisah oleh Duta Besar (Dubes) AS untuk Indonesia Ralph Boyce dan Dubes Federasi Rusia untuk Indonesia Vladimir Y Plotnikov di Jakarta, 7 Mei 2003. "AS mengakui dan menghormati bahwa Aceh adalah masalah dalam negeri atau domestik, karena itu, saya kira Indonesia tidak terlalu menyambut campur tangan asing yang terlalu banyak," kata Dubes AS Ralph Boyce. Boyce juga mengatakan, AS sebagai salah satu sahabat Indonesia dan dengan beberapa negara sahabat lain selalu berupaya mendukung penyelesaian Aceh. AS antara lain bersama Jepang dan Bank Dunia mengupayakan bantuan rekonstruksi Aceh. Oleh karena itu, dalam menghadapi perkembangan terakhir ini, Boyce mengatakan AS akan tetap berusaha melakukan upaya terbaik dalam mendukung perdamaian Aceh. "Kami siap menjadi fasilitator, bukan mediator. AS telah memainkan peran yang tepat," kata Boyce. (KCM, 8 Mei 2003)

Menurut dia, tidak ada seorang pun yang akan senang dengan kemungkinan dilakukannya tindakan militer di Aceh. Terutama karena rakyat Aceh sudah cukup lama menderita. Namun, kata Boyce, AS menghormati hak Indonesia untuk memutuskan langkah terbaik menyelesaikan persoalan Aceh. Walau begitu, lanjutnya, meski Aceh merupakan bagian wilayah Indonesia dan rakyat Aceh adalah rakyat Indonesia, AS mengharapkan tindakan militer benar-benar menjadi pilihan terakhir, dalam arti tetap mengutamakan upaya damai. Untuk memperjelas, Boyce menganalogikan masalah itu dengan invasi AS ke Irak. Menurut dia, invasi AS ke Irak dilakukan setelah seluruh upaya perdamaian mengalami jalan buntu. AS langsung mengikuti invasi itu dengan upaya rekonstruksi dan kemanusiaan. Boyce mengungkapkan, tidak yakin

sistem pemberlakuan daerah operasi militer (DOM) bisa membawa Aceh ke penyelesaian damai. Walau begitu, ia menghargai seluruh upaya Indonesia selama ini. "Ini masalah sangat sulit bagi Indonesia maupun Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Kami siap membantu, namun bukan menciptakan perdamaian karena perdamaian itu hanya bisa dilakukan oleh kedua pihak," tegasnya.

Pernyataan senada juga diungkapkan oleh pemerintah Rusia. "Rusia mendukung pemerintah RI untuk menjaga kesatuan, kestabilan hukum, dan kemakmuran negaranya di seluruh kawasan. Rusia sama sekali tidak mendukung gerakan separatis yang dapat memecahkan negara kesatuan Republik Indonesia," kata Plotnikov tentang gerakan separatis Aceh. Plotnikov mengakui antara Rusia dan Aceh telah lama ada hubungan historis, bahkan jauh sebelum Aceh berperang dengan penjajah Belanda dan kemudian jadi bagian wilayah kesatuan Republik Indonesia. "Aceh pernah meminta di bawah naungan kekaisaran Rusia pada akhir abad ke XIX (Tsar Nicholas II), supaya tidak dijajah Belanda dan Inggris. Namun, saat itu diputuskan untuk tidak melakukannya," ucapnya, mengacu pada hubungan historis antara Aceh dan Rusia di masa silam. (KCM, 8 Mei 2003)

Ditanya apakah ada kesamaan antara kasus separatis Chechnya di kawasan Balkan dan Aceh, Plotnikov mengatakan kasus Aceh mirip tetapi tidak sama. Kemiripannya adalah Aceh telah lama bergolak di masa silam, Chechnya juga telah berjuang sejak pertengahan pertama abad ke-XIX, waktu pemerintahan Tsar Nicholas I. Namun, perbedaannya adalah soal penanganan yang harus lebih sesuai dengan kebijakan yang ditempuh masing-masing pemerintah dari kedua negara di dalam menyelesaikan kasus separatis itu. Rusia berusaha menyelesaikan kasus Chechnya itu secara damai, tetapi tidak mudah meskipun sejak dulu Rusia tidak juga menginginkan campur tangan pihak luar. "Masalahnya bukan karena perbedaan agama, tetapi lebih kompleks. Chechnya pun pernah menyerang Dagestan yang beragama Islam," ucapnya.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Komentar Dubes Rusia itu berkaitan dengan 22 butir deklarasi kerangka hubungan persahabatan dan kemitraan Federasi Rusia dan Republik Indonesia, yang ditandatangani Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri dalam kunjungan ke Moskwa pada 21 April 2003. Megawati yang melakukan kunjungan historis

Dari Aceh sendiri, sejumlah tokoh ulama Kabupaten Aceh Selatan mengimbau seluruh komponen masyarakat di daerahnya agar menyatakan sikap bersatu dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Imbauan kepada masyarakat di kabupaten penghasil buah pala terbesar di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) agar bersatu dalam kerangka NKRI itu disampaikan dan ditandatangani tujuh tokoh ulama setempat pada tanggal 27 Juni 2003. Tujuh ulama Aceh Selatan yang menandatangani surat imbauan itu masing-masing, Teungku HM. Daud Al-Yusufi, Teungku H. Amran Waly, Teungku H. Baihaqi Daud, Teungku Yunus Thaiby, Teungku H. Marhabab Adnan, Teungku H. Djazuli Al-Djailani dan Teungku Anwar Fahimi. Enam butir imbauan ulama Aceh Selatan itu yakni meminta agar masyarakat untuk menjalin hubungan silaturahmi, tolong-menolong dan saling kasih. Orang yang seagama adalah saudara, haram menganiaya dan merusak harta serta keluarganya. Para ulama Aceh Selatan juga mengajak masyarakat untuk bersatu padu berpihak kepada NKRI sebagai pemerintah yang sah. (KCM, 27 Juni 2003)

Upaya penguatan integrasi Aceh ke dalam NKRI juga dilakukan dalam bentuk pendataan ulang pegawai negeri sipil di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dalam proses tersebut akan ditambah dengan suplemen menyangkut kesetiaan pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara untuk PNS di 29 provinsi lainnya, suplemen ini tidak disertakan pada kegiatan pendataan ulang yang dilakukan mulai 1 Juli 2003. "Tambahan menyangkut kesetiaan pada NKRI tersebut tidak dimaksudkan sebagai penelitian khusus. Pada prinsipnya kegiatan utama adalah pendataan ulang PNS yang dilakukan serentak secara nasional, dilakukan sepanjang 1-31 Juli 2003," kata Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Departemen Dalam Negeri Progo Nurdjaman selaku Ketua Tim Kerja Teknis Pemantapan Pemerintahan Provinsi NAD di Jakarta, 26 Juni 2003. Menurut Progo, pendataan terhadap PNS terakhir dilakukan pada tahun 1974. Khusus di NAD, jumlah PNS yang akan didata

---

pertama kali menyusul kunjungan ayahnya, Presiden Soekarno, beberapa puluh tahun lalu berusaha menghidupkan lagi hubungan politik ekonomi kedua negara. Melalui kerja sama itu, nilai perdagangan bilateral yang tahun 2002 diperkirakan 203 juta dollar diharapkan lebih baik lagi dalam tahun mendatang. (Kompas, 8 Mei 2003)

ulang-baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota-tercatat sebanyak 67.675 orang. (KCM, 27 Juni 2003)

Pada tanggal 20 Oktober 2004, pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kala dilantik oleh MPR RI sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI. Meneruskan kebijakan yang sudah diambil Megawati, Yudhoyono meneruskan status darurat sipil untuk Aceh, yang dilaksanakan maksimal enam bulan setelah darurat sipil enam bulan pertama berakhir pada 18 November 2004. Kesepakatan tentang kebijakan tersebut diambil oleh Presiden SBY bersama Pimpinan Dewan, setelah mereka mengadakan rapat konsultasi antar kedua pimpinan lembaga tersebut di Istana Negara Jakarta, 17 November 2004. Dalam pertemuan tersebut, hadir dari pihak pemerintah Presiden SBY, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Panglima TNI, serta sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu. Sementara DPR diwakili Ketua DPR Agung Laksono, sejumlah unsur pimpinan DPR, dan ketua Komisi DPR. Menurut Agung Laksono, ke depan DPR berharap agar segala upaya yang dilakukan pemerintah bertujuan akhir untuk secepatnya mengembalikan keadaan di Aceh menjadi lebih damai, sejahtera dan lebih aman. Untuk itu Agung mengusulkan baik DPR maupun pemerintah membentuk tim khusus yang bertugas mengawasi dan menangani segala masalah dalam pelaksanaan operasi terpadu di Aceh.

Presiden menyampaikan tiga pilar utama penyelesaian masalah Aceh, yaitu memelihara momentum dan kesinambungan penyelesaian masalah Aceh; mencari pendekatan dan langkah baru agar konflik di Aceh dapat diakhiri secara lebih damai, bermartabat, dan adil; serta melaksanakan lima operasi terpadu secara lebih berkualitas dan lebih konkrit dan dilaksanakan secara transparan, akuntabel, terbebas dari penyimpangan dan korupsi. Seusai Agung mempertegas dukungan DPR kepada pemerintah untuk memperpanjang status darurat sipil di Aceh, Presiden Yudhoyono menutup jumpa pers dengan menegaskan kembali konstruk penyelesaian Aceh. Mengenai perpanjangan status darurat sipil, Presiden mengemukakan bahwa hal itu dilakukan selama-lamanya enam bulan. "Guna memelihara momentum dan langkah-langkah yang makin mencapai sasaran, status di Aceh sekarang ini diperpanjang paling lama

enam bulan, setiap bulan kita evaluasi dan setiap saat dapat kita cabut atau kita ubah keadaannya menjadi tertib sipil apabila keadaan betul-betul makin baik,” papar Yudhoyono. (Mandan, 2006: 126)

Setelah itu, sejumlah perundingan dilakukan antara Pemerintah RI dan GAM. Putaran pertama diadakan pada 28-29 Januari 2005, putaran kedua pada 21-23 Februari 2005, putaran ketiga 12-16 April 2005, dan keempat 26-30 Mei 2005. Hasil dari perundingan yang disikapi cukup optimis oleh publik itu memasuki babak akhir pada bulan Juli-Agustus. Dua kehendak yang bertolak belakang selama puluhan tahun, seperti keinginan merdeka, amnesti bagi aktivis GAM, pengelolaan sumber daya alam dan identitas kedaerahan sudah mulai mencapai titik terang. Namun demikian, kekhawatiran publik terhadap isi kesepakatan juga mencuat. Melalui berbagai berita media masa, ada beberapa hal yang menurut sementara pihak berisiko memunculkan masalah baru bagi penyelesaian soal Aceh. Substansi yang disorot adalah keterlibatan negara asing dalam memantau atau mengawasi pelaksanaan hasil kesepakatan antara RI dengan GAM nantinya. Keterlibatan negara asing dalam penyelesaian masalah Aceh dikhawatirkan justru akan berpengaruh negatif bagi Indonesia.

Di tengah situasi yang cukup mencemaskan banyak pihak dalam kaitan perundingan puncak antara pemerintah RI dan GAM, Aceh dikejutkan dengan peristiwa bencana gempa bumi dan gelombang tsunami maha dahsyat. Lebih dari 200.000 orang meninggal dan hilang. Diperkirakan kerugian mencapai 4 hingga 4,5 milyar dolar AS atau sekitar Rp 46 trilyun. Untuk penanggulangannya diperlukan dana yang cukup besar dalam jangka waktu yang panjang. Badan Koordinasi Nasional Pengendalian Dampak Bencana menilai, jumlah dana taktis yang diperlukan untuk program pemulihan awal di NAD dan Sumatera Utara selama tahun 2005 ditetapkan sekitar Rp 5,3 trilyun. Ribuan bangunan lenyap, dan hampir semua prasarana fisik rusak parah. Situasi yang mengesankan ini menjadi momentum penting bagi pihak-pihak yang selama bertahun-tahun bersengketa di Aceh, yaitu GAM dan pemerintah Indonesia untuk berpikir kembali untuk segera mengakhiri konflik-konflik tersebut. Rakyat Aceh sangat membutuhkan perdamaian sebagai prasyarat pokok untuk melakukan rekonstruksi atas wilayah Aceh.

Beberapa bulan setelah peristiwa tsunami, memang tampak ada sedikit perubahan di tingkat wacana bahwa jika semula berbicara tentang Aceh lebih banyak diwarnai oleh muatan politik dan kepentingan, belakangan banyak orang berbicara tentang Aceh lebih dalam perspektif kemanusiaan. Dan memang seiring dengan membaiknya kondisi wilayah dan berjalannya rehabilitasi infrastruktur pasca bencana tsunami, penggunaan cara-cara damai dalam penyelesaian konflik di Aceh kian diapresiasi publik. Proses perundingan dengan GAM dinilai merupakan langkah yang paling tepat, meski kehadiran kekuatan militer di NAD juga masih dipandang penting. Di sisi lain, keterlibatan pihak Asing dalam proses penyelesaian Aceh cenderung disikapi publik dengan hati-hati. Memasuki bulan Agustus 2005, setelah terjadi perundingan sebanyak lima kali dalam kurun tujuh bulan, sinyal terjadinya kesepakatan bersama antara GAM dan Pemerintah RI pun mencuat. Dikabarkan pula bahwa penandatanganan kesepakatan itu akan dilakukan pada bulan Agustus itu pula. Tetapi berbagai pihak mengingatkan agar pemerintah RI berhati-hati.<sup>13</sup>

Setelah melalui perjalanan yang cukup panjang penandatanganan kesepakatan damai pun ditetapkan akan dilakukan pada 15 Agustus 2005. Warga Banda Aceh menyambut baik penandatanganan Kesepakatan Damai Pemerintah Indonesia dengan GAM di Helsinki. Ribuan warga berkumpul di kompleks Masjid Raya Baiturrahman, pada hari Senin 15 Agustus 2005, untuk mengikuti acara do'a dan tausiah bersama serta penayangan siaran langsung penandatanganan Kesepakatan Damai itu. Hadir dalam kesempatan itu Menkokesra Alwi Sihab, Mendagri Moh. Ma'ruf, Menaker dan Transmigrasi Fahmi Idris, Ketua Aceh Monitoring Mission (AMM) Peter Feith, Duta Besar Inggris untuk Indonesia Charles Humprey, Kepala Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Kuntoro Mangkusubroto, serta pimpinan NAD.

Dua ulama Aceh Tamiang, H Abdussalam dan H Abdulgani Ma'ad,

---

<sup>13</sup> Ketua Pembina Yayasan Aceh Kita Todung Mulya Lubis misalnya mengingatkan bahwa upaya perdamaian di Aceh rawan terhadap sabotase. Kelompok yang diuntungkan dengan konflik di Aceh, seperti spekulasi dan pedagang senjata, berpotensi melakukan sabotase karena pada dasarnya mereka tak ingin ada perdamaian.

menyampaikan tausyiah yang intinya mengingatkan bahwa kesepakatan Helsinki adalah awal. Sekalipun belum ada pegangan resmi, para ulama siap membantu mensosialisasikan MoU itu kepada masyarakat. Selain itu setidaknya 28 lembaga swadaya masyarakat, komponen masyarakat sipil dalam pernyataannya di Banda Aceh mendesak semua pihak menghormati dan menciptakan rasa aman dengan tidak melakukan kekerasan dan intimidasi dalam proses perdamaian. Selain itu, kedua belah pihak juga mesti membuka ruang partisipasi publik sebagai bentuk penguatan masyarakat sipil agar dapat merumuskan kebijakan untuk Aceh.

Sementara itu di Aceh Utara dan Bireun, warga juga terlihat menyambut antusias penandatanganan MoU Kesepakatan Damai di Helsinki itu. Di Bireuen puluhan narapidana GAM ikut berdo'a bersama ribuan warga lain. Warung-warung kopi di sejumlah desa di Aceh Utara dan Bireuen yang menyediakan televisi ramai dikunjungi warga untuk menyaksikan siaran penandatanganan MoU. "Kami berharap semua konflik berakhir", kata Ilyas Yakob (62) warga Sawang. Di desa lain di Nisam, Kab Aceh Utara, terlihat warga tetap beraktivitas seperti biasa. Di Lhokseumawe, pendopo kantor Wali Kota dipadati warga, pejabat sipil, dan prajurit TNI yang menyaksikan penandatanganan lewat televisi layar lebar. Harapan segera berakhirnya konflik juga diungkapkan sejumlah narapidana di LP Lhokseumawe. Gumarni (34) napi makar, menyatakan menerima setiap keputusan petinggi GAM. (Mandan, 2006: 151)

Antusias warga juga terlihat di alun-alun Lhokseumawe. Sekitar 2000 orang termasuk anggota militer menghadiri do'a bersama menyambut Kesepakatan Damai. Selain ribuan warga, sejumlah pejabat sipil dan militer juga hadir dalam acara itu. Wali Kota Lhokseumawe Marzuki Amin dan Bupati Aceh Utara Tarmizi A Karim tampak hadir dalam acara itu. Di Bireuen anggota GAM yang jadi tahanan ikut menyaksikan penandatanganan melalui televisi dan berdo'a bersama masyarakat. Seusai penandatanganan, para napi itu berpelukan dengan masyarakat dan tentara. Sementara itu di Jakarta Presiden SBY menyatakan, penandatanganan nota kesepakatan (MoU), antara pemerintah Indonesia dan GAM di Helsinki, Finlandia, merupakan awal yang baik bagi

penyelesaian konflik Aceh secara permanen. MoU itu juga awal menjadi bersatunya seluruh bangsa Indonesia. Presiden mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada mantan presiden Finlandia Martti Ahtisaari yang membantu dan memfasilitasi perundingan damai Aceh, melalui *teleconference* dengan delegasi Indonesia pasca penandatanganan MoU di Istana Merdeka. (Mandan, 2006: 152)

Tidak lama setelah penandatanganan MoU di Helsinki dilakukan, Mabes Polri menyatakan akan segera menarik 6781 personelnya dari berbagai Polda yang selama ini melaksanakan operasi di Provinsi NAD. Hal itu akan berlangsung tujuh tahap dan diperkirakan selesai Desember 2005. "Penarikan 703 personil Polri dari NAD ini merupakan tahapan pertama. Selanjutnya satuan organik Polda NAD yang akan menjaga wilayahnya sendiri," kata Kepala Badan Pembinaan Keamanan Polri Komisaris Jendral Ismerda Lebang, setelah menerima 703 personil Polri Bawah Kendali Operasi (BKO) NAD di Dermaga Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut I Belawan, Medan, Sumatera Utara, 15 Agustus 2005.

Begitulah, akhirnya konflik Pemerintah RI dan GAM yang berlangsung 30 tahun lebih secara resmi berakhir. Ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (*memorandum of understanding*) MoU di Helsinki, Finlandia antara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sekaligus Ketua Tim Perunding Indonesia Hamid Awaludin dengan Ketua Tim Perunding GAM Malik Mahmud. Penandatanganan MoU diselenggarakan dalam acara yang mendapat liputan luas belbagai media massa di Simolna, The Government Banquet Hall, Etelaesplanadi 6, Helsinki, Senin 15 Agustus 2005.

#### 4.A.4. Catatan

Secara historis, keberadaan Aceh di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak perlu diragukan. Sejarah menggambarkan begitu jelas adanya keterkaitan yang sangat kuat antara masyarakat Aceh dengan masyarakat lain di Indonesia. Rasa kebersamaan di dalam perjuangan melawan kolonialisme Belanda, begitu nyata ditunjukkan oleh masyarakat di Serambi

Mekah tersebut. Kontribusi yang diberikan Aceh dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, mungkin memiliki nilai lebih dibandingkan dengan sumbangan yang diberikan oleh daerah lain. Hal itu misalnya ditunjukkan dengan pemberian dua pesawat Dakota (yang kemudian menjadi pesawat pertama yang dimiliki Republik Indonesia) dan juga sebuah kapal speed boat, yang total nilainya mencapai 12.000 dolar Malaysia dan emas 20 kilogram. Karena itu tak berlebihan bila Bung Karno mengucapkan terima kasih yang begitu mendalam kepada masyarakat Aceh, seraya menyebut Aceh sebagai 'Daerah Modal' perjuangan yang sangat penting bagi Republik Indonesia.

Aspek yang sangat berharga bagi terjadinya integrasi nasional di Aceh, dalam perjalanannya nyaris kehilangan daya rekatnya. Berbagai kebijakan politik yang diambil oleh pemerintah pusat di Jakarta, beberapa tahun setelah kemerdekaan republik Indonesia, dianggap merugikan masyarakat Aceh. Pertama-tama adalah dengan diberlakukannya UUD 1950 dan UU Desentralisasi, yang termasuk di dalamnya mengatur mengenai pembagian atau penataan wilayah administratif pemerintahan. Menurut peraturan ini Aceh tidak berdiri sebagai satu propinsi, tetapi hanya menjadi bagian dari Propinsi Sumatera Barat. Aceh yang memiliki sejarah dan karakter yang sangat khas, khususnya aspek ke-Islaman yang selama ini merupakan identitas ke-Acehan, sangat tidak nyaman dengan kebijakan ini. Setelah melalui perjalanan dan perjuangan yang melelahkan, akhirnya pada tahun 1965 keluarlah UU. Nomor 18/1965, yang memberi pengakuan Aceh sebagai Daerah Istimewa. Tetapi sekitar sepuluh tahun kemudian muncul kembali sebuah undang-undang yang pada esensinya menghapus status keistimewaan Aceh, yaitu UU Nomor 5/1975, tentang Pokok-pokok Pemerintahan. Dari seluruh proses ini, negara dalam hal ini pemerintah pusat seolah-olah hendak menghilangkan peran sentral dari para ulama Aceh di dalam tata pemerintahan di wilayah tersebut. Padahal ulama Aceh, sebagaimana yang selama ini telah ditunjukkan oleh sejarah, selalu menempati posisi penting dan menentukan dalam sejarah perjuangan Aceh.

Belum hilang kekecewaan Aceh terhadap Jakarta akibat masalah politik, kekecewaan yang berikutnya muncul dengan dilakukannya eksploitasi ladang gas alam di Arun, Kabupaten Aceh Utara oleh PN Pertamina dan Mobil Oil

Indonesia, Inc., Setelah kilang raksasa dirikan dan perusahaan itu beroperasi, tak kurang menghasilkan produk senilai Rp 31,7 triliun pertahun pada tahun 1997/1998, rakyat Aceh hanya kebagian sebagian kecilnya saja. Hal itu bisa dilihat dari APBD Provinsi DI Aceh yang saat itu hanya mencapai Rp 150 Miliar saja. Hal ini masih ditambah lagi dengan dilakukannya eksploitasi hutan-hutan produktif di Aceh oleh Jakarta dalam bentuk HPH, IPK dan HTI, yang dikelola 19 perusahaan. Dari semua eksploitasi ini, masyarakat Aceh pada umumnya, hanya kebagian pahitnya saja, seperti limbah pabrik dan kerusakan alam akibat penggundulan hutan yang semena-mena.

Yang paling membuat masyarakat Aceh tidak dapat mentolelir lagi keberadaan Jakarta di bumi Aceh adalah diberlakukannya Aceh sebagai Daerah Operasi Militer (DOM). Aceh selama masa berlangsungnya operasi 'jaring merah' tahun 1989-1998 tak ubahnya sebagai ladang pembantaian. Berbagai bentuk kekejaman, seperti penganiayaan, pembantaian, pemerkosaan, perampokan dan sebagainya terjadi. Praktis tidak ada hukum yang berlaku di Aceh. Yang ada hanyalah pelanggaran berat hak asasi manusia. Atas semua peristiwa ini, masyarakat Aceh tidak saja merasa telah dikhianati, tetapi juga merasa telah dilecehkan, dieksploitasi dan dihancurkan oleh Jakarta. Untuk itu, tidak ada pilihan lain bagi Aceh kecuali berusaha sekuat mungkin agar bisa lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berbagai gagasan ke arah kemerdekaan, terus diintrodusir. Salah satunya mempersoalkan landasan konstitusional ikatan Aceh dengan Jakarta, yang dianggap tidak cukup legitimasi bagi klaim Jakarta terhadap Aceh sebagai bagian dari wilayah NKRI.

Gagasan kemerdekaan semakin mencuat di Aceh pasca terjadinya gelombang reformasi 1998, dimana Soeharto jatuh dari tampuk kepresiden yang sudah digenggamnya selama 32 tahun. Keberhasilan Timor Timur melepaskan diri dari NKRI, pada tahun 1999, sedikit banyak memberikan inspirasi bagi gerakan kemerdekaan Aceh untuk melanjutkan perjuangannya. Meski demikian, terlepasnya Timor Timur juga menjadikan Jakarta lebih berhati-hati dalam menyikapi Aceh. Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mencoba mendekati Aceh secara persuasif dan lebih personal, yang kemudian melahirkan 'jeda kemanusiaan'. Tetapi upaya-upaya ini tidak terlalu banyak membuahkan hasil,

diantaranya adalah karena masa kepemimpinan Gus Dur yang sangat singkat. Presiden Megawati mendekati masalah Aceh secara lebih tegas dan lebih militeristik, misalnya dengan melakukan mobilisasi pernyataan di kalangan warga Aceh termasuk para PNS, anggota Korpri, WNI keturunan Tionghoa, dan lain-lain. Pemerintah juga melakukan 'pendataan ulang' para PNS dengan melampirkan 'ikrar kesetiaan' kepada NKRI.

Pada akhir 2004, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia. Terhadap Aceh Presiden SBY melanjutkan status darurat sipil yang sudah diambil oleh presiden sebelumnya. Sementara itu upaya-upaya dialog dilanjutkan antara pihak Pemerintah RI dan GAM. Tak kurang empat dialog dilakukan sejak Januari 2005 hingga Mei 2005. Situasi Aceh pasca gempa dahsyat, turut mewarnai jalannya negosiasi antara Pemerintah RI dan GAM. Ujungnya adalah pada tanggal 15 Agustus 2005, di Helsinki, Finlandia, dimana kedua belah pihak menyatakan keinginannya untuk mengakhiri konflik yang sudah berlangsung lebih dari 30 tahun, dan terlalu banyak memakan korban jiwa. Di dalam naskah kesepakatan tersebut diatur banyak hal, termasuk menyangkut pengelolaan politik pemerintahan, pengelolaan sumber daya alam, hubungan antara Aceh dan Indonesia, dan sebagainya. Masyarakat Aceh dan umumnya masyarakat Indonesia menyambut baik nota kesepahaman ini. Pertama-tama karena berbagai bentuk kekerasan sudah akan segera diakhiri, sambil mempertahankan Aceh tetap berada dalam pangkuan NKRI. Dengan cara inilah sebuah politik integrasi nasional dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap Aceh, yang mungkin secara teoritik lebih bertumpu pada integrasi yang bersifat vertikal daripada horisontal.

Apa yang terjadi persis seperti digambarkan Bertrand (2004: 163) bahwa integrasi Aceh ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia menunjukkan dua hal sekaligus; pada satu sisi menunjukkan tingkat penerimaan dan dukungan yang diberikan oleh Aceh terhadap konsep mengenai bangsa Indonesia, dan pada sisi lain menunjukkan kuatnya identitas keAceh-an itu sendiri. Itulah yang sangat membedakan Aceh dengan daerah lain di Indonesia, di dalam konteks

integrasi nasional.<sup>14</sup> Kondisi ini bila dilihat dalam perspektif integrasi sebagaimana yang dikonsepsikan Liddle (1970), akan tampak betapa dimensi vertikal (hubungan politik pemerintahan dengan pimpinan pusat, khususnya yang dialami para elite nya) menunjukkan problem yang sangat serius bagi terwujudnya integrasi nasional, satu elemen penting dalam nasionalisme ke-Indonesiaan. Hal itu ditambah pula dengan problem horisontal (yaitu yang berhubungan dengan identitas lokal, kultur budaya lokal, sistem kekerabatan dan sebagainya) yang begitu kuat posisinya di Aceh, dan ini menjadi aspek penting dalam melakukan *bargaining position* terhadap pemerintah Jakarta. Dua dimensi penting dalam integrasi ini (vertikal dan horisontal), telah dicoba diakomodasi di dalam *memorandum of understanding* antara GAM dan Pemerintah RI pada 15 Agustus 2005 lalu di Helsinki. Hanya sejarah yang akan memperlihatkan apakah akomodasi itu cukup untuk membangun suatu nasionalisme Indonesia di kalangan masyarakat Aceh ataukah tidak.

#### 4.B. “Riau Merdeka, To be or not to be”<sup>15</sup>

Riau (‘Riau Daratan’) adalah salah satu propinsi di Indonesia yang dikenal sangat kaya akan sumber daya alam, khususnya minyak dan gas. Sebuah perusahaan multinasional Caltex beroperasi di wilayah itu sejak tahun 80-an dan telah menyumbangkan devisa yang sangat besar kepada pemerintah pusat. Tetapi masyarakat Riau, pada tahun 2004 tergolong 13 masyarakat termiskin secara nasional. Eksploitasi kekayaan alam Riau tidak hanya berhenti pada bidang pertambangan, tetapi juga perusakan hutan, perampasan tanah dan juga menghancurkan struktur masyarakat adat, seperti yang dialami oleh masyarakat adat Sakai. Namun ada luka yang terasa membekas begitu

---

<sup>14</sup> The integration of Aceh into the Indonesia Republic shows both a remarkable degree of adherence to the concept of the Indonesia nation and a strong regionalist identity. The Acehnese joined the Republic from a different starting point than many of the other regions. They had formed a unique sense of community through their past glory as regional power, their resistance to the Dutch, and their strong Islamic Identity. (Bertrand, 2004: 163)

<sup>15</sup> Ini adalah judul tulisan yang dibuat Tabrani Rab sebagai pengantar buku Edyanus Herman Halim, *Mengapa Harus Merdeka?: Tangis dan Darah Rakyat Riau Dalam Memperjuangkan Sebuah Marwah*. Riau: Unri Press Pekanbaru, 2001. Hal. 15-20. Rab adalah seorang dokter, guru besar dan proklamator ‘Riau Berdaulat’.

dalam dirasakan oleh masyarakat Riau ketika dalam suatu pemilihan Gubernur Riau (tahun 1985) yang sudah dijalankan secara demokratis, tiba-tiba hasilnya dimentahkan oleh pemerintah pusat, tanpa mendengarkan aspirasi masyarakat Riau.

Tulisan yang akan dibahas berikut jelas menggambarkan rasa kesal dan marah masyarakat Riau atas situasi yang dialaminya tersebut. Tulisan itu diawali dengan penggambaran situasi tengah malam ketika sang penulis (Tabrani Rab) menemani salah seorang tokoh Riau hendak menemui koleganya, untuk melaksanakan suatu ritual yang bersifat spiritual, yaitu 'sumpah pocong'. Ritual itu dimaksudkan untuk menjamin bahwa keesokan harinya, para anggota DPRD Riau yang memiliki hak suara dalam pemilihan Gubernur Riau, memilih tokoh pilihan mereka; Ismail Suko. Usaha mereka pun tidak sia-sia, karena memang keesokan harinya, para anggota dewan tersebut menjalankan amanat sesuai kesepakatan: memenangkan Ismail Suko. Berikut penuturan Rab:

Ketika itu jam menunjukkan pukul 11.30 malam; bulannya September 1985. Saya bimbing juga mendiang Pak Soeman HS yang telah berumur 80 tahun, tertatih-tatih di seputar gang di jalan Seroja. "Assalamu'alaikum..." kata pak Soeman. Kedengaran dari dalam suara "siapa tuu..." "kami..." kata pak Soeman lagi.

Sekalipun Sudah ada sumpah ala pocong di sebuah rumah bahwa yang akan dipilih menjadi Gubernur Riau adalah Ismail Suko dan bukannya Jendral Besar Imam Munandar, namun usaha terakhir saya bersama pak Soeman adalah mengetuk pintu para anggota DPRD. Usaha kami ini dimaksudkan agar yang dipilih adalah Ismail Suko, orang kecil dari daerah ini, yang 'mungkin' tak sehebat sang Jendral dari Pacitan itu (Imam Munandar).

Ketika keesokan harinya pemilihan gubernur dilakukan oleh anggota DPRD. Dengan hati berdebar-debar kami mengikuti acara pemilihan ini. Tampak Intan Judin, sang anggota DPRD, mencatat hasil pemilihan ini sambil tiap sebenar melihat arlojinya. Syahdan, benar saja, Ismail Suko berhasil memperoleh suara terbanyak. Tak ada rasa kegembiraan yang lebih besar, melihat hasil pemilihan ni. Saya pun langsung menelpon seorang rekan di Hamburg, Hans Kalipke. Besoknya, gemparlah Indonesia! Semua koran memuat berita hasil pemilihan.

Namun rasa suka cita masyarakat Riau tersebut tidak berlangsung lama. Hanya satu hari setelah peristiwa menggembirakan itu seorang petinggi militer LB Moerdani memberikan isyarat bahwa pemerintah tidak akan mengangkat Ismail Suko pilihan DPRD Riau tersebut sebagai Gubernur Riau. Ketika ditanya oleh seorang wartawan mengenai apakah Ismail Suko yang sudah terpilih tersebut akan diangkat, dengan enteng Moerdani menjawab, “Siapa bilang?”. Benar saja, yang kemudian diangkat pemerintah pusat bukan Ismail Suko, melainkan justru Imam Munandar, sosok yang selama ini sudah mereka ketahui memiliki reputasi buruk dalam memperlakukan adat istiadat setempat. Masyarakat Riau pun menjadi kecewa, marah, merasa tidak dihargai bahkan dilecehkan. Bahkan mereka kembali dibuat kecewa ketika dua tahun kemudian Imam Munandar meninggal, yang diangkat sebagai penggantinya bukan wakil gubernur sebagaimana diatur dalam undang-undang, melainkan orang lain dari pusat. Berikut penuturan Rab:

Selang sehari, Simanunsong dari Majalah *Tempo* Medan menghubungi saya dan mengupas pemilihan ini menjadi *cover story* majalah tersebut. Teman saya, Zaili Asril, terus memuat berita ini di Koran *Kompas* secara beruntun. Eeee...komentar pertama ketika ditanya wartawan, “Apakah Ismail Suko bakal menjadi gubernur Riau?”, dengan tegas Benny Moerdani mengatakan: “Siapa bilang?”.

Tahulah saya kini bahwa hak-hak demokrasi di Riau telah terkubur. Dua tahun kemudian dalam depresi yang berat, Imam Munandar meninggal. Aneh, gubernur Lampung, yang juga meninggal dalam waktu yang tidak jauh berbeda dilantik menjadi gubernur dan orang Lampung lagi. Ketika Baharuddin Yusuf, teman sejak mahasiswa, saya nyatakan bahwa dia akan dilantik menjadi gubernur, maka Eba—panggilan Baharuddin Yusuf—tertawa lepas dengan ceria. Tak disangka tak dinyana, Soeharto malah mengirim *caretaker* Athar Sibero untuk mendudukkan Soeripto—mantan Panglima Komandan Kostrad dan ketua Fraksi ABRI di DPR RI. Untuk kedua kalinya tahulah saya bahwa secara politik Riau akan dilumatkan oleh pusat. Hilanglah hak-hak politik bangsa Riau.

Rab kemudian mengungkap hal-hal buruk yang dialami masyarakat Riau selama bertahun-tahun di bawah pemerintahan Indonesia. Mulai dari eksploitasi sumber daya alam, perampasan tanah, perusakan hutan oleh para pemilik HPH yang rata-rata adalah kolega pejabat pemerintah pusat, hingga

perusakan dan penghancuran struktur adat setempat. Indonesia, yang direpresentasikan oleh pemerintah pusat, khususnya tentara, dipandang sebagai ‘perampok’ yang menghisap seluruh harta milik masyarakat Riau, dan menjadikan masyarakat Riau hancur dan miskin. Berikut penuturan Rab:

Lebih dari 30 tahun sebelumnya, minyak Riau telah terkuras habis. Dan APBN sektor minyak ini, tetap lebih tinggi dari sektor lainnya. Untuk Sakai yang tersisa hanyalah kwartet dari ABRI, Pertamina, Caltex, dengan polisi. Birokrat sang lurah yang Golkar, merampok tanah Sakai yang penuh dengan minyak hanya menghalau mereka. Padahal oleh kolonial Belanda mengakui tanah Sakai ini sebagai ‘Rokan Staaten’, dan diakui pula otonomi Sakai ini oleh Sultan Siak.

Tetapi pemerintah yang menamakan dirinya Republik Indonesia yang konon beradab itu, menghalau Sakai ini persis seperti babi hutan. Hancurnya sendi-sendi kehidupan ekonomi rakyat yang mengikuti Sakai Cleansing ini ketika 72,4 persen dari hutan Riau dibagikan kepada HPH dan usaha perkebunan sambil membawa ratusan ribu transmigran dari Jawa. Maka saya pun menyadari bahwa hilanglah hak-hak ekonomi bangsa Riau ini yang lebih terjamin ketika mereka dijajah Belanda dengan perjanjian pendek yang lebih dikenal dengan “Korte Verkraling”.

Belum juga lagi luluh lantak ekonomi dan politik di Riau, maka musibah baru pun muncul dengan keluarnya Undang-undang No. 5 tahun 1979 yang menyamakan struktur pemerintahan desa sebagai pusat budaya rakyat dengan pemerintahan di Jawa. Yang ingin dicapai oleh pemerintah pusat adalah mengubah sistem unitarian menjadi uniformitas dan pada langkah selanjutnya menuju ke otoritarian. Semua bangsa Indonesia menyadari keanekaragaman dalam kesatuan, *Bhineka Tunggal Ika, unity in diversity, e pluribus unum ‘from many, one’* maka dari sini perang budaya sebagai simbol sosial—sebagai benteng terakhir—haruslah ditabuhgendangkan.

Akan tetapi, dengan undang-undang tersebut, hilanglah kepenghuluan di Riau, Wanua di Irian, Nagari di Sumatera Barat dan Subak di Bali. Sebab, sejak republik ini diproklamirkan, konflik pusat dengan daerah selalu diselesaikan pusat dengan senjata seperti pemberontakan Republik Maluku Selatan dari PRRI Permesta.

Khusus untuk Riau yang merupakan daerah penghasil devisa terbesar dengan sumbangan devisa sekitar Rp 60 triliun dalam setahun. Akan tetapi, hutan Riau habis dieksploitasi dan yang tertinggal hanya sekitar 0,2 juta hektar saja. Saat ini yang masih ‘perawan’ tinggal sekitar 450 ribu hektar. Bahkan pasir dari Riau dijual untuk reklamasi Singapura, serta sekitar 82,7 persen peranan hak ulayat rakyat Riau diambil oleh konglomerat di Jakarta. Daerah-daerah yang produktif, seperti Batam dan Natuna, justru dipisahkan dan dibentuk otorita

sendiri. Hanya dua hal yang tertinggal; sampah dan limbah! Dan cuma debu saja yang belum sempat dikirim ke Jakarta.

Secara moral, yuridis dan konstitusional, menurut Rab, pemerintah Indonesia telah kehilangan otoritas atas Riau, karena telah gagal dalam memenuhi hak-hak sosial, politik maupun budaya yang sudah seharusnya dijamin oleh suatu pemerintahan sebagaimana diamankan oleh konvensi internasional HAM dan Ekosob. Jika landasan berbangsa dan bernegara adalah atas adanya rasa memiliki dan menghargai, maka sudah saatnya Riau benar-benar lepas dari Indonesia, karena landasan tersebut memang tidak ada. Berikut pernyataan Rab:

Setelah 37 tahun menjadi bagian dari Indonesia, masyarakat Riau bukannya sejajar, baik dari segi pendidikan maupun ekonomi dengan masyarakat daerah lain. Akan tetapi, justru menjadi salah satu provinsi yang jumlah penduduk miskinnya paling banyak di Indonesia, yaitu mencapai angka sekitar 42,3 persen. Menjadi provinsi yang terburuk sesudah Timor Timur memisahkan diri. Sementara sumberdaya alam dijarah habis oleh pusat dan hampir semua desa di Riau tergolong dalam desa miskin.

Kita pun boleh melihat ke mana saja, ke hak-hak asasi manusia yang dikumandangkan oleh Nyonya Rossevelt tahun 1948 bahwa negara haruslah mampu melindungi hak-hak asasi manusia. Tetapi sejak republik ini didirikan dengan berkedok Undang-undang dasar 1945 dan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, pada hakekatnya adalah pembabatan terhadap demokrasi dan hak-hak rakyat Indonesia dan khususnya untuk bangsa Riau.

Kita boleh juga melihat kepada *International Covenant on Civil and Political Rights* dan *International Covenant on Economics, Social and Cultural Rights*. Bila hak-hak asasi ini telah hilang, maka sudah saatnya kita untuk menyatakan memisahkan diri dari Republik Indonesia. Sebab Republik ini dibentuk berdasarkan konsensus saling mempercayai antara bangsa Riau dengan bangsa Indonesia, tanpa paksaan apa pun.

Sebagai kesimpulan, Rab menegaskan kembali apa yang sudah ia nyatakan di dalam proklamasi 'Riau Berdaulat' (pada 15 Maret 1999), bahwa tidak ada pilihan lain bagi masyarakat Riau kecuali berpisah dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan mengambil teks Proklamasi Indonesia

17 Agustus 1945 (yang dibacakan oleh Soekarno-Hatta), Rab memodifikasi teks tersebut menjadi Proklamasi Riau Merdeka, dan menempatkan Indonesia sebagai pihak ‘penjajah’ yang ‘harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan’:

Maka kita pun kembali ke preambule Undang-undang Dasar 1945; “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa (termasuk bangsa Riau) dan oleh Sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan (termasuk penjajahan Republik Indonesia), karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Riau telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa, mengantarkan rakyat Riau ke depan gerbang kemerdekaan Riau, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”.

Yang menjadi masalah utama cara untuk merebut kemerdekaan dengan kekerasan adalah selalu merupakan model pemisahan diri yang gagal. Terdapat setumpuk harapan yang diberikan contoh oleh Singapura dan Brunei, bagaimana mereka memisahkan diri dari Malaysia. *To be or not to be*, inilah jalan yang ingin dicapai oleh Gerakan Riau Merdeka.

Dari teks tersebut, paling tidak terdapat dua hal penting yang menandai pemaknaan penulisnya terhadap nasionalisme Indonesia. *Pertama*, sudah tidak ada nasionalisme Indonesia di Riau, hal itu terutama diakibatkan oleh sikap dan tindakan pemerintah pusat yang tidak menghargai aspirasi dan harkat hidup masyarakat Riau. *Kedua*, tidak ada jalan yang terbaik bagi masyarakat Riau kecuali memisahkan diri dengan NKRI, karena memang rasa kebersamaan dan saling memiliki tidak ada. Inilah kurang lebih makna nasionalisme Indonesia bagi masyarakat Riau sebagaimana yang dipersepsikan dan dikonstruksikan di dalam teks tersebut.

Jika ditinjau dari perspektif Michel Foucault, maka akan tampak bahwa di dalam teks tersebut sebenarnya sedang berlangsung proses *counter* wacana (atau bisa juga dikatakan sebagai perebutan wacana) terhadap apa-apa yang sudah diproduksi oleh Orde Baru, khususnya yang berkaitan dengan pemaknaan nasionalisme, ke-Indonesiaan dan juga ‘ke-Riau-an’. Bila diurai lebih lanjut menurut konsep Foucault, maka setidaknya ada 6 (enam) dimensi konseptual yang terlibat dalam perebutan wacana tersebut, yakni; *power*,

*knowledge, games of truth, discourse, counter history, episteme*. Pada dimensi ‘power’ misalnya, tampak terjadi proses ‘legitimasi’ *versus* ‘deligitimasi’ kekuasaan. Ketika Orde Baru berusaha menjelaskan keterlibatannya di Riau sebagai upaya menjaga integritas NKRI, untuk menjaga stabilitas, yang antara lain dipraktikkan dengan berbagai bentuk kekerasan, maka di dalam teks yang diproduksi oleh masyarakat Riau tersebut, digambarkan bahwa yang terjadi hanyalah praktik-praktik melawan nilai-nilai kemanusiaan, dimana jalan dialog dikesampingkan. Yang mengemuka selalu penyelesaian dengan cara kekerasan.

Demikian pula pada dimensi ‘knowledge’, sementara Orde Baru membangun wacana bahwa kehadirannya di panggung kekuasaan adalah untuk melakukan ‘Pembangunan nasional, Pembaharuan dan modernisasi masyarakat’, maka di dalam teks yang diproduksi oleh masyarakat Riau digambarkan bahwa yang terjadi sesungguhnya adalah justru proses ‘penguburan nilai-nilai demokrasi masyarakat Riau’ (‘...hak-hak demokrasi di Riau telah terkubur’). Terjadi pula proses perebutan makna kebenaran (*games of truth*) di dalam teks tersebut. Hal itu tampak misalnya ketika Orde Baru mendefinisikan kehadiran dirinya di panggung kekuasaan adalah dalam rangka ‘...Melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, Demokrasi Pancasila, kepentingan rakyat di atas segalanya’, maka di dalam teks yang diproduksi masyarakat Riau tersebut digambarkan, bahwa justru dengan berpijak pada landasan Preambule UUD 1945, masyarakat Riau seharusnya berhak mendapatkan hak kemerdekaan, karena kemerdekaan adalah hak segala bangsa.

Pada dimensi ‘discourse’ Orde Baru telah membuat sejumlah kategori tertentu untuk menempatkan orang-orang atau sekelompok orang yang dipandang melawan negara sebagai GPK (Gerakan Pengacau Keamanan), PKI (Partai Komunis Indonesia), dan juga ‘gerakan separatis’. Semua kategori ini memiliki implikasi yang berat bagi pihak-pihak yang dianggap sebagai bagian di dalamnya. Bagi masyarakat Riau, semua bentuk pengkategorian Orde Baru tersebut tidak lain adalah cara-cara untuk membatasi dan menindas masyarakat Riau. Di dalam teks yang diproduksi

masyarakat Riau jelas digambarkan bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru di Riau sebenarnya hanyalah upaya penghilangan hak-hak politik masyarakat Riau: (*'...tahulah saya bahwa secara politik Riau akan dilumatkan oleh pusat. Hilanglah hak-hak politik bangsa Riau..'* *To be or not to be.. inilah jalan yang ingin dicapai oleh Gerakan Riau Merdeka.*)

Tampak jelas pula bahwa di sini ada satu permainan perebutan makna kebenaran, *games of truth*, sekaligus juga perebutan pembacaan sejarah ('history' versus 'counter-history'). Yaitu ketika Orde Baru sudah mengatakan bahwa bentuk 'NKRI adalah final' yang mestinya berimplikasi bagi terwujudnya kemakmuran maka yang terjadi justru sebaliknya. Di dalam teks yang diproduksi masyarakat Riau tersebut dikatakan bahwa: *'setelah 37 tahun menjadi bagian diri Indonesia...Riau justru menjadi propinsi terburuk setelah Timor Timor..'* *Games of truth* dan *counter history* yang dibangun oleh teks yang diproduksi masyarakat Riau merupakan bentuk delegitimasi akan kehadiran pemerintahan Orde Baru di tengah-tengah masyarakat Riau. Dimana kehadiran negara yang semestinya membawa nilai-nilai kemajuan masyarakat, pada praktiknya justru menyengsarakan masyarakat.

Sementara itu pada dimensi 'Episteme', juga tampak terjadi perebutan makna yang tajam. Ketika Orde Baru meletakkan landasan kenegaraan yang dibangunnya di atas asas kekeluargaan, teks yang diproduksi masyarakat Riau justru mengatakan bahwa pemerintahan yang ditawarkan Orde Baru telah menempatkan masyarakat Riau menjadi masyarakat pinggiran yang tak memiliki hak untuk menentukan kebijakannya sendiri, khususnya dengan diterbitkannya UU No. 5/1979 tentang pemerintahan daerah. Orde Baru telah mengorbankan dan menindas masyarakat Riau. Jika dibuat suatu tabel perebutan makna tersebut (menurut enam konsep Michel Foucault) maka akan tampak sebagai berikut:

| FOUCAULT'S CONCEPTS | WACANA ORBA   | WACANA DI RIAU  |
|---------------------|---|---|
| Power               | 'DOM, Menjaga Integritas NKRI, stabilitas politik,  | '...konflik pusat daerah selalu diselesaikan dengan senjata....'  |
| Knowledge           | 'Pembangunan nasional, Pembaharuan dan modernisasi masyarakat'  | '...hak-hak demokrasi di Riau telah terkubur'   |
| Games of Truth      | 'Melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, Demokrasi Pancasila, kepentingan rakyat di atas segalanya' | 'Berdasarkan Preamble UUD 1945...Riau berhak mendapat kemerdekaan..'  |
| Discourse           | 'OPM, GPK, PKI, GAM, Gerakan Separatis'   | '...tahulah saya bahwa secara politik Riau akan dilumatkan oleh pusat. Hilanglah hak-hak politik bangsa Riau.. To be or not to be.. inilah jalan yang ingin dicapai oleh Gerakan Riau Merdeka |
| Counter-history     | 'NKRI Final'  | 'setelah 37 tahun menjadi bagian diri Indonesia...Riau justru menjadi propinsi terburuk setelah Timor Timur..'  |
| Episteme            | '..massa mengambang, Negara kekeluargaan...'  | '...dengan UU No, 5/1979, pemerintah pusat mengubah sistem unitarian menjadi uniformitas dan selanjutnya menjadi otoritarian...'  |

Untuk mendapat gambaran yang baik mengenai teks tersebut, adalah penting untuk melihat konteks sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan Riau yang lebih luas, yang telah terjadi dan dialami oleh masyarakat Riau selama ini, sehingga memunculkan konstruksi nasionalisme ke-Indonesiaan seperti itu. Paparan di bawah ini adalah upaya membuat gambaran tentang hal tersebut.

Sebagaimana halnya dengan wilayah lain di kepulauan Nusantara, Riau memiliki sejarah kolonialisme yang panjang. Meski ada sejumlah kerajaan yang sudah berumur sangat lama, namun ketika kolonialisme Portugis, Belanda, Inggris dan kemudian Jepang masuk menguasai nusantara, raja-raja yang ada di sana pun tunduk di bawah penguasa kolonial. Menurut catatan Cribb (1992: 405-406), Kesultanan Riau didirikan pertama kali oleh Sultan Mahmud I, setelah kota tersebut jatuh ke tangan Portugis tahun 1511. Wilayah kesultanan itu mencakup Kepulauan Riau, pesisir Sumatera dan semanjung Melayu. Beberapa kali ibukota kesultanan itu bergeser antara kepulauan Riau dan Johor. Dan pada tahun 1641, kesultanan ini bersama

dengan Belanda mengusir Portugis keluar dari Malaka. Setelah terjadinya pembunuhan atas Sultan Mahmud II (1685-1699), Riau terseret dalam perang saudara (*civil war*) yang berlarut-larut. Penguasa independen yang terakhir, Mahmud Riayat Syah III (1761-1812) berusaha untuk menghentikan perseteruan yang melibatkan orang-orang Bugis, Melayu, Belanda dan Inggris, tetapi ia gagal.

Pada awal 1788 Belanda berhasil menguasai Tanjungpinang, sebuah kota yang terletak di pulau Bintan. Pendudukan Belanda ini menyebabkan penduduk setempat menyingkir dari daerah kekuasaan Belanda, sehingga melumpuhkan perdagangan Belanda. Oleh sebab itu Belanda merasa perlu mengembalikan kedudukan Sultan Melayu ke Tanjungpinang. Terjadilah perdamaian antara Belanda dengan Sultan Mahmud Syah III pada tahun 1795 yang berisi antara lain; *pertama*, Sultan Mahmud Syah III dipulihkan haknya semula di Tanjungpinang. *Kedua*, Sultan Mahmud Syah diharuskan membayar ganti rugi kepada Kompeni Belanda sebesar 60.000 real. Pengakuan Belanda ini diikat dengan suatu perjanjian 26 Nopember 1818.<sup>16</sup> Tetapi tidak lama setelah perjanjian itu, yaitu pada tahun 1819 Inggris berhasil mendapatkan Singapura, yang saat itu merupakan pusat kesultanan Riau. Dan pada tahun 1824 dalam sebuah Pakta Inggris-Belanda (*Anglo-Dutch Treaty*), secara definitif Singapura dipisahkan dari wilayah Riau. Riau memiliki kebanggaan sejarah, yaitu dengan tradisi sastranya yang terkenal. Kalau di Jawa masa kolonial berdiri Budi Utomo (1908), maka di Riau berdiri *Rusdiach Club* dengan tokohnya Raja Ali Haji (1782-1784). Di samping sastrawan yang terkenal dengan karyanya 'Gurindam Duabelas', Raja Ali Haji juga memimpin perang melawan kolonialisme Belanda, dan namanya masih terus dikenang indah oleh masyarakat Riau hingga sekarang ini.

---

<sup>16</sup> Perjanjian itu ditandatangani pihak Melayu yang diwakili oleh Yang Dipertuan Muda Raja Jaafar atas nama Sultan Abdul Rachman, dan dari pihak Belanda diwakili oleh C. Walterbeck. Isi perjanjian itu antara lain; *Pertama*, Sultan mengakui Belanda sebagai penguasa tertinggi di Riau. *Kedua*, Pemerintah Belanda diberi izin untuk menambah jumlah angkatan perangnya. *Ketiga*, Selain dari bangsa Belanda tidak dibenarkan mengadakan perdagangan dengan Riau. *Keempat*, pengangkatan raja-raja harus mendapatkan persetujuan dari Belanda. (Rabb, 2002: 37-38)

Pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, menurut Rabb (2002: 54) Riau tidak langsung termasuk salah satu wilayah Indonesia. Propinsi dengan luas wilayah 329 kilometer persegi ini (70 persennya berupa perairan), dalam catatan Rabb, baru bergabung dengan Republik Indonesia pada tahun 1954. Sejumlah kerisauan sudah mulai dirasakan masyarakat Riau, sejak awal bergabung dengan RI. Pangkal kerisauan itu tampaknya terletak pada soal pembagian pendapatan yang dirasakan tidak adil dan juga pengambilan keputusan politik. Awalnya adalah dengan terbitnya Undang-undang No. 32 tahun 1956, tentang perimbangan antara negara dan daerah-daerah. Dalam undang-undang yang disahkan oleh Parlemen hasil Pemilu 1955 dan ditandatangani oleh Presiden Soekarno itu, antara lain dinyatakan bahwa daerah mendapat 75 persen dari hasil daerah sementara pusat hanya menerima 25 persen. Dalam pasal 3, dinyatakan bahwa;

“Tetapi agar daerah selekas mungkin dapat memiliki penerimaan dari sumber-sumber ini, maka dimulai dengan tahun dinas 1957 akan diserahkan 90 persen dari penerimaan sumber-sumber tersebut kepada daerah yang bersangkutan. Penetapan penyerahan 90 persen ini akan menjadi dorongan bagi daerah untuk selekas mungkin mengambil tindakan untuk mengoper sumber-sumber pendapatan ini. Berhubung dengan dikeluarkannya biaya untuk administrasi dan penagihan oleh pemerintah pusat adalah selayaknya kepada daerah tidak diserahkan seluruh penerimaan.” (Rabb, 2002: 131-132)

Undang-undang ini dirasakan sangat indah bagi daerah-daerah, khususnya daerah yang kaya sumber daya alam seperti Riau. Tetapi dalam prakteknya Undang-undang ini hanyalah sebatas aturan yang tak pernah direalisasikan. Ketika sejumlah daerah meminta kepada pemerintah pusat untuk merealisasikan undang-undang ini, pemerintah pusat tidak menanggapi. Sebagai akibatnya muncullah pemberontakan-pemberontakan daerah yang didukung oleh TNI, seperti Dewan Banteng, Dewan Gajah dan sebagainya. Bahkan pada 15 Februari 1958, sebagai kelanjutan dari Dewan Banteng, dibentuklah Pemerintahan Revolusioner

Republik Indonesia (yang kemudian dikenal dengan sebutan PRRI/Permesta) di Bukit Tinggi, Sumatera Barat.<sup>17</sup>

Konflik dan kerisauan yang dirasakan daerah-daerah terhadap pemerintah pusat, menurut Audrey Kahin (2005) berkisar pada tuntutan daerah untuk memperoleh representasi yang lebih besar dalam pengambilan keputusan, khususnya pada kekuasaan kepala daerah dan dewan perwakilan daerah. Pada awal tahun 50-an, banyak terjadi perdebatan di Parlemen, dimana pendukung otonomi luas bagi daerah berjuang untuk aturan yang lebih menguntungkan daerah di luar Jawa. Salah satu usul mereka adalah perwakilan dua kamar, seperti Amerika Serikat, dimana keanggotaan salah satu dewan dipilih berdasarkan jumlah penduduk, tetapi di samping itu ada badan yang satu atau dua anggotanya wakil dari setiap daerah tanpa melihat jumlah penduduknya. Usul ini, bersamaan dengan usul lain yang dimaksudkan untuk memperluas otonomi daerah, dikalahkan di parlemen, dan pemerintah menunda menyelesaikan masalah-masalah desentralisasi yang rumit sampai sesudah dibentuknya Dewan Konstituante yang dipilih, mengikuti pelaksanaan Pemilu.

Dalam Undang-undang yang disahkan tahun 1950, untuk melengkapi Undang-undang Desentralisasi tahun 1948, secara keseluruhan Indonesia dibagi atas sepuluh propinsi; Sumatera Utara, Sumatera Tengah, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Untuk Sumatera, pembagian atas tiga propinsi itu tidak mungkin dilaksanakan selama masa revolusi, dan karesidenan masih dapat mempertahankan peranannya sebagai bentuk pemerintahan yang efektif.

---

<sup>17</sup> Susunan Pemerintahan PRRI adalah sebagai berikut: Mr. Sjafruddin Prawiranegara sebagai Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan; Kol. Maludin Simbolon sebagai Menteri Luar Negeri; Dahlan Djambek sebagai Menteri Dalam Negeri; Burhanuddin Harahap sebagai Menteri Pertahanan merangkap Menteri Kehakiman; Soemitro Djojohadikoesoemo sebagai Menteri Perhubungan/ Pelayaran; Mohammad Sjafei sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan merangkap Menteri Kesehatan; YF. Warouw sebagai Menteri Pembangunan/ Pekerjaan Umum; Saladin Sarumpaet sebagai Menteri Pertanian; Mochtar Lintang sebagai Menteri Agama; Saleh Lahade sebagai Menteri Penerangan; Abdul Gani Usman sebagai Menteri Sosial. (Rabb, 2002-48-49). Beberapa buku penting yang mengulas peristiwa ini antara lain, Kahin, Audrey. *From Rebellion to Integration: West Sumatra and the Indonesian Polity 1926-1998*, juga Kahin Audrey R. Kahin & George McT. Kahin, *Subversion as Foreign Policy: The Secret Eisenhower and Dulles Debacle in Indonesia* (New York: The new Press, 1995)

Sesudah tahun 1950, Jakarta menghadapi masalah besar dalam melaksanakan kebijakan itu. Kesulitan itu, dalam catatan Kahin( 2005) pertama-tama adalah karena keputusan mengenai perbatasan itu bersifat arbitrer dan kurang memperhatikan etnis, agama, sosial atau ekonomi. Sumatra Utara mencakup Aceh, Sumatra Timur, dan Tapanuli, dua yang pertama mayoritas beragama Islam, sedangkan yang terakhir mayoritas Kristen. Semua daerah ini mempunyai pola kultural dan ekonomi yang sangat berbeda. Propinsi itu berbeda secara etnis, dengan campuran Aceh, Melayu, Batak (Toba, Karo dan Simalungun) dan banyak imigran Jawa di perkebunan Sumatra Timur.

Begitu pula Sumatra Tengah yang menggabungkan tidak hanya Minangkabau dan Sumatra Barat tetapi juga Riau Daratan dan Riau Kepulauan yang membentang sampai ke Singapura, dan Jambi. Banyak penduduk Jambi dan Riau merasakan dominasi orang Minangkabau yang lebih maju secara politik dan pendidikan. Sementara itu, mengenai Propinsi Sumatra Selatan (yang mencakup karesidenan Palembang, Bengkulu, Lampung dan Bangka-Balliton/Belitung), mengutip Maryanov, Kahin (2005: 259) melukiskan propinsi itu sebagai menggabungkan daerah kaya minyak Palembang dengan orang kubu, salah satu suku yang sangat primitif di Indonesia. Daerah itu meliputi daerah hutan yang amat luas yang belum terjamah, dengan daerah hunian baru untuk orang Jawa yang kelebihan penduduk.

Perkembangan politik di Sumatra Tengah, pasca terbentuknya Indonesia sebagai negara kesatuan pada 17 Agustus 1950, juga menambah kekecewaan daerah terhadap kebijaksanaan pemerintah Jakarta. Propinsi Sumatra Tengah saat itu ditata kembali dengan memasukkan tidak hanya Jambi dan Riau di Pulau Sumatra, tetapi juga Kepulauan Riau. Kekecewaan masyarakat Sumatra Tengah bermula dari ditolaknya calon yang disulkan oleh DPR Sumatra Tengah (DPRST) untuk menjadi Gubernur Sumatra Tengah oleh Perdana Menteri RI M. Natsir. Sebaliknya, M. Natsir menunjuk orang Jawa Roeslan Moeljohardjo, sebagai pejabat Gubernur Sumatra Tengah. Natsir, menjelaskan bahwa keputusan untuk menunjuk Roeslan adalah karena dia seorang Muslim yang baik dan anggota Masyumi, karena itu

akan diterima oleh penduduk Sumatera Barat. Tetapi DPRST menolaknya, dan Roeslan kembali ke Jakarta pada tanggal 20 Desember.

Natsir kemudian membekukan DPRST melalui Undang-undang No. 1 tahun 1951, dan kemudian menyerahkan kekuasaan kepada Roeslan Moeljohardjo yang diangkat kembali sebagai pejabat gubernur, dan kepada badan yang beranggotakan enam orang yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri. Roeslan secara resmi menggantikan pejabat sementara Gubernur Sumatera Tengah SJ St. Mangkuto pada tanggal 13 Januari 1951. Berbagai upaya yang dilakukan elite politik Sumatera Tengah untuk menghidupkan kembali DPRST belum membuahkan hasil. M. Natsir sendiri berjanji akan membentuk kembali DPRST dalam waktu enam bulan. Namun sebelum berhasil membentuk kembali DPRST, kabinet Natsir keburu jatuh dan digantikan oleh kabinet Sukiman. Sukiman tidak menunjukkan itikadnya untuk memenuhi janji Natsir. Dr. Sukiman, menurut Audrey Kahin (2005: 263) adalah orang Jawa yang tidak punya hubungan ataupun simpati kepada orang Minangkabau di Sumatera Barat).

Perjuangan masyarakat Sumatera Tengah untuk menghidupkan kembali dewan perwakilan selalu menemui jalan buntu. Dalam sebuah konferensi mengenai otonomi daerah yang diadakan pada akhir 1953, diantara bupati-bupati Sumatera Tengah dan utusan pemerintah pusat, mengemuka permintaan masyarakat untuk menghidupkan kembali lembaga daerah tersebut. Wakil Pemerintah Pusat, Prof. Hazairin yang menjabat Menteri Dalam Negeri dalam Kabinet Ali Sastroamidjojo, yang hadir saat itu memberikan jawaban yang dirasakan masyarakat sangat mengecewakan. Saat itu Hazairin mengatakan:

“Kami tidak setuju mengeluarkan sebuah *instellingwest* (*institutional law*—undang-undang kelembagaan) yang diberlakukan tidak hanya kepada kabupaten atau kota, tetapi juga untuk propinsi, jika undang-undang itu didasarkan pada Undang-undang Nomor 22 tahun 1948, karena melihat situasi dan perkembangan masyarakat sekarang, dalam undang-undang tersebut, kami melihat banyak sekali yang tidak lagi sesuai dan karena itu harus dirubah. Karena itu apakah tidak lebih baik masalah pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Tengah ditunda sampai rencana

pengaturan yang baru dari pemerintah dijalankan?...karena masalah ini telah muncul tidak hanya di Sumatera tetapi juga di Kalimantan dan daerah lainnya”. (Audrey Kahin, 2005: 264-265)

Jawaban Hazairin ini membuat frustrasi para utusan dari Sumatera Barat, juga utusan dari Riau dan Jambi. Salah seorang dari mereka mengatakan:

Sekarang apa yang terjadi? Daerah Sumatera Tengah dalam keadaan kosong demokrasi. Karena itu sekarang kami menuntut, dengan kata lain rakyat Sumatera Tengah menuntut, pemerintahan yang demokratis dari pusat sampai ke daerah, karena selama delapan tahun rakyat telah menunggu dan (suatu putusan) tidak dapat lagi dielakkan. Jika pemerintah pusat akan menunggu keluarnya undang-undang baru untuk menggantikan Undang-undang No, 22 tahun 1948, lebih baik menunggu undang-undang dasar yang baru yang tidak sementara atau tunggu kedatangan demokratisasi pemerintahan daerah dan negara baru. (Audrey Kahin, 2005: 265)

Melihat peristiwa sejarah seperti ini Audrey Kahin (2005) mengambil kesimpulan bahwa sesudah pembentukan negara kesatuan pada bulan Agustus 1950, pemerintah pusat segera menunjukkan bahwa mereka tidak lagi ingin mewujudkan otonomi daerah yang sesungguhnya bagi propinsi-propinsi di Sumatera. Tindakan ini pada akhirnya menimbulkan pemberontakan yang serius terutama di Aceh. Seterusnya pandangan yang bertentangan antara Jakarta dan Sumatera Barat berkenaan dengan posisi daerah Minangkabau di dalam Republik Indonesia menjadi bagian dari perjuangan yang hanya diselesaikan sesuai dengan keinginan pemerintah pusat sesudah daerah itu melakukan pemberontakan bersenjata tahun 1958. Masalahnya menjadi bertambah serius, karena:

Pada waktu yang bersamaan, pemerintah gagal melakukan tindakan yang efektif untuk melanjutkan pengembangan ekonomi daerah luar Jawa, atau untuk memperhatikan masalah ekonomi mereka yang utama, juga tidak ada keinginan untuk memberikan pengurusan yang efektif dan desentralisasi keuangan kepada pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Kegelisahan daerah bertambah terhadap penjatahan keuangan luar negeri (*foreign exchange*) negara yang disalurkan ke Jawa—daripada

ke luar Jawa yang merupakan penghasil hampir tiga perempatnya. (Audrey Kahin, 2005:266)

#### 4.B.1. Kekecewaan dan Perlawanan

Berbagai bentuk kekecewaan dan kemarahan masyarakat Riau sudah muncul sejak awal kemerdekaan. Persoalannya adalah karena banyak kebijakan Jakarta yang melibatkan masyarakat Riau tetapi tanpa mendengar aspirasi masyarakat Riau sendiri. Selain soal penataan struktur pemerintahan yang terjadi pada tahun 1950-an, yang mengakibatkan pemberontakan sejumlah daerah di pulau Sumatera, khususnya Aceh, masyarakat Riau pada tahun 1960-an juga dirisaukan oleh kebijakan konfrontatif Soekarno terhadap Malaysia. Pada tahun 1963, pemerintah pusat (Soekarno) memutuskan melakukan konfrontasi dengan Malaya (Malaysia/Singapura), yang dianggapnya sebagai boneka Amerika Serikat dan agen neokolonialisme dan imperialisme yang bisa mengancam kedaulatan Republik Indonesia. Secara sosial politik dan ekonomi, ini membebani masyarakat Riau. Masyarakat Riau menanggung akibat-akibat paling berat, antara lain berupa; Pertama, Riau dijadikan sebagai basis militer, dengan segala konsekuensi sosial-budayanya. Kedua, ekonomi rakyat Riau runtuh karena kebijakan deideologisasi, pembatasan-pembatasan zona ekonomi perairan (terutama di Pesisir dan pulau-pulau). Ketiga, terpecah belahnya hubungan kultural antara Riau dengan saudara dan kerabatnya di tanah semenanjung Malaya (Malaysia dan Singapura). (Mundung, tt: 1)

Sekitar sepuluh tahun kemudian, rakyat Riau dirisaukan dengan lahirnya UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah, yang secara telanjang memperlihatkan sikap setengah hati pemerintah pusat dalam memberikan otonomi daerah. Hal ini antara lain terlihat dari Kepmendagri No. 240 Tahun 1980 yang mengatur tentang Struktur Organisasi Pemerintahan Propinsi, di bawah sekwilda yang terdiri dari asisten I, II dan III, namun Kepala Kanwil sebagai “perpanjangan tangan Pusat di Daerah”, berkoordinasi langsung dengan Departemen. Hal ini mengakibatkan wewenang antara asisten Gubernur dan Kanwil menjadi tumpang tindih. Keputusan ini terkesan menempatkan Sekwilda hanya sebagai “Tata Usaha”. Tumpang tindihnya wewenang antara

Pusat dan Daerah ini mengakibatkan laju pembangunan daerah terhambat, karena pelaksanaan pembangunan dan anggaran pembangunannya diharuskan berkoordinasi dengan Kanwil terlebih dahulu. UU No 5 Tahun 1974 beserta Peraturan Pemerintah dan Keputusan-keputusan lain yang mengiringinya, telah menggusur tatanan pemerintahan tradisional Melayu “Tali Berpilin Tiga” (yang menyeimbangkan kekuasaan antara pemerintah, ulama, dan adat/cendekiawan); melucuti hak komunal atas hutan-hutan (hak ulayat), dan menjadi titik balik (*turning point*) peminggiran masyarakat lokal (*indigenous people*) secara politik, ekonomi, dan budaya di tanah tumpah darahnya sendiri. (Mundung, tt: 2)

Yang paling menjengkelkan bahkan menjadikan masyarakat Riau kehilangan kepercayaan kepada pemerintah pusat Jakarta adalah apa yang terjadi pada tanggal 2 September 1985. Pada hari itu Ismail Suko, seorang tokoh politik Riau yang dipilih oleh mayoritas anggota DPRD Tingkat I Riau untuk menjadi Gubernur Riau, namun digagalkan oleh pemerintah pusat, dengan tetap menunjuk Mayor Jendral Imam Munandar (Gubernur sebelumnya) untuk kembali memegang jabatan Gubernur Riau. Dalam proses pemungutan suara untuk pemilihan calon Gubernur, terlihat secara jelas bahwa para pengurus Golkar di Riau tidak sejalan dengan Golkar di Jakarta. Para anggota DPRD Riau dari Golkar tidak memenuhi instruksi pusat untuk memilih Munandar, tetapi malah memilih Ismail Suko. Sehingga dalam pemilihan tersebut Ismail Suko unggul dengan 19 suara, sementara Imam Munandar hanya mendapat 17 suara. Tetapi, pada akhirnya pemerintah pusat—memveto pilihan masyarakat Riau tersebut dengan—menetapkan Imam Munandar sebagai Gubernur, bukan Ismail Suko.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Tabrani Rab menceritakan bahwa, malam menjelang pemilihan gubernur berlangsung, telah diadakan sumpah pocong bagi para anggota dewan untuk memastikan bahwa Ismail Suko yang harus jadi gubernur, dan bukan Imam Munandar. Ia mengatakan; “... *ada sumpah pocong di sebuah rumah bahwa yang akan dipilih menjadi Gubernur Riau adalah Ismail Suko dan bukannya Jendral Besar Imam Munandar...keesokan harinya pemilihan gubernur dilakukan oleh anggota DPRD, dengan hati berdebar-debar, kami mengikuti acara pemilihan ini...Syahdan, benar saja, Ismail Suko berhasil memperoleh suara terbanyak....namun ketika ditanya wartawan ‘Apakah Ismail Suko bakal menjadi Gubernur Riau?’ dengan tegas Benny Moerdani mengatakan, siapa bilang?. Tahulah saya kini bahwa hak-hak demokrasi di Riau telah terkubur.*” (Rab, dalam Halim, 2001: 16)

Dalam pandangan Golkar Riau, Munandar sudah tidak ada hubungan dengan rakyat di provinsi tersebut, dan juga dianggap sebagai langkah yang buruk. Para pejabat di Pekanbaru mengeluh bahwa gubernur melangkahi mereka, dan lebih mengandalkan kabinet dapurnya sendiri. Munandar juga dianggap sebagai seorang Jawa yang congkak. Ia mempunyai reputasi sebagai orang yang tidak menghormati sewajarnya adat dan kebudayaan setempat. Satu tindakannya yang sering dibicarakan adalah menyangkut patung pahlawan Riau. Munandar telah mengabadikan tapak kakinya di dasar beton monumen itu. Jejak kaki itu dianggap meniru kebiasaan para pemimpin pribumi di zaman lampau. Namun di Riau, hal ini dilihat sebagai perlambang bagaimana Munandar, orang dari luar, menginjak-injak nilai setempat, dan bagaimana ia sebagai orang Jawa telah menjajah provinsi itu kembali. Belakangan, setelah Munandar tidak lagi berkuasa, bekas jejak kaki Munandar kemudian dihapus. Meski demikian kenangannya tidak hilang. (Malley, dalam Emmerson, 2001: 152) Kenangan yang tidak menyenangkan tahun 1985 itu, kembali terulang dua tahun kemudian. Menyusul meninggalnya Imam Munandar sebelum masa jabatannya berakhir, pemerintah pusat menunjuk Atar Sibero (Dirjen PUOD) sebagai pejabat Gubernur Riau. Namun, pengangkatan Atar Sibero berdasarkan penunjukkan langsung oleh Soeharto, yang ini berarti menyalahi konstitusi karena berdasarkan undang-undang yang berhak menggantikan posisi Gubernur apabila berhalangan tetap adalah wakilnya. Saat itu posisi Wakil Gubernur dijabat putra daerah, yang saat itu juga adalah Ketua DPD Golkar Riau, Drs. H. Baharudin Yusuf. (*Dokumentasi KRR II*, 29 Januari s/d 2 Februari 2000)

Selain masalah politik yang pahit, masalah minyak merupakan salah satu isu sentral di kalangan masyarakat Riau, karena memang kandungan minyak di wilayah tersebut sangatlah besar. Namun selama ini masyarakat setempat tidak memperoleh manfaat dari kekayaan alamnya tersebut. Yang sangat membuat masyarakat Riau terusik adalah ketika Chairul Saleh selaku Direktur PERMINA (Perusahaan Minyak Negara) pada tahun 1960 menegaskan bahwa masalah minyak tidak boleh dibicarakan daerah dan dinyatakan pula secara lisan bahwa Riau tidak berhak untuk mendapatkan jatah minyak itu. Pernyataan itu disampaikan menanggapi aspirasi masyarakat Riau agar diberi

bagian setelah pengelolaan minyak Riau oleh Caltex yang telah berlangsung 10 tahun. Kebijakan pemerintah pusat tentang pengelolaan minyak di Riau inilah yang kemudian menjadi turning point perlawanan Riau terhadap pemerintah. Padahal untuk eksploitasi minyak dalam kurun tahun 1980-1985 tersebut masyarakat Suku Sakai harus merelakan makam nenek moyang mereka yang selama ini mereka hormati, dihancurkan oleh para investor, dan mereka hanya memperoleh ganti Rp. 30.000,- dan pembelian tanah hanya diganti Rp 150 per meter untuk lokasi penggalian minyak dan jalur pipa PT CPI. (Rab, 1999: 60)

Al-Azhar (1999) mencatat bahwa penduduk asli Riau dua kali mengalami musibah. Pertama, ketika terjadi perampasan tanah milik penduduk Sakai oleh Caltex. Untuk mengambil tanah milik warga Sakai dan orang Melayu tersebut Caltex menggunakan aparat keamanan, birokrasi dan berbagai aparat represif lainnya. Kemudian musibah kedua terjadi pada tahun 1970, dimana saat itu pemerintah memberikan Hak Pengelolaan Hutan (HPH) kepada 66 perusahaan konglomerat yang meliputi 6,6 juta hektar dari 9,2 juta hektar hutan yang berada di Riau sehingga masyarakat suku Sakai, sekali lagi kehilangan hak-haknya. Ini yang disebut Al-Azhar sebagai *Sakai Cleansing* (pemberangusan atau pembersihan suku Sakai). “Pendek kata penduduk asli terutama Sakai dan Bonai dimana perusahaan Caltex dan perusahaan perkebunan berada, telah menyebabkan masyarakat tersebut kehilangan hak-hak ekonominya (*economic right*), hak sipil (*civil right*), hak politik (*political right*) serta hak-hak budaya (*cultural right*). Hal ini bertentangan dengan International Covenant on Civil and Political Right yang telah disetujui dan disahkan oleh Majelis Umum PBB tahun 1966,” tulisnya. (Al-Azhar, dalam Rab, 1999: xxvii)

Di luar masalah minyak, kebijakan pemerintah pusat di sektor perkebunan juga terasa sangat tidak adil. Sejak tahun 1976, kebijakan di sektor perkebunan secara nasional telah meligitimasi perampasan tanah masyarakat. Berkedok perusahaan milik nasional (BUMN) dan atau keluarga “Cendana” (kroni Soeharto), perusahaan memaksa masyarakat tempatan untuk menjual tanah mereka dengan harga murah, sekitar Rp 3 s/d Rp. 25 per hektar. Alih-alih kesejahteraan yang didapatkan dari perkebunan sawit dan karet, masyarakat hanya menjadi penonton atas penjarahan yang dilakukan perusahaan atas ladang

masyarakat Riau sendiri. (Sumber: Tabrani Rab, *Menuju Riau Berdaulat*, Pekanbaru: RCI, 2002) PTPN V, misalnya mendapatkan ijin dari Gubernur Riau dengan Surat KPTS 131/V/1983 untuk membuka lahan perkebunan kelapa sawit dan karet seluas 30.000 hektar, di Kecamatan Tandun dan Kecamatan Siak, Kabupaten Kampar. Namun, praktiknya, pembukaan lahan yang dilakukan PTPN V tersebut melebihi luas lahan yang diijinkan. (Laporan TIM Terpadu Penyelesaian Tuntutan 176 KK Masyarakat Sei Pagar Atas Lahan Kebun Inti Sei Pagar)

Pada tahun 1988, Gubernur Riau memberikan izin pemanfaatan hutan seluas 10.000 hektar dengan cara berkolusi pemerintah pusat melalui Kanwil Kehutanan dengan PT ADEI sehingga luas wilayah yang mendapat HPH bertambah menjadi 15.800 hektar. Kemudian bergerak kepada Menteri Pertanian sehingga diberikan izin seluas 18.440 hektar sehingga luasnya menjadi 34.240 hektar yang di dalamnya terdapat pemukiman penduduk Desa Kecamatan Tambusai. Belum puas dengan kolusi yang telah dilakukan maka Menteri Kehutanan memberikan tambahan lagi 7.510 hektar sehingga luasnya menjadi 41.750 hektar. Masih juga puas, Menteri Kehutanan memberikan tambahan seluas 15.526 hektar di daerah Sam Sam dan Penaso. Klimaks penjarahan ini, pemerintah memperkuat kepemilikan PT ADEI oleh badan pertanahan nasional dengan surat keputusan kepala BPN nomor 2/HGU/1990 seluas 15.526 hektar. (*Dokumentasi KRR II*, 29 Januari s/d 2 Februari 2000)

Perusakan hutan Riau oleh pemerintah pusat masih terus berlanjut. Pada tahun 1992, sedikitnya 25.000 dari 120.000 hektar hutan kawasan konservasi Taman Buru (*Game Reserve*) dan Kerumutan yang terletak di Kabupaten Kampar dan Indragiri Hulu, Riau, dibabat 300 penebang liar. Diduga penjarahan hutan konservasi yang telah menghasilkan log (kayu bulat) ratusan ribu meter kubik ini dimodali oleh perusahaan tertentu, diantaranya PT SM dan MKM dari Pekanbaru. (Kompas, 22 Juni 1992) Kebijakan atas perlindungan penuh kepada konglomerat dan sama sekali tidak berpihak kepada masyarakat dilakukan lagi oleh Pemerintah pusat pada tahun 1996, dengan cara memberikan HPH kepada PT Musimas atas lahan seluas 60.000 hektar milik masyarakat

Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Kampar, sekarang Kabupaten Pelalawan (*Dokumentasi KBH Riau*, 2003)

Pada tahun 1997, berdasarkan laporan dari perusahaan HPH PT Rokan Permai Timber, Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Dinas Kehutanan Riau, serta pernyataan pimpinan proyek PT Torganda, sejak tahun 1995, PT Torganda telah melakukan perambahan hutan pada hutan produksi tetap di Tambusai Timur seluas 6.892 hektar, 4000 hektar di antaranya sudah ditanam kelapa sawit. Kepada Menhut, Djamaludin Suyohadikusumo, Pimpro PT Torganda Dasun Kartamiharja mengakui bahwa perusahaannya tidak memiliki izin prinsip dari pemerintah (Dephut) untuk membuka perkebunan kelapa sawit di daerah itu. Meskipun demikian PT Torganda tetap eksis hingga sekarang (*Koran Harian Ekonomi Neraca*, 16 Juni 1997, *Media Pos*, 13 Juni 1997, *Kompas*, 13 Juni 1997, *Angkatan Bersenjata*, 13 Juni 1997.) Masih pada tahun yang sama, tidak kurang 197 petani kelapa sawit di desa Simpang Kanan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Bengkalis, (sekarang masuk wilayah Kabupaten Rokan Hilir) diresahkan adanya oknum ABRI berpangkat letkol yang melakukan penyerobotan terhadap lahan perkebunan yang sedang mereka kerjakan, seluas 600 hektar lebih. (*Suara Karya*, 9 Juni 1997)

Serangkaian eksploitasi dan penghancuran alam terus berlangsung di Riau. Pada tahun 2000, sekitar 29 hektar hutan bakau dieksploitasi di Indragiri Hilir. Akibatnya kerugian negara mencapai triliunan rupiah. Pihak kehutanan diduga ikut bermain. LSM menuduh PT Pulau Sambu Group bertanggungjawab, dan harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Hutan Bakau merupakan salah satu potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki Kabupaten Inhil, dan luasnya tidak kurang dari 129 ribu ha. Namun akhir-akhir ini diperkirakan sekitar 29 ribu hektar telah gundul. (*Media Riau*, 6 Maret 2000). Eksploitasi kayu juga ditemukan pada tahun 2000, dimana ribuan tual/batang kayu bulat setiap harinya ditumpuk di lokasi Sawmill PT Taman Ros Indah (PT TRI) Jalan Pasir Putih, kilometer 8, Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar,

dipasok dengan truk dengan kawalan oknum berseragam TNI-AD.<sup>19</sup> Menteri Pertanian dan Kehutanan Prof. DR. Ir Bungaran Saragih mengakui maraknya aktivitas illegal logging tak terlepas adanya beking aparat kehutanan sendiri. Namun demikian, ketika didesak wartawan apakah dirinya sudah menyiapkan sistem pengawasan kehutanan yang baru, Bungaran serta merta mengaku belum sempat memikirkannya. Selanjutnya, ketika didesak wartawan soal adanya HPH nakal yang kini beroperasi di Riau, khususnya di sekitar Taman Nasional Bukit Tiga Puluh dan Hutan Lindung Bukit Betabuh, Bungaran justru meminta wartawan agar memberikan bukti. (*Koran Analisa*, 6 November 2000)

Akibat berbagai eksploitasi yang tak berkeadilan ini sungguh tragis. Kekayaan alam Riau, yang semestinya menjadi modal bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat setempat, ternyata tidak terjadi. Kondisi masyarakat Riau justru sangat memprihatinkan, karena kebijakan pemerintah pusat yang tidak adil. Hal ini tampak dari data-data berikut ini. Hasil survey sosial ekonomi nasional 1997 menyebutkan 64,59 persen penduduk Riau tidak berpendidikan atau tidak tamat SD; sebesar 17,21 persen hanya tamat SLTP; sebesar 15,53 persen berpendidikan SLTA; dan hanya 2,57 persen lulus perguruan tinggi. Menurut survei sosial ekonomi BPS 1997, 6,5 persen angkatan kerja di Riau menganggur. (BPS Propinsi Riau, 2001) Dalam kasus yang lebih spesifik tampak misalnya dari apa yang dialami oleh warga Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar, Riau yang merupakan pindahan dari proyek PLTA Kotopanjang, keadaannya kini sungguh menyedihkan. Selain mengalami kelaparan, menurut ketua Fraksi PPP DPRD Kampar, HM Amin Hs, kini mereka melarat karena tidak memiliki ladang sebagai mata pencaharian. (*Republika*, 12 Juli 1999)

Di samping itu, kasus gizi buruk atau kekurangan energi dan protein (KEP) yang mengakibatkan busung lapar di Riau terus meningkat tajam dan sudah sampai pada tahap memprihatinkan. Bahkan, pada tahun 1999, 14 orang dilaporkan meninggal. Laporan Pemda Riau atas kondisi obyektif ini kepada

---

<sup>19</sup> Truk bermuatan kayu itu masuk ke lokasi pada malam hari hingga subuh. Informasi yang diperoleh *Panji Demokrasi* mengatakan bahwa kayu bulat dan usaha sawmill PT TRI milik Maria disinyalir ilegal. (*Panji Demokrasi*, Edisi Minggu V September 2000).

pemerintah pusat untuk mendapatkan bantuan, belum mendapatkan respon positif. (*Media Indonesia*, 8 Juli 1999).<sup>20</sup> Menurut sensus tahun 2004, Riau masuk 13 besar termiskin secara nasional. Penduduk miskin di Riau tersebar di pedesaan mencapai 18,79 persen, dan kota 7,40 persen. Untuk pendidikan, kondisi pendidikan keluarga miskin sebesar 51 persen merupakan keluarga yang tamat SD, 39 persen tamat SLTP, dan 11 persen tamat SMA. Untuk aspek kesehatan, angka kematian bayi perseribu pada tahun 2002 mencapai 36,9 persen. Kemudian 58,9 persen merupakan penduduk tanpa akses terhadap air bersih. Akar penyebab kemiskinan di Riau yaitu tingginya tindak KKN, kebijakan yang tidak berpihak pada masyarakat miskin, faktor sosial, ekonomi, politik, serta program pengembangan masyarakat (Community Development/CD) swasta yang tidak menyentuh akar persoalan kemiskinan. (Riau Mandiri, 6 September 2004) Ini semua sangat ironis, karena pada tahun yang sama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Purnomo Yusgiantoro sendiri telah menyatakan, bahwa produksi minyak Riau mencapai 195,4 juta barel selama periode 2004. Jumlah ini merupakan angka tertinggi dibandingkan daerah minyak lain yang berada di Sumatera. Lebih lanjut dilaporkan, dari ratusan ribu barel itu yang diproduksi dari perut bumi Riau itu secara berurutan adalah Kabupaten Bengkalis (95,7 juta barel), Siak (41,2 juta barel), Rokan Hilir (39,6 juta barel), Kampar (16,7 juta barel), Inhul (0,9056 juta barel), Pelalawan (0,7518 juta barel) dan Inhil (0,5599 juta barel). Namun sayangnya, propinsi Riau diakui belum memiliki data pembanding atas data yang disampaikan pemerintah pusat ini. (*Riau Mandiri*, 28 April 2004) Sejak UU No 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU 25 tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah diberlakukan (2001), APBD

---

<sup>20</sup> Contoh nyata dari gizi buruk ini adalah nasib tragis yang menimpa keluarga Misiono, warga Dusun Pendawa, Desa Harapan Baru, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Misiono kehilangan tiga anaknya sekaligus setelah memakan ubi mengandung racun, karena tak mampu lagi membeli beras. Bagi Misiono sekeluarga, makan tiwul (ubi yang dikeringkan) sebagai pengganti nasi terpaksa dibiasakan untuk mempertahankan hidup. Ketua RT 12 RW I Desa Harapan Baru, Mardijun, menjelaskan dari sekitar 87 KK yang berada di RT-nya sebagian besar hidup dalam kondisi memprihatinkan. Rata-rata warga dusun Pandawa bekerja sebagai buruh harian lepas. Mereka hanya mengharapkan Rp. 8.000 jika bekerja setengah hari di kebun-kebun milik warga yang sawitnya sudah panen. Itupun kalau ada yang meminta mengerjakannya. (*Riau Mandiri*, 4 Desember 2004)

Riau meningkat drastis antara 15-16 trilliun. Namun penambahan tersebut pada faktanya tidak berkaitan secara signifikan dengan penurunan angka kemiskinan, peningkatan pelayanan pendidikan, serta perbaikan lingkungan. Hal ini terutama disebabkan oleh lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di bidang korupsi yang menjadi domain pemerintah pusat.

Terhadap berbagai tindak kejahatan dan ketidakadilan yang ada, bukannya tidak ada perlawanan dari masyarakat setempat. Berbagai upaya melawan itu tetap ada, meski bersifat sporadis dan dalam skala yang kecil-kecil. Misalnya adalah apa yang dilakukan oleh ratusan karyawan PT Torganda dan Torus Ganda pada tanggal 18 Maret 1999. Mereka melakukan penyerangan terhadap perusahaan tersebut yang berakibat satu orang korban dari pihak masyarakat dan perusakan terhadap harta benda penduduk Desa Tolan Baru, Dalu-dalu, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Kampar. Hal serupa yang terkait dengan perusahaan yang sama juga pernah terjadi pada tahun 1996, dengan sasaran Warga Desa Mahato, di kecamatan yang sama. (*Media Indonesia*, 30 Maret 1999) Aksi lainnya dilakukan oleh sekitar 2000 mahasiswa Riau, pada 11 Desember 1999. Mereka menduduki pelabuhan ekspor minyak terbesar di daerah ini, yakni Dumai, Kabupaten Bengkalis. Setelah mendobrak pintu gerbang unit pengolahan Pertamina II, mereka akhirnya dapat berdialog dengan pimpinan Pertamina. Demonstrasi dilakukan sehubungan dengan terbaikannya tuntutan bagi hasil minyak Riau. (*Suara Pembaharuan*, 12 Desember 1999)

Aksi rakyat juga muncul di Riau. Misalnya yang dilakukan oleh sedikitnya 60 kepala keluarga penduduk asli Pulau Batam pada 1 Desember 1999. Mereka memblokir ratusan perusahaan industri kawasan Batu Ampar, Batam, menyusul tidak digubrisnya tuntutan ganti rugi 300 hektar atas lebih tanah mereka. (*Media Indonesia*, 2 Desember 1999) Aksi senada juga dilakukan oleh sekitar 2000 anggota Kelompok Tani Sari Pingai (KTSP) di Kabupaten Siak Indrapura, Riau, Pada 9 November 1999. Mereka akhirnya bentrok dengan karyawan PT Aneka Inti Persada (AIP), salah satu anak perusahaan Liem Sio Liong Grup di Riau. Peristiwa ini bermula dari kedatangan 2000 orang anggota KTSP yang ingin menduduki lahan seluas 364 hektar

Kebun Sawit Plasma milik PT AIP di desa mereka. Para petani itu ingin menduduki kebun sawit tersebut karena kesepakatan mereka dengan pihak PT AIP di hadapan DPRD I Riau bahwa PT AIP akan memberikan kebun kelapa sawit Pola Plasma kepada KTSP selambat-lambatnya dua minggu kemudian, tidak dipenuhi. Perjanjian ini terjadi karena lahan warga seluas 12.000 hektar digarap anak perusahaan Liem Sio Liong itu diambil begitu saja tanpa ada pembayaran ganti rugi. (*Media Indonesia*, 1 Desember 1999)

Demo yang lain dilakukan oleh ratusan mahasiswa Riau yang ingin memblokir PT CPI di Rumbai, Pekanbaru. Aksi ini berakhir dengan kerusuhan. Akibat bentrokan itu, lima mahasiswa luka parah dan mereka segera dilarikan ke rumah sakit terdekat. Mereka berdemo dengan alasan selama ini Riau tidak mendapat apa-apa dari hasil minyak dari perusahaan milik Amerika Serikat yang beroperasi di Riau itu. (*Republika*, 28 Januari 2000) Demonstrasi juga dilakukan oleh sekitar 60 warga Sakai Duri mewakili 300 kepala keluarga (KK), pada 1 Maret 2004. Mereka kemudian menduduki Main Office Caltex Duri, dan menuntut perusahaan tersebut segera menyelesaikan ganti rugi lahan seluas 170 hektar di daerah Sebangar Duri XIII RW 08 Kecamatan Mandau yang sampai sekarang belum tuntas oleh perusahaan minyak itu. Sebelumnya pihak Caltex sudah pernah menjanjikan bahwa mereka akan menyelesaikan seluruh pembayaran pada akhir 2003. Namun setelah ditunggu-tunggu beberapa bulan, ternyata janji tersebut tidak terbukti dan nasib warga pemilik tanah tetap terkatung-katung tanpa ada kejelasan sama sekali. (*Riau Mandiri*, 11 Maret 2004)

Perlawanan yang lain juga dilakukan massa di Rokan Hilir. Sekitar 100.000 orang keturunan Suku Hamba Raja Riau (SHRR) menduduki lahan perkebunan sawit PT Ovomas A dan B di Bagan Batu, Kabupaten Rokan Hilir, Riau, selama dua hari Sabtu-Minggu 22-23 Januari 2000. Aksi ini dilakukan karena 212.000 hektar lahan yang dikuasai perusahaan milik Salim Group merupakan tanah ulayat SHRR keturunan Sultan Siak. (*Sinar Pagi*, 24 Januari 2000) Kemudian, lima unit sumur minyak PT CPI di Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Riau (sekitar 300 kilometer dari Pekanbaru), Senin 6 November 2000 dibakar massa yang mengatasnamakan kelompok Tani Sawit

Permai.<sup>21</sup> Aksi juga terjadi di Mandau. Merasa tidak ada lagi komitmen perusahaan yang beroperasi di Mandau, Kabupaten Bengkalis, puluhan pemuda Melayu Balai Makam melakukan aksi penyanderaan terhadap puluhan mobil-mobil milik perusahaan, pada Selasa 20 Januari 2004. Sedikitnya 50 buah mobil disandera, yang masing-masing berasal dari PT CPI, PT Haliburton, PT Nawakara, PT Bormindo, dan beberapa perusahaan lainnya. Menurut koordinator aksi, Mustafa Kamal, aksi ini merupakan satu-satunya cara yang bisa mereka lakukan untuk meminta perhatian ratusan perusahaan yang ada di Mandau agar memperkerjakan putra tempatan, setelah berbagai upaya diplomatis yang mereka tempuh selalu berakhir dengan kegagalan. (*Riau Mandiri*, 21/01/2004)

#### 4.B.2. Deklarasi Riau Berdaulat

Merasa tak pernah dihiraukan oleh pemerintah pusat, sementara pada saat yang sama segala Sumber Daya Alam yang mereka miliki dirampok, dieksploitasi, dihancurkan dan dikuras habis-habisan, akhirnya masyarakat Riau memilih untuk mengambil jalan sendiri. Puncak dari segala kemarahan rakyat Riau berujung pada keberanian Prof. Dr. Tabrani Rab memproklamasikan 'Riau Berdaulat', pada hari Senin 15 Maret 1999. Disaksikan sekitar 50 mahasiswa dari beberapa Perguruan Tinggi di Pekanbaru. Tabrani menegaskan, inti deklarasi itu berupa pernyataan menentukan nasib sendiri karena merasa tidak puas dengan pemerintah RI yang selama ini tidak memperhatikan nasib masyarakat dan kebudayaan Riau. (*Koran Riau Pos*, 16 Maret 1999). Naskah Deklarasi berbunyi:

*Sudah lebih dari setengah abad  
Kami menggantungkan hidup  
Pada Republik ini*

*Selama itu*

---

<sup>21</sup> Menurut Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) Polda Riau, Superintendent S Pandiangan SH, dari penyelidikan awal, diperkirakan masyarakat membakar sumur minyak itu karena tak puas dengan ganti rugi atas tanah mereka yang diambil PT CPI. (*Kompas* 8 November 2000)

*Minyak kami dijarah  
Tak sedikit pun menetes di tanah kami  
Sungai dan tanah kami tak lagi memberi hidup  
Karena polusi*

*Sudah lebih seperempat abad  
Tanah kami dijarah  
Sebagai konspirasi pusat dan konglomerat*

*Maka hari ini  
Kami putuskan  
Untuk menentukan nasib sendiri*

*Kami telah mulai menukilkan sejarah kami  
Dalam lembaran yang baru  
Akan hak-hak kami  
Identitas dan tradisi kami  
Dengan jalan damai*

*We are beginning to think  
We are writing the new chapter of history  
To demand our right  
Take on our duties  
And defend our identity and our tradition  
With peace  
(Pekanbaru, 15 Maret 1999)*

Menjelaskan terhadap pertanyaan mengapa memilih 'Riau Berdaulat', dalam bukunya Rab (2002) mengatakan, ada tiga alasan pokok:

*Pertama*, pemerintahan pusat sangat sentralistik bahkan cenderung monolitik di tangan Soekarno dan Soeharto, telah meluluhlantakkan Riau. Puncaknya peritiswa 2 September 1985 ketika DPRD Riau secara resmi memilih Ismail Suko sebagai Gubernur Kepala Daerah. Toh, Beny Moerdani sebagai kepanjangan tangan Soeharto tetap menunjuk Imam Munandar sebagai Gubernur. Hal ini adalah pelecehan hal politik bangsa Riau. Dua tahun kemudian, ketika Imam Munandar meninggal dunia pusat masih mempermainkan makna demokrasi dengan tidak mengangkat Baharuddin Yusuf selaku Wakil Gubernur sebagai Gubernur, tetapi malah menunjuk caretaker Atar Sibero untuk mendudukkan Soeripto. Jelaslah hinaan ini bertentangan dengan Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia dimana diluluhlantakannya pilar politik hak-hak rakyat Riau. *Kedua*, dana Rp 60 triliun yang disedot pemerintah pusat yang dikembalikan hanya berkisar sekitar Rp 200-300 milyar sebagai APBD. Dan keadaan ini menyebabkan Riau menjadi propinsi termiskin di Indonesia dengan pengabaian

pendidikan dan busung lapar. Hak-hak ekonomi yang merupakan pilar dari hak-hak asasi manusia telah diluluhlantakkan oleh pusat. *Ketiga*, hak-hak sosial kita memang telah dijahanamkan oleh pusat. Riau sebagai pusat bahasa dan devisa, harus menerima nasib luluhlantak dan memalukan pada negara tetangga Singapura dan Malaysia. (Rab, 2002: 15-16)

Rab kemudian menunjuk sejarah Riau sendiri. Menurutnya, jauh sebelum kebangkitan Budi Utomo 1908 di Jawa, di Riau telah berdiri Rusdiach Club dengan standarisasi bahasa Melayu yang menjadi cikal bakal bahasa Indonesia dengan Raja Ali Haji sebagai tokohnya. Raja Haji yang memimpin angkatan perang menghantam Belanda di Malaka jauh sebelum perang kemerdekaan. Riau baru disentuh oleh penjajahan Belanda pada tahun 1903 dan pemakzulan Sultan Lingga pada tahun 1911 justru oleh karena peristiwa bendera Belanda berkibar di atas bendera Riau Merdeka. Kebudayaan di Jawa yang baru berkembang pada tahun 1920-an telah didahului oleh sejarah Riau yang perkasa pada tahun 1900. Akibat pemakzulan Sultan Lingga Raja Ali Haji Kelana meminta bantuan Turki dan Jepang untuk membebaskan Riau dari Belanda jauh sebelum perang kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Demikian pula pemberian kuasa Sultan Siak kepada Republik Indonesia dinyatakan dalam telegram “Sementara”. Oleh karena pemerintah tak pernah merealisasikan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1959 dan kini melahirkan pula Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 maka seluruh Undang-undang tersebut adalah obsesi kosong yang menyebabkan Riau tak lebih dari sampah dan hidup dalam suasana limbah. Sebagai kesimpulan, Rab menulis: “Oleh karena itulah tak ada jalan lain bagi Riau kecuali untuk memerdekakan diri sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dimana penghancuran hak-hak azasi, hak-hak sipil, hak-hak politik, hak-hak kepemilikan yang berujung pada hilangnya eksistensi rakyat Riau hanya dapat diselamatkan bukan dari pendekatan ekonomi akan tetapi dari pendekatan politik yakni Riau berdaulat.” (Rab, 2002: 19)<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Sebagai upaya untuk menunjukkan berbagai kejahatan dan perlakuan tidak adil yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap Riau selama ini, Tabrani Rab bersama temannya sesama penggagas Riau Berdaulat menulis 14 buku seri, yang disebutnya sebagai ‘Buku Putih’. Ke-14 buku tersebut adalah; (1) Penjarahan Minyak Riau. (2) Penjarahan Tanah

Di luar aspek sosial, ekonomi dan politik yang sangat menonjol dalam argumentasi Rab, sebetulnya ada aspek lain yang turut mendorong munculnya gerakan riau berdaulat. Aspek itu adalah berkaitan dengan identitas etnik yang sangat kuat dimiliki oleh masyarakat Riau, khususnya Kepulauan Riau. Sebagaimana ditunjukkan oleh Vivienne Wee dari *Southeast Asia Research Centre* (2002), bahwa di Riau saat ini telah muncul suatu jenis baru nasionalisme yang berbeda dari nasionalisme Indonesia, yaitu etno-nasionalisme, suatu nasionalisme yang didorong oleh kecenderungan dan identitas etnik. Dan etno-nasionalisme di Riau tersebut memiliki satu akar yang sangat kuat dalam sejarah dan kebudayaan mereka. Etnonasionalisme ini semakin menguat di Riau seiring dengan melemahnya spirit nasionalisme Indonesia, yang disebabkan oleh berbagai kebijakan pemerintah pusat yang kurang peka terhadap apa yang dirasakan oleh masyarakat Riau. Meski demikian, Wee tidak terlalu yakin bahwa perkembangan ini bisa mengubah hubungan yang relatif seimbang antara Jakarta dengan daerah, karena sejak awal struktur Indonesia lebih didominasi oleh perspektif Jawa sentris, sehingga imajinasi tentang Indonesia adalah Indonesia sebagaimana yang dimajinasikan oleh orang Jawa. Dan ini menurut Wee suatu tragedi lama, dalam sejarah Indonesia modern. Selanjutnya ia mengatakan:

I suggest that the ‘foreshortened imagining’ of Indonesian nation-state was not just ‘the first of modern Indonesia’s tragedies’; it is a continuing tragedy. The promotion of civil politics that would allow civil debates between alternative discourses was alien to the regimes of both Sukarno dan Suharto. In particular, the patrimonial politics of Suharto’s New Order centralised power (therefore all debates and decisions) in himself and a small elite of kin and allies. While it is arguable that some form of civil politics has emerged in post-Suharto Indonesia, under Presidents Habibie and Abdurrahman Wahid, Indonesian politics remains firmly Jakarta-Suharto Indonesia remain centralised in Jakarta. It is because of the polarising effect of such centralisation, I argue that the politics of the diverse peripheries have

---

Rakyat Riau. (3) Penjarahan Hutan Riau. (4) Transmigrasi dan Konflik Sosial. (5) Kehancuran Ekonomi Rakyat oleh pabrik pulp & paper. (6) Pencemaran Riau. (7) Kapet Natuna dan Otorita Batam. (8) Nasib Rakyat Kampar di PLTA Kotopanjang. (9) Marginalisasi Penduduk Riau. (10) Perburuan Suku Asli di Riau. (11) Polusi dan penghidupan rakyat setempat. (12) Pemiskinan rakyat Riau dan daerah terdepan busung lapar. (13) Penjarahan pasir Riau untuk reklamasi Singapura. (14) Pembodohan masyarakat Riau.

become localised, indigenised and fragmented, with each definable periphery spinning off in its own centrifugal trajectory. (Wee, 2002: 29)<sup>23</sup>

#### 4.B.3. Beberapa problem yang belum dituntaskan

‘Genta’ kemerdekaan Riau sudah ditabuh oleh Tabrani Rab bersama sejumlah masyarakat Riau. Meski demikian sikap pemerintah Indonesia tampaknya tidak terlalu ambil peduli, bahkan terkesan meremehkan masyarakat Riau. Pada tahun 2000 Pemerintah Indonesia, melalui Presiden Wahid mengelak pernah mengatakan akan memberikan 75 persen sumber daya alam Riau kepada masyarakat di daerah itu, dan 25 persen sisanya diberikan kepada pusat. Ini bukan pernyataan kontroversial presiden terhadap Riau yang pertama kali. Sebelumnya, Presiden Wahid pernah mengatakan bahwa “Riau tidak ada apa-apanya”. Ungkapan presiden Wahid ini memantik reaksi keras dari rakyat Riau. Padahal pada Sabtu, 29 April 2000, Pemerintah Indonesia melalui presiden Wahid pernah menjanjikan bersedia memberi garansi untuk mewujudkan hasrat masyarakat Riau mengelola CPP Blok. Namun, sebagaimana diduga, ungkapan presiden Wahid itu tidak lebih dari sekedar janji politik yang tidak pernah ada itikad untuk direalisasikan. (*Kompas*, 2 Mei 2000)

Masyarakat Riau tidak tinggal diam, berbagai upaya perlawanan terus mereka lakukan. Pada tanggal 5 Agustus 2001, diadakan pertemuan akbar masyarakat Riau untuk rebut CPP block (Aliansi Riau Untuk Kuasai [ARUK] CPP Block) menghasilkan beberapa manifesto politik antara lain: *pertama*

---

<sup>23</sup> Saya menduga bahwa ‘pengimajinasian yang digambarkan’ oleh negara-bangsa Indonesia yang seperti ini bukanlah ‘yang pertama dalam tragedi Indonesia modern’, ini adalah suatu tragedi lanjutan. Peningkatan politik sipil yang memungkinkan terjadinya debat mengenai berbagai macam wacana alternatif, sangatlah asing pada masa Sukarno dan Suharto. Khususnya, politik patrimonial Orde Baru Suharto telah memusatkan kekuasaan (dimana seluruh inisiatif dan keputusan berada), hanya pada diri, keluarga kecil dan kroninya saja. Sementara hal ini bisa diperdebatkan, sejumlah politik sipil telah muncul pasca Soeharto. Di bawah Presiden Habibie dan Abdurrahman Wahid politik Indonesia sungguh masih terdapat sisa-sisa Jakarta sentris, seperti bahwa setiap wacana alternatif tentang masa depan yang dibentuk oleh Indonesia pasca Suharto masih terpusat di Jakarta. Hal ini karena efek dari sentralisasi tersebut. Menurut saya, politik keberagaman pinggiran telah terlokalisasi, terindigenisasi dan terfragmentasi, dimana setiap pendefinisian atas pinggiran itu justru tidak mengaitkan lagi dengan arah lintasan sentrifugalnya sendiri.

CPP harus menjadi milik masyarakat Riau. Keputusan ini sudah menjadi komitmen bersama masyarakat dan rakyat sebagai penegak marwah dan martabat masyarakat Riau. *Kedua* Keppres yang berkaitan dengan perpanjangan kontrak blok CPP harus ditolak karena tidak memasukkan aspirasi masyarakat Riau khususnya tentang dana kompensasi dan keterlibatan SDM tempatan. Perpanjangan dapat diterima bila mampu mengakomodir aspirasi masyarakat tersebut. *Ketiga* bila kedua tuntutan di atas tidak diterima, maka rapat akbar masyarakat Riau mengambil kesimpulan bahwa pengelolaan blok CPP harus diblokir sambil bernegosiasi dengan pemerintah pusat dan pihak-pihak terkait. Batas peninjauan ulang keppres adalah 3 x 24 jam dari tanggal 4 agustus 2001. *Keempat* proses pemblokiran blok CPP dilakukan dengan membentuk aliansi dimana dalam pembentukan aliansi terakomodir semua komponen masyarakat. Pembentukan aliansi dikordinir oleh Al Azhar. *Kelima* aliansi harus sudah terbentuk sebelum tanggal 8 agustus 2001 sedangkan proses dan mekanisme gerakan sudah harus ditentukan sebelum tanggal 9 agustus 2001. (*Dokumentasi KRR II, 29 Januari s/d 2 Februari 2000*)

Masyarakat Riau juga melakukan aksi besar pada tanggal 17 Maret 2004. Mereka melakukan aksi tanda tangan menggunakan cap jempol darah. Aksi ini dilakukan para guru, PNS, pemuda, masyarakat, dan ninik mamak di Kampar. Tindakan ini dilakukan selain sebagai sikap tegas menolak kepemimpinan Jefri Noer, juga merupakan wujud desakan kepada Mendagri Hari Sabarno agar segera mengeluarkan SK pengesahan keputusan DPRD Kampar yang memecat Jefri Noer. (*Riau Mandiri, 17 Maret 2004*) Pada tanggal 23-24 Maret 2003, kembali massa menggelar aksi besar. Aksi yang melibatkan puluhan ribu massa, di Bengkayang, Kampar ini berakhir rusuh. Dua pelajar tertembak peluru karet, sementara puluhan warga sipil mengalami luka-luka ketika bentrokan dengan aparat kepolisian tak terhindarkan lagi. Polisi membubarkan massa secara represif dengan menembakkan peluru karet dan gas air mata, dengan alasan demo tidak memiliki izin. Merespons aksi tersebut, pada 25 Maret 2004, Mendagri akhirnya mengeluarkan SK penonaktifan Bupati Kampar Jefri Noer dan Wakilnya, A Zakir SH, dan selanjutnya ditekankan kepada Gubri, HM Rusli Zainal, SE untuk mengambil alih

wewenang pemerintahan di Kampar. Meski pada akhirnya ada penyelesaian dari pemerintah pusat, namun masyarakat Riau sudah memiliki kesan yang kuat bahwa pemerintah Indonesia tampaknya memang tidak menginginkan keharmonisan dan kedamaian terjadi di bumi Lancang Kuning. (*Riau Mandiri*, 24-25 Maret 2004)

Tak kalah penting untuk dicatat di sini adalah bahwa pada akhir Januari 2000, masyarakat Riau berhasil menyelenggarakan Kongres Rakyat Riau. Kongres Rakyat Riau II, dilaksanakan pada 29-31 Januari 2000. Mereka kembali mengangkat isu utama 'Riau Berdaulat' yang merupakan kata lain dari "Riau Merdeka". Kepada peserta Kongres diminta untuk menyatakan pendapatnya mengenai posisi Riau terhadap Republik Indonesia. Berdasarkan hasil keputusan sidang pleno V Kongres Rakyat Riau – II (KRR-II) mengenai Bidang Sosial Politik, ditetapkan bahwa opsi yang mendapat dukungan terbesar dari peserta Kongres adalah opsi "MERDEKA" secara damai. Secara rinci hasil perolehan suara pada sidang pleno tersebut adalah sebagai berikut, Opsi Otonomi (199 Suara), Opsi Federal (146 Suara), Opsi Merdeka (270 Suara), Abstain 8 Suara. Jumlah keseluruhan 623 Suara. Keputusan KRR, visi yang diinginkan KRR adalah, mewujudkan Riau sebagai negeri yang bermartabat, berdaulat, sejahtera, cerdas dan berperan dalam membangun masyarakat Riau yang lebih beradab, demokrasi, adil dan makmur. Sedangkan misinya adalah, memajukan marwah masyarakat Riau yang berkualitas dengan peningkatan dan pemberdayaan sendi-sendi kehidupan sosial politik, sosial ekonomi dan sosial budaya yang berpihak kepada rakyat Riau. Dalam Kongres tersebut terdapat sejumlah rekomendasi penting, diantaranya adalah agar, PT. Torus Ganda dan Tor Ganda, harus "keluar" dari Riau. Kongres juga mendesak Pemerintah Riau dan DPRD untuk merealisasikan pemblokiran hasil Minyak Riau. Kongres juga menuntut penghapusan sistem *Otorita Batam* dan mengembalikannya kepada kedaulatan Pemerintah Riau. Yang lebih tegas lagi adalah mereka menuntut agar seluruh Keputusan Pemerintah Pusat tentang Investasi di Riau dikembalikan ke Riau, dan bagi hasil minyak Riau 100 persen untuk masyarakat Riau.

#### 4.B.4. Catatan

Secara historis, Riau sebenarnya tidak memiliki problem yang serius atau pun dendam sejarah dengan Republik Indonesia (NKRI). Luka itu terjadi beberapa tahun kemudian pasca kemerdekaan. Awalnya adalah dengan terbitnya Undang-undang No. 32 tahun 1956, tentang perimbangan antara negara dan daerah-daerah. Dalam undang-undang yang disahkan oleh Parlemen hasil Pemilu 1955 dan ditandatangani oleh Presiden Soekarno itu, antara lain dinyatakan bahwa daerah mendapat 75 persen dari hasil daerah sementara pusat hanya menerima 25 persen. Undang-undang ini dirasakan sangat indah bagi daerah-daerah, khususnya daerah yang kaya sumber daya alam seperti Riau. Tetapi dalam prakteknya Undang-undang ini hanyalah sebatas aturan yang tak pernah direalisasikan. Ketika sejumlah daerah meminta kepada pemerintah pusat untuk merealisasikan undang-undang ini, pemerintah pusat tidak menanggapi. Sebagai akibatnya muncullah pemberontakan-pemberontakan daerah yang didukung oleh TNI, seperti Dewan Banteng, Dewan Gajah dan sebagainya. Bahkan pada 15 Februari 1958, sebagai kelanjutan dari Dewan Banteng, dibentuklah Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (yang kemudian dikenal dengan sebutan PRRI/Permesta) di Bukit Tinggi, Sumatera Barat.

Konflik dan kerisauan yang dirasakan daerah-daerah terhadap pemerintah pusat, berkisar pada tuntutan daerah untuk memperoleh representasi yang lebih besar dalam pengambilan keputusan, khususnya pada kekuasaan kepala daerah dan dewan perwakilan daerah.

Dalam Undang-undang yang disahkan tahun 1950, untuk melengkapi Undang-undang Desentralisasi tahun 1948, secara keseluruhan Indonesia dibagi atas sepuluh propinsi; Sumatera Utara, Sumatera Tengah, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Untuk Sumatera, pembagian atas tiga propinsi itu tidak mungkin dilaksanakan selama masa revolusi, dan karesidenan masih dapat mempertahankan peranannya sebagai bentuk pemerintahan yang efektif. Sesudah tahun 1950, Jakarta menghadapi masalah besar dalam melaksanakan kebijakan itu. Kesulitan itu, pertama-tama adalah karena keputusan mengenai

perbatasan itu bersifat arbitrer dan kurang memperhatikan etnis, agama, sosial atau ekonomi. Sumatra Utara mencakup Aceh, Sumatra Timur, dan Tapanuli, dua yang pertama mayoritas beragama Islam, sedangkan yang terakhir mayoritas Kristen. Semua daerah ini mempunyai pola kultural dan ekonomi yang sangat berbeda. Propinsi itu berbeda secara etnis, dengan campuran Aceh, Melayu, Batak (Toba, Karo dan Simalungun) dan banyak imigran Jawa di perkebunan Sumatera Timur. Begitu pula Sumatera Tengah yang menggabungkan Minangkabau, Sumatera Barat, Riau Daratan dan Riau Kepulauan yang membentang sampai ke Singapura, dan Jambi. Banyak penduduk Jambi dan Riau merasakan dominasi orang Minangkabau yang lebih maju secara politik dan pendidikan. Sementara itu, mengenai Propinsi Sumatera Selatan (yang mencakup karesidenan Palembang, Bengkulu, Lampung dan Bangka-Balliton/Belitung), merupakan menggabungkan daerah kaya minyak Palembang dengan orang kubu, salah satu suku yang sangat primitif di Indonesia.

Persoalan lain yang juga menambah kekecewaan masyarakat Riau terhadap Jakarta, adalah ditolaknya calon yang disulkan oleh DPR Sumatera Tengah (DPRST) pada tahun 1950 untuk menjadi Gubernur Sumatera Tengah oleh Perdana Menteri RI M. Natsir. M. Natsir justru menunjuk orang Jawa Roeslan Moeljohardjo, sebagai pejabat Gubernur Sumatera Tengah. Natsir, menjelaskan bahwa keputusan untuk menunjuk Roeslan adalah karena dia seorang Muslim yang baik dan anggota Masyumi, karena itu akan diterima oleh penduduk Sumatera Barat. Tetapi DPRST menolak figur pilihan M. Natsir ini, dan Roeslan pun kembali ke Jakarta pada tanggal 20 Desember. Natsir kemudian membekukan DPRST melalui Undang-undang No. 1 tahun 1951, dan kemudian menyerahkan kekuasaan kepada Roeslan Moeljohardjo yang diangkat kembali sebagai pejabat gubernur. Perjuangan masyarakat Sumatera Tengah untuk menghidupkan kembali dewan perwakilan selalu menemui jalan buntu. Dalam sebuah konferensi mengenai otonomi daerah yang diadakan pada akhir 1953, diantara bupati-bupati Sumatera Tengah dan utusan pemerintah pusat, mengemukakan permintaan masyarakat untuk menghidupkan kembali lembaga daerah tersebut. Wakil Pemerintah Pusat,

Prof. Hazairin yang menjabat Menteri Dalam Negeri dalam Kabinet Ali Sastroamidjojo, yang hadir saat itu memberikan jawaban yang sangat mengecewakan bahkan membuat frustrasi masyarakat. Seperti digambarkan Kahin (2005), dengan apa yang dilakukannya itu pemerintah pusat jelas menunjukkan bahwa mereka tidak ingin mewujudkan otonomi daerah yang sesungguhnya bagi propinsi-propinsi di Sumatera.

Selain soal penataan struktur pemerintahan yang terjadi pada tahun 1950-an—yang mengakibatkan pemberontakan sejumlah daerah di pulau Sumatera—masyarakat Riau juga dirisaukan oleh kebijakan konfrontatif Soekarno terhadap Malaysia, yang dianggap sebagai boneka Amerika Serikat dan agen neokolonialisme dan imperialisme yang bisa mengancam kedaulatan Republik Indonesia. Secara sosial politik dan ekonomi, ini membebani masyarakat Riau. Masyarakat Riau menanggung akibat-akibat paling berat, antara lain berupa; *Pertama*, Riau dijadikan sebagai basis militer, dengan segala konsekuensi sosial-budayanya. *Kedua*, ekonomi rakyat Riau runtuh karena kebijakan deideologisasi, pembatasan-pembatasan zona ekonomi perairan (terutama di Pesisir dan pulau-pulau). *Ketiga*, terpecah belahnya hubungan kultural antara Riau dengan saudara dan kerabatnya di tanah semenanjung Malaya (Malaysia dan Singapura). (Mundung, tt: 1). Rakyat Riau juga dirisaukan dengan lahirnya UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah, yang memperlihatkan sikap setengah hati pemerintah pusat dalam memberikan otonomi daerah. Hal ini antara lain terlihat dari Kepmendagri No. 240 Tahun 1980 yang mengatur tentang Struktur Organisasi Pemerintahan Propinsi, di bawah sekwilda yang terdiri dari asisten I, II dan III, namun Kepala Kanwil sebagai “perpanjangan tangan Pusat di Daerah”, berkoordinasi langsung dengan Departemen. Hal ini mengakibatkan wewenang antara asisten Gubernur dan Kanwil menjadi tumpang tindih. Keputusan ini terkesan menempatkan Sekwilda hanya sebagai “Tata Usaha”. Tumpang tindihnya wewenang antara Pusat dan Daerah ini mengakibatkan laju pembangunan daerah terhambat, karena pelaksanaan pembangunan dan anggaran pembangunannya diharuskan berkoordinasi dengan Kanwil terlebih dahulu. UU No 5 Tahun 1974 beserta Peraturan Pemerintah dan Keputusan-

keputusan lain yang mengiringinya, telah menggusur tatanan pemerintahan tradisional Melayu “Tali Berpilin Tiga” (yang menyeimbangkan kekuasaan antara pemerintah, ulama, dan adat/cendikiawan); melucuti hak komunal atas hutan-hutan (hak ulayat), dan menjadi titik balik (*turning point*) peminggiran masyarakat lokal (*indigenous people*) secara politik, ekonomi, dan budaya di tanah tumpah darahnya sendiri. (Mundung, tt: 2)

Yang paling membuat jengkel masyarakat Riau kepada pemerintah pusat Jakarta adalah pengangkatan kembali Imam Munandar sebagai Gubernur Riau, padahal hasil dari pemungutan suara para anggota DPRD Ismail Suko unggul dengan 19 suara, sementara Imam Munandar hanya mendapat 17 suara. Tetapi pemerintah pusat memveto pilihan masyarakat Riau tersebut dengan menetapkan Imam Munandar sebagai Gubernur. Dalam pandangan masyarakat Riau, Munandar adalah orang Jawa yang congkak, mempunyai reputasi sebagai orang yang tidak menghormati adat dan kebudayaan setempat. Tindakannya mengabadikan tapak kakinya di dasar beton monumen pahlawan Riau, dilihat masyarakat setempat sebagai perlambang pelecehan nilai setempat oleh orang luar, dan bentuk penjajahan orang Jawa atas orang Riau. Mesti belakangan, setelah Munandar tidak lagi berkuasa, bekas jejak kaki Munandar kemudian dihapus, tetapi kenangannya tidak hilang dalam benak masyarakat Riau. Kenangan yang tidak menyenangkan tahun 1985 itu, kembali terulang dua tahun kemudian, dimana menyusul meninggalnya Imam Munandar sebelum masa jabatannya berakhir, pemerintah pusat menunjuk Atar Sibero (Dirjen PUOD) sebagai pejabat Gubernur Riau. Pengangkatan Atar Sibero oleh Soeharto ini menyalahi konstitusi karena berdasarkan undang-undang yang berhak menggantikan posisi Gubernur apabila berhalangan tetap adalah wakilnya. Saat itu posisi Wakil Gubernur dijabat putra daerah, yang saat itu juga adalah Ketua DPD Golkar Riau, Drs. H. Baharudin Yusuf. (*Dokumentasi KRR II*, 29 Januari s/d 2 Februari 2000)

Selain masalah politik yang pahit, masalah minyak merupakan salah satu isu sentral di kalangan masyarakat Riau. Di samping jumlah keuntungan yang diberikan kepada masyarakat Riau sangat kecil,

eksploitasi alam Riau telah menghancurkan struktur adat masyarakat adat Riau, dan juga berbagai bentuk penyerobotan tanah yang semena-mena. Al-Azhar (1999) mencatat bahwa penduduk asli Riau dua kali mengalami musibah. Pertama, ketika terjadi perampasan tanah milik penduduk Sakai oleh Caltex. Untuk mengambil tanah milik warga Sakai dan orang Melayu tersebut Caltex menggunakan aparat keamanan, birokrasi dan berbagai aparat represif lainnya. Kemudian musibah kedua terjadi pada tahun 1970, dimana saat itu pemerintah memberikan Hak Pengelolaan Hutan (HPH) kepada 66 perusahaan konglomerat yang meliputi 6,6 juta hektar dari 9,2 juta hektar hutan yang berada di Riau sehingga masyarakat suku Sakai, sekali lagi kehilangan hak-haknya. Ini yang disebut Al-Azhar sebagai *Sakai Cleansing* (pemberangusan atau pembersihan suku Sakai).

Di luar masalah minyak, kebijakan pemerintah pusat di sektor perkebunan juga terasa sangat tidak adil. Sejak tahun 1976, kebijakan di sektor perkebunan secara nasional telah meligitimasi perampasan tanah masyarakat. Pada tahun 1988, Gubernur Riau memberikan izin pemanfaatan hutan seluas 10.000 hektar dengan cara berkolusi pemerintah pusat melalui Kanwil Kehutanan dengan PT ADEI sehingga luas wilayah yang mendapat HPH bertambah menjadi 15.800 hektar. Kemudian bergerak kepada Menteri Pertanian sehingga diberikan izin seluas 18.440 hektar sehingga luasnya menjadi 34.240 hektar yang di dalamnya terdapat pemukiman penduduk Desa Kecamatan Tambusai. Belum puas dengan kolusi yang telah dilakukan maka Menteri Kehutanan memberikan tambahan lagi 7.510 hektar sehingga luasnya menjadi 41.750 hektar. Masih juga puas, Menteri Kehutanan memberikan tambahan seluas 15.526 hektar di daerah Sam Sam dan Penaso. Klimaks penjarahan ini, pemerintah memperkuat kepemilikan PT ADEI oleh badan pertanahan nasional dengan surat keputusan kepala BPN nomor 2/HGU/1990 seluas 15.526 hektar. (*Dokumentasi KRR II*, 29 Januari s/d 2 Februari 2000)

Perusakan hutan Riau oleh pemerintah pusat masih terus berlanjut. Pada tahun 1992, sedikitnya 25.000 dari 120.000 hektar hutan kawasan konservasi Taman Buru (*Game Reserve*) dan Kerumutan yang terletak di Kabupaten Kampar dan Indragiri Hulu, Riau, dibabat 300 penebang liar.

Diduga penjarahan hutan konservasi yang telah menghasilkan log (kayu bulat) ratusan ribu meter kubik ini dimodali oleh perusahaan tertentu, diantaranya PT SM dan MKM dari Pekanbaru. (Kompas, 22 Juni 1992) Kebijakan atas perlindungan penuh kepada konglomerat dan sama sekali tidak berpihak kepada masyarakat dilakukan lagi oleh Pemerintah pusat pada tahun 1996, dengan cara memberikan HPH kepada PT Musimas atas lahan seluas 60.000 hektar milik masyarakat Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Kampar, sekarang Kabupaten Pelalawan (*Dokumentasi KBH Riau*, 2003)

Serangkaian eksploitasi dan penghancuran alam terus berlangsung di Riau, dan berbanding terbalik dengan kondisi masyarakat Riau yang semakin memprihatinkan, karena kebijakan pemerintah pusat yang tidak adil; tingkat pendidikan yang sangat rendah, kelaparan, dan gizi buruk terus meningkat. Menurut sensus tahun 2004, Riau masuk 13 besar termiskin secara nasional. Penduduk miskin di Riau tersebar di pedesaan mencapai 18,79 persen, dan kota 7,40 persen. Untuk pendidikan, kondisi pendidikan keluarga miskin sebesar 51 persen merupakan keluarga yang tamat SD, 39 persen tamat SLTP, dan 11 persen tamat SMA. Untuk aspek kesehatan, angka kematian bayi perseribu pada tahun 2002 mencapai 36,9 persen. Kemudian 58,9 persen merupakan penduduk tanpa akses terhadap air bersih. Akar penyebab kemiskinan di Riau yaitu tingginya tindak KKN, kebijakan yang tidak berpihak pada masyarakat miskin, faktor sosial, ekonomi, politik, serta program pengembangan masyarakat (Community Development/CD) swasta yang tidak menyentuh akar persoalan kemiskinan. (Riau Mandiri, 6 September 2004) Ini sangat ironis, karena pada tahun yang sama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Purnomo Yusgiantoro sendiri telah menyatakan, bahwa produksi minyak Riau mencapai 195,4 juta barel selama periode 2004. Jumlah ini merupakan angka tertinggi dibandingkan daerah minyak lain yang berada di Sumatera.

Terhadap berbagai tindak kejahatan dan ketidakadilan yang ada, bukannya tidak ada perlawanan dari masyarakat setempat. Berbagai upaya melawan itu tetap ada, meski bersifat sporadis dan dalam skala yang kecil-kecil. Tetapi karena merasa tak pernah dihiraukan oleh pemerintah pusat,

sementara pada saat yang sama segala Sumber Daya Alam telah dieksploitasi, dihancurkan dan dikuras habis-habisan oleh pemerintah Jakarta, akhirnya masyarakat Riau memilih untuk mengambil jalan sendiri. Puncak dari segala kemarahan rakyat Riau berujung pada dideklarasikannya 'Riau Berdaulat', pada hari Senin 15 Maret 1999, oleh Prof. Tabrani Rab. Disaksikan sekitar 50 mahasiswa dari beberapa Perguruan Tinggi di Pekanbaru. Inti deklarasi itu adalah keinginan menentukan nasib sendiri karena merasa tidak puas dengan pemerintah RI yang selama ini tidak memperhatikan nasib masyarakat dan kebudayaan Riau. (*Koran Riau Pos*, 16 Maret 1999).

Meski kemarahan masyarakat Riaug sudah demikian tinggi, pemerintah Indonesia di Jakarta tampaknya tidak terlalu ambil peduli, bahkan terkesan meremehkan masyarakat Riau. Pada tahun 2000 Pemerintah Indonesia, melalui Presiden Wahid mengelak pernah mengatakan akan memberikan 75 persen sumber daya alam Riau kepada masyarakat di daerah itu, dan 25 persen sisanya diberikan kepada pusat. Ungkapan presiden Wahid ini memantik reaksi keras dari rakyat Riau. Padahal pada Sabtu, 29 April 2000, Pemerintah Indonesia melalui presiden Wahid pernah menjanjikan bersedia memberi garansi untuk mewujudkan hasrat masyarakat Riau mengelola CPP Blok. (*Kompas*, 2 Mei 2000) Masyarakat Riau pun tidak tinggal diam, berbagai upaya perlawanan terus mereka lakukan. Pada tanggal 5 Agustus 2001, diadakan pertemuan akbar masyarakat Riau untuk rebut CPP Block (Aliansi Riau Untuk Kuasai [ARUK] CPP Block) yang menghasilkan beberapa manifesto politik antara lain: *pertama* CPP harus menjadi milik masyarakat Riau. Keputusan ini sudah menjadi komitmen bersama masyarakat dan rakyat sebagai penegak marwah dan martabat masyarakat Riau. *Kedua* Keppres yang berkaitan dengan perpanjangan kontrak blok CPP harus ditolak karena tidak memasukkan aspirasi masyarakat Riau khususnya tentang dana kompensasi dan keterlibatan SDM tempatan. Perpanjangan dapat diterima bila mampu mengakomodir aspirasi masyarakat tersebut. *Ketiga* bila kedua tuntutan di atas tidak diterima, maka rapat akbar masyarakat Riau mengambil kesimpulan bahwa pengelolaan blok CPP harus diblokir sambil bernegosiasi dengan pemerintah pusat dan pihak-pihak terkait. Batas

peninjauan ulang keppres adalah 3 x 24 jam dari tanggal 4 agustus 2001. *Keempat* proses pemblokiran blok CPP dilakukan dengan membentuk aliansi dimana dalam pembentukan aliansi terakomodir semua komponen masyarakat. Pembentukan aliansi dikordinir oleh Al Azhar. *Kelima* aliansi harus sudah terbentuk sebelum tanggal 8 agustus 2001 sedangkan proses dan mekanisme gerakan sudah harus ditentukan sebelum tanggal 9 agustus 2001. (*Dokumentasi KRR II*, 29 Januari s/d 2 Februari 2000)

Yang juga penting untuk dicatat adalah bahwa pada akhir Januari 2000, masyarakat Riau menyelenggarakan Kongres Rakyat Riau pada 29-31 Januari 2000. Mereka kembali mengangkat isu utama 'Riau Berdaulat' yang merupakan kata lain dari "Riau Merdeka". Peserta Kongres diminta untuk menyatakan pendapatnya mengenai posisi Riau terhadap Republik Indonesia. Berdasarkan hasil keputusan sidang pleno V Kongres Rakyat Riau – II (KRR-II) ditetapkan bahwa opsi yang mendapat dukungan terbesar dari peserta Kongres adalah opsi "MERDEKA" secara damai. Secara rinci hasil perolehan suara pada sidang pleno tersebut adalah sebagai berikut; Opsi Otonomi (199 Suara), Opsi Federal (146 Suara), Opsi Merdeka (270 Suara), Abstain 8 Suara. Jumlah keseluruhan 623 Suara. Keputusan KRR, visi yang diinginkan KRR adalah, mewujudkan Riau sebagai negeri yang bermartabat, berdaulat, sejahtera, cerdas dan berperan dalam membangun masyarakat Riau yang lebih beradab, demokrasi, adil dan makmur. Sedang misinya adalah, memajukan marwah masyarakat Riau yang berkualitas dengan peningkatan dan pemberdayaan sendi-sendi kehidupan sosial politik, sosial ekonomi dan sosial budaya yang berpihak kepada rakyat Riau. Dalam Kongres tersebut terdapat sejumlah rekomendasi penting, diantaranya adalah agar, PT. Torus Ganda dan Tor Ganda, harus "keluar" dari Riau. Kongres juga mendesak Pemerintah Riau dan DPRD untuk merealisasikan pemblokiran hasil Minyak Riau. Kongres juga menuntut penghapusan sistem *Otorita Batam* dan mengembalikannya kepada kedaulatan Pemerintah Riau. Yang lebih tegas lagi adalah mereka menuntut agar seluruh Keputusan Pemerintah Pusat tentang Investasi di Riau dikembalikan ke Riau, dan bagi hasil minyak Riau 100 persen untuk masyarakat Riau.

Meski tidak sedramatis perlawanan yang ditunjukkan masyarakat Aceh, apa yang terjadi di Riau sesungguhnya juga menggambarkan problem yang belum selesai bagi politik integrasi nasional yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Dan jika dilihat secara empirik, tampaknya problem utama dari terjadinya integrasi nasional itu berada pada dimensi vertikal, yaitu menyangkut hubungan politik, ekonomi, dan tata hukum pemerintahan antara pemerintah Jakarta dengan elite masyarakat lokal Riau. Meski demikian pada dimensi horisontal (yang menyangkut aspek kultur, identitas etnik, agama, hubungan kekerabatan setempat) juga memiliki problem yang cukup mengganjal. Ketersinggungan masyarakat setempat akibat perilaku elite yang didrop dari Jawa yang tidak menghargai adat istiadat setempat (bahkan sangat melecehkan), jelas merupakan aspek yang mengganggu dan menghambat terjadinya integrasi nasional dalam dimensi horisontal. Rusaknya struktur budaya dan kepercayaan (religiositas) masyarakat setempat akibat diusir dari tanah tumpah darahnya (yang diserobot kekuasaan Jakarta), juga mengacaukan kemungkinan bagi terwujudnya integrasi nasional (dalam dua dimensi sekaligus, vertikal dan horisontal).

Meski demikian, di dalam perspektif horisontal ini ada perkembangan baru dalam proses integrasi nasional di dalam masyarakat Riau, khususnya Kepulauan Riau. Yaitu, bersamaan dengan kebijakan desentralisasi yang pasca tahun 2004 ini begitu marak dibicarakan, substansi dari pendidikan sendiri masihlah sangat sentralistis. Akibatnya, seperti yang ditunjukkan Faucher (2007), generasi muda di Riau (khususnya Kepulauan Riau)—akibat penetrasi media massa yang begitu massif—justru menemukan identitasnya di Jakarta. Ini jelas menimbulkan satu bentuk kesenjangan horisontal, dimana, sementara generasi tua berusaha mempertahankan nilai-nilai kebudayaan lama generasi muda justru mencari identitasnya yang jauh dari lokalitasnya sendiri. Faucher mengatakan:

An interesting and often ignored aspect of decentralization is that school curriculum is still to a large extent focussed on the unity of the nation state. Together with education the recent penetration of Indonesian mass media in Kepri invited young people in Tanjungpinang in search for a comfortable and accessible modernity to

turn to Jakarta. The irony is that, whereas the older generation tried to revive, invent and rephrase notions of Malayness which served their interests in the framework of regional autonomy, the younger generation recently discovered Jakarta as a source of identification. (Faucher, 2007: 456-457)<sup>24</sup>

#### 4. C. “Andaikan Saya Manusia Merdeka”

Wacana tandingan atas wacana nasionalisme Indonesia yang dibuat oleh Orde Baru, juga muncul di kalangan masyarakat Timor Timur. Pada tahun 1992, muncul sebuah tulisan yang disebarluaskan melalui jaringan surat elektronik yang menggambarkan kegelisahan, kekecewaan juga kemarahan penulisnya (yang mungkin karena alasan keamanan pada saat itu, disebut Anonim), berjudul “Andaikan Saya Manusia Merdeka”<sup>25</sup>. Menarik sekali, penulis memulai tulisannya dengan sebuah cerita yang khas yang menggambarkan suasana ‘kampung Kristiani’, seolah hendak mengabarkan sesuatu yang memiliki makna religius sangat dalam. Dikatakan:

Lonceng gereja berbunyi di seluruh Maubere. Di Setiap jalan kota bendera dan rumbai-rumbai berwarna-warna dipasang. Gedung kantor gubernur dan pos militer temboknya dicat, dan berulang-ulang dibersihkan. Halaman rumah-rumah penduduk diharuskan memasang bendera Merah putih. Terlihat kesibukan oleh ibu-ibu dharma wanita menyiapkan perayaan. Ada juga yang bikin panggung terbuka untuk

<sup>24</sup> Salah satu aspek yang menarik tetapi seringkali diabaikan dari desentralisasi adalah bahwa kurikulum sekolah masih sangat terfokus pada kesatuan negara kebangsaan. Bersama pendidikan, penetrasi media massa Indonesia baru-baru ini di Kepri mengundang kaum muda di Tanjungpinang berpaling ke Jakarta untuk mencari suatu modernitas yang nyaman dan bisa diakses. Ironisnya, juga generasi yang lebih tua berusaha menghidupkan kembali, menciptakan, dan merumuskan kembali gagasan-gagasan tentang kemelayuan yang melayani kepentingan-kepentingan mereka dalam kerangka otonomi daerah, generasi yang lebih muda baru-baru ini menemukan Jakarta sebagai salah satu sumber identifikasi.

<sup>25</sup> Sumber: David Bouchier & Vedi R. Hadiz, *Pemikiran Sosial dan Politik Indonesia Periode 1965-1999*, Jakarta: Pt. Pustaka Utama Grafiti, 2006. Hal. 352-358. Dalam pengantar untuk tulisan ini, Bouchier dan Hadiz menulis: Pada 1913 seorang nasionalis Indonesia Soewardi Soeryaningrat membuat skandal ketika artikelnya yang berjudul “Seandainya saya seorang Belanda” muncul dalam surat kabar berbahasa Belanda *De Express*. Artikel yang terkenal itu memanfaatkan perasaan seorang nasionalis Belanda menjelang seabad kemerdekaan Belanda dari kekuasaan Napoleonik untuk menunjukkan bahwa rakyat Indonesia juga memiliki cita-cita yang sah untuk meraih kemerdekaan. Dalam dokumen yang disebarluaskan melalui jaringan surat elektronik pada 1992 ini, seorang nasionalis Timor Timur yang anonim dengan sengaja meniru taktik yang sama, dan menggunakan banyak bahasa yang sama, untuk mengimbau orang Indonesia agar mengakui cita-cita rakyat Timor timur. Versi bahasa Inggris yang sudah diringkas dari naskah berbahasa Indonesia pertama kali muncul dalam *Inside Indonesia*. (Bouchier & Hadiz, 2006: 352)

pertunjukan musik, tari dan drama pada malam hari. Di siang harinya ada lomba olah raga dari tingkat desa sampai kota dari bermacam-macam jenis olahraga, di mana pemenangnya berhak mendapatkan hadiah. Seru! Dan ramai sekali.

Setelah itu penulis melanjutkan kisahnya dengan mengacu pada *'sebuah laporan yang ditulis surat kabar'* dan *'lembaran yang ditulis ahli Belanda maupun beberapa akademisi Australia'* sebagai bahan informasi awal untuk artikelnya tersebut. Sementara isinya adalah berupa informasi mengenai *'perayaan pembebasan Indonesia Merdeka'*, yang sebelumnya telah *'dijajah kolonialis Belanda selama 3,5 abad dan diteruskan oleh penjajah Jepang selama 3,5 tahun'* yang semua itu memiliki pengaruh yang pahit dan *'sulit dilupakan oleh bangsa Indonesia'* karena kekejaman dan perampasan harta rakyat' yang dilakukan oleh penjajahnya. Dengan ungkapan ini, penulis tampaknya hendak memberi kesan kepada setiap pembacanya tentang *'jauhnya jarak'* atau *'jurang pemisah'* antara yang disebut sebagai *'Indonesia'* dengan si penulis yang *'orang Timor Timur'*. Simak pernyataan berikut:

Menurut laporan yang ditulis di surat kabar, kesibukan itu semua dilangsungkan untuk menyambut perayaan pembebasan Indonesia merdeka. Bulan Agustus tepatnya tanggal 17, bangsa Indonesia merdeka menjadi negara republik kesatuan.

Menurut lembaran sejarah yang ditulis oleh ahli dari Belanda maupun beberapa akademisi dari Australia, bangsa Indonesia pernah dijajah oleh kolonialis Belanda selama 3,5 abad dan diteruskan oleh penjajahan Jepang selama 3,5 tahun. Praktek penjajahan yang sulit dilupakan oleh bangsa Indonesia, mulai dari tindak kekejaman terhadap rakyat Indonesia maupun perampasan harta rakyat....

Selanjutnya penulis memperkuat kesan keberjarakan dirinya dengan bangsa lain yaitu *'orang-orang Indonesia nasionalis'*, meski dirinya juga sama dan setara dengan bangsa asing itu dalam hal mencintai tanah airnya. Ia juga menjajarkan dirinya dengan orang Indonesia dalam hal sama-sama ingin menjadi *'seorang yang merdeka'* dalam arti yang sesungguhnya, tidak dalam retorika saja:

Seperti banyak orang-orang Indonesia nasionalis yang mencintai tanah airnya, saya pun mencintai tanah air saya bahkan lebih daripada yang

terungkap dalam sebuah kata-kata semata.....Saya ingin menjadi seorang merdeka, bukan nama tapi makna dari arti sebuah kemerdekaan bagi manusia yang tidak bisa dipisahkan dari negara kesatuan Indonesia, yang bebas dari setiap penindasan bangsa asing.

Namun semua yang dirasakan penulis artikel tersebut adalah suatu kontradiksi, dimana bangsanya, yaitu 'bangsa Timor Timur' selama ini disuruh menyaksikan bahkan dipaksa ikut terlibat pada perayaan kemerdekaan bangsa lain, yang selama justru menjajahnya, merampasnya, dan menjadikan bangsanya tersebut berada dalam kemiskinan yang malang. Bangsanya disuruh merayakan kebahagiaan bangsa lain, yang menjadi penjajah bangsanya, bangsa Timor Timur. Dan ini adalah satu tindakan keji, tidak senonoh.:

Menurut pendapat saya, ada suatu yang tidak pada tempatnya. Suatu yang tidak senonoh jika kita mengharuskan pribumi Maubere itu mengikuti pesta-pesta perayaan kemerdekaan kita. Sebab sementara kita merayakan kemerdekaan kaki kita menginjak kemerdekaan orang lain dan menduduki daerah orang lain. Tidakkah terasa oleh kita bahwa makhluk-makhluk yang malang ini juga sedang merindukan saat seperti ini, kapan mereka seperti kita, akan mampu merayakan kemerdekaan mereka?

Jika peringatan itu merupakan pernyataan kebahagiaan bangsa Indonesia, tidaklah bijaksana bahwa perayaan kemerdekaan itu harus dirayakan di negeri yang terjajah.

Dihadapkan pada kenyataan pahit itu, penulis justru memperkeras dan mempertajam bahkan mempertentangkan dua nasionalisme yang berbeda: rakyat Maubere yang terjajah *versus* kolonialisme Indonesia. Dan ia sangat senang bahwa dirinya 'bukanlah orang merdeka dan bangsa Indonesia':

...dalam masa sekarang ini rakyat Maubere sedang giat mengorganisasikan diri mereka, masih terluka sebab menerima konsekuensi dari kesadaran mereka, berdasarkan taktik maka tidak pantas memberi contoh tentang bagaimana seharusnya merayakan kemerdekaan mereka.

Apabila bulan Agustus tahun ini berlalu, kolonialisme Indonesia telah melaksanakan suatu kebijaksanaan yang tidak bertanggungjawab.

Tetapi saya bukan seorang yang merdeka, saya hanya seorang pribumi jajahan dari bumi Timor Timur, seorang yang didera hukum kolonialisme Indonesia tiap hari,

Syukurlah saya bukanlah orang merdeka dan bangsa Indonesia.

Penulis juga menegaskan bahwa dirinya, sebagai ‘orang Maubere’ sebenarnya adalah bangsa yang telah merdeka pada tanggal 7 Oktober 1975, dimana saat itu bangsa Timor Timur telah memiliki pemerintahan sendiri dengan ibukota di Dili. Tetapi kemudian kemerdekaannya dirampas oleh pemerintah Indonesia pada 15 Juli 1976. Sejak saat itulah bangsa Timor Timur ditindas, dibunuh, diperlakukan secara tidak manusiawi, sepadan dengan ketika bangsa Indonesia diperlakukan demikian oleh penjajah Belanda-nya. Hartanya dikuras, nyawanya dirampas dan kehidupannya diteror sepanjang waktu:

Kami rakyat Maubere telah merdeka berbentuk negara Republik Demokrasi Timor Timur pada tanggal 7 Oktober 1975 telah menjalankan roda pemerintahan berarti rakyat Timor merdeka penuh dari kolonialis asing dengan ibukota di Dili. Tetapi tiba-tiba tanggal 15 Juli 1976 Timor Timur diklaim menjadi bagian dari daerah Indonesia tanpa mengindahkan kemerdekaan dari kedaulatan rakyat Timor Timur.

Jadi sangat sulit bagi saya untuk percaya pada sebuah pemerintahan yang hanya dilandasi slogan-slogan menifestasi yang bagaimana pun indahya sampai sakral dikatakannya tanpa pertimbangan nurani kemanusiaan dan keadilan serta hak hidup bangsa lain.

Saya sadar dan rakyat di Maubere pun telah mengenal siapa pemerintahan Indonesia itu sebenarnya. Tak ada bedanya dengan kolonialis dunia lainnya. Militer Indonesia pun tangannya menumpahkan darah di bumi Maubere. Kalau Belanda menjajah Indonesia menjagal manusia Indonesia lewat JP Coen, Daendels, sampai Westerling memakan korban nyawa, sekarang militer Indonesia pun tidak kurang-kurangnya membunuh rakyat Maubere.

....diperkirakan 200.000 rakyat Timor Timur telah terbunuh oleh tentara pendudukan Indonesia selama 16 tahun menguasai Timor Timur. tindak teror setiap saat dan jam terus dijalankan seolah kami binatang yang membahayakan bagi sebuah negara besar seperti Indonesia ini.

Hal yang kemudian menjadi penekanan penting penulis teks tersebut adalah bahwa, Indonesia yang mendasarkan dirinya pada UUD 1945 dan falsafah Pancasila, yang semestinya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, pada kenyataannya sangatlah kejam dan tidak mengenal pri kemanusiaan. Ia menyamakan bangsa Indonesia sebagai ‘gerombolan di lautan Timor’, ‘tidak pernah simpati pada pembebasan rakyat Timor Timur yang sejati’, ‘mempraktekkan penindasan pada bangsa lain!:

Jelaslah bagi saya sekarang ini bangsa yang memuliakan kemerdekaannya lewat UUD 1945 dan falsafah Pancasila tak lebih dari gerombolan perompak di lautan Timor. Sejak awal perjuangan kemerdekaan sewaktu terjadi perundingan penentuan hari depan bangsa kami, pemerintah Indonesia tidak pernah simpati pada pembebasan rakyat Timor Timur yang sejati.

Pemerintah Indonesia sebagai budak bangsa Belanda memang sekarang menjadi budak yang mewarisi sifat tuannya. Sampai dia sendiri lupa bahwa bangunan nasionalisme Indonesia itu pun lahir dari rekayasa politik etis Belanda. Bagaimana bisa seorang yang pernah luka oleh sebuah penindasan sekarang mempraktekkan penindasan pada bangsa lain!

Apakah semangat nasionalisme bangsa Indonesia itu tidak pernah lahir atas landasan pertimbangan keadilan dan kemanusiaan? Rakyat kami terus tercengang ketika pemerintah Indonesia terus mengangkut kekayaan minyak bumi dan cadangan gas alam yang semuanya mempunyai nilai investasi sebesar US\$ 261,72 miliar diangkut para perampok Indonesia dan kapitalis barat lainnya. Padahal tiap hari rakyat Maubere hanya menerima imbalan hardikan dan pembunuhan dan tuduhan subversif sesuai dengan peraturan pemerintah Indonesia yang secara jelas tak pernah dirundingkan dengan rakyat kami.

Apakah saya terus meyakini keadilan yang terus dipaksakan oleh pemerintah Indonesia sekarang ini? Kami dibuat miskin dan dirampas hak hidup kami, tetapi masih diharuskan mengatakan Indonesia negara republik yang berkeadilan dan berprikemanusiaan.

Dari teks ini dapat diambil beberapa pikiran pokok, khususnya berkaitan dengan nasionalisme Indonesia. *Pertama*, bahwa tidak ada nasionalisme Indonesia di kalangan masyarakat Timor Timur. Begitu pula sejarah integrasi dengan Indonesia tidak pernah diakui. *Kedua*, Indonesia digambarkan sebagai telah merebut kemerdekaan Timor Timur yang sebenarnya telah merdeka pada tahun 1975. *Ketiga*, kehadiran Indonesia di Timor Timur adalah sejarah kelam bagi bangsa Timor Timur, karena sejak itulah penindasan dan perampasan oleh tentara Indonesia terjadi. Indonesia di Timor Timur dipandang sebagai kolonialis, imperialis bahkan 'prampok di laut Timor' yang telah menumpahkan darah masyarakat Timor Timur, dan menyebabkan penderitaan yang panjang.

Jika ditinjau dari perspektif Michel Foucault, maka akan tampak bahwa di dalam teks yang diproduksi masyarakat Timor Timur tersebut sebenarnya

sedang berlangsung proses *counter* wacana (atau bisa juga dikatakan sebagai perebutan wacana) terhadap apa-apa yang sudah diproduksi oleh Orde Baru, khususnya yang berkaitan dengan pemaknaan nasionalisme, ke-Indonesiaan dan juga ‘ke-Timor Timur-an’. Bila diurai lebih lanjut menurut konsep Foucault, maka setidaknya ada 6 (enam) dimensi konseptual yang terlibat dalam perebutan wacana tersebut, yakni; *power, knowledge, games of truth, discourse, counter history, episteme*. Pada dimensi ‘power’ misalnya, tampak terjadi proses ‘legitimasi’ *versus* ‘deligitimasi’ kekuasaan. Ketika Orde Baru berusaha menjelaskan keterlibatannya di Timor Timur sebagai upaya menjaga integritas NKRI, untuk menjaga stabilitas, yang antara lain dipraktikkan dengan menggelar Operasi Militer—salah satunya yang terkenal dengan sebutan ‘Operasi Seroja’—maka di dalam teks yang diproduksi oleh masyarakat Timor Timur tersebut, digambarkan bahwa yang terjadi hanyalah ‘...kolonialisme dan pembantaian’.

Demikian pula pada dimensi ‘knowledge’, sementara Orde Baru membangun wacana bahwa kehadirannya di panggung kekuasaan adalah untuk melakukan ‘Pembangunan nasional, Pembaharuan dan modernisasi masyarakat’, maka di dalam teks yang diproduksi oleh masyarakat Timor Timur digambarkan bahwa yang terjadi sesungguhnya adalah penumpahan darah rakyat Timor Timur oleh kolonialisme Indonesia: ‘...rakyat di Maubere telah mengenal siapa pemerintah Indonesia itu sebenarnya..tak ada bedanya dengan kolonialis di dunia lainnya...tangannya menumpahkan darah di bumi Maubere...’

Dalam konteks ini telah terjadi pula proses perebutan makna kebenaran (*games of truth*) di dalam teks tersebut. Hal itu tampak misalnya ketika Orde Baru mendefinisikan kehadiran dirinya di panggung kekuasaan adalah dalam rangka ‘...Melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, Demokrasi Pancasila, kepentingan rakyat di atas segalanya’, maka di dalam teks yang diproduksi masyarakat Timor Timur digambarkan, bahwa Indonesia (yang dipandang sebagai kolonialis) tak ubahnya ‘gerombolan perompak, dengan kata-kata: ‘...bangsa yang memuliakan kemerdekaannya lewat UUD 1945 dan falsafah Pancasila...tak lebih dari gerombolan perompak di lautan Timor..’

Pada dimensi ‘discourse’ Orde Baru telah membuat sejumlah kategori tertentu untuk menempatkan orang-orang atau sekelompok orang yang

dipandang melawan negara sebagai OPM (Organisasi Papua Merdeka), GPK (Gerakan Pengacau Keamanan), PKI (Partai Komunis Indonesia), GAM (Gerakan Aceh Merdeka), dan juga ‘gerakan separatis’. Semua kategori ini memiliki implikasi yang berat bagi pihak-pihak yang dianggap sebagai bagian di dalamnya. Di dalam teks yang diproduksi masyarakat Timor Timur kategori-kategori yang dibuat Orde Baru tersebut hanyalah upaya rezim Soeharto untuk memaksakan kekuasaan yang tidak adil dan tidak berprikemanusiaan di kalangan masyarakat Timor Timur. Hal itu antara lain tampak dalam kata-kata berikut: *‘apakah saya terus meyakini keadilan yang terus dipaksakan oleh pemerintah Indonesia sekarang ini? Kami dibuat miskin dan dirampas hak hidup kami, tetapi masih diharuskan mengatakan Indonesia negara republik yang berkeadilan dan berprikemanusiaan’*.

Tampak jelas pula bahwa di sini ada satu permainan perebutan makna kebenaran, *games of truth*, sekaligus juga perebutan pembacaan sejarah (*‘history’ versus ‘counter-history’*). Yaitu ketika Orde Baru sudah mengatakan bahwa bentuk ‘NKRI adalah final’ di mana termasuk di dalamnya Timor Timur, di dalam teks yang diproduksi masyarakat Timor Timur dikatakan bahwa, Timor Timur adalah negeri merdeka dan sudah berdaulat, namun kemudian datang Indonesia yang kemudian mengambil alih negeri tersebut dalam kekuasaannya. Dalam teks tersebut dikatakan: *‘...kami rakyat Maubere telah merdeka pada 7 Oktober 1975...tetapi tiba-tiba tanggal 15 Juli 1976 Timor Timur diklaim menjadi bagian dari Indonesia tanpa mengindahkan kemerdekaan dan kedaulatan rakyat Timor Timur*. Di sini tampak terjadi perebutan makna kebenaran, *games of truth*; bahwa tidak ada landasan historis dan konstitusional yang kuat bahwa Timor Timur adalah bagian dari Indonesia.

Sementara itu pada dimensi ‘Episteme’, tampak terjadi perebutan makna yang tajam. Ketika Orde Baru meletakkan landasan kenegaraan yang dibangunnya di atas asas kekeluargaan, teks yang diproduksi masyarakat Timor Timur justru mengatakan bahwa pemerintahan yang ditawarkan Orde Baru tidak memberikan jalan keluar apa pun bagi penderitaan masyarakat Timor Timur, yang terjadi justru sebaliknya, Orde Baru telah mengorbankan dan menindas masyarakat Timor Timur, persis seperti apa yang dilakukan kolonialisme

Belanda terhadap bangsa Indonesia. Dalam kata-kata teks tersebut: *'...saya jadi teringat hujatan tuan-tuan Belanda pada para budaknya bangsa Indonesia. Sekarang hujatan tuan Belanda itulah yang dipakai oleh si budak pemerintah Indonesia yang sekarang menjadi tuan kepada kami rakyat di Maubere..'* Jika dibuat suatu tabel perebutan makna tersebut, akan tampak sebagai berikut:

| FOUCAULT'S CONCEPTS | WACANA ORBA   | WACANA DI TIMOR TIMUR  |
|---------------------|---|--|
| Power               | Operasi Militer, Menjaga Integritas NKRI, stabilitas politik,   | '...kolonialisme Indonesia pembantaian   |
| Knowledge           | 'Pembangunan nasional, Pembaharuan dan modernisasi masyarakat'  | '...rakyat di Maubere telah mengenal siapa pemerintah Indonesia itu sebenarnya..tak ada bedanya dengan kolonialis di dunia lainnya...tangannya menumpahkan darah di bumi Maubere...  |
| Games of truth      | 'Melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, Demokrasi Pancasila, kepentingan rakyat di atas segalanya' | '...bangsa yang memuliakan kemerdekaannya lewat UUD 1945 dan falsafah Pancasila...tak lebih dari gerombolan perompak di lautan Timor..'  |
| Discourse           | 'OPM, GPK, PKI, GAM, Gerakan Separatis'   | 'apakah saya terus meyakini keadilan yang terus dipaksakan oleh pemerintah Indonesia sekarang ini? Kami dibuat miskin dan dirampas hak hidup kami, tetapi masih diharuskan mengatakan Indonesia negara republik yang berkeadilan dan berprikemanusiaan'. |
| Counter-history     | 'NKRI Final'  | "...kami rakyat Maubere telah merdeka pada 7 Oktober 1975...tetapi tiba-tiba tanggal 15 Juli 1976 Timor Timur diklaim menjadi bagian dari Indonesia tanpa mengindahkan kemerdekaan dan kedaulatan rakyat Timor Timur.                                    |
| Episteme            | '... massa mengambang, Negara kekeluargaan'   | '...saya jadi teringat hujatan tuan-tuan Belanda pada para budaknya bangsa Indonesia. Sekarang hujatan tuan Belanda itulah yang dipakai oleh si budak pemerintah Indonesia yang sekarang menjadi tuan kepada kami rakyat di Maubere..'                   |

Untuk memberi gambaran lebih utuh di balik nuansa 'kemarahan' dan 'kekecewaan' yang begitu mendalam di balik teks tersebut, adalah penting

untuk memahami latar belakang sejarah bangsa Timor Timor, yang dalam istilah Malinowski, bisa dianggap sebagai ‘konteks situasi’ dan ‘konteks budaya’ dari suatu teks (dalam Halliday & Hasan, 1992: 8). Secara historis Timor Timur adalah daerah yang kenyang dengan sejarah penjajahan. Portugis menguasai wilayah Timor dalam rentang waktu lebih dari tiga abad. Meski sempat direbut oleh Belanda dan Jepang, tetapi pada akhirnya daerah itu kembali berada di bawah kontrol Portugis. Ekspansi Portugis ke Timor dimulai sejak abad 16 untuk kepentingan ekonomi dan perdagangan. Saat itu Pelabuhan Malaka yang terletak di pantai barat semenanjung Melayu adalah kawasan Asia tenggara yang paling strategis, juga sekaligus menjadi pusat penyebaran agama Islam. Pelabuhan Malaka mengendalikan perdagangan sepanjang rute pulau rempah-rempah di Indonesia bagian timur menuju India dan Cina. Dalam posisi yang seperti ini, seperti ditulis Taylor (1998), Malaka lalu menjadi target utama paling strategis dari Portugis dalam perjuangan mereka demi Tuhan dan Mammon melawan keunggulan agama dan ekonomi Kekaisaran Ottoman di Asia. Portugis berhasil menaklukkan Malaka pada tahun 1511. Kemudian armada Portugis bergerak ke arah timur dengan tujuan membangun pabrik-pabrik di kepulauan rempah-rempah yang kaya dengan pusat pada pulau-pulau tertentu seperti Ambon dan Maluku.

Pendaratan Portugis pertama di kawasan Timor adalah di pulau Solor. Selama masa kekuasaan Portugis, berlangsunglah konsolidasi suatu kelompok yang mendominasi Timor abad ke-17 dan ke-18. Orang Belanda menyebut golongan ini dengan nama ‘Topasse’ atau ‘Portugis Hitam’.<sup>26</sup> Golongan ini kemudian pindah bersama Portugis ke Larantuka. Sesudah kepindahan ini, golongan Topasse ini mulai mengontrol jaringan dagang antara Solor, Larantuka dan Timor, khususnya perdagangan cendana. Dalam proses pengendalian jaringan ini, mereka mulai menetap di Timor. Menurut Taylor

---

<sup>26</sup> Mengutip Boxer (1960), Taylor menulis bahwa asal usul sebutan ini bisa jadi karena peran mereka sebagai penerjemah (dari kata Gujarat *tupasse* yang artinya penerjemah), atau bisa juga karena cara kelompok ini berpakaian yang selalu mengenakan topi (dari bahasa India *topee walas* artinya orang bertopi). Golongan Topasse ini pertama kali muncul dalam tulisan sejarah kolonial yang mengatakan golongan Topasse: ‘...sebagai ras campuran...keturunan tentara-tentara Portugis, pelaut dan pedagang dari Malaka dan Makao yang berkawin mawin dengan perempuan Solor’. (Taylor, 1998: 6)

(1998) titik balik sejarah Timor terjadi pada abad ke-17, karena pada masa itu Portugis menyerang Timor dengan kekuatan penuh, dalam rangka memperluas pengaruhnya. Mereka bergerak langsung menyerang kerajaan barat di Sonbai dan kerajaan pelindung mereka, Babali atau Wehale. Portugis melihat Wehale sebagai pusat politik dan agama di Timor. Akibatnya golongan Topasse melakukan migrasi besar-besaran ke Lifau (sekarang Oecusse) wilayah pantai sebelah utara. Dari wilayah ini mereka mempersiapkan kekuatan untuk menghadapi kekuatan yang akan menyerbu mereka, termasuk Belanda yang tengah mendekati Timor dari arah barat.

Tahun 1633, pasukan Belanda berhasil menaklukkan Portugis di Kupang, yang kemudian diikuti dengan pendaratan kekuatan militer secara besar-besaran tahun 1656. Belanda sekali lagi mempertegas kekuasaannya di bagian barat pulau. Pada tahun 1730, mereka memperluas pengaruh di kalangan suku-suku lokal dengan memberi dukungan perlawanan terhadap Topasse. Usaha ini memuncak dengan pendirian kembali benteng Kupang pada tahun 1746. Tidak seperti perseteruan sebelumnya, kampanye menentang Belanda tahun 1745 hanya memiliki pengaruh yang kecil. Pasukan Topasse kemudian kembali mendekati Portugis untuk meminta bantuan. Pada tahun 1749, mereka mengumumkan suatu serbuan gabungan atas wilayah yang dikuasai Belanda. Lalu terjadilah peperangan yang dikenal di Timor sebagai Perang Penfui. Pasukan Belanda berhasil mematahkan perlawanan. Setelah perang ini Belanda memperkuat pasukannya dalam skala besar di bagian barat pulau. Akhir dari Perang Penfui adalah ditetapkannya pembagian wilayah kekuasaan pulau Timor; Belanda di bagian barat, dan Portugis di bagian Timur.

Oleh karena Topasse sudah minta bantuan Portugis, maka ini mempertegas kehadiran Portugis di pulau tersebut, sekaligus berkurangnya kekuasaan Topasse. Sejak saat itu terbangunlah suatu hubungan saling hormat-menghormati antara pihak satu dengan pihak lainnya. Tidak ada upaya dari masing-masing pihak untuk memperluas pengaruh mereka melampaui pengaruh raja dan membiarkan masyarakat Timor hidup aman, relatif bebas dari gangguan. Orang-orang Timor pun secara efektif mampu memelihara kehidupan secara damai dan tenang. Menurut Taylor, masyarakat Timor adalah masyarakat

yang berhasil memelihara kehidupan sosialnya dengan ciri yang khas, yang berbeda dari masyarakat lain di kawasan Asia Tenggara. “Reproduksi kerja dan gagasan di semua tingkat kehidupan, baik itu ekonomi, politik, maupun ideologi, dijaga lewat sejumlah mekanisme yang rumit, yang bersatu di dalam sebuah sistem pertukaran,” tulis Taylor. (Taylor, 1998:9)

Dalam masa yang panjang Portugis menguasai Timor, dengan pola-pola tradisional agraria feodal yang bergantung pada irigasi. Kelas pemilik tanah berhasil menahan perkembangan industri manufaktur untuk mempertahankan kekuasaan politiknya. Dihadapkan pada kenyataan kekuatan Eropa lainnya, Portugis merasa perlu mendorong posisinya dengan membangun suatu penghisapan sistematis atas koloninya termasuk Timor. Timor selama ini tak lebih dari sebuah pos perdagangan. Penghisapan tersebut dilakukan dengan penggalian bahan-bahan mentah, penanaman tanaman perdagangan untuk ekspor, dan bersamaan dengan itu perlu dikembangkan pasar dalam negeri koloni. Konsekuensinya, terhadap koloninya di Asia dan Afrika, Portugis mengembangkan berbagai kebijakan yang tujuannya mengubah ekonomi subsisten menjadi sistem ekonomi tanaman perdagangan. Dengan mekanisme ini, kegiatan ekonomi lebih terintegrasi dengan sistem dunia. Khusus di Timor, fokus kebijakan awalnya adalah bagaimana kegiatan ekonomi subsisten itu bisa menghasilkan produksi yang lebih besar. Dalam pelaksanaannya digunakanlah tenaga kerja secara paksa untuk membangun infrastruktur ekonomi, untuk menanam tanaman ekspor dan untuk keperluan sistem perdagangan.

Antara tahun 1884 sampai tahun 1890, dilaksanakan suatu program pembangunan jalan dengan menggunakan tenaga kerja paksa. Tahun 1899, sebuah perusahaan berdiri dengan nama *Sociedade Agricola Patriae Trabalho* (SAPT)—Masyarakat, Tanah Air, Pertanian dan Pekerja. Perusahaan ini memasukkan penanaman kopi di Ermera, daerah barat laut. Sejak tahun 1908, pajak kepala diberlakukan bagi semua laki-laki berusia 18-60 tahun. Satu-satunya cara yang membuat pelaksanaan pajak itu berhasil adalah jika keluarga-keluarga petani menghasilkan dan membeli barang-barang untuk keperluan pasar. Itu berarti petani harus bekerja melampaui waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan barang keperluannya sendiri. Semua kebijakan ini lama-kelamaan

memicu kemarahan masyarakat Timor. Para raja kemudian bersatu di bawah kepemimpinan seorang *liurai* dari daerah selatan Manufahi (Same) yang bernama Dom Boaventura. Mereka lalu melakukan pemberontakan, yang berpuncak pada tahun 1910 sampai 1912. Portugis terpaksa mendatangkan pasukan dari Mozambique dan serdadu meriam dari Macau. Kekuatan Boaventura dikalahkan pada tahun 1912. Dalam perang tersebut, sejumlah 3000 orang Timor terbunuh, dan 4000 orang ditangkap. Taylor, 1998: 21)

Dengan padamnya pemberontakan tersebut, Portugis segera memasukkan kebijakan mereka yang bertujuan menghancurkan sistem politik masyarakat Timor yang bertumpu pada ikatan dan pertukaran kekeluargaan. Posisi *liurai* dihilangkan dengan cara menghapus kerajaan mereka. Koloni dipecah-pecah ke dalam unit-unit administratif, yang secara garis besar didasarkan pada wilayah *suco* (kepatihan). Ini berarti kuasa administratif telah dihibahkan pada unit-unit yang ada di bawah raja dalam hirarkhi masyarakat Timor. Kebijakan ini memperkuat posisi *suco*, meski pemilihan untuk menjadi administrator harus mendapat persetujuan Portugis. Menurut Taylor, dengan cara inilah Portugis berupaya mengganti sistem politik Timor dengan sesuatu yang memiliki struktur dan hirarkhi yang independen terhadap persekutuan berdasarkan kekerabatan. “Esensi penaklukan Portugis adalah penghancuran aspek terpenting dalam sistem sosial Timor yang reproduksinya selama ini berhasil menghambat pengaruh kuasa Portugis,” tegas Taylor (1998: 91)

Jepang juga pernah hadir dalam sejarah Timor. Saat berkecamuk Perang Pasifik, Jepang meyakini bahwa tentara sekutu akan menggunakan Timor sebagai satu basis militer mereka. Karena itu Jepang berusaha menguasai daerah ini dengan mengirimkan 20.000 tentara. 400 tentara Belanda dan Australia mendarat di Dili, untuk membendung serbuan Jepang, dengan dibantu oleh orang Timor. Ketika tentara Australia terdesak dan dievakuasi pada bulan Februari 1943, orang Timor tetap menjalankan pertempuran. Dalam pertempuran ini Jepang melakukan pembunuhan brutal. Daerah-daerah yang diketahui terdapat aktivitas Australia, dibakar dan keluarga yang terdapat di dalamnya dieksekusi. Saat Jepang takluk pada tahun 1945, kira-kira 60.000 orang Timor (atau 13 persen dari populasi) mati akibat perang. Sebagian besar

kota dan desa telah dihancurkan. Ketika Jepang pergi, Portugis kembali mengambil alih kendali atas daerah tersebut. Dan hingga beberapa tahun kemudian, Timor tidak menunjukkan perkembangan yang berarti. Portugis tetap menunjukkan praktik-praktik feodalisme. Mengutip Glenn (1960), Taylor mencatat apa yang terjadi di tengah masyarakat Timor di bawah Portugis: “Tenaga kerja paksa di bawah lecutan cambuk berlangsung sejak fajar hingga petang, dan penguasa Portugis...hidup dalam kesantunan dan kebrutalan seperti 350 tahun yang lalu”. (Taylor, 1998: 27)

#### **4.C.1. Persentuhan Timor Timur dengan Indonesia**

Tak ada penjelasan yang pasti, kapan persisnya Indonesia mulai terlibat dalam masalah Timor Timur. Tetapi dengan memahami konteks politik yang berkembang pada tahun-tahun 60-an itu, banyak penjelasan yang kira-kira bisa menjawab, kapan dan mengapa Indonesia pada akhirnya terlibat begitu jauh dalam masalah Timor Timur. Penjelasan mengenai hal itu antara lain diberikan oleh Taylor (1998), yang garis besarnya adalah sebagai berikut. Indonesia pasca Proklamasi Kemerdekaan 1945 menghadapi banyak sekali pemberontakan daerah, seperti gerakan Islam di Jawa dan Sumatera, juga dari kelompok Kristem di Maluku. Keadaan ini ditambah dengan upaya membangun rasa persatuan nasional untuk pembangunan politik dan ekonomi, telah menghabiskan banyak energi para politisi dari kelompok nasionalis, komunis dan militer yang memimpin kekuasaan negara pada pertengahan tahun 1960-an. Namun apa yang merekaanggapi kebanyakan hanya masalah-masalah sederhana yang muncul akibat ketimpangan regional. Mereka kurang memusatkan perhatian pada struktur yang mendasari regionalisme itu sendiri.

Ketika ketimpangan regional semakin memburuk, politik di pusat terpecah-pecah diantara elit politik. Dalam suasana konflik regional dan ideologis yang berkembang saat itu, Soekarno cenderung menggunakan retorika-retorika dan slogan antikolonialisme daripada membuat perencanaan ekonomi atau politik yang lebih relevan. Seakan hendak pergi dari konflik internal yang rumit Soekarno lalu berorientasi pada musuh luar, baik itu

Belanda, atau negara kolonial Malaysia, atau imperialisme Amerika, yang saat itu disebut Soekarno sebagai Nekolim (Neokolonialisme dan Imperialisme). Pada awal tahun 1960-an, kebijakan luar negeri Indonesia didominasi oleh sikap sloganistis yang menggambarkan bahwa pembentukan Malaysia (dari negara Sarawak, Sabah dan Malaya), yang dianggap sebagai boneka Amerika, yang tak dapat dipisahkan dari rencana Barat untuk mengguncang kedaulatan Indonesia. Atas semangat yang sama, Soekarno menekankan tentang pentingnya merebut wilayah Irian Barat, yang dianggap memang bagian tak terpisahkan dari Indonesia.<sup>27</sup>

Dalam iklim politik seperti itulah, spekulasi tentang sikap yang akan diambil oleh Indonesia terhadap Timor Timur muncul. Sikap itu awalnya menegaskan tentang tidak ada rencana apapun yang akan dilakukan Indonesia terhadap koloni Portugis tersebut. Seperti dinyatakan oleh Menteri Luar Negeri Soebandrio: 'Kami tidak punya tuntutan atas Timor Portugis, atau pun Borneo Utara dan wilayah lainnya di luar bekas jajahan Belanda'. (*Antara*, 2 Oktober 1962). Demikian pula terungkap dalam sebuah dokumen PBB tentang Timor Timur yang terbit 1962, menyatakan: 'Dari pihak Indonesia, pemerintahnya telah menyatakan bahwa mereka akan menjaga hubungan baik dengan Portugal dan tidak menuntut Timor Portugis, daerah yang tidak pernah menjadi bagian dari wilayah jajahan Belanda dan karenanya tidak sama statusnya dengan Irian Barat.' (*United Nations Document A/AC 108/L.13, 3 Desember 1962, paragraf 35*, dalam Taylor, 1998: 38).

Namun pernyataan yang bertentangan dengan yang dikatakan oleh Soebandrio juga muncul dari kalangan pemerintah Jakarta. Pada awal 1950-an,

---

<sup>27</sup> Bung Karno memahami wilayah Indonesia dari pandangan geopolitik. Dalam konteks itu, Bung Karno memaknai 'geopolitik' sebagai wilayah geografis suatu Negara yang sudah ditentukan secara alamiah. Dalam pidatonya pada Rapat BPUPKI pada 1 Juni 1945, Bung Karno mengatakan:

*"Menurut geopolitik, maka Indonesialah tanah air kita. Indonesia jang bulat, bukan Djawa sadja, bukan Sumatera sadja, atau Borneo sadja, atau Selebes sadja, atau Ambon sadja, atau Maluku sadja, tetapi segenap kepulauan yang ditundjuk oleh Allah swt, mendjadi satu kesatuan antara dua benua dan dua samudera, itulah tanah air kita! Kesinilah kita semua harus menudju: mendirikan suatu Nationale Staat, di atas kesatuan bumi Indonesia dari Ujung Sumatera sampai ke Irian. Saja yakin tidak ada satu golongan diantara tuan-tuan yang tidak mufakat, baik Islam maupun golongan yang dinamakan 'golongan kebangsaan'. Kesinilah kita harus menudju semuanja."* (dalam, Swantoro, 2002: 294)

Mohamad Yamin, Menteri Kehakiman dan Pendidikan, menyatakan bahwa Indonesia harus memasukkan wilayah bekas Hindia Belanda, Borneo Utara dan seluruh Timor Portugis dalam wilayahnya. (*Antara*, 1 Februari 1950, dalam Taylor, 1998: 38).<sup>28</sup> Selang beberapa tahun kemudian, sejalan dengan perubahan yang banyak terjadi baik di dalam internal Indonesia sendiri maupun lingkungan internasional, terjadi pula perubahan sikap Indonesia terhadap Timor Timur. Hal itu antara lain tampak dalam pernyataan, Ruslan Abdulgani, Wakil Ketua DPA, pada tahun 1961. Abdulgani menyatakan bahwa, ‘Mata dan hati Indonesia terarah ke Timor Portugis...tumbuhkan dalam hatimu dengan kebencian tidak hanya pada kolonialisme Portugis, tetapi pada seluruh kolonialisme yang masih hidup di tanah Asia dan Afrika.’ (Pidato Ruslan Abdulgani di depan Pertemuan Solidaritas Afro-Asia, Jakarta, 1961, dalam Taylor, 1998: 38)). Berikutnya, pada tahun 1963, Jendral Mokoginta, menyatakan sesuatu yang lebih khusus lagi: ‘Kalau rakyat Timor Timur Hari ini atau besok mulai melancarkan revolusi...kami akan mendukungnya...sesudah kemerdekaan tercapai, jika mereka tetap ingin merdeka, itu baik—kalau mereka ingin bergabung dengan Indonesia, kami akan membicarakannya.’ (wawancara dengan *Washington Post*, 10 Mei 1963, dalam Taylor, 1998: 38). Apa yang sesungguhnya terjadi, tampaknya sudah jauh lebih maju dari apa yang dikatakan para pejabat pemerintah Jakarta. Hal itu tampak misalnya, dalam sebuah laporan PBB 1962 tentang Timor Timur tercatat adanya ‘Biro Pembebasan Republik Timor’ di Jakarta. Sekitar bulan Mei-Juni 1963, biro tersebut menyatakan telah mendirikan sebuah pemerintahan dengan 12 menteri di Batugade, Timor Timur. Pernyataan itu meminta pengakuan dari pemerintah negara lainnya. Peristiwa ini bertepatan dengan laporan mengenai didirikannya markas militer di Timor Timur dengan seribu pasukan yang dikirim oleh Portugal.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Dalam catatan Simanjuntak, Mohamad Yamin adalah orang pertama yang dalam rapat Badan Penyelidik (29 Mei 1945 dan diulangi 31 Mei 1945) berbicara mengenai daerah negara yang batas-batasnya diilhami oleh ‘welingan testamen politik Gajah Mada’. Tanah tumpah darah bangsa Indonesia itu, menurut Yamin, meliputi juga Semenanjung Malaka seluruh Kalimantan termasuk Sarawak dan Brunei sekarang, seluruh Papua, di samping wilayah yang kita kenal sekarang sebagai bekas wilayah jajahan Hindia-Belanda. (Simanjuntak, 1994: 249)

<sup>29</sup> Munculnya gerakan yang disponsori Indonesia di awal tahun 1960an ini, menurut analisa Taylor (1998: 39), tampaknya berkaitan dengan peristiwa yang terjadi beberapa tahun sebelumnya di Timor Timur pada tahun 1959. Pada tahun itu, 14 pejabat militer Indonesia mendarat di pantai Timor

Perkembangan berikutnya menjadi semakin jelas ketika Jendral Soeharto mengambil alih kekuasaan Soekarno secara efektif pada 11 Maret 1966. Soeharto kemudian membangun sebuah rezim yang dinamakan Orde Baru, dengan ciri meningkatnya militerisasi dalam semua lingkungan ekonomi dan kehidupan sosial. Sistem politiknya sangat sentralistik yang dikendalikan oleh elit militer Jawa. Menjelang peristiwa 1965, isu politik luar negeri seperti Timor

---

Timor dan memohon suaka politik; mereka berasal dari Sulawesi Selatan, dan telah terlibat dalam sebuah pemberontakan tahun 1958 menentang pemerintah pusat. Pemerintah Portugis mengizinkan mereka untuk tinggal di Timor Timur. 10 di Baucau, 4 di daerah selatan Viqueque. Di daerah-daerah ini, khususnya di daerah Uatolari dan Uatocarabu, dikat Viqueque, orang Indonesia itu mulai membangun sekutu dengan kelompok-kelompok yang menentang pemerintah Portugis. Tampaknya tujuan mereka adalah persatuan Indonesia dengan Timor Portugis. Seperti yang dikatakan oleh salah seorang pemimpin kelompok di kemudian hari: “Kami tidak pernah menganggap diri kami sebagai bagian dari Portugal. Kami juga tidak tertarik dengan pemerintah Indonesia, melainkan suatu integrasi antara Timor Barat dan Timor Timur. Kami punya ikatan nenek moyang—kami tidak punya batas sebelum Portugal menjajah Timor.” (John Manuel Duarte, seorang Timor, pemimpin pemberontakan Viqueque, wawancara di Lisbon oleh Jill Jolliffe, 11 November 1978, transkripsi milik Taylor, dalam Taylor, 1998: 39). Apa yang kemudian terjadi adalah sebuah pemberontakan pada 7 Juni 1959. Serangan diarahkan ke posto-posto Portugis di Uatolari dan Uatocarabu. Untuk mengucilkan posto-posto ini, saluran telpon ke Baucau dipotong. Sebuah revolusi lainnya juga direncanakan terjadi di Dili. Tetapi rincian rencana itu telah dibocorkan ke pihak Portugis oleh seorang informan. Sehingga massa pemberontak yang tengah menuju ke pusat barak tentara di Dili berhasil dicegat oleh satu truk penuh tentara. Sementara itu pertempuran di Viqueque berlangsung seru. Portugis mengirimkan 100 orang dari Goa India, untuk memadamkan pemberontakan. Pemberontakan berakhir pada 14 Juni 1959. Jumlah yang tewas diperkirakan antara 160-100 orang. Tetapi semua laporan membenarkan kebrutalan pasukan Portugis dalam memadamkan pemberontakan tersebut—desa-desa dibakar, keluarga-keluarga dibunuh dan sebagian besar pemimpin masyarakat dieksekusi. Sejumlah 58 orang Timor telah dibuang ke Angola dan Mozambique, walaupun sebelumnya dikatakan bahwa mereka akan diajukan ke pengadilan di Lisbon. Laporan mengenai keterlibatan Indonesia dalam revolusi itu beragam. Beberapa laporan bahkan mengatakan bahwa 14 pejabat tersebut adalah agen langsung pemerintah Indonesia, yang dikirimkan untuk mengorganisasi penghapusan pemerintah kolonial. Joe Martins, seorang pemimpin partai KOTA yang pro Indonesia, mengatakan bahwa ‘para pengungsi’ telah disponsori oleh pemerintah Indonesia, lewat konsulnya di Dili. Pemerintah Indonesia berhasil mendapat dukungan dari orang Timor dengan cara menyuap. (Martins, J., Affidavit terlampir pada Sekjen PBB, 23 Maret 1976, dalam Taylor, 1998: 40). Menurut Taylor, tampaknya para pemberontak itu benar-benar pemimpin regional yang menentang pemerintah pusat, yang mencoba memobilisasi keresahan lokal sebagai cara untuk membangun basis mereka di Timor timur. Meski demikian, adalah juga fakta yang tak terelakkan bahwa mereka dibantu oleh konsul Indonesia di Dili dan dari Kupang wilayah Timor bagian barat, yang sepakat untuk memasok senjata. Selanjutnya Taylor mengatakan: “*Semua fakta ini menunjukkan, bahwa paling tidak sudah ada lobi-lobi integrasionis yang mendapat dukungan di beberapa tingkatan dalam pemerintah Indonesia. Berita-berita tentang begitu mudahnya 14 tentara itu mengorganisir pemberontakan dalam negeri Timor Timur dalam waktu singkat pasti mendorong beberapa anggota elite politik Indonesia yang ingin memperluas batas nasional mereka. Tepatnya, pemberontakan itu mendorong elite politik untuk mendukung ‘biro pembebasan’ yang berusaha membentuk pemerintah Timor alternatif. Dengan begitu keunggulan biro pembebasan ini pada awal tahun 1960an, dan bukti keberhasilannya ditunjukkan dengan pembentukan sebuah ‘pemerintahan’ di dalam Timor Timur tahun 1963.*” (Taylor, 1998: 41)

Timor hilang dari medan politik. Pertikaian di tubuh elite politik antara nasionalis, komunis, militer dan Islam meningkat. Pada awal kekuasaannya, Soeharto mengarahkan seluruh energi militernya ke pembangunan kembali institusi politik dan konsolidasi kekuasaan negara. Masalah kebijakan luar negeri sekali lagi terkesampingkan sampai akhir tahun 1960-an. Lebih jauh lagi, terdapat timbal-balik ideologis antara rejim Caetano di Portugal dan Soeharto di Indonesia. Sehingga masalah potensial yang memungkinkan mereka berkonflik, seperti masalah perbatasan, bisa dengan cepat diatasi.

Namun secara perlahan di dalam tubuh militer dan pejabat tinggi negara 'masalah' Timor kembali muncul di permukaan. Pada akhir tahun 1969, masalah ini digarap oleh BAKIN, dan lebih khusus lagi adalah Opsus, suatu unit operasi khusus yang dipimpin oleh penasehat politik paling dekat dengan Presiden Soeharto, yaitu Brigjen Ali Moertopo. Dari hasil kajiannya, Opsus berkesimpulan bahwa kalau Timor Portugis merdeka, itu akan merupakan ancaman bagi wilayah Indonesia bagian timur. Militer lebih baik memasukkan pulau itu ke dalam wilayah Indonesia apabila kekuasaan Portugis berkembang menjadi tidak stabil atau tidak dapat bertahan seterusnya. (Dunn, *Timor, a People Betrayed*, 1983: 106, dalam Taylor, 1998: 42) Sejak Opsus mengambil sikap semacam itu, maka persoalan yang berkembang adalah bagaimana usaha memasukkan wilayah itu ke Indonesia berhasil, dan tidak lagi masalah kebijakan penggabungan itu sendiri.

Meskipun ada kesimpulan tidak resmi seperti itu, posisi resmi pemerintah Indonesia tetap seperti sebelumnya. Bahkan pada akhir April 1974, pada puncak kudeta rejim Caetano di Portugal, kebijakan Indonesia secara resmi tetap, yaitu 'tidak campur tangan' pada masalah Timor Portugis. Bahkan Menlu Adam Malik, menyambut gembira berdirinya pemerintahan sesudah Caetano yang lebih berwatak progresif dengan mengatakan bahwa pemerintah baru ini 'punya niatan untuk memberi kemerdekaan'. Satu-satunya petunjuk adanya ketidaksepakatan di tingkat pejabat pemerintah adalah kejadian pada bulan April 1972. Ketika itu pers Indonesia yang telah dikendalikan oleh negara, melaporkan adanya huru-hara di Timor Timur beberapa hari menjelang kedatangan delegasi resmi Indonesia ke Dili untuk membahas pendirian komisi

Perbatasan. Walaupun berita itu kemudian disangkal, sasaran sudah tercapai, yaitu usaha menghalang-halangi terjadinya kontak pemerintah resmi yang akan secara langsung mengakui perbatasan wilayah di Timor. Isyarat ini juga diakui oleh kebanyakan kalangan senior militer, yang sumbernya adalah Opsus sendiri.

Dengan kata lain, menurut Taylor, insiden itu melambangkan kebijakan masa sesudah perang terhadap Timor Portugis. Di Balik pernyataan resmi pemerintah tentang pengakuan terhadap posisi Portugal dan diberlakukannya kebijakan tidak campur tangan, tekanan untuk melakukan aneksasi sebentar-sebentar muncul. Tekanan ini makin bertambah kuat dalam dinas intelijen pada awal tahun 1970. Kemudian, berbeda dengan opini kebanyakan pengamat, tekanan tersebut menjadi unsur lobi politik yang menentukan, sebagaimana terlihat pada peristiwa-peristiwa berikutnya. (Taylor, 1998: 43)

Sikap dinas intelijen Indonesia, BAKIN tegas, bahwa pada suatu waktu tertentu Timor Timur perlu diintegrasikan. Selama tahun 1960-an, BAKIN telah membangun jaringan informasi di dalam Timor Timur. Jaringan ini bekerja melalui pedagang, pejabat bea cukai dan agen-agen konsulat Indonesia di Dili. Goncavels, Soares, dan dalam beberapa hal Araujo punya hubungan dengan agen-agen ini. Sebagai gantinya mereka dapat keuntungan, yaitu perlindungan dalam konflik-konflik tertentu dan pembayaran tunai. Segera setelah Apodeti berdiri, tiga orang ini, dan sejumlah orang-orang Indonesia lainnya, menerima dukungan finansial. Malahan jauh sebelum terjadinya kudeta di Lisabon, BAKIN sudah melatih sejumlah orang Timor Timur pro-Apodeti untuk melakukan pekerjaan penyiaran radio dan penerjemahan. Dengan demikian sejak semula berdirinya Apodeti lebih banyak adalah hasil bentukan Indonesia. Dukungan rakyat terhadap partai ini minim. Kalau anggota ASDT dan UDT terus bertambah sampai ribuan, sebaliknya Apodeti tidak pernah lebih dari 300 orang selama tahun 1974. (Taylor, 1998: 50)

Perkembangan berikutnya semakin menjadi jelas ketika pada tanggal 12 Juni, Wakil Ketua DPR John Naro, anggota dewan dari Indonesia Timur menyatakan bahwa, Indonesia seharusnya 'merumuskan kebijakan khususnya untuk Timor Portugis, sehingga akhirnya daerah tersebut dapat kembali di

bawah Indonesia. (*Indonesia Current Affair Translation Service*, Jakarta, Juni 1974, dalam Taylor, 1998: 52). Pernyataan ini keluar tak lama setelah berdirinya Apodeti. Sedang kalangan elit Dili mulai sadar bahwa ada keterkaitan antara partai itu dengan Indonesia. Sehingga apa yang dinyatakan Naro jelas membuat panik. Selama ini sebagian besar ASDT memandang Indonesia terutama karena perannya sebagai anggota pendiri gerakan Non-Blok. Malahan kebanyakan anggota partai percaya adanya dukungan tipe ‘semangat Bandung’ untuk kemerdekaan dari Portugal. Para pemimpin UDT juga merasa tidak ada alasan untuk memberi perhatian pada negara tetangganya. Bahkan banyak anggota partai ini berharap bisa membangun jaringan dagang dan investasi dengan Indonesia, tapi bukan integrasi.

Dengan segera seorang calon diplomat baru dari komite pendiri Fretilin Jose Ramos Horta dikirim ke Jakarta oleh ASDT untuk menyelidiki situasi di sana. Kehadiran Horta diterima dengan baik. Naro tampak bersahabat, dan ia menunjukkan rasa hormat yang tinggi atas pilihan rakyat Timor Timur mengenai masa depannya sendiri. Menlu Adam Malik bahkan lebih jelas lagi dalam mengungkapkan pendiriannya. Ia menyatakan tiga prinsip dalam tulisannya yang dianut oleh pemerintah: *“Bahwa kemerdekaan sebuah negara adalah hak setiap bangsa, tidak terkecuali rakyat Timor; bahwa pemerintah Indonesia tidak punya niatan untuk melakukan ekspansi atau menduduki wilayah lain; bahwa siapapun yang memerintah di Timor setelah kemerdekaannya akan menjalin persahabatan dan kerjasama dengan Indonesia”*. (teks surat Adam Malik, milik Jose Ramos Horta, tertanggal 17 Juni 1974, dan direproduksi dalam Taylor: 51-52)

Pada akhir bulan Agustus, *Berita Yudha* menganalisa situasi di Timor Timur dan berkesimpulan bahwa hak menentukan nasib sendiri ‘tidak dapat dipisahkan dari strategi umum dunia’. Lebih khusus lagi, koran ini menuduh bahwa ASDT ‘mencari dukungan komunis’. Meskipun ide-ide *Berita Yudha* tidak ditiru oleh surat kabar lain, tetapi tetap penting, seperti juga pernyataan Naro sesudah kudeta bulan April di Portugal. “Keduanya memberi petunjuk bahwa di balik segala pernyataan resmi Indonesia, sesungguhnya masa depan yang jauh berbeda dari bayangan orang Timor selama ini telah dipetakan,” tulis

Taylor (1998: 54). Kekuatan penggerak di balik ini semua, menurut Taylor, adalah BAKIN. Sejak menetapkan sikap melakukan integrasi tahun 1960-an, dinas intelijen Indonesia telah membangun jaringan luas, dan Apodeti adalah bagiannya. BAKIN merupakan cerminan pandangan kelompok paling berpengaruh di tubuh militer. Ciri utama kelompok ini adalah besarnya perhatian pada masalah keamanan nasional (dan karenanya perlu ekspansi wilayah untuk menjamin keamanan tersebut), pembentukan negara kuat dan korporatis.

Pada tahun 70-an, peran mereka menyebar di tingkat menteri dari departemen terpenting dan dinamika kabinet Soeharto. Juru bicara kelompok ini adalah Ali Moertopo, juga kepala Opsus, suatu unit operasi yang telah membantu Soeharto menjalankan operasinya dengan sukses (menggulingkan bekas presiden Soekarno, memanipulasi partai-partai politik dan memasukkan Irian Barat pada tahun 1969).<sup>30</sup> Kedua adalah Letjen Yoga Sugama, memiliki hubungan dekat dengan Soeharto, dan juga figur penting di Opsus dan Kopkamtib. Ketiga, Laksamana Sudomo, pemimpin Kopkamtib. Dan terutama sekali adalah Meyjen Leonardus Benjamin Murdani, pemimpin operasi intelijen militer dan unit intelijen tugas khusus dari Kopkamtib. Dialah orang militer yang memiliki kontak dekat dengan CIA di Indonesia.

Sampai akhir tahun 1960an pandangan kelompok BAKIN ini tidak diikuti oleh kelompok militer lainnya, kecuali beberapa orang anggota lobi dewan perwakilan dari Indonesia Timur seperti Naro. Tetapi sejak kudeta bulan

---

<sup>30</sup> Opsus awalnya adalah unit intelijen khusus dari Kostrad. Soeharto adalah komandan Kostrad sebelum kudeta 1965. Kostrad memainkan peran penting dalam perencanaan konfrontasi dengan Malaysia tahun 1964, dan sesudah kudeta tahun 1965 menjadi suatu unit operasi khusus bagi Soeharto. Unit ini juga terlibat dalam kecurangan Pemilu, mengorganisir protes dan memobilisasi gerakan massa. Patut dicatat, unit ini mendalangi terbentuknya 'Penentuan Jajak Pendapat Rakyat' bagi Irian Barat di bawah pengawasan PBB). Pendeknya, menurut Taylor, tiga orang ini dan jaringan pejabat militer di sekitar mereka adalah yang memimpin rejim Orde Baru. Mereka punya pengaruh luas dalam hubungan luar negeri, diplomasi, pertahanan dan keamanan. Bahkan mereka mampu merancang serangkaian perdebatan akademis lewat kelompok pemikir yang berpusat di CSIS. Mereka sangat terlibat dalam perencanaan ekonomi. Seperti semua pejabat militer, mereka pun membikin ruang kerja pengeruk keuntungan dalam struktur ekonomi pajak dan pembagian keuntungan, sumbernya adalah kekayaan mineral, cadangan minyak dan investasi. Tapi mereka tidak tampil sebagai kekuatan di salah satu sektor ekonomi, baik itu perdagangan, pertanian maupun industri. Di Indonesia, militer sendiri sudah merupakan kelompok dominan di semua kegiatan ekonomi, sedangkan kelompok ekonomi lainnya—pengusaha pribumi, pemilik modal maupun tuan tanah—ada di bawah. (Taylor, 1998: 55-56)

April, pandangan mereka cepat menyebar. Ada beberapa peristiwa yang mendorong tersebarnya pandangan ini. Pada pertengahan tahun 1974, BAKIN berhasil menyelesaikan rincian umum rencana pengintegrasian Timor Timur. Skema kerja itu diberi nama Operasi Komodo. Menurut dokumen asli, operasi ini akan menggunakan cara aneksasi non militer. Operasi itu meliputi beberapa operasi utama, masing-masing dengan tujuan tertentu. Elias Tomodok adalah konsul Indonesia di Dili dan salah seorang anggota lobi Indonesia Timur. Sejak tahun 1968 dia sudah memulai pekerjaan mentransmisi pesan-pesan dari Dili ke Jakarta. Sementara itu ia melebih-lebihkan adanya dukungan integrasi dan sangat menekankan segi-segi buruk kolonialisme Portugis.

Gubernur Indonesia untuk NTT El Tari, direkrut masuk dalam rencana BAKIN pada awal tahun 1970-an. Ia berperan penting dalam kontak-kontak awal dengan anggota Apodeti dan orang Timor Timur di daerah perbatasan. Pekerjaan ini dilakukannya bersama seorang agen BAKIN di Timor Barat, Louis Taolin. Untuk urusan luar Indonesia, tugas menggalang dukungan diplomatik bagi kebijakan integrasi di Amerika Serikat dan Eropa Barat, dibebankan pada Liem Bian Kie (dikenal dengan nama Jusuf Wanandi). Sedangkan direktur CSIS, Harry Tjan Silalahi, bertanggungjawab untuk menggalang dukungan di Australia dan Portugal. Sejumlah pejabat militer ditunjuk untuk secara khusus mengorganisir kampanye militer di daerah perbatasan jika dibutuhkan. Yang terkenal dari kelompok ini adalah Kolonel Sugianto, Hernoto, Sinaga, Dading dan Kasenda, dibantu oleh seorang mayor bernama Andreas. Seorang Timor, Letkol Alexander Dinuth, dikirim ke Kupang untuk melakukan kerja propaganda Timor Timur. Kantor berita Indonesia, Antara, diorganisir untuk menyebarkan propaganda Timor Timur di tingkat internasional.<sup>31</sup>

Artikel dalam *Berita Yudha* dan pernyataan Naro dengan demikian adalah genderang pembuka integrasi Timor Timur. Operasi Komodo mulai

---

<sup>31</sup> Informasi tentang Operasi Komodo diperoleh Taylor dari dua sumber: pimpinan Partai KOTA, Jose Martins, setelah ia keluar dari tim Indonesia untuk PBB tahun 1976. Martinus direkrut oleh Taolin sebagai agen BAKIN tahun 1975. Lebih rinci lihat Jose Martins, 'Affidavit', diserahkan pada Sekretariat Jenderal PBB, Maret 1976. Sumber informasi lainnya yang utama mengenai Operasi Komodo adalah McDonald, 1980, bab 9, hal 189-215, dalam Taylor, 1998: 57)

bergerak pada akhir Agustus, ketika aktor-aktornya mulai memainkan peran dengan serius. Awal September, Gubernur El Tari mengundang pemimpin Apodeti ke Kupang sesudah ia mengeluarkan pernyataan pers bahwa pemerintah provinsi bermaksud 'membantu perjuangan Apodeti'. (*Sinar Harapan*, 12 September 1974, dalam Taylor, 1998: 57). Pertengahan bulan September, salah seorang jenderal terpenting Indonesia, Amir Machmud, menyatakan bahwa meski secara teritorial Indonesia tidak punya ambisi, tetapi tidak ada keberatan untuk melakukan integrasi. Dalam minggu-minggu berikutnya makin banyak tokoh masyarakat mendukung integrasi. Yang paling mengejutkan adalah perubahan sikap Menteri Luar Negeri Adam Malik. Tiga bulan sebelumnya ia mendukung kemerdekaan dan selalu menentang manuver Ali Moertopo. Tapi pada tanggal 18 September di depan publik ia menyatakan dukungannya pada Apodeti.

Perubahan sikap Adam Malik ini berkaitan dengan peristiwa yang terjadi di Wonosobo, sebuah ibukota kabupaten, 60 kilometer ke arah barat dari Yogyakarta, pada bulan September 1974. Presiden Soeharto bertemu dengan Perdana Menteri Australia Gough Whitlam, dalam rangka pengembangan persahabatan dua negara. Sebelum tiba di Wonosobo, Whitlam bertemu dengan sekelompok jenderal, menghabiskan waktu lama berbincang-bincang dengan pejabat BAKIN, terutama dengan Yoga Soegama. Selama pembahasan di Wonosobo, Soeharto ragu-ragu mengangkat masalah Timor Timur. Tetapi jawaban Whitlam sungguh mengejutkannya. Perdana Menteri Australia ini menjawab singkat, personal dan blak-blakan: 'Kalau merdeka, Timor Timur tidak akan menjadi negara yang sanggup bertahan lama, dan akan jadi ancaman potensial'. (*Sydney Morning Herald*, 19 November 1974, dalam Taylor, 1998: 58). Ia bahkan menawarkan bantuan Australia membuat suatu pendekatan bersama terhadap Portugal untuk mendorong integrasi.

Pada akhir pertemuan, Departemen Luar Negeri menerbitkan suatu tulisan singkat yang menyatakan: "Australia sangat menghargai perhatian besar Indonesia terhadap masa depan wilayahnya. Australia percaya akan perlunya kesukarelaan Timor Portugis untuk bersatu dengan Indonesia, berdasarkan ketentuan internasional mengenai hak menentukan nasib sendiri yang dapat

diterima, yang kiranya akan mempermudah tercapainya dekolonisasi dan pada saat yang sama kepentingan stabilitas di tingkat regional tetap terjaga.” (*Masa depan Timor Portugis, Dokumen BP/60 Departemen Luar Negeri, Canberra, 11 September 1974, dalam Taylor, 1998: 58*). Kini semakin jelas bahwa sebenarnya pemerintah Australia bukan ‘tidak cukup informasi’ atau ‘tidak punya kepentingan’. Inilah tampaknya mengapa Adam Malik merubah pernyataan sebelumnya yang menolak campur tangan Indonesia atas Timor Timur dan beralih dengan menyatakan dukungan pada Apodeti. Sekitar dua bulan kemudian di Klub Pers Asing Jakarta, ia menyatakan bahwa; “Integrasi adalah satu-satunya pilihan serius bagi Timor Timur.” (Adam Malik membuat pernyataan ini pada tanggal 29 November 1974, dalam Taylor, 1998: 59).

Begitulah, pada akhir 1974, keputusan Indonesia terhadap Timor Timur sampai pada titik yang tidak mungkin dirubah lagi. Dalam semua peristiwa ini peran Amerika Serikat adalah sangat sentral. Seperti yang dipaparkan Ben Anderson (1998) bahwa, tanpa Amerika Serikat invasi Indonesia atas Timor barangkali tidak akan terjadi. Sekitar 90 persen senjata yang digunakan untuk invasi berasal dari Amerika Serikat. Meskipun penggunaannya di luar Indonesia jelas-jelas dilarang dengan kesepakatan Indonesia-Amerikan tahun 1958, Washington, yang mendapat informasi dari CIA mengenai persiapan Indonesia untuk invasi, menutup mata atas pelanggaran kesepakatan tersebut. Pada tahun 1977, ketika tentara Indonesia yang kecewa berupaya mendapatkan pesawat udara penangkal pemberontakan Bronco OV-10 yang dibutuhkan untuk suatu serangan udara massal terhadap berbagai benteng pegunungan Fretilin, kantor administrasi Carter secara diam-diam memasoknya, seraya berbohong kepada Kongres dan publik bahwa suatu embargo atas perlengkapan militer sedang dikenakan terhadap Indonesia. “Di PBB, duta besar Amerika Serikat Patrick Moynihan melakukan segala cara yang ia bisa untuk menggagal dukungan guna menghalangi intervensi diplomatik PBB—ia membanggakan hal ini dalam memoir keberhasilannya,” tulis Anderson (1998: 237).

Mengapa Amerika begitu tertarik pada apa yang terjadi di salah satu koloni Portugal yang jauh dan paling kecil itu? Timor Timur punya arti penting

secara ekonomi dan politik bagi Indonesia, Richard Nixon menyebut daerah itu sebagai ‘hadiah paling berharga di wilayah Asia Tenggara’ (Richard Nixon, ‘Asia after Vietnam’, *Foreign Affairs*, 1967, dalam Taylor: 1998: 99). Di samping itu Timor Timur memang punya arti penting tersendiri bagi strategi global Amerika. Di sebelah utara pulau terletak Selat Ombai-Wetar. Selat ini merupakan jalur yang sangat dalam sehingga kapal selam bersenjata nuklir bisa melintasi jalur Samudra Pasifik ke Samudra Hindia tanpa dapat dideteksi. Sementara untuk mengadakan perjalanan yang sama lewat Selat Lombok atau Sunda perlu waktu tambahan paling cepat 8 hari. Jadi Selat Ombai-Wetar sangat penting bagi strategi Amerika, vital dalam tiap konflik dengan pesaingnya yang melakukan ekspansi ke selatan, yaitu Uni Soviet.<sup>32</sup> Sudah barang tentu, pemerintah Amerika amat berminat untuk sebisa mungkin ikut mengatur agar setiap konflik di Timor Timur, membawa hasil yang aman, dalam pengertian apapun. Jauh-jauh hari tanggal 16 Agustus, John Newsom, duta besar Amerika tiba di Jakarta. Ia menyatakan bahwa pemerintahnya berharap penyerangan Indonesia atas Timor Timur, harus dilakukan ‘dengan efektif, cepat dan tidak perlu menggunakan peralatan kami’.<sup>33</sup>

Dalam bahasa yang lain, Ben Anderson menunjuk dua faktor menentukan kebijakan Washington mengenai Timor Timur-Indonesia ini:

*Pertama*, dan paling penting adalah rasa terima kasihnya terhadap Soeharto yang, berkaitan dengan era Perang Vietnam, telah

<sup>32</sup> Di dalam otobiografinya, secara selintas Soeharto menjelaskan kebijakannya mengenai wilayah perairan Indonesia. Indonesia saat itu sedang berjuang pengakuan untuk mendapat pengakuan internasional sebagai Negara kepulauan. Antara lain ia mengatakan, “Di banyak kunjungan kenegaraan saya langsung mengemukakan masalah kekuasaan negara kepulauan itu. Hal ini diakui oleh Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, ahli kita di bidang hukum laut dan diplomasi, banyak membantu usaha memperoleh pengakuan dunia internasional. Secara pribadi saya juga turut memikirkan jalan keluar dari masalah-masalah sulit, antara lain masalah lintas kapal perang. Sistem sumbu adalah salah satu hasil pemikiran saya yang timbul pada saat masalah ini saya bicarakan dengan Mochtar Kusumaatmadja di tahun 1976. Sementara pihak merasa lautan kita itu lautan bebas. Maka mereka melakukan dengan caranya sendiri melewati lautan kita yang mengakibatkan kedaulatan kita diinjak-injak. Maka kita tawarkan kepada mereka, “Kamu harus mengakui kedaulatan wilayah Indonesia, dan kami akan mengakui pula kepentinganmu.” Maka saya berikan petunjuk, tentukan porosnya, jangan sampai perairan kita ini bisa dijelajahi dengan semau-maunya.” (Dwipayana & Ramadhan, 1989: 319-320)

<sup>33</sup> Komentar Newsom dikutip dalam telepon Woolcott kepada Sekretaris Whitlam, Alan Renouf, pada tanggal 17 Agustus, dari Munster dan Walsh (eds.), *Documents on Australian Defence and Foreign Policy 1968-1975*, Sydney, 1980: 200, dalam Taylor, 1998: 99)

membubarkan pada tahun 1965-1966 sebuah partai komunis yang paling besar (dan legal) di dunia blok sosialis (tanpa setetes darah Amerika pun tertumpah) dan terima kasih atas berbagai kebijakan ekonomi Soeharto yang melepaskan Indonesia yang kaya raya sumber daya kepada investasi dan perdagangan asing. *Kedua*, adalah berbagai kalkulasi strategis pada satu era dimana kekuatan militer Soviet (terutama angkatan laut dan udara) berada pada puncaknya. Indonesia terbentang melintasi berbagai jalur laut antara bendua Indonesia dan Pasifik, dan tawaran rahasia Suharto untuk mengizinkan kapal selam nuklir Amerika untuk melewati perairan Indonesia, kini meliputi jalur dalam sepanjang Timor Timur, tanpa terlihat oleh pengawasan satelit Soviet, sangatlah menarik. (Anderson, 1998: 237)

Begitulah, dengan restu sejumlah negara adidaya, khususnya Amerika Serikat dan Australia, Indonesia melakukan berbagai operasi atas Timor Timur. Salah satunya yang terkenal apa yang disebut Operasi Seroja, yang berlangsung pada tanggal 8 Desember 1974. Operasi ini dimulai dengan pengeboman di pagi buta, disusul oleh serangan udara jam 5 pagi dan pada saat yang sama tentara elit Indonesia, Kopassandha, mendarat di sekitar dermaga. Dalam rencana, saat itu akan dilakukan pengepungan Dili secara cepat oleh pasukan khusus dari daerah perbatasan, tetapi mereka harus menghadapi perlawanan ketat. Sejumlah 10.000 tentara diturunkan. Mereka berasal dari divisi Brawijaya Jawa Timur dan Siliwangi Jawa Barat. Terjadilah pembunuhan massal terhadap penduduk sipil Dili, kekerasan dan perampasan harta benda dengan cara-cara yang primitif. Bekas uskup Dili, Mgr. Costa Lopez, menggambarkan: *“Begitu tentara mendarat, dimulailah pembunuhan terhadap siapa pun yang mereka temui. Mayat-mayat bergelimpangan di jalan. Yang kami lihat cuma tentara yang membunuh, membunuh dan membunuh”*. (Tapol Bulletin No 59, London, September 1983, dalam Taylor, 1998: 123)

Sementara itu, perkembangan di tingkat internasional, Amerika semakin membutuhkan persahabatan yang baik dengan Indonesia. Sehingga pada awal bulan Agustus 1975, pejabat Pentagon dan anggota pemerintah AS bertemu dengan Malcolm Fraser di Washington. Mereka memperingatkan Fraser agar tidak membuat kesalahan yang bisa merusak hubungan pemerintahnya dengan Indonesia. ‘Kepentingan keamanan’ Amerika membutuhkan ‘niat baik’ pemerintahan Suharto. Puncak kepentingan itu adalah keinginan tetap

digunakannya Selat Ombai-Wetar sebagai lintasan kapal selam Amerika. Saat itu RUU kelautan sedang dibahas di PBB yang mungkin sekali meniadakan hak melintasi bawah laut. Menyadari hal ini, pejabat Pentagon melihat perlintasan bawah laut hanya mungkin tetap berlangsung lewat hubungan bilateral dengan militer Indonesia. Memelihara 'niat baik' menjadi penting kalau AS masih ingin mempertahankan peluang bergerak tanpa dideteksi antara Samudra Hindia dan Pasifik. Kepentingan strategis ini merupakan inti strategi nuklir global pemerintah Amerika. Dan ini pola yang paling mempengaruhi kebijakannya terhadap invasi Indonesia. Dalam rangka ini pula Australia harus bisa memastikan bahwa Indonesia bisa menerima kepentingan tersebut. (Taylor, 1998: 136)

Sehubungan dengan hal itu, Fraser melakukan kunjungan selama empat hari ke Jakarta. Ia berpidato di depan Parlemen Indonesia tanggal 11 Oktober 1975 dan memberi pengakuan atas pendudukan Indonesia. Dalam konferensi pers berikutnya ia menyatakan bahwa 'Australia mengakui penyatuan tersebut untuk alasan yang benar-benar demi kemanusiaan.' Dalam kesempatan itu ia juga mengunjungi perusahaan J.B.Reid, Direktur Broken Hill Proprietary Company (BHP). Demi kepentingan minyaknya, Australia melakukan lobi kuat tahun 1975 mendukung aksi Indonesia dengan harapan kehadiran kapal minyak mereka di laut Timor diterima. Posisi mereka harus terjamin, oleh karenanya mereka membuat persetujuan sangat cepat tentang batas kelautan antara Indonesia-Australia yang bebas dari tekanan permusuhan pemerintah Portugis maupun pemerintah Timor Timur yang sudah mempertegas kontrol mereka atas wilayah kelautan. BHP dalam hal ini adalah salah satu perusahaan penting. Perusahaan ini baru saja mendapat saham dalam Woodside-Burmah Company dan sudah melakukan operasi pengeboran bawah laut di Timtim menjelang kudeta UDT.

Beberapa hari setelah Fraser pergi pemerintah Indonesia menyebarkan hasil fotocopi surat kawat yang diterima oleh duta besar di Canberra. Isi surat kawat itu adalah tentang salah satu pertemuan rutin antara Komite Bisnis Indonesia dan Australia (AIBC) pada tanggal 15 Oktober. Pertemuan itu dihadiri oleh semua perusahaan besar Australia, pejabat departemen seperti

hubungan luar negeri dan perdagangan luar negeri, juga bekas Presiden AIBC, J.B. Reid. Dalam surat kawat itu disebutkan bahwa AIBC adalah yang paling keras menunjukkan sikapnya terhadap pemerintah Australia, agar pemerintah mempertegas pengakuannya atas integrasi Indonesia. Seperti halnya kepentingan strategis AS, kepentingan Australia pun tidak dapat diremehkan, yaitu berkaitan adanya celah Timor yang diduga mengandung cadangan minyak sebanyak lima milyar barel dan 1850 milyar kubik gas alam. Kandungan ini termasuk 25 ladang minyak terbesar di dunia. Lobi minyak tersebut segera membawa hasil konkrit. Tak berapa lama kunjungan Fraser ke Indonesia, Menteri Luar Negeri Australia Peacock menyatakan bahwa Australia akan segera mengakui integrasi, tapi tidak saat ini demi alasan kemanusiaan dan lebih mengakui tindakan itu dari segi 'lingkungan regional'. Ia menegaskan: *'Itu berarti kita harus memahami pandangan Indonesia dan bahwa Timor Timur sekarang adalah bagian dari Indonesia dan bahwa situasi seperti ini tidak mungkin diubah'*. (Taylor, 1998: 137)

Sejak awal argumen resmi pemerintah Indonesia terlibat dalam kasus Timor timur adalah untuk menjaga wilayah kedaulatan Indonesia dari kemungkinan ancaman keamanan yang mungkin timbul dari konflik internal Timor Timur. Tetapi belakangan sedikit bertambah dengan alasan untuk melindungi warga negara tersebut yang menginginkan integrasi dengan Indonesia, dari serangan kelompok yang tidak menginginkan integrasi Indonesia. Semua ini menjadi semakin eksplisit setelah ditandatanganinya naskah proklamasi integrasi yang lebih dikenal sebagai Deklarasi Balibo pada tanggal 30 November 1975, oleh enam orang yang mewakili Partai Apodeti, UDT, Kota dan Trabalhista.<sup>34</sup> Naskah yang berisi pernyataan bergabung dengan Indonesia ini kemudian diserahkan kepada pemerintah Indonesia. Soeharto kemudian menandatangani integrasi resmi Timor Timur ke dalam Indonesia pada tanggal 17 Juli 1976. Menurut Nevins (2008), "Sejak saat itu pula posisi resmi Amerika Serikat adalah menerima aneksasi Timor Timur sebagai *fait*

---

<sup>34</sup> Mereka yang membubuhkan tandatangan dalam naskah Deklarasi Balibo adalah, Guelherme Mario Concalves (Apodeti), Alexandrino Borroau (Apodeti), Jose Martins (KOTA), Francisco Lopes da Cruz (UDT), Domingos de Oliveira (UDT) dan Domingos C. Pereira (Trabalhista).

*accompli*, dan karena itu sebagai bagian *de facto* (tetapi tidak *de jure*) Indonesia.” (Nevins, 2008: 70)

Sementara itu, pasca deklarasi Balibo, pertempuran masih terus terjadi. Tentara Indonesia di Timor Timur terus ditambah. Pada tanggal 10 Desember, pasukan TNI mendarat di Baucau. Pada tanggal 25 dan 26 Desember jumlah pasukan ditambah lagi sekitar 15.000 tentara dari 10.000 tentara yang sudah ada. Pada empat bulan pertama 1976, sekitar 2000 tentara telah mati. Dilaporkan bahwa tentara-tentara itu mulai menolak keluar untuk patroli dan kerap mengeluh tidak mendapat makanan yang cukup, sehingga kemudian divisi-divisi pasukan dirotasi secepat mungkin. Pasukan Fretilin terdiri dari 2500 tentara reguler, bekas tentara Portugis dengan milisi tak tetap sejumlah 7000 dan cadangan sebanyak 20.000. Mereka memiliki persenjataan cukup baik peninggalan Portugis. Di daerah-daerah basis ini, Fretilin melanjutkan programnya yang sudah berlangsung selama 1974-1975.

Pemahaman mengenai medan tempur yang kurang baik, seringkali membuat tentara Indonesia yang sudah diterjunkan ke daerah pedalaman, selalu harus tunggang langgang lari keluar, karena terkepung oleh pasukan Fretilin. Satu contoh misalnya kejadian di kota Suai, daerah pantai selatan dekat perbatasan. Meskipun kota itu hanya tiga kilometer dari laut, tentara yang berjumlah 3000 orang butuh waktu tiga bulan untuk menguasainya. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, Fretilin mulai mengambil alih desa-desa yang telah dikuasai Indonesia, seperti Alas di selatan dan Remexio, 15 kilometer dari Dili. Gerakan militer yang tidak beranjak lebih maju membuat frustrasi sehingga tentara Indonesia meningkatkan teror terhadap penduduk lokal.<sup>35</sup> Desa-desa dihancurkan dan penduduk yang tersisa dipindahkan ke kamp-kamp strategis. Kekejaman meluas ketika senjata kimia digunakan. Awal Agustus, di daerah sekitar Zumalai, enam desa dibakar dan ratusan penduduk diekskusi. Semua itu terus berlanjut. Sehingga Gubernur yang baru diangkat, bekas anggota Apodeti,

---

<sup>35</sup> Sebagai salah satu petinggi TNI Benny Moerdani konon tidak menyetujui dilakukannya operasi secara terbuka dan besar-besaran seperti itu. Ia lebih menghendaki dilakukannya Operasi Intelijen. Dalam buku Memoarnya, dikatakan, ‘Apa yang dirisaukan Benny ternyata menjadi kenyataan. Operasi gabungan dengan melibatkan berbagai macam unsur angkatan mengandung banyak sekali resiko, terutama tidak terjalin kekompakan. Dalam kata-kata Benny, “Pasukan tidak disiplin, saling tembak menembak. Wah pokoknya memalukan.” (Pour, 1993: 398)

Arnaldo Araujo terpaksa harus menulis surat ke Suharto mengancam pembunuhan yang meluas itu. (Taylor, 1998: 128-19)

#### **4.C.2. Perlawanan Rakyat Timor-Timur**

Meski integrasi Timor Timur dengan Indonesia telah memperoleh pengakuan 'de facto' dari sejumlah negara adidaya seperti Amerika Serikat dan Australia, pemerintah Indonesia menghadapi berbagai perlawanan yang sangat kuat dari masyarakat Timor Timur yang dimotori oleh Fretilin. Tak mudah bagi TNI untuk menguasai wilayah Timor Timur yang luas dan berbukit-bukit. Pada Agustus 1976, Indonesia hanya menguasai kota-kota besar, beberapa pusat regional dan wilayah pedalaman, serta beberapa koridor yang menghubungkan beberapa wilayah. Bagian terbesar kawasan pedesaan, di mana mayoritas rakyat tinggal. Pada Maret 1977 Departemen Luar Negeri Amerika Serikat memperkirakan, dua pertiga penduduk Timor Timur masih berada di wilayah yang dikuasai Fretilin. (Nevins, 2008: 38) Tentara Fretilin, Falintil saat itu diperkirakan berkekuatan 20.000 orang yang terdiri dari mantan tentara, tentara cadangan dan orang-orang yang dilatih tentara kolonial serta banyak orang yang mendapatkan latihan militer dari Falintil sebelum invasi Indonesia. Falintil juga mempunyai banyak senjata yang ditinggalkan oleh Portugis dan memiliki pengetahuan rinci mengenai topografi Timor Timur, sehingga memiliki kontrol yang efektif atas wilayah tersebut. Radio Fretilin juga terus mengudara ke seluruh wilayah. Di sejumlah wilayah yang dibebaskan, sekolah, koperasi pertanian dan sebagainya berfungsi di bawah pemerintahan Fretilin. Kontrolnya begitu kuat sehingga dapat menyelenggarakan konferensi nasional di suatu kota di bagian tengah wilayah, pada tanggal 20 Mei hingga 2 Juni 1976, tanpa ada gangguan. (Nevins, 2008: 38-39)

Menghadapi situasi demikian, Jakarta pada akhir 1977 memutuskan untuk menghabisi perlawanan dalam skala besar dan untuk selamanya, dan sekaligus memusnahkan harapan untuk kemerdekaan Timor Timur. Menggambarkan situasi yang terjadi saat itu, Nevins menulis:

Menggunakan puluhan ribu pasukan darat dan pemboman udara, pasukan TNI masuk ke arah tengah dari perbatasan dan dari pantai. Sebagai bagian dari operasi itu, Indonesia membom kawasan hutan, dengan tujuan untuk menghilangkan perlindungan darat, dan menggunakan semprotan kimia untuk menghancurkan tanaman dan ternak. Tujuannya adalah mendesak perlawanan ke suatu kawasan sempit di mana mereka bisa dibunuh atau ditangkap serta menggiring penduduk di pedalaman ke dataran rendah pantai di mana Indonesia bisa lebih mudah menguasai penduduk. Operasi ini berdampak kehancuran bagi perlawanan dan penduduk sipil, membunuh ribuan orang. Ketika keadaan memburuk, Falintil terpaksa memerintahkan penduduk sipil yang berada dalam perlindungan untuk menyerah kepada tentara Indonesia di tempat terdekat, mendorong mereka membangun perlawanan di dalam wilayah yang dikuasai Indonesia. Ketika operasi ini berakhir pada Maret 1979, banyak pemimpin tertinggi Fretilin mati, tertangkap, atau menyerah. Falintil kehilangan sekitar 80 persen pasukannya, dan lebih 90 persen senjatanya; jalur komunikasi dalam dan luar negerinya terputus sama sekali. (Nevins, 2008: 39)

Meski demikian sisa-sisa Fretilin dan tentara Falintil yang masih hidup dan tidak tertangkap tentara Indonesia terus mengadakan perlawanan. Mereka menyusun organisasi kembali di bawah pimpinan Xanana Gusmao.<sup>36</sup> Pada tahun 1980 kesatuan Falintil menyerang sejumlah markas tentara Indonesia di Dili. Menjawab munculnya kembali tentara gerilya, TNI melancarkan Operasi Keamanan pada pertengahan 1981, menggunakan taktik yang disebut “Pagar Betis”. Tentara memaksa sekitar 80.000 laki-laki Timor Timur membentuk rantai manusia yang berjalan melintasi negeri depan tentara Indonesia untuk membuat gerilya Falintil keluar atau mengepung mereka pada titik-titik dimana mereka bisa dibantai. Banyak tentara Falintil yang tertangkap atau menyerah, tetapi banyak juga yang berhasil meloloskan diri. Mereka yang berhasil lolos, kemudian mengorganisasi diri kembali. Pada akhir 1982, Falintil kembali melakukan sejumlah serangan di beberapa daerah, khususnya di bagian timur dan selatan.

Berbagai bentuk perlawanan Fretilin tersebut memberikan gambaran betapa masih banyak masyarakat Timor Timur yang tidak menginginkan untuk

---

<sup>36</sup> Kepada jurnalis Australia, Robert Domm pada September 1990, Xanana Gusmao menggambarkan militansi masyarakat Timor Timur khususnya Fretilin yang begitu kuat dan tidak mudah ditaklukkan. Menurut Xananan, serepresif apapun perbuatan tentara Indonesia, mereka tidak akan menyerah, dan perang akan terus berlanjut. Ia mengatakan; *“If Indonesia thinks that by exterminating Falintil the war will end, they are wrong!”* (Carey, 1995: 33)

bergabung dengan Indonesia. Dan mereka tidak mudah dikalahkan atau menyerah. Sebaliknya mereka terus melakukan perlawanan dan juga membangun organisasi perlawanan bawah tanah. Melalui organisasi bawah tanah, Fretilin membangun komunikasi ke masyarakat internasional, melalui para jurnalis dan para relawan atau gereja. Sesekali mereka melakukan aksi publik, dan kemudian diberitakan di media internasional, yang tujuannya adalah mempermalukan tentara Indonesia. Mereka juga hendak mengatakan kepada masyarakat internasional bahwa mereka tidak berintegrasi ke Indonesia sebagaimana yang diakui oleh sejumlah elit yang menandatangani 'Deklarasi Balibo'. Dengan cara-cara seperti itu mereka meminta simpati dunia atas perjuangan dan kekerasan yang mereka alami.

Suara-suara masyarakat tertindas di Timor Timur juga sampai ke Vatikan. Sebagai daerah mayoritas Katolik di tengah negara yang dihuni oleh 90 persen lebih penduduknya pemeluk Islam, wajar jika Timor Timur mendapat perhatian khusus dari Roma. Sebagai tindak lanjutnya, pada tahun 1989, Paus Yohannes Paulus II, datang ke Indonesia dan kemudian ke Dili. Di Dili Paus menyelenggarakan misa untuk puluhan ribu orang Katolik Timor Timur. Sementara Jakarta berharap bahwa kehadiran Paus akan efektif memberkati invasi Indonesia atas Timor Timur, masyarakat Timor Timur justru mengambil manfaat dari kunjungan Paus tersebut untuk melancarkan demonstrasi pro kemerdekaan pada masa akhir misa Paus. Dan karena demonstrasi itu dilakukan di depan wakil puluhan media internasional, maka momentum kehadiran Paus justru berbalik mempermalukan Indonesia.

Namun perlawanan yang paling memojokkan Indonesia di mata internasional adalah peristiwa di Kuburan Santa Cruz yang terjadi pada tanggal 12 November 1991. Pada hari itu, Pastor Ricardo menyelenggarakan misa untuk Sebastio Gomes, seorang aktivis pro-kemerdekaan yang dibunuh tentara Indonesia dua minggu sebelumnya di Gereja Motael. Setelah misa peringatan diselenggarakan, para hadirin berjalan ke pekuburan Santa Cruz dimana Sebastio Gomes dikuburkan. Ketika orang banyak itu membanjiri jalan-jalan Dili, mereka membentangkan berbagai spanduk dan meneriakkan kemerdekaan. Pada hari itu banyak orang meninggalkan kerja dan rumah mereka untuk bergabung

dengan rombongan massa demonstran, sehingga lautan massa itu berubah menjadi perlawanan massa terhadap Indonesia. Pada waktu arak-arakan itu mencapai makam Santa Cruz, jumlahnya sudah membengkak menjadi ribuan. Pada saat itulah tentara Indonesia melakukan penembakan massal sehingga mengakibatkan sekitar 250 orang tewas. (Nevins, 2008: 43)

Masyarakat Timor Timur hari itu kehilangan anak-anak dan saudara mereka. Tetapi justru karena peristiwa itulah kini perjuangan mereka melawan Indonesia mendapatkan momentumnya yang terbaik. Peristiwa Santa Cruz membuka mata dunia, akan sebuah kebiadaban yang selama ini ditutup rapat. Melalui mata para wartawan asing, peristiwa Santa Cruz sampai ke seluruh penjuru dunia. Diantara wartawan yang menjadi mata internasional pada peristiwa tersebut adalah wartawan lepas Allan Nairn, wartawan Radio *Pasifica* Amy Goodman dari Amerika Serikat, Russel Anderson dari Australia, dan juga Max Stahl yang bekerja untuk *Yorkshire Television*. Stahl inilah yang berhasil membuat film tentang pembantaian tersebut.<sup>37</sup> Dan sejak saat itu, Timor Timur masuk kembali ke dalam agenda internasional, yang pada ujungnya semakin memojokkan posisi Indonesia di mata dunia.

Sejak pembantaian Santa Cruz, Timor Timur untuk pertama kalinya menjadi sebuah isu politik terbuka tidak hanya di Indonesia tetapi juga dunia. Sejumlah pihak mulai mempertanyakan kepada pihak Indonesia, apa yang selama ini mereka lakukan terhadap rakyat Timor Timur. Menghadapi berbagai pertanyaan yang memojokkan itu, jawaban yang diberikan pemerintah Indonesia semakin terdengar defensif. Menlu Ali Alatas mengatakan dalam konferensi pers bahwa Timor Timur merupakan “kerikil dalam sepatu kami”<sup>38</sup>,

---

<sup>37</sup> Stahl mengubur filmnya di lubang kuburan yang baru digali, dan setelah tentara Indonesia menangkap dan menginterogasinya selama beberapa jam, ia kembali ke tempat itu pada malam harinya untuk mengambilnya. Dengan bantuan Saskia Kouwenberg, seorang aktivis solidaritas Belanda, film itu bisa sampai ke sejumlah stasiun televisi di berbagai negara. Diantara kisah dan foto peristiwa Santa Cruz 12 November 1991 karya mereka diproduksi dalam: Cox & Carey, *Generations of Resistance East Timor*. (New York: Cassel, 1995)

<sup>38</sup> Tahun 2006, Ali Alatas menerbitkan buku yang berisi kesaksian dirinya selama terlibat dalam masalah Timor Timur sejak bertugas sebagai Duta Besar RI untuk PBB hingga menjadi Menteri Luar Negeri Indonesia. Antara lain dia menyesalkan bahwa kemerdekaan Timor Timur dianggap sebagai kekalahan Indonesia, padahal menurutnya, masalahnya bukan soal kalah dan menang, melainkan menemukan jalan yang damai, adil dan bisa menjadi solusi yang bisa diterima

dan Suharto mengatakan bahwa ia merupakan “jerawat pada wajah kami”. Para wartawan Indonesia pun mulai berani menyelidiki sendiri apa yang terjadi di Timor Timur.

Pasca Peristiwa Santa Cruz 1991, banyak dukungan muncul bagi perjuangan masyarakat Timor Timur. Salah satunya terjadi pada tahun 1994 ketika terjadi aksi pendudukan atas Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta oleh para mahasiswa Timor Timur—persis ketika Presiden Soeharto sedang menyambut kedatangan Presiden AS Bill Clinton dan para pemimpin negara lainnya pada konferensi tingkat tinggi APEC. Dalam hitungan hari, Pangdam Jaya Jendral Hendro dipecat—jendral ketiga yang jatuh karena kasus Timor Timur dalam tiga tahun. Pemerintah tak memiliki jalan lain kecuali memberikan surat pas jalan kepada para mahasiswa tersebut untuk menuju pembuangan ke Portugis. Keberhasilan dari apa yang disebut oleh Ben Anderson sebagai *coup de theatre* ini di Jakarta memiliki gaung yang kuat di Timor Timur, dimana ia dianggap sebagai isyarat lain bahwa sejarah kini berpihak pada kaum muda. Salah satu hasilnya adalah semakin banyaknya insiden kekerasan antara kaum muda Timor Timur dan para pendatang yang mendominasi pasar daerah, yang mencapai puncaknya pada kerusuhan kota hampir di seluruh daerah itu pada bulan Oktober 1995. Ratusan, bahkan mungkin ribuan, kaum imigran dipaksa lari ke tempat asal mereka di Kalimantan Selatan dan Jawa. Pemerintah Indonesia, yang sebelumnya sudah mengumumkan bahwa kondisi sudah membaik dan sudah memungkinkan penarikan mundur sejumlah besar pasukan tentara, terpaksa mengirimkan kembali beberapa batalion yang baru, dengan konsekuensi yang mudah diduga berupa penahanan massal dan kebrutalan, yang tidak merepresentasikan apa-apa selain politik *cul-de-sac*.

Menurut Anderson (1998) semua ini telah mengakibatkan suatu peralihan yang nyata dalam kebijakan Amerika. Amerika tidak mendukung Indonesia pada pertemuan Hak Asasi Manusia PBB di Wina; Kementerian Luar Negeri memblokir penjualan pesawat terbang militer. Presiden AS Bill Clinton menasehati Soeharto pada pertemuan G-7 di Tokyo dan secara terang-terangan

---

dunia internasional. Buku tersebut berjudul, *The Pebble in the Shoe: The Diplomatic Struggle for East Timor*, Jakarta: Aksara Karunia, 2006

mendukung pembicaraan Indonesia Portugis yang diaktifkan kembali di bawah perlindungan Boutros-Ghali. Sementara itu, keprihatinan Kongres yang sudah berlangsung lama dan mendapat dukungan dari dua partai telah secara jelas beralih dari hak asasi manusia orang Timor Timur ke arah hak penentuan nasib mereka sendiri (*self determination*). Dalam peralihan tersebut, Soeharto semakin terpojok, ditambah lagi gejala-gejala keresahan rakyat Indonesia yang semakin membesar, bersama dengan berbagai konflik di kalangan elite penguasa. Melihat gambaran suram ini, Anderson menulis:

Bagi Jakarta tidak ada jalan keluar. Mengulang kebengisan dasawarsa 1970-an tidaklah masuk akal; sementara ‘pembangunan’ dasawarsa 1980-an telah mengarah justru kepada intensifikasi nasionalisme dan Katolikisme rakyat Timor Timur. Tak ada yang menunjukkan kesadaran akan kebuntuan ini yang lebih baik ketimbang memoir Jendral Murdani yang belakangan ini dipublikasikan. Naskah ini terutama merupakan sebuah katalog yang sombong mengenai berbagai kejayaan politik dan militer penulisnya; tetapi mengenai Timor Timur tidak disinggung sama sekali, kecuali sedikit mengenai invasi yang rusak pada tahun 1975, yang dipersalahkan karena para pengawas yang tanpa nama. Barangkali terobosan akhir harus menunggu hingga kematian politik dan fisik Soeharto, meskipun ia telah menunjukkan, pada masa silam, suatu kapasitas bagi realisme dan pembatasan yang mengejutkan. Tak ada pengganti yang masuk akal akan memiliki kekuasaan atau kapasitas untuk bertahan sangat lama demi menghadapi pasang-surut usaha imperial Indonesia. (Anderson, 1998: 246-247)

#### 4.C.3. Memilih berpisah dengan Indonesia

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak akhir 1997, terus meluncur semakin memperburuk berbagai bidang kehidupan masyarakat Indonesia. Tak terkecuali kehidupan politik. Krisis sembako (sembilan bahan pokok) yang dirasakan masyarakat luas berujung pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Berbagai aksi mahasiswa dan massa rakyat silih berganti mewarnai berbagai kota besar di Indonesia. Menghadapi gejolak masyarakat yang gelisah, pemerintah melalui aparat keamanannya, seperti biasa mengambil tindakan yang represif. Aksi di kampus-kampus mahasiswa, seringkali diakhiri dengan penangkapan, penganiayaan bahkan penculikan oleh aparat keamanan. Situasi ini menambah tingkat kemarahan dan kejengkelan

mahasiswa. Bukannya takut atau menghentikan aksi, mahasiswa dan masyarakat justru semakin berani melawan aparat keamanan, dan semakin hari jumlah massa yang berkumpul dalam aksi semakin membesar. Berbagai kerusuhan pun hampir setiap hari terjadi. Sejak awal Mei 1998, kota Jakarta nyaris tidak pernah sepi dari aksi massa. Pada 12-13 Mei terjadi aksi besar di kampus Universitas Trisakti, yang mengakibatkan sejumlah mahasiswa tewas. Ini semua memicu mahasiswa untuk menyatukan barisan yang nyata untuk menantang rejim Soeharto yang dirasakan sudah sangat keterlaluan. Dan ujungnya adalah pada pendudukan gedung DPR/MPR oleh mahasiswa dan massa rakyat. Kalau sebelumnya tuntutan mereka adalah turunkan harga sembako, maka kini mereka menuntut agar Soeharto turun dari jabatannya sebagai presiden.

Pendek kata, menghadapi situasi yang tak mungkin dikendalikan lagi, akhirnya Soeharto memilih untuk berhenti. Peristiwa itu terjadi pada 21 Mei 1998. Jabatan kepresidenan diambil alih oleh Wakil Presiden BJ Habibie. Dalam situasi yang serba sulit dan legitimasi yang sangat minim, Habibie tak banyak mengambil kebijakan yang mendasar. Satu-satunya kebijakan yang mungkin menyita perhatian baik publik Indonesia maupun luar negeri, adalah keputusannya untuk memberikan dua opsi bagi rakyat Timor Timur. Mereka diberi kesempatan untuk melakukan referendum, untuk memilih, apakah ingin tetap bergabung dengan Indonesia dan diberi otonomi yang diperluas, ataukah berpisah. Oleh sebagian kalangan kebijakan Habibie ini dinilai sebagai 'keputusan yang berani'. Penilaian ini atas dasar pertimbangan; *pertama*, hanya berselang beberapa minggu setelah menerima peralihan pemerintah Republik Indonesia dari Presiden Soeharto pada bulan Mei 1998, Habibie pada 9 Juni 1998 sudah mengumumkan tawaran Opsi I berupa kesediaan Pemerintah Republik Indonesia untuk memberikan status khusus dengan otonomi luas sebagai formula untuk mencapai penyelesaian politik masalah Timor Timur. Habibie menawarkan otonomi khusus bagi Timor Timur menjelang pembicaraan dengan IMF. Ketika bertemu Uskup Belo pada tanggal 24 Juni 1998, Habibie mengumumkan bahwa sedikit demi sedikit TNI akan ditarik keluar dari Timor Timur dalam rangka otonomi luas yang ia tawarkan.

*Kedua*, yang cukup membuat terkejut banyak pihak karena perundingan untuk mematangkan Opsi I berupa Otonomi Daerah Khusus Timor Timur pun belum final dan waktunya hanya berselang sekitar 6 bulan sejak Opsi I dikeluarkan, Menlu Ali Alatas mengumumkan keputusan Sidang Kabinet Paripurna pada tanggal 27 Januari 1999 tentang pemberian Opsi II. Ini berarti jika tawaran otonomi luas ditolak oleh mayoritas rakyat Timor Timur, maka pemerintah RI akan mengusulkan kepada Sidang Umum MPR yang baru terpilih agar Timor Timur dapat berpisah dari pangkuan RI secara baik, terhormat, tertib dan konstitusional. Didampingi Menteri Penerangan Yunus Yosfiah dan Penasehat Politik merangkap Juru Bicara Presiden Dewi Fortuna Anwar, Menteri Luar Negeri Ali Alatas Menjelaskan hasil Sidang kabinet hari itu kepada para wartawan:

“...Satu alternatif yang antara lain didengung-dengungkan oleh lawan-lawan kita adalah menerima otonomi itu secara luas 5 tahun sampai 10 tahun, Pemerintah RI terus melaksanakan otonomi, dengan lain perkataan mereka bebas sebebas-bebasnya, kita terus membiayai mereka, tidak ada biaya nasional sendiri, kita beri segala macam, setelah sepuluh tahun berlalu mereka katakan goodbye, terimakasih. Itu usul mereka. Kita katakan itu tidak akan jalan. Tetapi harus ada alternatif. Bagaimana alternatif penyelesaiannya. Seperti saya katakan tadi, kalau setelah 23 tahun tetap tidak dimengerti dan dihargai, tetap tidak bisa dilihat bahwa Indonesia itu masuk ke Timtim bukan untuk mencapai sesuatu tetapi untuk memberi, maka tidak usahlah banyak cingcong, 5 tahun, 10 tahun, tidak ada itu. Sekalian sajalah kita keluar. Artinya, kalau rakyat Timtim tidak mau penyelesaian dengan otonomi, maka kita akan mengusulkan kepada SU MPR untuk memutuskan bahwa kita mencari bentuk dimana kita bisa berpisah secara terhormat dan baik-baik, tidak secara jelek-jelek.” (Harian *Suara Timor Timur*, 28 Januari 199, dalam, Makarim dkk, tt: 31)

Keputusan Habibie yang memberi Opsi II (Referendum) sangat mengejutkan publik Indonesia dan juga publik internasional, dan mendapat tanggapan yang beragam. Mantan Duta Besar RI untuk PBB, Nugroho Wisnumurti menggambarkan keputusan Opsi II yang dikeluarkan Habibie itu bagaikan halilintar di siang bolong. (*Panji Masyarakat*, 15 September 1999, dalam Makarim, tt: 39). Keterkejutan Nugroho sangat wajar mengingat dirinyalah yang selama bertahun-tahun menjalani lobi-lobi panjang yang

melelahkan dengan Portugal dan PBB di New York tentang pemberian otonomi bagi Timor Timur. Tetapi ada juga yang memberi apresiasi terhadap kebijakan Habibie tersebut. Pengamat politik Bilver Singh, menilai dalam jangka pendek mungkin keputusan melepas Timor Timur merupakan kekalahan diplomatik politik. Tetapi dalam jangka panjang, boleh jadi merupakan keputusan yang benar. Ia menyebut Habibie sebagai seorang politikus yang sangat berani dan keputusannya adalah benar, *“He is very daring politician and his right decision cannot be wrong.”* (Makarim, tt: 57)

Habibie memang menaruh perhatian sangat besar terhadap masalah Timor Timur, yang dilihatnya selama ini hanya menimbulkan kerumitan bagi Indonesia, sehingga ia ingin masalah Timor Timur diselesaikan secepat mungkin. Dalam sebuah pertemuan dengan pimpinan DPR pada 4 Februari 1999, pada Munas Kadin Indonesia 11 Februari 1999, juga pada acara silaturahmi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tanggal 12 Februari 1999. Pada acara-acara tersebut yang selalu disiarkan TVRI dan sejumlah televisi lainnya, ia menegaskan bahwa tahun 2000 masalah Timor Timur sudah harus selesai. Bagi Habibie Timor Timur merupakan masalah yang harus segera dituntaskan. Ia mengibaratkan infeksi yang harus segera disembuhkan atau bahkan disingkirkan. Ia mengatakan:

“Jika terjadi infeksi usus buntu di tubuh kita, maka sangatlah masuk akal jika infeksi itu harus segera disingkirkan secepat mungkin sebelum menjalar ke seluruh tubuh. Keputusan menerima integrasi Timtim ke wilayah Indonesia adalah tindakan kemanusiaan semata. Tetapi keuntungan apa yang Indonesia peroleh? Sumber daya alam? Tidak. Sumber daya manusia? Tidak. Teknologi? Tidak. Tambang emas yang berlimpah? Tidak. Batuan dan lemparan batu? Ya, benar!”. (Pernyataan Habibie ketika menerima delegasi daerah Sulawesi Utara pada 23 Februari 1999, dalam Makarim, tt: 57)

Tawaran Habibie untuk Opsi II, yang berarti dilaksanakan referendum bagi rakyat Timor Timur, langsung mendapat respons positif dari dunia internasional. PBB langsung membentuk badan untuk memfasilitasi bagi dilaksanakannya jajak pendapat tersebut, yaitu UNAMET. Tanggal pelaksanaan jajak pendapat pun sudah ditetapkan, 30 Agustus 1999. Sekitar

400.000 penduduk Timor Timur ambil bagian dalam pemberian suara. Hasilnya 78,5 persen menyatakan menolak otonomi (yang berarti menolak integrasi dengan Indonesia) dan selebihnya 21,5 persen menerima otonomi.<sup>39</sup> Dan dengan demikian, masyarakat Timor Timur telah menyatakan sikapnya; berpisah dengan Indonesia.<sup>40</sup>

Pasca penentuan jajak pendapat yang mendapat perhatian dunia internasional itu, di Timor Timur terjadi kekerasan yang luar biasa. Pembunuhan, penyiksaan, pembakaran, pemerkosaan dan berbagai macam tindak kejahatan kemanusiaan berlangsung. Ribuan orang mengungsi ke wilayah perbatasan di Atambua dan beberapa daerah lainnya. Peristiwa ini ditanggapi serius oleh berbagai lembaga internasional. Pihak Indonesia dan Timor Timur (yang kemudian setelah berdiri menjadi negara tersendiri bernama Republik Demokratik Timor Leste), membentuk organisasi bersama untuk menyelesaikan kasus tersebut. Organisasi tersebut bernama Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia Timor Leste. Komisi ini diberi tugas untuk menetapkan kebenaran Konklusif tentang peristiwa pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilaporkan terjadi menjelang, segera, setelah Jajak Pendapat tanggal 30 Agustus 1999 dan menyusun rekomendasi-rekomendasi yang dapat membantu menyembuhkan luka-luka lama dan memperkokoh persahabatan. Rekomendasi itu sendiri bertujuan untuk mewujudkan masa

---

<sup>39</sup> Dari kalangan Indonesia, ada sejumlah pihak yang menyangsikan kejujuran UNAMET dalam penyelenggaraan jajak pendapat, sehingga bisa menghasilkan suara yang benar-benar sesuai keinginan rakyat Timor Timur. Salah satu bentuk kesangsian itu disampaikan oleh wartawan senior Rosihan Anwar. Ia menyaksikan, pada acara 'Question and Answer' yang disiarkan CNN pada tanggal 1 Maret 1999, jauh sebelum jajak pendapat dilaksanakan, hasilnya sudah dapat diperkirakan dengan pasti, 78 persen menolak dan 22 persen menerima otonomi. Narasumber yang hadir dalam acara tersebut Utusan Khusus Sekjen PBB Jamshed Marker dan pengamat politik Prof. James Clad dari Universitas George Town AS. Rosihan sangat kaget karena angka-angka itu sama dengan hasil jajak pendapat yang diumumkan tanggal 4 September 1999. (*Kompas*, 4 Maret 2002, dalam Makarim, tt: 19-20)

<sup>40</sup> Nada sesal yang mendalam diungkapkan seorang pengamat militer Iswahyudi Karim, atas lepasnya Timor Timur dari NKRI, dan ia menunjuk bahwa ini adalah kesalahan satu orang, Habibie. Ia menulis; '*Lepas sudah Timor Timur dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bukan karena ABRI kalah perang. Bukan juga karena rakyat Indonesia sudah tak sudi lagi menerima saudara-saudara mereka dari Timor Timur berada di bawah naungan Sang saka Merah Putih, tetapi karena satu orang yang kebetulan pada waktu itu menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia melepas Timor Timur dari NKRI tanpa persetujuan dari 210 juta rakyat Indonesia yang dipimpinnya. Pahit bagi kita. Lebih pahit lagi ABRI yang telah kehilangan 2.292 orang prajuritnya gugur seperti ditulis di Monumen Seroja, belum terhitung lagi yang belum tercatat dan ribuan lainnya menderita cacat tubuh.*' (Iswahyudi Karim, dalam Subroto, 2005: xi)

depan yang damai dan sejahtera bagi kedua negara yang akan menjadi catatan sejarah bersama. Kedua pemimpin negara RI dan Timor Leste bertekad akan menutup lembaran sejarah kelam yang pernah terjadi di masa lalu. Presiden Indonesia Megawati Soekarnoputri, menunjukkan jiwa besar Indonesia dengan hadir pada perayaan kemerdekaan Timor Leste pada 20 Mei 2002 di Dili. Presiden Timor Leste Xanana Gusmao, dalam pidatonya tak menyebutkan kejahatan militer Indonesia, ia hanya mengatakan 'hubungan yang sulit selama 24 tahun', yang ia sebut sebagai 'akibat dari kesalahan sejarah yang sekarang menjadi milik sejarah masa lalu'. (Nevins, 2008: 204)

#### 4.C.4. Catatan

Sejak awal, sejarah integrasi Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sangatlah problematik. Indonesia terlibat dalam wilayah Timor Timur (Timor Portugis) saat daerah itu berada dalam gejolak internal menuju dekolonisasi dari Portugal. Portugal sendiri saat itu belum menemukan formula yang tepat bagaimana melepaskan daerah yang sudah dijajahnya selama ratusan tahun itu secara elegan dan terhormat. Konflik internal di dalam masyarakat Timor Timur mulai marak ketika terjadi pergantian pemerintahan Portugal pasca 'revolusi anyelir' (*carnation revolution*) dari Caetano kepada Pimpinan Angkatan Bersenjata (AFM) Antonio de Spínola. Seiring perubahan konstelasi politik internasional (dimana negara-negara jajahan Barat mayoritas sudah terlepas dan berhasil menjadi bangsa yang merdeka), ditambah juga krisis ekonomi di Portugal sebagai konsekuensi beban besar yang harus ditanggung negeri itu untuk membiayai perang dan mempertahankan koloninya di Asia dan Afrika, Spínola memiliki pandangan baru tentang perlunya memberikan otonomi bagi koloni-koloninya yang berada di luar daratan Eropa itu.

Kebijakan Spínola segera direspons oleh masyarakat Timor Portugal untuk mempersiapkan segala kemungkinan bagi bangsa itu untuk menentukan masa depannya sendiri. Pada saat itu pula mereka segera membangun partai-partai politik, untuk mengagregasi aspirasi masyarakat setempat. Partai politik yang pertama kali terbentuk adalah *Uniao Democratica Timorese* (UDT-Partai

Serikat Demokratik Timor). Berikutnya muncul *Associacao Social Democratica Timor* (ASDT-Asosiasi Sosial Demokratik Timor), dan *Associacao Popular Democratica Timor* (APODETI-Asosiasi Demokratik Populer Timor). Di samping itu masih ada tiga partai politik yang relatif sangat kecil pendukungnya yaitu; *Klibur Oan Timur Aswain* (Kota-Putra Prajurit Gunung), *Partindo Trabalhista* (Partai Buruh) dan *Associacao Democratica Integracao Timor Leste Australia* (ADLITA). Secara umum garis politik partai-partai ini terbagi dalam empat kelompok; menginginkan tetap integrasi dengan Portugal (UDT), menginginkan integrasi dengan Australia (ADLITA), menginginkan integrasi dengan Indonesia (APODETI), dan ingin berdiri sendiri sebagai negara merdeka (ASDT) yang kemudian menjadi Fretilin.

Dalam perkembangannya, kedua aspirasi yang pertama tidak berkembang, karena sikap kedua negeri itu (Portugal dan Australia) yang tidak mendukung gerakan tersebut. Yang tertinggal hanyalah dua kekuatan yang saling bersaing; menghendaki bergabung dengan Indonesia, dan yang menginginkan kemerdekaan penuh, berdiri sebagai negeri sendiri yang berdaulat. Indonesia sendiri semula menunjukkan sikapnya yang netral dan tidak menunjukkan niat untuk memasukkan wilayah tersebut sebagai bagian dari NKRI. Yang paling jauh dijadikan argumen keterlibatan Indonesia dalam konflik perbatasan hanyalah ingin menjaga wilayah kedaulatannya dari persoalan negeri tetangganya tersebut. Tetapi belakangan seiring dengan perkembangan konstelasi politik dunia, argumen keterlibatan Indonesia dalam masalah Timor Timur pun menjadi berkembang.

Titik tolak yang sangat penting bagi sikap dan kemudian keterlibatan Indonesia dalam masalah Timor Timur terjadi pada September 1974 ketika Presiden Soeharto bertemu dengan Perdana Menteri Australia Gough Whitlam di Wonosobo, di mana Whitlam menandatangani dukungan pemerintah Australia bagi pengambil alihan Timor Timur oleh Indonesia. Yang juga turut menentukan adalah kesediaan Amerika untuk memberikan bantuan peralatan militer yang dibutuhkan Indonesia bagi invasi ke Timor Timur tersebut. Australia dan Amerika Serikat memberikan dukungan bagi Indonesia untuk mengambil wilayah Timor Timur karena dua alasan utama, pertama alasan

ideologis, dimana keduanya tidak menginginkan Timor Timur menjadi basis berkembangnya komunisme dan sosialisme di wilayah Asia, dan kedua alasan ekonomis dan strategi pertahanan global. Australia mengharapkan dapat menikmati kandungan minyak yang berada di Celah Timor yang diduga berjumlah sangat besar sekali, sementara Amerika Serikat mengharapkan dapat mengakses perairan selat Ombai Wetar yang sangat dalam agar kapal selam mereka yang berhulu ledak nuklir dapat melintasi jalur Samudra Pasifik ke Samudra Hindia untuk ekspansi ke selatan ke arah Uni Soviet, tanpa terdeteksi negara pesaingnya tersebut. Sikap Amerika Serikat dalam hal ini sangat jelas, ketika tanggal 16 Agustus 1974, Duta Besar Amerika di Jakarta, menyatakan pemerintah AS berharap penyerangan Indonesia atas Timor Timur haruslah dilakukan dengan 'efektif dan cepat'. Ketika Senat Amerika mempersoalkan sikap pemerintah AS yang mengetahui dan mendukung Indonesia dalam penyerbuan ke Timor Timur sebagai suatu bentuk kebohongan, Menlu AS Henry Kissinger malah dengan bangga mengatakan; 'Ilegal dan indah' (Nevins, 2008: 70)

Dukungan internasional yang begitu melimpah membuat Pemerintah Indonesia tidak ragu lagi untuk mengambil langkah cepat memasuki Timor Timur. Pemerintah lawan BAKIN membuat tim khusus yang disebut OPSUS untuk melakukan tugas pengambil alihan Timor Timur ini.<sup>41</sup> Selain Jendral Soeharto sendiri sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Perang, ada sejumlah jendral dalam Opsus ini, antara Yoga Sugama, Ali Murtopo, dan LB Murdani. Di bawah kendali mereka inilah pengambil-alihan dilakukan. Setelah melalui operasi teritorial, dan dipandang terlalu lambat, dilakukanlah operasi besar-besaran yang melibatkan seluruh angkatan dalam TNI. Jumlah korban jiwa dari kedua belah pihak mencapai ribuan orang. Dan di atas semua ini, pada tanggal 30 November 1975, dilakukanlah suatu deklarasi integrasi Timor Timur dengan Indonesia, yang terkenal dengan 'Deklarasi Balibo'. Deklarasi ini

---

<sup>41</sup> Sekitar enam pekan sebelum invasi, dua arsitek invasi Indonesia atas Timor Timur, Ali Murtopo dan LB Murdani mengunjungi Cornell University Amerika Serikat. Mengenai rencana invasi Indonesia terhadap Timor Timur, kepada audiens di universitas tersebut keduanya dengan penuh tawa meyakinkan mengatakan bahwa, 'segala sesuatunya akan selesai dalam tiga pekan'. (Anderson, 1998: 236)

ditandatangani oleh enam orang yang mewakili empat partai politik yang ada di Timor Timur, yaitu: Apodeti, UDT, KOTA dan Tralabista. Naskah Deklarasi tersebut kemudian dikirim kepada pemerintah Indonesia di Jakarta. 8 (delapan) bulan kemudian (yaitu pada 17 Juli 1976) Soeharto menandatangani integrasi resmi Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan sejak saat itu pula posisi resmi Amerika Serikat adalah menerima aneksasi Timor Timur sebagai *fait accompli*, dan karena itu sebagai bagian *de facto* (tetapi tidak *de jure*) Indonesia. (Nevins, 2008: 70)

Kisah proses integrasi yang ‘berdarah’ ini rupanya terus menjadi kenangan buruk bagi masyarakat Timor Timur. Apalagi praktik kekerasan tersebut tidak juga berhenti selama 24 tahun ‘berintegrasi’ dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Buruknya kondisi ekonomi, kesehatan, pendidikan, ditambah praktik diskriminasi dan seringkali juga pelecehan budaya (dan agama) semakin memupuk keinginan warga Timor Timur untuk melepaskan diri dari Indonesia. Seperti digambarkan Anderson (1998), dengan semakin banyaknya insiden kekerasan antara kaum muda Timor Timur dan para petualang (yang kebanyakan Muslim) yang mendominasi pasar daerah, yang mencapai puncaknya pada kerusuhan kota hampir di seluruh daerah itu pada bulan Oktober 1995, semuanya bermuara pada intensifikasi nasionalisme dan Katolikisme rakyat Timor Timur. (Anderson, 1995: 246)

Puncak kejengkelan itu adalah pada Peristiwa Santa Cruz 12 November 1991, dimana lebih dari 180 orang Timor Timur tewas seketika akibat tembakan tentara Indonesia. Peristiwa ini rupanya justru menjadi titik balik bagi sejarah Timor Timur, karena peristiwa itu telah menggugah kepedulian dunia bagi perjuangan masyarakat Timor Timur. Opini internasional membuat Indonesia berada dalam posisi terpojok, sementara negara-negara besar yang dulu mendukung Indonesia dalam proses invasi, seperti Australia dan Amerika Serikat, tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan kadang-kadang justru turut memojokkan Indonesia. Situasi ini pada akhirnya memaksa Indonesia—yang pasca reformasi 1998 memberikan corak kepemimpinan yang berbeda—untuk bersikap yang lebih terbuka mengenai masalah Timor Timur. Dihadapkan pada berbagai tekanan internasional, pemerintahan transisional pimpinan BJ Habibie, tak memiliki banyak daya tawar. Dan cukup mengejutkan banyak pihak bahwa

dalam waktu yang singkat, pada 9 Juni 1998 (tak lebih dari sebulan masa kepresidenannya) Habibie mengeluarkan kebijakan untuk memberikan opsi referendum bagi penentuan masa depan Timor Timur. Pihak internasional, PBB, segera memfasilitasi opsi ini. Dan sebulan kemudian, yaitu pada 30 Agustus dilangsungkanlah proses jajak pendapat untuk menentukan masa depan Timor Timur. Dan hasilnya 78,5 persen masyarakat menyatakan menolak otonomi (yang berarti menolak berintegrasi dengan Indonesia), dan selebihnya, 21,5 persen menerima otonomi. Atas dasar inilah, Timor Timur sejak itu terlepas dari NKRI, dan berdiri sebagai negeri sendiri yang berdaulat dengan nama Republik Demokratik Timor Leste.

Jika kasus Timor Timur dianggap sebagai suatu 'proyek nasionalisme Indonesia' yang gagal, maka tampaknya kegagalan itu langsung menyentuh dua dimensi sekaligus, dimensi vertikal dan horisontal. Secara vertikal (yang mencakup segi politik, ekonomi, hukum dan sikap para elite Jakarta) tidak tampak adanya aspek yang mendukung bagi terwujudnya nasionalisme ke-Indonesiaan (secara lebih praktis berupa terjadinya integrasi nasional) tersebut. Pengakuan internasional secara *de jure* tidak ada, sementara sikap politik elite pun memperlihatkan bentuk arogansi yang menempatkan rakyat Timor Timur sebagai obyek kecil yang bisa ditentukan semaunya, seperti tampak dalam pernyataan LB Murdani berikut:

“Jangan mimpi punya Negara Timtim. Tidak ada kemungkinan seperti itu! Di masa lalu, ada beberapa Negara kecil yang ingin berdiri sendiri, dan tanpa lelah pemerintah Indonesia mengambil langkah-langkah untuk menghentikan hal itu. Semua kekuatan yang ada kami gunakan untuk mencegah terciptanya Negara-negara kecil. Dan hal ini juga berlaku di Timtim...ABRI mungkin gagal saat pertama, tetapi ia akan mencoba untuk kedua dan ketiga kalinya. Ada pemberontakan lebih besar, ada perbedaan pendapat yang jauh lebih tajam pada pemerintah ketimbang segelintir orang yang menamakan dirinya Fretilin, atau siapa pun simpatisannya di sini. Kami akan menghancurkan mereka semua! Saya ulangi, kami akan menghancurkan mereka semua! (Pidato Jenderal Murdani, dili 3 Februari 1990, ditranskrip dari kaset oleh Liem Soei Liong, dan diterjemahkan oleh Carmel Budiardjo. Pidato ini tersedia sebagai dokumen Tapol, direproduksi dalam, Taylor, hal. 350)<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Taylor juga mengutip pernyataan lain yang senada yang diucapkan oleh seorang tentara Indonesia: 'Kami tentara Indonesia tidak membutuhkan orang Timor,' tegas seorang komandan garnisun militer Dili. "Kami berhuungan dengan orang Timor seperti kami

Sementara itu dari dimensi horisontal (yang mencakup identitas budaya lokal, agama, ideologi, kekerabatan, dan sebagainya), juga tampak tidak ada aspek yang mendukung bagi terwujudnya ‘nasionalisme ke-Indonesiaan’ di kalangan masyarakat Timor Timur.

#### 4.D. “Permasalahan di Irian Jaya”<sup>43</sup>

Papua (yang dulu disebut Irian Jaya) merupakan wilayah paling ujung bagian timur Indonesia. Sejak dinyatakan bergabung dengan Indonesia pada tahun 1969 dan juga telah disahkan oleh PBB pada 19 November 1969, merupakan daerah yang tidak pernah sepi dengan pergolakan. Maraknya berbagai gerakan di wilayah itu selama ini dipersepsikan sebagai upaya sekelompok masyarakat Papua (khususnya Organisasi Papua Merdeka/OPM) untuk memisahkan diri dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai reaksi atas gerakan-gerakan tersebut, tentara telah banyak melakukan tindak kekerasan, baik melalui penangkapan, penganiayaan hingga pembunuhan. Tetapi menurut Manuel Kaisiepo, seorang wartawan Papua, sebenarnya gerakan separatis itu tidak ada. Yang ada hanyalah aksi-aksi biasa yang dilakukan masyarakat untuk mengekspresikan kekecewaan dan kemarahan mereka, karena diperlakukan tidak adil, sewenang-wenang, dan tanpa menghormati martabat kemanusiaan mereka. Gambaran mengenai hal itu dapat disimak dalam sebuah artikelnya yang dibuat tahun 1993 yang berjudul ‘Permasalahan di Irian Jaya’. Berikut kutipan poin-poin penting yang

---

berhubungan dengan babi—kami menjagal mereka kapan pun kalau mungkin.’ (Taylor, 296; diproduksi dari sebuah makalah yang disajikan dalam the Fourth Christian Consultation on East Timor, 22-24 Januari 1990, Lisabon)

<sup>43</sup> Sumber: David Bourchier dan Vedi R. Hadiz, *Pemikiran Sosial dan Politik Indonesia Periode 1965-1999*, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2006. Hal. 346-350. Tentang asal-usul tulisan ini, Bourchier & Hadiz memberikan catatan sebagai berikut; “Intisari ini berasal dari makalah seminar oleh wartawan moderat dari Papua, Manuel Keisiepo, yang menyoroti sejumlah keluhan utama rakyat Papua di bawah Orde Baru. Makalah ini juga menggambarkan sulitnya memunculkan gagasan nasionalisme regional dalam atmosfir politik yang mengabaikan semua gagasan. Makalah berjudul ‘Ke-Irian-an dan Ke-Indomnesia-an: Mengkaji Nasionalisme dalam konteks lokal’ ini disampaikan dalam sebuah seminar tentang nasionalisme Indonesia Menjelang dan Pada Abab XXI’ di Salatiga pada Juni 1993 (Kaisiepo, 1993)

kurang lebih menggambarkan wacana lokal dalam melihat persoalan yang ada:

Penting untuk dipahami, aksi-aksi perlawanan yang muncul secara sporadis hingga beberapa tahun terakhir ini tidak lagi dilandasi oleh tujuan separatis ingin mewujudkan 'Negara Papua', melainkan lebih karena faktor-faktor lain, misalnya ketidakpuasan sosial.

Gerakan-gerakan perlawanan yang bersifat sporadis itu walaupun masih menyandang nama OPM, namun sesungguhnya hanya 'OPM' (dalam tanda petik) yang tidak dilandasi oleh keyakinan, cita-cita dan tujuan politik yang jelas.

Yang menjadi persoalan sekarang, sekalipun eksistensi gerakan-gerakan perlawanan dengan nama 'OPM' itu tidak berarti lagi secara politik dan lebih-lebih secara militer, tetapi tetap perlu mendapat perhatian mengapa gerakan-gerakan itu masih ada hingga kini. Sebab tanpa pemahaman yang jelas akar persoalannya, kita senantiasa akan tergelincir dalam kesimpulan keliru mengenai aksi-aksi perlawanan tersebut.

Ada dua faktor yang tampaknya langsung atau tak langsung berkaitan dengan masih munculnya gerakan-gerakan perlawanan tersebut. *Pertama*, efek sampingan dari pendekatan keamanan yang untuk jangka waktu cukup lama dijalankan di daerah Irian Jaya. Kedua, dampak dari beberapa program pembangunan yang justru dirasakan rakyat setempat sebagai merugikan kepentingan mereka.

Di samping akibat kekecewaan terhadap pemerintah Indonesia, termasuk pemerintah daerah, maraknya gerakan perlawanan di Papua, antara lain juga dipicu oleh sikap dan perilaku tentara yang selalu membuat teror terhadap masyarakat luas, yang sebenarnya tidak mau tahu soal gerakan perlawanan terhadap pemerintah, dengan menuduh mereka sebagai OPM atau 'antek OPM'. Ketakutan dicap OPM, membuat rakyat frustrasi lalu menyingkirkan diri dari keramaian dan masuk ke hutan. Sementara mereka yang di hutan sudah diklasifikasi oleh tentara sebagai OPM atau paling tidak simpatisan OPM. Inilah yang digambarkan Kaisiepo:

Pendekatan keamanan dalam bentuk-bentuk operasi militer yang dijalankan secara intensif dan dalam waktu yang cukup lama di Irian Jaya, memang dimaksudkan untuk menumpas perlawanan OPM selama periode 1965 hingga 1970. Operasi-operasi militer yang intensif itu pada satu pihak bisa menghancurkan kekuasaan kelompok-kelompok perlawanan OPM, namun meninggalkan 'efek sampingan'

berupa rasa takut yang mendalam dan berlarut-larut bahkan menjadi trauma di kalangan rakyat Irian.

Mereka senantiasa dihantui trauma dicap sebagai 'OPM', suatu trauma yang mirip dengan apa yang dialami sebagian penduduk pedesaan Jawa usai penumpasan G30S/PKI tahun 1965/1966, yaitu ketakutan dicap sebagai 'PKI'.

Celakanya, ketakutan akan cap 'OPM' itu seringkali justru dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu, baik dari aparat pemerintah maupun swasta, untuk menakut-nakuti rakyat. Apabila rakyat misalnya menolak melepaskan tanah-tanah mereka untuk keperluan pembangunan proyek-proyek pemerintah atau swasta, dengan mudah mereka akan dicap 'OPM'.

Ketakutan dicap sebagai 'OPM' itulah yang sering menjadi faktor pendorong bagi sebagian rakyat Irian untuk melarikan diri ke hutan, atau malah menjadi pelintas batas menyeberang ke negara tetangga PNG. Sesungguhnya tindakan mereka melarikan diri ke hutan, atau menyeberang ke PNG hanyalah merupakan tindakan mencari selamat, atau semacam mekanisme pertahanan diri (self defense mechanism).

Melarikan diri ke hutan, hanya karena takut dicap OPM, seringkali malah berbalik menjadi bumerang, karena dengan tindakan mereka seperti itu, akhirnya benar-benar dicap sebagai OPM, dan kembali menjadi sasaran operasi militer. Contoh dari kasus semacam ini adalah peristiwa 'eksodus' sejumlah besar rakyat Irian ke Papua Nugini awal tahun 1984.

Problem yang juga nyata dihadapi oleh masyarakat Papua, menurut Kaisepo adalah tentang pembangunan dan kemiskinan. Pembangunan yang dijalankan pemerintah Indonesia di Irian Jaya sejak integrasi memang telah berhasil di beberapa sektor dan hasilnya benar-benar bisa dirasakan rakyat Irian Jaya. Tapi di sisi lain, pendekatan pembangunan yang dilakukan dan dampak dari beberapa program pembangunan yang ada, justru merugikan rakyat Irian, yang seterusnya menimbulkan rasa tidak puas, kecewa, bahkan pada titik ekstrem, mendorong mereka melakukan aksi-aksi perlawanan. Beberapa contoh untuk itu adalah soal pembebasan tanah-tanah adat milik rakyat untuk keperluan penebangan kayu (HPH), untuk program transmigrasi atau proyek-proyek lainnya tanpa menghiraukan hukum adat yang dianut rakyat setempat, sering menjadi pemicu timbulnya rasa tidak puas yang kemudian meningkat menjadi aksi perlawanan kepada pemerintah. Membanjirnya transmigran dari Jawa dan arus migran dari Sulawesi Selatan

yang menguasai hampir seluruh sektor dari kelas menengah sampai kelas bawah, jelas dirasakan suatu yang tidak adil buat rakyat Irian Jaya. Mengutip data dari Kanwil Transmigrasi Irian Jaya, Kaisepo mencatat bahwa:

.... transmigran dari Jawa sejak Pelita I hingga Pelita V terus meningkat, dan pada bulan April 1993, 23.947 KK atau sebanyak 102.941 jiwa.

Sedangkan arus migran dari Sulawesi Selatan yang datang ke Irian Jaya, menurut penelitian George J. Aditjondro, adalah sebesar 3.000-4.000 orang setiap tahun, sehingga dalam periode 1970-1985 diperkirakan sekitar 60.000 migran asal Sulsel yang menetap di Irian Jaya, yang tentunya jumlah lebih membesar lagi saat ini.

Kehadiran para migran itu ternyata membawa beberapa dampak negatif, di antaranya: (1) cara berjual beli yang tidak fair; (2) persaingan usaha yang tidak seimbang antara mereka dengan penduduk asli; (3) Pengurusan sumber-sumber alam hayati di laut maupun di darat; (4) Konflik-konflik tanah; (5) Perkawinan bermotif bisnis; (6) Kriminalitas.

Beberapa hal lain yang juga disinggung Kaisepo adalah soal perasaan tidak puas di kalangan muda lulusan SLA dan Perguruan Tinggi yang mengganggu, karena sebagian besar pekerjaan telah diduduki oleh 'pendatang' (suatu istilah yang punya konotasi negatif). Dari data Kanwil Depnaker Irja tahun 1992, memperlihatkan bahwa jumlah pencari kerja terbesar adalah lulusan SLTA sebanyak 67.418 orang, disusul SD sebanyak 23.018 orang, SLTP 15.369 orang dan sarjana/diploma sebanyak 5.902 orang. Jumlah besar generasi muda yang belum mendapat pekerjaan itu, jelas bisa melahirkan berbagai implikasi sosial yang cukup pelik. Hal ini masih ditambah lagi soal kemiskinan di kalangan rakyat Irian, khususnya yang tinggal di daerah pedesaan. Dari 11 Propinsi yang secara regional mempunyai persentase penduduk miskin yang berada di atas rata-rata nasional pada tahun 1987, Irian Jaya berada di urutan teratas. Kaisepo juga memperlihatkan angka investasi pembangunan dan pendapatan per kapita di Irian Jaya. Investasi di daerah ini cukup besar di sektor pertambangan dan pengelolaan hutan. Dalam urutan komposisi PDRB Irian Jaya menurut Lapangan Usaha tahun 1990, sektor pertambangan adalah yang terbesar, yaitu 31,55 persen. Persoalannya adalah bahwa keuntungan dari proyek pertambangan ini menjadi milik pemerintah

pusat, sehingga hanya sedikit hasilnya yang bisa dinikmati penduduk Irian Jaya sendiri. Akibatnya ironis, dari segi pendapatan per kapita Irian Jaya adalah paling tinggi, namun kesejahteraan penduduknya lebih buruk dibandingkan daerah lainnya. Pendapatan per kapita Irian Jaya tahun 1985 sebesar 565.086 persen dan tahun 1990 sebesar 690.339 persen dengan rata-rata pertumbuhan 4,43 persen. Akibat dari semua praktik ketidakadilan dan kesewenang-wenangan inilah yang menyebabkan masyarakat Papua melakukan gerakan-gerakan perlawanan. Berikut penuturan Kaisepo:

Akumulasi dari berbagai rasa tidak puas dan kecewa terhadap dampak negatif pembangunan, serta realitas kemiskinan yang melilit kehidupan rakyat Irian Jaya, jelas merupakan faktor-faktor yang sering menjadi pendorong bagi sebagian dari mereka untuk melarikan diri ke hutan, membentuk gerombolan-gerombolan bersenjata melawan pemerintah, atau melintas batas ke PNG.

Jelas bahwa aksi-aksi perlawanan sejak tahun 1970 hingga saat ini yang dilatarbelakangi oleh rasa ketidakpuasan dan kemiskinan itu, bukanlah gerakan yang dilatarbelakangi oleh tujuan politik ingin membentuk 'Negara Papua' seperti halnya di tahun 1965 hingga 1970, walau pun dengan mudah mereka akan dicap 'OPM'.

Dari apa yang ditulis oleh Kaisepo, dapat diambil satu kesimpulan penting berkaitan dengan Nasionalisme Indonesia di kalangan masyarakat Papua. Yaitu bahwa, sebenarnya masyarakat Papua tidak mempersoalkan keberadaannya di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Rasa nasionalisme sebagai warga negara Indonesia itu ada di kalangan masyarakat Papua. Kekerasan perampasan, dan kesewenang-wenangan pemerintahlah (dengan aparat militernya) yang memicu masyarakat Papua untuk melakukan gerakan-gerakan perlawanan yang tidak kunjung henti sejak awal bergabung dengan Indonesia pada tahun 1969 hingga sekarang ini. Gerakan perlawanan itu bukanlah sikap yang sungguh-sungguh berkeinginan untuk melakukan pemisahan diri dari NKRI, melainkan sebagai ekspresi atas kemarahan dan kekecewaan mereka yang telah dizalimi.

Jika ditinjau dari perspektif Michel Foucault, maka akan tampak bahwa di dalam teks yang diproduksi masyarakat Papua tersebut sebenarnya sedang

berlangsung proses *counter* wacana (atau bisa juga dikatakan sebagai perebutan wacana) terhadap apa-apa yang sudah diproduksi oleh Orde Baru, khususnya yang berkaitan dengan pemaknaan nasionalisme, ke-Indonesiaan dan juga 'ke-Papua-an'. Bila diurai lebih lanjut menurut konsep Foucault, maka setidaknya ada 6 (enam) dimensi konseptual yang terlibat dalam perebutan wacana tersebut, yakni; *power, knowledge, games of truth, discourse, counter history, episteme*. Pada dimensi 'power' misalnya, tampak terjadi proses 'legitimasi' *versus* 'deligitimasi' kekuasaan. Ketika Orde Baru berusaha menjelaskan keterlibatannya di Papua sebagai upaya menjaga integritas NKRI, untuk menjaga stabilitas, yang antara lain dipraktikkan dengan menggelar Operasi Militer—salah satunya yang terkenal dengan sebutan 'Operasi Pembebasan Papua'—maka di dalam teks yang diproduksi oleh masyarakat Papua tersebut, digambarkan bahwa yang terjadi hanyalah '...kolonialisme dan pembantaian'.

Demikian pula pada dimensi 'knowledge', sementara Orde Baru membangun wacana bahwa kehadirannya di panggung kekuasaan adalah untuk melakukan 'Pembangunan nasional, Pembaharuan dan modernisasi masyarakat', maka di dalam teks yang diproduksi oleh masyarakat Papua digambarkan bahwa yang terjadi sesungguhnya adalah terlalu banyaknya dampak negatif dari praktik-praktik pembangunan yang dilakukan oleh Orde Baru di Papua. Karena berbagai dampak negatif itu tidak juga ditangani dengan baik, maka yang muncul kemudian adalah gerakan perlawanan rakyat. Dalam teks tersebut dikatakan: '*akumulasi dari berbagai rasa tidak puas dan kecewa terhadap dampak negatif pembangunan, serta realitas kemiskinan yang melilit kehidupan rakyat Irian jaya..merupakan faktor pendorong perlawanan di Papua.*

Dalam konteks ini telah terjadi pula proses perebutan makna kebenaran (*games of truth*) di dalam teks tersebut. Hal itu tampak misalnya ketika Orde Baru mendefinisikan kehadiran dirinya di panggung kekuasaan adalah dalam rangka '*...Melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, Demokrasi Pancasila, kepentingan rakyat di atas segalanya*', maka di dalam teks yang diproduksi masyarakat Papua digambarkan, bahwa yang terjadi selama pembangunan Orde Baru adalah paradoks dan ironi kesenjangan yang parah. Sementara segelintir elite Jakarta menerima keuntungan yang besar, masyarakat

Papua justru terpuruk dalam kemiskinan yang parah: *'...keuntungan proyek pertambangan ...milik pemerintah pusat, akibatnya..hanya sedikit hasilnya yang bisa dinikmati penduduk Irian Jaya..akibatnya, meski dari segi pendapatan perkapita Irian jaya adalah paling tinggi, namun kesejahteraan penduduknya lebih buruk dibanding daerah lainnya.*

Pada dimensi 'discourse' Orde Baru telah membuat sejumlah kategori tertentu untuk menempatkan orang-orang atau sekelompok orang yang dipandang melawan negara sebagai OPM (Organisasi Papua Merdeka), GPK (Gerakan Pengacau Keamanan), PKI (Partai Komunis Indonesia), GAM (Gerakan Aceh Merdeka), dan juga 'gerakan separatis'. Di dalam teks yang diproduksi masyarakat Papua kategori-kategori yang dibuat Orde Baru tersebut hanyalah upaya rezim Soeharto untuk memaksakan kekuasaan yang tidak adil dan tidak berprikemanusiaan di kalangan masyarakat Papua, yang efeknya justru menimbulkan antipati bagi masyarakat Papua terhadap Indonesia. Di dalam teks dikatakan: *'...cap OPM malah sering menjadi bumerang'. Ia menimbulkan efek trauma yang mendalam..'*

Tampak pula bahwa muncul satu permainan perebutan makna kebenaran, *games of truth*, yaitu perebutan pembacaan sejarah, meski tidak setajam yang terjadi dalam teks Aceh, Riau dan Timor Timur. Yaitu ketika Orde Baru sudah mengatakan bahwa bentuk 'NKRI adalah final' termasuk di dalamnya Papua, di dalam teks yang diproduksi masyarakat Papua hal ini tidak diingkari. Baik secara juridis maupun konstitusional ada pengakuan bahwa Papua adalah bagian dari Indonesia. Jadi kalau terjadi perlawanan di kalangan masyarakat Papua, maka itu semua semata dikarenakan ketidakpuasan semata. Dalam teks jelas dikatakan: *'...aksi-aksi perlawanan yang bersifat sporadis...tidaklah dilandasi oleh tujuan sparatis... melainkan lebih karena faktor lain, misalnya ketidakpuasan sosial*

Hal ini kemudian tampak lebih jelas jika kita lihat pada dimensi 'Episteme'. Ketika Orde Baru meletakkan landasan kenegaraan yang dibangunnya di atas asas kekeluargaan, teks yang diproduksi masyarakat Papua sekali lagi mengatakan bahwa praktik pembangunan yang dilakukan pemerintahan Orde Baru-lah yang selama ini telah membuat masyarakat Papua

melawan, karena dianggap tidak adil dan menyebabkan masyarakat Papua terpuruk dalam jurang kemiskinan: 'Masalah ketidakadilan dan kemiskinan yang membuat warga Papua melawan'. Jika dibuat suatu tabel perebutan makna tersebut, akan tampak sebagai berikut:

| FOUCAULT'S CONCEPTS | WACANA ORBA   | WACANA DI PAPUA   |
|---------------------|---|---|
| Power               | 'DOM, Menjaga Integritas NKRI, stabilitas politik,  | ....pembantaian....   |
| Knowledge           | 'Pembangunan nasional, Pembaharuan dan modernisasi masyarakat'  | 'akumulasi dari berbagai rasa tidak puas dan kecewa terhadap dampak negatif pembangunan, serta realitas kemiskinan yang melilit kehidupan rakyat Irian jaya..merupakan faktor pendorong perlawanan di papua   |
| Games of truth      | 'Melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, Demokrasi Pancasila, kepentingan rakyat di atas segalanya' | '...keuntungan proyek pertambangan ...milik pemerintah pusat, akibatnya..hanya sedikit hasilnya yang bisa dinikmati penduduk Irian Jaya..akibatnya, meski dari segi pendapatan perkapita Irian jaya adalah paling tinggi, namun kesejahteraan penduduknya lebih buruk dibanding daerah lainnya. |
| Discourse           | 'OPM, GPK, PKI, GAM, Gerakan Separatis'   | '...cap OPM malah sering menjadi bumerang'. Ia menimbulkan efek trauma yang mendalam.   |
| Counter-history     | 'NKRI Final'  | '...aksi-aksi perlawanan yang bersifat sporadis...tidaklah dilandasi oleh tujuan sparatis... melainkan lebih karena faktor lain, misalnya ketidakpuasan sosial  |
| Epsiteme            | Pembebasan Irian Barat; massa mengambang, Negara kekeluargaan'  | 'Masalah ketidakadilan dan kemiskinan yang membuat warga Papua melawan'   |

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik makna di balik teks yang ditulis Kaisepo tersebut, dalam bagian berikut ini akan dipaparkan konteks sejarah, sosial, politik dan budaya masyarakat Papua.

Papua adalah propinsi yang terletak di sebuah wilayah ujung paling timur Indonesia. Secara geografis, wilayah Papua memiliki batas-batas sebagai berikut: di sebelah utara berbatasan dengan laut Pasifik, di sebelah Selatan berbatasan dengan laut Arafuru dan Propinsi Maluku, di sebelah Timur berbatasan dengan Negara Papua New Guinea dan di sebelah Barat berbatasan dengan sebagian lautan Pasifik dan sebagian Propinsi Maluku. Dengan

demikian Irian Jaya membujur dari Barat ke Timur dengan selang  $11^0$  atau sejauh  $\pm 1200$  km (dari kota Sorong sampai Jayapura) sedangkan lebarnya dari Utara ke Selatan sejauh  $\pm 736$  km (dari kota Jayapura ke Merauke). (Djopari, 1993: 23)

Persinggungan Indonesia dengan Papua telah memakan waktu yang sangat panjang, dengan berbagai versinya. Banyak buku yang mengulas tentang sejarah Papua. Dalam buku yang diterbitkan pada tahun 1992, Cribb menulis bahwa, dewasa ini di Papua hidup sekitar satu juta penduduk asli dengan 200 jenis bahasa daerah. (Cribb, 1992: 206). Salah satu buku sejarah Papua yang terbaru, adalah yang ditulis oleh Sejarawan Belanda Pieter J. Droogdlever, berjudul “Een daad van vrije keuze De Papoea’s van westelijk Nieuw-Guinea en de grenzen van het zelfbeschikkingsrecht” (November, 2005).<sup>44</sup> Buku ini menceritakan tentang masuknya penduduk New Guinea ke dalam era modern. Dalam konteks ini, menurut Droogdlever, Belanda bertindak sebagai perantara sampai tahun 1962. Oleh karena itu banyak perhatian dalam buku ini diarahkan pada tujuan-tujuan dari kebijakan Belanda. Awalnya, tujuan kebijakan Belanda itu bersifat strategis: menetapkan batas timur dari pengaruh kekuasaan Batavia. Dengan menciptakan pusat-pusat pemerintahan yang pertama di tahun 1898, Belanda maju selangkah. Tujuan yang ingin dicapai—meminjam kata-kata Komisararis Plate—adalah ‘untuk mengubah orang-orang liar menjadi manusia beradab.’

Dalam kaitannya dengan Indonesia, Droogdlever menegaskan bahwa, perkembangan nasionalisme Indonesia tidak menyentuh orang-orang Papua sama sekali. Hal ini tidak saja karena tingkat perkembangan mereka yang masih

---

<sup>44</sup> Hingga saat ini penulis belum berhasil memperoleh buku asli Droogdlever ini. Namun Droogdlever menulis sendiri ringkasan buku tersebut dalam bahasa Inggris, yang kemudian diterjemahkan oleh Agus Sumule ke dalam Bahasa Indonesia. Terjemahan Bahasa Indonesia telah diperiksa dan disetujui oleh Droogdlever, dan dimuat dalam situs: <http://www.melenesianews.org/-cgbn/spm/exec/view.cgi?archive=7&num=1612>. Droogdlever mengatakan bahwa, tujuan penulisan buku ini adalah untuk mengemukakan secara jujur peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam suatu proses kompleks masuknya penduduk New Guinea ke dalam abad ke-20. “Ini tidaklah berarti bahwa kisah ini bisa ditulis tanpa perasaan atau tanpa emosi. Mereka yang telah terlibat dalam keadaan yang serba tidak mungkin ini, sebagaimana yang dialami oleh orang-orang Papua selama sejarah mereka, hanya dapat berharap, sebagaimana juga harapan penulis buku ini, bahwa nasib orang-orang Papua akan berubah di abad yang baru kita masuki ini,” tulisnya.

rendah, tetapi juga terkait dengan komunikasi satu-arah dengan seluruh kawasan Hindia Belanda. Mereka yang disebutkan belakangan mengunjungi New Guinea, tetapi kecuali beberapa pelayaran ke pulau-pulau yang dekat, orang-orang Papua tidak mengunjungi pusat-pusat Hindia Belanda yang memang memiliki sangat sedikit untuk ditawarkan kepada orang-orang Papua. “Hanya ada satu kasus di mana orang-orang Papua dikirim ke Jawa untuk disekolahkan, dan pada waktu itu mereka merasa seperti ikan yang dikeluarkan dari dalam air,” tulis Droogdlever. Selanjutnya ia mengatakan:

Ada jarak yang lebar antara para pejabat, guru, dan petugas gereja orang Ambon dan Kai di satu pihak dan masyarakat Papua di pihak lain. Kelompok yang disebutkan pertama ini memandang remeh orang-orang Papua yang kurang maju dan memperlakukan mereka dengan remeh pula. Orang-orang Papua, yang sudah lama menaruh sikap curiga kepada orang-orang pendatang, atau disebut ‘amberi’, yang merampok daerah pesisir mereka dengan pelayaran hongkong Ternate dan Tidore, semakin tidak suka kepada kaum pendatang ini. Ketidaksukaan ini tidak begitu terjadi terhadap orang-orang Eropa yang sebenarnya bertanggung jawab terhadap kehadiran orang-orang Maluku yang menduduki posisi menengah ini. Tanpa orang-orang Maluku ini, berbagai kegiatan pembangunan tidak mungkin dilakukan. Sikap anti-pendatang ini adalah bentuk negatif dari kesadaran identitas diri sendiri orang-orang Papua. (Droogdlever, 2005)

Perang Dunia Kedua dan peristiwa-peristiwa sesudahnya semakin memperlebar jarak ini. Sentimen anti-amberi diperkuat karena, dalam sejarahnya para aparat Maluku digunakan sebagai eksekutor tindakan-tindakan paksa orang-orang Jepang. Keadaan tersebut mirip dengan keadaan di bagian Indonesia yang lain, di mana hal yang sama juga terjadi. Ini adalah satu-satunya kejadian yang mirip antara yang terjadi di New Guinea dan di Indonesia. Tetapi di New Guinea tidak ada gerakan nasionalis yang memiliki semangat anti-Belanda, yang timbul oleh karena pendudukan Jepang. Dengan beberapa pengecualian, revolusi Indonesia tidak menyentuh New Guinea.

Konsep hak penentuan nasib sendiri, menurut Droogdlever adalah kunci kebijakan Belanda. Ini adalah salah satu bentuk kebijakan emansipasi yang menurut Belanda, diberlakukan di wilayah nusantara pada beberapa puluh tahun pertama abad ke-20. Apa yang terjadi di dalam prakteknya

benar-benar berbeda, karena Belanda sesungguhnya beranggapan bahwa belum saatnya kebijakan ini diberlakukan secara penuh. Keinginan untuk mempertahankan hubungan yang permanen – yaitu versi Belanda atas ambisi-ambisi imperial Eropa – juga merupakan salah satu penghalang diberlakukannya kebijakan ini.<sup>45</sup> Sesudah tahun 1945, keenganan ini mulai satu per satu ditinggalkan. Di bawah kepemimpinan Letnan Gubernur Jenderal Van Mook, dicarilah jalan keluar dengan menggunakan perangkat hak penentuan nasib sendiri yang baru saja menjadi bagian dari Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa. Pada waktu itu dibuat pembedaan antara hak menentukan nasib sendiri Indonesia secara keseluruhan, dan hak menentukan nasib sendiri daerah-daerah bagiannya. Hal ini tidak saja merupakan akibat dari kemajuan yang tidak merata dan perbedaan derajat revolusi yang terjadi di berbagai tempat di kepulauan nusantara, tetapi juga, dari sisi pandang Belanda, merupakan suatu instrumen siasat untuk menyalurkan revolusi itu ke arah yang sesuai dengan kepentingan dan ambisi Belanda.

Hal ini kemudian menghasilkan sistem federalisme, yang kemudian, memberikan ruang bagi daerah-daerah untuk menentukan posisi mereka sendiri. Kerangka struktur ini termuat dalam persetujuan Linggardjati antara Belanda dan Republik Indonesia. Konsepnya dimulai oleh kedua belah pihak pada bulan November 1946. Negara-negara bagian itu diberi nama, dan mereka diharapkan akan membentuk federasi. Ketika draf tersebut dibahas oleh kabinet Belanda, diputuskan bahwa pengaturan yang terpisah akan dibuat untuk New Guinea, karena penduduknya dianggap masih belum mampu untuk menentukan nasib mereka sendiri. Proteksi Belanda masih dilanjutkan untuk waktu yang lebih lama. Anggapan bahwa orang-orang Papua belum dapat menentukan nasib mereka sendiri langsung menciptakan masalah, karena alasan itu tidak ditetapkan melalui cara-cara demokratis. Perjanjian

---

<sup>45</sup> Menurut sejarawan Belanda yang lain, de Geus, ada tiga alasan Belanda untuk mencoba tetap mempertahankan wilayah Papua terpisah dari Negara Indonesia. *Pertama*, menyangkut kependudukan orang-orang Indo-Eropa yang ingin tetap tinggal di daerah tropis, di bawah pemerintahan Belanda. *Kedua*, pada tahun lima puluhan, pemerintah Belanda ingin tetap mengamankan pulau itu bagi kalangan Barat, karena Indonesia terancam untuk bergeser ke blok komunis. *Ketiga*, sudah muncul keinginan di kalangan penduduk Papua sendiri untuk merdeka. (De Geus, 2003: 1)

Linggadjati ditandatangani pada bulan Maret 1947, walaupun belum dicapai kesepakatan atas soal New Guinea.

Sesudah itu terjadi konsultasi intensif antara Belanda dan Republik Indonesia, yang sempat terhenti oleh masa-masa konflik militer sampai pada akhir 1949. Salah satu masalah yang dipersoalkan adalah organisasi Negara Indonesia merdeka di waktu akan datang. Belanda terus berpegang pada konsep negara federal, sementara Republik, walaupun di atas kertas menyetujui konsep Belanda ini, dalam kenyataannya tidak mau melepas ide Negara Kesatuan. Selama perundingan-perundingan ini berlangsung, persoalan New Guinea selalu menjadi latar belakang. Alasan-alasan yang dikemukakan oleh Belanda tentang perlunya memberikan perlakuan khusus kepada New Guinea di antaranya adalah sangat rendahnya kemajuan, karakter nasional yang sama sekali berbeda, dan hampir tidak ada paham nasionalistis Indonesia di kalangan orang-orang Papua. Selain itu, menurut Drooglever, ada alasan lain yang disampaikan; “bahwa orang-orang Belanda yang lahir di Indonesia memerlukan tempat mereka sendiri di bawah cahaya matahari tropis di New Guinea, walaupun bendera Belanda sudah tidak lagi berkibar di seluruh kepulauan nusantara.”

Belanda memiliki posisi yang kuat selama Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949, dan New Guinea tidak dimasukkan dalam pengalihan ke Indonesia, sebagaimana tampak dalam Perjanjian Penyerahan Kedaulatan. Pasal 1 menyatakan bahwa Belanda menyerahkan secara penuh kedaulatan atas Indonesia kepada Republik Indonesia Serikat, sementara pasal 2 mengatur bahwa ‘status quo’ dari keresidenan New Guinea tidak akan berubah pada masa itu. Jalan keluar bagi persoalan ini diusahakan untuk dicapai dalam jangka waktu setahun. Pemerintah Belanda berpegang pada penafsiran bahwa dalam naskah KMB hak Belanda tetap dijamin untuk melanjutkan pelaksanaan kedaulatan. Pemerintah Indonesia mengambil pandangan yang berbeda, dan menolak untuk bekerjasama melalui keputusan yang ditetapkan oleh Mahkamah Internasional.

Indonesia kemudian mengambil posisi yang lebih mendasar, yaitu menyatakan bahwa New Guinea telah dimasukkan ke dalam proklamasi

kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, dan bahwa perundingan dengan Belanda hanya bisa dilakukan atas dasar kenyataan tersebut. Dengan demikian, perundingan yang akan dilakukan hanyalah tentang bagaimana kontrol atas New Guinea dialihkan kepada Indonesia, tetapi bukan tentang prinsip kedaulatan atau hak-hak orang-orang Papua. Karena inilah, maka pembicaraan-pembicaraan selanjutnya antara Belanda dan Indonesia tidak menghasilkan apa-apa. Droogdlever menyatakan:

Hal ini sebetulnya sudah dapat diketahui pada musim semi 1951, tetapi 'paku terakhir yang ditancapkan ke dalam peti mati itu' terjadi ketika konferensi di Jenewa gagal diselenggarakan pada akhir tahun 1955/awal tahun 1956. Penyebabnya adalah berbagai perkembangan internal Indonesia dan hubungan Indonesia dengan Belanda yang memburuk dengan begitu cepat. Pada bagian ini ditekankan tentang pernyataan yang sering dibuat oleh Belanda bahwa New Guinea bukanlah alasan terjadinya konflik, tetapi bahwa New Guinea selalu digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk memperuncing masalah. Pernyataan Belanda ini sudah barang tentu tidak bisa mengingkari fakta bahwa New Guinea memang bagian dari konflik antara Belanda dan Indonesia. Tanpa New Guinea, sebagian fokus sengketa Belanda dan Indonesia sudah lama hilang. (Droogdlever, 2005)

Dalam perkembangannya kemudian, di Indonesia dan situasi internasional pada paruh kedua tahun-tahun limapuluhan banyak berubah. Berakhirnya pemberontakan daerah-daerah luar di Indonesia terhadap pemerintah pusat di Jakarta, dan gagalnya upaya Amerika untuk mengintervensi dengan mendukung para pemberontak, memiliki peranan yang besar terhadap berubahnya posisi Amerika Serikat. Sejak saat itu, Indonesia memperoleh lebih banyak dukungan internasional. Dukungan internasional itu kemudian menjadi semakin intensif selama masa Perang Dingin. Semua perkembangan ini, menurut Droogdlever, berujung pada perlombaan senjata di katulistiwa, karena baik Rusia maupun Amerika Serikat yang sementara mendukung sekutu masing-masing, berusaha saling mengalahkan dalam memberikan senjata kepada Indonesia, sepanjang sejumlah kondisi terpenuhi. Situasi ini semakin membuat Belanda terdesak. Posisi Australia sendiri sebagai tetangga Indonesia yang paling dekat, lebih memihak Belanda. Tetapi,

Australia menyadari bahwa ia tidak dapat mendukung Belanda apabila Amerika Serikat tidak memiliki pandangan yang sama.

Langkah-langkah awal tentang kemungkinan keterlibatan internasional secara terbatas mulai muncul pada tahun 1960. Satu tahun sesudahnya mulai dikembangkan rencana Menteri Luar Negeri Belanda Luns, kemudian diajukan ke Majelis Umum PBB. Rencana Luns ini berisi tawaran untuk menempatkan New Guinea di bawah pemerintahan internasional, dengan syarat bahwa Indonesia tidak terlibat di dalamnya. Walaupun begitu, rencana ini ditarik kembali karena pembicaraan-pembicaraan awal di Majelis Umum PBB menunjukkan bahwa rencana ini terlalu jauh untuk dibicarakan oleh Majelis. Pada umumnya para anggota berpendapat bahwa Belanda harus berdialog terlebih dahulu dengan Indonesia. Segera sesudah pertemuan itu berakhir, Presiden Sukarno mengumumkan bahwa ia sementara mempersiapkan komando operasi yang bertugas untuk menduduki New Guinea dengan kekuatan bersenjata. Hal ini berarti bahwa Belanda berada di bawah tekanan beberapa pihak sekaligus. Sesudah melakukan serangkaian diskusi, dengan terpaksa Belanda mengumumkan pada tanggal 2 Januari 1962 bahwa Belanda bersedia untuk melibatkan Indonesia dalam pembicaraan-pembicaraan mengenai masa depan New Guinea. Hal ini juga berarti bahwa Belanda akan langsung berhadapan dengan asumsi bahwa Indonesia telah memiliki kedaulatan atas wilayah tersebut sejak tahun 1945, sehingga hal-hal yang perlu didiskusikan hanyalah tinggal bagaimana penyerahan kedaulatan itu dilakukan.

Setelah itu muncul laporan-laporan intelijen menunjukkan bahwa Indonesia akan siap untuk mengirim sejumlah besar angkatan bersenjata ke New Guinea pada pertengahan tahun 1962. Pada bulan April, Amerika Serikat menyampaikan usulan yang dikenal dengan nama Rencana Bunker, di mana New Guinea akan diserahkan ke Indonesia melalui suatu masa singkat pemerintahan PBB. Persoalan tentang bagaimana seharusnya Belanda menanggapi usulan Amerika Serikat ini mengakibatkan kabinet Belanda terpecah. Sesudah pembicaraan yang berlangsung cukup lama, pemerintah Belanda menyetujui rencana ini sebagai titik awal negosiasi dengan Indonesia,

walaupun mereka akan berupaya untuk tetap memperjuangkan hak penentuan nasib sendiri orang-orang Papua sejauh mungkin.

Drama ini berakhir dengan ditandatanganinya Persetujuan New York pada tanggal 15 Agustus 1962, yang berisi kurang lebih mengenai suatu pengaturan tentang penyerahan kekuasaan sesegera mungkin kepada PBB, yang kemudian dilanjutkan dengan penyerahan ke Indonesia beberapa waktu kemudian. Sebagai konsesi, seperti yang diharapkan oleh Belanda, suatu Tindakan Pemilihan Bebas (*Act of Free Choice*) akan dilakukan sebelum akhir tahun 1969, yaitu melalui cara di mana orang-orang Papua akan memilih apakah mereka ingin tetap bersama Indonesia atau tidak. Tetapi, menurut Droogdlever, persetujuan New York ini, adalah suatu dokumen yang pengkalimatannya dibuat kabur untuk sejumlah hal prinsip, sehingga merugikan Belanda. Hal ini merupakan cermin dari lemahnya posisi tawar Belanda. Ketidakpastian ini khususnya mengenai berapa lama transisi berlangsung, dan jaminan mengenai pelaksanaan referendum yang diterima secara internasional. Tanggung jawab mengenai hal yang disebutkan terakhir ini diserahkan sepenuhnya kepada Indonesia, dan PBB hanya memiliki tugas untuk membantu apabila Indonesia memintanya. Droogdlever juga mencatat:

Kekaburan ini sebetulnya ada manfaatnya juga bagi Belanda, karena dengan begitu Belanda dapat menghibur diri dengan mengatakan bahwa ia telah berusaha berbuat yang terbaik bagi orang-orang Papua. Pendapat seperti ini selalu disampaikan oleh Belanda dengan bersemangat kepada dunia luar dalam berbagai kesempatan. Tetapi, di dalam negeri semua orang tahu bahwa bukan seperti itu keadaannya. Ketika persetujuan itu ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 1962, Dewan Menteri Belanda kecewa dengan hasilnya yang jelek itu, sementara Luns secara terbuka mengeritik pemerintah Amerika Serikat. (Droogdlever, 2005)

Pokok-pokok kunci dari kebijakan ini adalah pembentukan Dewan New Guinea pada bulan April 1961, yang diikuti dengan penetapan bendera dan lagu pada tahun yang sama. Pembentukan Dewan New Guinea dilakukan dengan persiapan yang cermat dengan tujuan agar badan politik ini memiliki tingkat keterwakilan sebaik mungkin. Penetapan Bendera dan Lagu berlangsung lebih cepat. Inisiatif berasal sepenuhnya dari pihak orang-orang

Papua, tetapi kemudian diterima oleh penguasa Belanda. Dan secara mengejutkan bendera dan lagu itu dengan cepat disahkan dalam suatu ordinansi. Peristiwa ini terjadi ketika Luns berusaha, namun gagal, untuk menjual idenya itu kepada PBB. Pengibaran bendera pertama kali dilakukan pada tanggal 1 Desember 1961, yang disambut dengan sukacita di mana-mana. Orang-orang Papua di bagian barat New Guinea, kini memiliki simbol identitas mereka sendiri yang diterima secara meluas. Tidak saja Papua yang memiliki pemahaman seperti itu, tetapi juga Jakarta. Soekarno memandang pengibaran bendera itu sebagai penolakan langsung terhadap proklamasi 1945, dan pasti merupakan awal pembentukan negara Papua. Pada Pidato Trikora Soekarno mengumumkan serangan ke New Guinea, yang bertujuan untuk menghantam perkembangan ini.<sup>46</sup>

Pemerintahan PBB di Papua, United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) dimulai pada 30 September 1962. Tetapi dalam prakteknya badan PBB ini tidak memiliki kekuasaan sebagaimana yang seharusnya. Mereka tidak memiliki kemauan dan keahlian untuk menjalankan masa peralihan itu secara netral dalam pengertian yang sebenar-benarnya. Walaupun begitu, PBB mampu mengorganisir mundurnya pemerintahan Belanda dan mengalihkan tugas-tugas tersebut ke pihak Indonesia yang menggantikan Belanda.

Sikap Jakarta berubah ketika Soeharto memegang tampuk kekuasaan sebagai presiden Indonesia yang baru. Ketika ia mulai memerintah, negara dalam keadaan kacau dan ekonomi porak poranda, sementara ia sangat memerlukan kredit internasional. Untuk itu, Indonesia harus memperoleh respek internasional. Indonesia harus menunjukkan bahwa ia mampu untuk patuh kepada ketentuan-ketentuan internasional. Tindakan Pemilihan Bebas, yang merupakan bagian terakhir dari Persetujuan New York, menawarkan kesempatan itu. Walaupun begitu, Presiden Soeharto memberikan syarat

---

<sup>46</sup> Pidato Presiden Soekarno yang mendeklarasikan Trikora (Tri Komando Rakyat) ini disampaikan di Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1961. Isinya adalah; bubarkan negara boneka Irian Barat buatan Belanda, mobilisasi massa, dan kibarkan sang saka merah putih di Irian Barat. (Tim Elsham Papua, 2003: 3)

bahwa satu-satunya hasil yang bisa diterimanya adalah keputusan yang berpihak pada Indonesia.

Proses Tindakan Pemilihan Bebas pun dimulai pada tahun 1968 dengan kedatangan Ortiz Sanz, yang dalam kapasitasnya sebagai wakil Sekjen PBB harus membantu Indonesia melaksanakan Tindakan Pemilihan Bebas. Awalnya Ortiz Sanz bersemangat dan berharap bahwa ia akan mampu untuk menyelenggarakan suatu referendum yang kredibel sesuai dengan standar-standar internasional. Harapannya itu diperkukuh dengan sikap Menlu Adam Malik yang baru saja mengunjungi New Guinea, dan yang sesudah kembali dari kunjungannya itu berhasil didesak untuk mengakui bahwa ada masalah salah-kelola yang serius. Malik menegaskan bahwa ia ingin agar keadaan tersebut diperbaiki, tidak saja dalam hal pemerintahan tetapi juga dalam hal bagaimana seharusnya Tindakan Pemilihan Bebas dilaksanakan.

Apa yang kemudian terjadi adalah kekecewaan bagi Ortiz Sanz. Karena tekanan Indonesia, Tim PBB yang dipimpin sangat kecil jumlahnya. Sesudah tiba di New Guinea pada bulan September 1968, ia dibanjiri oleh berbagai petisi dari orang Papua yang memprotes salah-urus yang dibuat oleh Indonesia di semua bidang. Ia menanggapi dengan serius protes-protes ini dan meneruskannya ke mitra Indonesiannya, Sudjarwo Tjondronegoro, dan meminta Sudjarwo mengambil tindakan. Sudjarwo menganggap hal ini sebagai intervensi yang tidak perlu. Indonesia menolak bentuk referendum yang disarankan oleh Ortiz Sanz, dan sebaliknya memilih sistem musyawarah yang disebut sebagai tradisi Indonesia. Istilah ini, yang pada awalnya hanya menyangkut satu bagian dari persetujuan New York, sekarang menjadi prinsip utama dari keseluruhan referendum. Di dalam sistem ini, yang dimungkinkan hanyalah keputusan kolektif, atas dasar persyaratan konsensus bersama. Untuk kepentingan ini, Presiden Soeharto menugaskan Ali Mutropo untuk mengatur jalannya musyawarah. Ali Mutropo memastikan agar sidang-sidang ini cukup banyak dihadiri oleh orang-orang Irian yang pro integrasi.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Elson menggambarkan, apa yang dilakukan Ali Mutropo serupa dengan yang kemudian dia digunakan pada Pemilu 1971; perpaduan antara kebijakan untuk menakut-makuti serta mengintimidasi, dan membujuk serta menyuap. Cara yang disebut terakhir dilakukan

Proses Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) atau *Act of Free Choice* ditentukan melalui musyawarah yang dianggap lebih sesuai dengan nilai-nilai dimulai kebudayaan setempat. Musyawarah dimulai di Merauke pada tanggal 14 Juli dan berakhir di Jayapura pada tanggal 2 Agustus 1969. Musyawarah yang diselenggarakan pada 8 kota di Irian Jaya itu disaksikan oleh utusan PBB, Dr. Fernando Ortiz-Santz, duta besar dari Bolivia untuk PBB yang oleh Sekjen PBB U Tant ditunjuk untuk menyelenggarakan tugas yang berkaitan dengan act of Free Choice di Irian Jaya. Ortiz-Santz tiba di Irian Jaya pada 22 Agustus 1969 dengan tiga orang staf ditambah atau didampingi Mr. Sudjarwo Tjondronegoro, pembantu khusus Menteri Luar Negeri Indonesia untuk masalah Irian Jaya. Setelah melakukan kunjungan ke wilayah dan memperoleh data tentang tata cara pelaksanaan Pepera, maka pada tanggal 1 Oktober 1968, sebagai wakil PBB Ortiz-Santz menerima bentuk musyawarah rakyat yang dilakukan di Papua. (Djopari, 1993: 74-75) Berikut tabel jadwal pelaksanaan Pepera tersebut:

| TANGGAL       | KABUPATEN         | JUMLAH ANGGOTA DEWAN MUSYAWARAH PEPERA | JUMLAH PENDUDUK |
|---------------|-------------------|--|-----------------|
| 14-7-1969     | Merauke           | 175                                    | 144.171         |
| 16-7-1969     | Jayawijaya        | 175                                    | 165.000         |
| 19-7-1969     | Paniai            | 175                                    | 156.000         |
| 23-7-1969     | Fak-fak           | 75                                     | 43.187          |
| 26-7-1969     | Sorong            | 110                                    | 75.474          |
| 29-7-1969     | Manokwari         | 75                                     | 49.875          |
| 31-7-1969     | Teluk Cendrawasih | 130                                    | 91.870          |
| 2-8-1969      | Jayapura          | 110                                    | 83.760          |
| <b>Jumlah</b> |                   | <b>1.025</b>                           | <b>809.337</b>  |

*Sumber: Djopari, 1993: 75*

Jumlah total anggota Dewan Musyawarah Pepera sebanyak 1.025 orang mewakili jumlah penduduk sebesar 809.337 orang. Selain wakil dari PBB, pelaksanaan Pepera juga disaksikan oleh duta besar dari Rhailand,

---

dengan cara mendatangkan barang-barang konsumsi serta hadiah dalam jumlah amat besar ke Irian Barat dan membagi-bagikannya kepada para kepala suku setempat serta para wakil rakyat. Selain itu ada juga upaya-upaya untuk melakukan konvensi politik yang dijalankan oleh kader-kader asuhan Fr. Beek. (Elson, 2005: 338-339)

Belanda, Australia, Jerman Barat, Selandia Baru dan Burma. Walaupun terjadi beberapa demonstrasi pada hari penyelenggaraan Pepera di Merauke, Fak-fak, Manokwari, Paniai, dan Jayapura, musyawarah berjalan lancar, dengan hasil, secara aklamasi memutuskan untuk berintegrasi dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Djopari, 1993: 76)<sup>48</sup>

Pada Agustus 1969, sidang-sidang ini menghasilkan suara setuju untuk bergabung dengan Indonesia. Soeharto secara resmi menetapkan Irian Barat sebagai 'propinsi otonom' Indonesia pada 16 September 1969. Babak terakhir dari keseluruhan proses ini terjadi pada bulan Oktober dan November 1969 dalam Majelis Umum PBB, di mana Belanda dan Indonesia bekerjasama mengarahkan laporan Sekretaris Jenderal PBB dalam pertemuan itu. Amerika Serikat juga membantu. Walaupun secara pragmatis Amerika Serikat lebih bertanggung jawab terhadap keseluruhan tahapan yang berakibat dengan penandatanganan Persetujuan New York dan sesudah itu Tindakan Pemilihan Bebas, tetapi Amerika Serikat, sebagaimana Belanda, berlindung di belakang PBB. Pada tanggal 19 November 1969, PBB mencatat untuk mengesahkan hasil 'plebisit' yang berarti memberikan pengakuan formal kedaulatan Indonesia atas wilayah Irian tersebut. (Elson, 2005: 339)

Sekelompok negara-negara Afrika yang sejak tahun 1961 telah bersimpati terhadap persoalan-persoalan Papua melancarkan kritiknya. Tetapi apa yang mereka lakukan ini tidak banyak artinya. Amandemen yang mereka sampaikan kepada Majelis Umum PBB yang mendesak supaya suatu referendum dilaksanakan dalam beberapa tahun mendatang ditolak oleh mayoritas anggota dalam suatu pemungutan suara. Hasilnya adalah bahwa

---

<sup>48</sup> Penting untuk dicatat bahwa pada 12 Februari 1969, sekitar lima bulan sebelum dilakukan Pepera, terjadi demonstrasi besar yang dilakukan masyarakat setempat menuju rumah Ortiz-Santz, dengan menyerahkan sebuah resolusi yang menuntut diselenggarakannya pemilihan secara langsung yang sesuai ketentuan dalam Perjanjian New York yaitu dengan cara *one man one vote* (setiap orang memberikan suaranya), bukan melalui musyawarah. Mereka juga menuntut kemerdekaan penuh sebagaimana dijanjikan Belanda, sekaligus memprotes tindakan tentara Indonesia yang melakukan penangkapan terhadap tokoh-tokoh Irian barat dan memperlakukan mereka secara tidak manusiawi. Pimpinan demonstrasi itu adalah Herman Wajoi dan Penhas Hans Torrey, dan mereka diterima Ortiz-Santz yang berjanji akan melanjutkannya kepada Sekjen PBB U Thant. Demonstrasi yang berjalan dengan tertib itu menyanyikan lagu rohani 'Laskar Kristen Maju' itu kemudian bubar ketika mendengar tembakan panser kavaleri. (Djopari, 1993: 76)

Majelis Umum PBB menerima resolusi yang disampaikan secara bersama-sama oleh Belanda dan Indonesia, dan di dalamnya dinyatakan bahwa Majelis mencatat/mengetahui adanya laporan tersebut, dengan 30 anggota abstain dan tidak ada yang menolak. `Masalah New Guinea' dengan demikian telah diselesaikan sesuai dengan persetujuan New York dan dapat dikeluarkan dari agenda PBB.

Berakhirnya Tindakan Pemilihan Bebas (*act of free choice*) berarti dimulainya pemerintahan Indonesia yang diterima secara penuh oleh masyarakat internasional. Kekhawatiran bahwa akan terjadi pemberontakan meluas di Papua ternyata tidak terbukti. Walaupun begitu, ketidakpuasan terus berlangsung. Pada tahun 1971, gerakan perlawanan militan OPM memproklamasikan kemerdekaan. Perlawanan ini ditangani dengan keras, dan dalam keadaan bagaimana pun tetap merupakan gejala marjinal. Mengutip sebuah studi hukum yang dilakukan oleh Universitas Yale pada tahun 2003, Droogdlever menyatakan bahwa terdapat fakta-fakta yang begitu serius sehingga membuat mereka menggunakan istilah genosida (*genocide*) untuk menggambarkan keadaan yang terjadi. Menurut kelompok peneliti tersebut, perilaku pemerintah Indonesia adalah dalam rangka memusnahkan orang-orang Papua. Tetapi Droogdlever menilai, kesimpulan seperti ini tidak seharusnya dibuat. Selanjutnya ia mengatakan:

Tentu saja kejahatan yang dilakukan oleh pemerintahan Indonesia sebagaimana yang dikemukakan oleh mereka adalah fakta sebenarnya. Hal ini telah nyata sebagaimana yang kami kemukakan sejak tahun pertama pemerintah Indonesia di New Guinea. Menurut laporan-laporan orang-orang Papua yang memiliki pemahaman tentang apa yang terjadi, setiap hari pasti ada paling tidak ada satu orang yang tewas atau yang diperlakukan secara kejam. Lebih dari itu, Indonesia mulai menggunakan kawasan New Guinea dalam skala yang jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya, untuk menampung banjir penduduk Indonesia yang tumbuh begitu cepat. Dalam kaitan ini keadaan orang-orang Papua menjadi lebih jelek. Selama proses ini, tanah mereka semakin banyak yang dirampas, demikian pula kesempatan kerja diambil oleh masyarakat pendatang. Hal ini juga terjadi di bagian lain di Indonesia, tetapi yang paling opresif adalah di Irian Barat. Kota-kota Irian Barat menjadi sama seperti kota-kota Indonesia lainnya: padat dan kotor. (Droogdlever, 2005)

Meski demikian Droogdlever secara fair mengakui bahwa ada sisi positif yang diberikan Indonesia, yaitu bahwa di Papua telah terjadi peningkatan perumbuhan lebih dari 50 persen di bawah pemerintahan Indonesia. Pemerintah Indonesia juga terus mendukung pendidikan, tidak saja melalui badan-badan pemerintah, tetapi juga melalui lembaga-lembaga gereja. Ini berarti bahwa pendidikan generasi muda Papua terus meningkat. Lebih dari itu, lebih banyak kontak yang terjadi dengan bagian Indonesia yang lain melalui kontak dengan para pendatang baru, melalui media, dan melalui kunjungan perorangan ke pulau-pulau lain di Indonesia, dimana hal-hal ini semua memperluas cakrawala orang-orang Papua.

Walaupun begitu, Droogdlever menegaskan, mengintegrasikan orang-orang Papua ke dalam negara Indonesia tetap menjadi masalah. Kedatangan pemerintah Indonesia mengakhiri struktur formal profesional badan-badan pemerintah, di mana pendidikan terkait erat dengan pengembangan karir. Sekarang, penempatan pada jabatan tergantung pada pertemanan dan koneksi, dan hal ini berarti yang kalah adalah orang-orang Papua. Pendanaan untuk membiayai pemerintahan juga tidak memadai, hal mana berarti bahwa para pejabat pemerintah harus mencari tambahan pendapatan sendiri secara lokal. Hal ini juga terjadi pada militer, yang diperkirakan hanya menerima 30 persen pendanaan dari negara. Selain itu, Irian Barat bukanlah, merupakan lokasi penempatan yang disukai, sehingga sejumlah besar pejabat Indonesia meninggalkan tempat ini.

Perkembangan terakhir di Papua memperkuat tesis Droogdlever, bahwa integrasi mental dan organisasional ke dalam negara Indonesia tidak tercapai. Ketika arus reformasi tiba pada tahun 1998 dan rejim Soeharto berakhir, timbullah kevakuman kekuasaan di mana penduduk New Guinea, sekali lagi, dapat berbicara dengan bebas, dan selama jangka waktu tertentu masalah-masalah yang terjadi di daerah tersebut dapat disampaikan secara jelas kepada dunia luar. Akhirnya Droogdlever mengambil kesimpulan:

Satu hal yang pasti adalah: Indonesia tidak berhasil memenangkan hati orang-orang Papua. Dalam pada itu kesadaran

nasional orang-orang Papua meningkat dengan tajam. Dengan disiplin mereka sendiri, para tokoh Papua dalam organisasi gereja maupun di masyarakat mampu mengelola keadaan ini sehingga kerusuhan dapat dicegah, bahkan mampu membawa suara orang Papua untuk didengar oleh pemerintah Indonesia dan dunia melalui cara yang terhormat namun tegas. ... dalam kunjungan ke Jayapura pada malam tahun baru 2000, Presiden Abdurrahman Wahid berjanji untuk meningkatkan pemerintahan, dan setuju bahwa nama Irian Jaya, yang dipandang sebagai lambang dominasi Indonesia, dapat diubah menjadi Papua. Ini adalah salah satu titik kunci dalam urutan kejadian yang kami gunakan untuk memulai penulisan buku ini. Sejak saat itu, jarum jam, dalam banyak hal, telah diputar kembali. Walaupun begitu, Papua masih tetap menanti sejumlah janji, yang terkandung dalam otonomi luas, ditepati dengan benar. Hal ini bukanlah persoalan sepihak, dan apa tanggapan orang-orang Papua sangat tergantung pada sejauh mana janji-jani itu ditepati. Salah satu persyaratan penting adalah kemerdekaan berpendapat dan bergerak. Hal ini langsung mengingatkan kami kepada kata-kata Menlu Adam Malik, yang mengumumkan secara terbuka pada saat ia berkunjung ke New Guinea pada tahun 1966 bahwa tentara harus ditarik terlebih dahulu sebelum masyarakat Papua dapat membangun. Tetapi yang terjadi adalah sejak Adam Malik mengemukakan kata-kata ini, tekanan yang dilakukan oleh tentara dan polisi terhadap penduduk justru semakin meningkat. (Droogdlever, 2005)

Mengulas buku Droogdlever, Dr. Phil Erari, dosen Sekolah Tinggi Teologia GKI Abepura dan anggota eksekutif *Partnership for Governance Reform Indonesia*, mengatakan bahwa, penulisan buku tersebut tidak lepas dari suatu gerakan politik Belanda, terutama yang dimotori oleh Partai Gereformeed Politiek Verbond atau Christen Unie.<sup>49</sup> Gerakan politik ini mendapat angin segar setelah Gus Dur berkunjung ke Belanda pada Februari 2000. Gus Dur sebagai Presiden, dengan wawasan politik yang luas dan demokratis, telah mengubah paradigma Jakarta yang cenderung tertutup terhadap aspirasi rakyat Papua. Oleh Gus Dur nama “Papua” dikembalikan kepada rakyat. Bahkan Gus Dur juga mengizinkan pengibaran bendera Bintang Kejora sebagai lambang budaya dan identitas orang Papua, bukan sebagai bendera nasional. Namun sikap Gus Dur ini tidak disambut baik oleh seluruh elite politik di Jakarta. Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri

---

<sup>49</sup> Menurut Erari, penulisan karya ilmiah setebal 700 halaman dengan 14 bab itu, oleh Droogdlever dimulai tahun 1999 atas perintah Menlu Jozias van Aartsen, yang memang diamanatkan pula oleh parlemen Belanda.

adalah salah satu yang menentang keras sikap Gus Dur ini. Megawati merasa Gus Dur telah mengkhianati perjuangan Bung Karno, yang telah memberi nama Irian kepada tanah dan bangsa yang tinggal di bekas koloni Belanda tersebut. Menurut Erari, ada dua konteks yang mendorong penelitian itu dilakukan: *pertama*, karena Kongres II Rakyat Papua, Mei 1999 mendesak perlunya pelurusan sejarah, karena rakyat Papua merasa jalan sejarahnya menuju kemerdekaan sebagai suatu bangsa, telah dibelokkan oleh kepentingan politik Jakarta. *Kedua*, tampilnya Gus Dur sebagai pemimpin Indonesia yang lebih demokratis. Mengapresiasi karya Droogdlever, Erari mengatakan:

Masyarakat dunia kini dapat mendengar dan menyaksikan seorang mahaguru yang berhasil mengungkapkan sebuah kebenaran sejarah yang terkubur selama 43 tahun. Kebenaran itu kini tersingkap, betapa rakyat Papua terpaksa menelan pil pahit, karena janji untuk berdaulat sebagai negara yang merdeka telah berubah menjadi suatu tragedi kemanusiaan. (Erari, 2005.)<sup>50</sup>

#### 4.D.1. Kekerasan dan Perlawanan

Kisah kekerasan negara dan perlawanan masyarakat di Papua, sudah marak sejak tahun 1965 (sebelum wilayah tersebut secara resmi diakui sebagai bagian dari NKRI). Saat itu sudah ada konflik terbuka antara sekelompok kecil kaum separatis bersenjata (TPN/OPM) dan pasukan keamanan Indonesia. Militer Indonesia telah melaksanakan berbagai operasi militer, khusus untuk menumpas ‘pemberontakan kaum separatis’. Untuk tujuan ini, sejumlah 60.000 tentara dikirim ke Papua barat dari tahun 1967 hingga tahun 1972. Perhitungan mutakhir atas sejumlah personil militer dan polisi mencapai angka 15.000-20.000. Personil TPN/OPM, kira-kira berjumlah 1600, termasuk di dalamnya satuan-satuan yang menempuh jalan non-kekerasan.

Meski TNP/OPM tak pernah menjadi ancaman serius terhadap pasukan ABRI/TNI yang kuat, namun aktivitas mereka telah memperkuat

<sup>50</sup> Ulasan Phill Erari ini dikutip dan didownload dari: [http://www.melanesianews.org/spm/publish/article\\_1490.shtml](http://www.melanesianews.org/spm/publish/article_1490.shtml), pada 5 November 2008

alasan untuk melakukan militerisasi yang meluas di Papua Barat. Kehadiran pasukan keamanan di Papua Barat dan modusnya tidak dapat dipisahkan dari kepentingan politik dan ekonomi mereka. Secara politik, kepentingan militer terlindungi oleh 'ancaman terhadap kesatuan nasional', yang menyokong posisi militer dalam politik nasional. Sementara secara ekonomis kehadiran militer tak dapat dipisahkan dari kepentingan bisnis tentara Indonesia. Ini mencakup penambangan kayu ilegal, perlindungan terhadap instalasi komersial yang penting, perdagangan hewan liar yang dilindungi, dan sebagainya. Perdagangan di luar anggaran dari berbagai kegiatan ini menjadi sumber penghasilan utama bagi minimnya anggaran negara yang dialokasikan bagi para aparat keamanan. (Bonay & Gregory, 2005: 116)

Menurut Bonay & Gregory (2005) ada dua bentuk kekerasan negara di Papua Barat. *Pertama*, korban rakyat sipil yang disebabkan oleh operasi militer yang dilakukan secara buruk dan brutal. Sejak tahun 1964, operasi militer Indonesia dalam menumpas TPN/OPM sering menimbulkan korban tewas dan luka-luka di kalangan rakyat sipil, pengusiran dan kerusakan harta benda. Di samping itu, operasi militer menciptakan budaya rasa takut, yang seringkali amat parah di kalangan masyarakat pedalaman. Pola *kedua* kekerasan negara adalah respons terhadap gerakan politik bagi kemerdekaan Papua Barat. Aparat keamanan berupaya menumpas dan membungkam musuh-musuh pemerintah Indonesia dengan cara melanggar hak-hak asasi manusia. Statistik pelanggaran HAM pada masa Orde Baru sulit diperoleh dan bahkan lebih sulit lagi untuk diverifikasi. Beberapa laporan mutakhir memperlihatkan daftar persoalan sebagai berikut:

*Pertama*, penelitian oleh ELSHAM Papua Barat mencatat rata-rata 1.000 kasus pelanggaran HAM terjadi antara 1997 dan 2002. *Kedua*, laporan mutakhir Dewan Gereja Dunia kepada Komisi HAM PP di Jenewa menyebutkan meningkatnya kasus pembunuhan tanpa proses peradilan pada periode 2000 hingga 2002, selain 838 kasus penahanan sewenang-wenang, interogasi dan penculikan. *Ketiga*, Human Rights Watch mencatat sekurang-kurangnya ada sepele kasus yang di dalamnya banyak tentara diperintahkan untuk membubarkan unjuk rasa nasionalisme Papua selama tahun 1999 dan 2000, termasuk insiden di Biak, Nabire dan Merauke ketika militer mengghunakan

kekerasan untuk menurunkan bendera Papua ‘Bintang Pagi’ yang menimbulkan banyak korban. Salah satu tindak kekerasan khususnya yang menelakui rasa keadilan rakyat Papua adalah pembunuhan atas Theys Hiyo Eluai, pemimpin gerakan kemerdekaan dan ketua Papuan Presidium Council (PPC) oleh militer Indonesia pada tanggal 11 Nopember 2001. (Bonay & Gregory, 2005: 117-118)

Mengenai terbunuhnya Ketua Presidium Dewan Papua (PDP) Theys Hiyo Eluay, praktisi hukum Todung Mulya Lubis mengatakan bahwa, ini adalah sandungan terbesar bagi pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan persoalan Papua; malah tak terlalu salah untuk menyimpulkan, rakyat Papua hampir kehilangan kepercayaan terhadap itikad baik Pemerintah Indonesia. Menurut Lubis, aparat keamanan gagal menunjukkan kepekaan atas arti penting Theys sebagai bagian penyelesaian kasus Papua. Lubis mengatakan:

Jangan heran bila ada praduga, terbunuhnya Theys sebagai bagian dari rekayasa memperkeruh situasi sehingga penyelesaian persoalan Papua terbengkalai, dan nantinya kekacauan akan merebak sehingga keadaan darurat militer akan diperlakukan. Atau, sebaliknya terbunuhnya Theys adalah ulah orang-orang yang ingin agar kebencian terhadap pemerintah makin kuat. Karena itu tuntutan terhadap kemerdekaan Papua menjadi satu-satunya jalan keluar. Apa pun penyebab terbunuhnya Theys, yang jelas itu merupakan *setback* di tengah upaya menyelesaikan persoalan Papua melalui UU No 21/2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. UU No 21/2001 itu, meski tak seperti UU No 18/2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dianggap cukup maju, tetapi harus diakui UU No 21/2001 memberi nuansa baru bagi otonomi luas dengan kekhasan daerah yang bila dikaji lebih jauh sudah memberikan hak-hak yang dimiliki sebuah negara bagian dalam konstelasi negara federal. (*Kompas*, 15 Januari 2002)

Pemerintah Indonesia juga melakukan kekerasan struktural di Papua yang menimbulkan kerugian ekonomi, politik, sosial dan budaya rakyat Papua. Kekerasan struktural ini telah menciptakan ketimpangan hubungan kekuasaan dan peluang hidup antara rakyat Papua dan bukan Papua. Meskipun merupakan propinsi terkaya dari segi sumber daya alam, Papua justru menjadi propinsi paling miskin di Indonesia. Rakyat Papua memperoleh kesempatan pendidikan, layanan kesehatan dan media yang lebih rendah dibandingkan

dengan seluruh daerah lain di Indonesia. Selain itu, sebelum peraturan otonomi khusus diterapkan, orang-orang bukan Papua mendominasi jabatan dalam birokrasi pemerintah, khususnya untuk jabatan tinggi. Sedikit sekali wakil Papua yang duduk di dalam angkatan militer dan kepolisian. Bisnis besar biasanya dikuasai oleh para investor dari luar Papua. Kaum pendatang menguasai sektor komersial daerah. Rakyat Papua merasa kecewa, sebab mereka hanya menjadi warga negara kelas dua yang hanya duduk menyaksikan bisnis sumber alam yang diambil dari tanah merdeka.

Nyaris selama 40 tahun, pemanfaatan pendapatan ekonomi pada umumnya disalurkan langsung ke Jakarta. Papua benar-benar tidak mendapat berkah pembangunan. Kesejahteraan ekonomi rakyat Papua terpuruk akibat penguasaan lahan tradisional dan merosotnya budaya penduduk asli. Kerusakan tak terperikan menimpa lingkungan hidup. Contohnya adalah penambangan emas dan batubara PT. Freeport di Mimika, yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dan sosial dalam usaha penambangan emas yang konon terbesar di dunia.

Pemerintah Indonesia telah berusaha ‘memperadabkan’ rakyat Papua, yang digambarkan sebagai rakyat primitif, untuk membuat orang Papua berpikir, berbuat dan berpenampilan seperti ‘orang Indonesia’. Berbagai upaya ‘pengindonesiaan’ dengan melarang pakaian tradisional Papua, menghapuskan pemerintah tradisional, maupun membatasi upacara dan simbol-simbol tradisional, telah menghilangkan jati diri penduduk asli Papua. Runtuhnya nilai-nilai dan sistem tradisional telah menimbulkan berbagai masalah sosial di kalangan masyarakat Papua, termasuk alkoholisme, runtuhnya etika kerja dan kekerasan domestik. (Bonay & Gregory, 2005: 119)

Di luar itu, Papua juga sering dilanda konflik komunal, terutama pasca kedatangan kaum transmigran yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Akibat transmigrasi, baik yang merupakan program pemerintah maupun swakarsa, sejumlah besar etnik Melayu, Jawa dan Bugis dari wilayah Barat Indonesia datang ke suatu komunitas yang secara etnik benar-benar orang Melanesia, pada saat integrasi. Mayoritas kaum pendatang beragama Islam, sementara itu penduduk asli Papua pada umumnya beragama Protestan atau Katholik. Di samping itu, kaum pendatang sering kali memiliki kemampuan

ekonomi yang lebih tinggi daripada penduduk asli Papua. Perbedaan dalam etnisitas, agama dan status sosio-ekonomi ini telah menjadi sumber masalah di dalam masyarakat Papua kontemporer.

Di Papua, ada perbedaan kultur yang mencolok diantara lebih dari 250 kelompok sub-etnik Papua, khususnya antara suku yang tinggal di daerah pesisir dan di daerah pedalaman. Diantara kaum pendatang, juga ada banyak perbedaan dan sebagian 'kaum pendatang' telah menetap di Papua Barat selama beberapa generasi. Tetapi sulit mengingkari bahwa isu jati diri di Papua adalah rumit. Kesadaran terhadap jati diri etnik dan sentimen primordial merebak di kalangan masyarakat Papua. Selalu ada dan kecurigaan antara berbagai kelompok etnik dan sosial. Ini sekurang-kurangnya menimbulkan dua pola konflik komunal; pertama, konflik sosial antara berbagai kelompok etnik/agama, dan kedua, manipulasi perbedaan atau ketegangan etnik/agama demi kepentingan politik tertentu. Seperti ditunjukkan Bonay & Gregory, sejumlah contoh konflik yang bersifat komunal, antara lain adalah terjadinya beberapa kali pertikaian antar-etnik di pasar-pasar Jayapura selama tahun 2000. Dalam kejadian tersebut, ketimpangan ekonomi menimbulkan kebencian dan kecemburuan sosial orang-orang Papua terhadap kaum pendatang. Karena tidak adanya mekanisme untuk menengahi atau mengatasi ketegangan ini, orang Papua melakukan tindak kekerasan. Konflik, ketegangan dan polarisasi antara berbagai kelompok etnik merupakan akibat ketidakadilan ekonomi. Pada sisi yang lain, tekanan vertikal muncul sebagai akibat struktur ekonomi yang timpang, akibat berbagai kebijakan pemerintah, yang pada akhirnya menciptakan 'keretakan' di dalam masyarakat, dan mengejawantah sebagai konflik kekerasan di sepanjang garis komunal.

Yang lebih parah lagi, sentimen etnik seringkali dimanipulasi pihak tertentu dan dimanfaatkan demi tujuan politik tertentu. Seperti ditunjukkan hasil penelitian *International Crisis Group* (2002), akibat konflik antara orang Papua dan kaum pendatang di kota pegunungan Wamena pada tahun 2000, lebih dari 30 orang tewas (7 orang Papua dan 24 orang pendatang), 10.000 orang kehilangan tempat tinggal dan merebaknya tindakan pengrusakan

terhadap harta benda. Kajian ICG menemukan bahwa meski konflik ini telah sringkali dijelaskan sebagai meledaknya sentimen kesukuan, ada alasan yang masuk akal untuk percaya bahwa ia didalangi oleh militer berlatar belakang menentang kepentingan elite politik. Ada dugaan bahwa konflik antara agama dipicu oleh kedatangan kelompok milisi Islam, Laskar Jihad, di Papua Barat. Ada dugaan bahwa dukungan para petinggi militer terhadap laskar Jihad dapat mencerminkan strategi untuk sengaja memicu konflik agama dan menciptakan rasa tidak aman di Papua Barat demi menopang kepentingan politik militer.<sup>51</sup>

Kekerasan ekonomi yang terutama dirasakan masyarakat Papua sejak tahun 1967, dengan beroperasinya PT Freeport Indonesia. Sejumlah pelanggaran HAM telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia (TNI) dengan dukungan penuh PT Freeport Indonesia, terutama selama berlakunya Papua sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) sejak tahun 1978 hingga 5 Oktober 1998. Hanya segelintir rakyat Papua yang diuntungkan. Sebagai bentuk kekecewaan, rakyat Papua, khususnya Amungme dan enam suku lainnya di seputar Freeport, melakukan pemberontakan. Pada tahun 1977 mereka meledakkan jalur pipa milik perusahaan raksasa tersebut. Sebagai reaksinya, pasukan TNI melakukan serangan balik. Kebun-kebun dan rumah-rumah penduduk dihancurkan, beberapa orang Amungme dibantai.<sup>52</sup>

Keterlibatan PT. Freeport-Rio Tinto dalam menyediakan fasilitas bagi pelaku pelanggaran HAM di Mimika, jelas menggambarkan bagaimana kekuatan internasional turut mendukung perusakan struktur sosial, ekonomi dan budaya masyarakat Papua. Uskup Muninghof pada tahun 1995, membuat laporan mengenai hal ini. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) segera membentuk tim untuk meneliti kebenaran laporan itu. Tapi, negara tidak pernah memberi sanksi pada pelaku pelanggaran HAM termasuk

---

<sup>51</sup> ICG, 2002, "Indonesia: Resources and Conflict in Papua", *ICG Asia Report*, No, 39, 13 September 2002, [www.intl-crisis-group.org/projects/showreport.cfm?Reportid=74](http://www.intl-crisis-group.org/projects/showreport.cfm?Reportid=74)

<sup>52</sup> Secara resmi pemerintah Indonesia mengumumkan bahwa jumlah orang yang meninggal pada peristiwa 1977 di Tembagapura adalah sebanyak 900 jiwa, tetapi angka dilapangan menunjukan data dua kali lipat lebih banyak dari angka-angka resmi pemerintah Indonesia tersebut (CEB WPNews, 25 Februari 2006. Laporan dikutip dari, <http://www.melanesianews.org/cgi-bin/spm/exec/view.cgi?archive=7&num=1776>)

PT. Freeport-Rio Tinto yang menyediakan sarannya. Dalam laporannya, PT Freeport-Rio Tinto, Freeport-McMoran Copper and Gold Inc., menyatakan bahwa, TNI/Polri maupun Pemerintah Indonesia selalu meminta perusahaan yang berada di wilayah Timika tersebut untuk menyediakan dukungan logistik dan infrastruktur mengingat jauhnya lokasi dan keterbatasan pembangunan di Papua. Pada tahun 2002, dana yang telah disetor PT Freeport-Rio Tinto untuk TNI mencapai Rp 50 milyar. Tahun 2001, dana tersebut mencapai Rp 41 milyar untuk 2300 personel. (*Kompas*, 14 Maret 2003). PT Freeport-Rio Tinto (PTFI), tahun 2002, mengeluarkan biaya sebesar 7 juta dollar AS untuk dukungan penyelenggaraan keamanan di perusahaan pertambangan itu. Tahun sebelumnya, mereka mengeluarkan biaya sebesar 5,8 juta dollar AS. Anggaran itu dialokasikan untuk prasarana, pengadaan pangan dan kantin, perumahan, bahan bakar, perjalanan, perbaikan kendaraan, tunjangan untuk menutup biaya-biaya insidental dan administrasi, serta program bantuan terhadap masyarakat yang dilakukan oleh TNI dan Polri. Kepala Dinas Penerangan Umum Puspen TNI Letkol (Inf) DJ Nachrowi menyatakan bahwa dana sebesar 7 Juta Dolar AS yang disebutkan oleh manajemen PT.Freeport-Rio Tinto itu belum termasuk uang saku yang diberikan kepada setiap petugas keamanan sebesar Rp 350.000 per bulan. Untuk pengamanan PTFreeport-Rio Tinto, TNI menugaskan satu batalyon (sekitar 700-800 personel) prajuritnya, ditambah sejumlah satuan-satuan non-organik dari TNI. Secara keseluruhan jumlah personil TNI yang berada di Tembagapura (seputar daerah Konsesi PT.Freeport-Rio Tinto) mencapai 3000 personil.

PT. Freeport-Rio Tinto juga telah melakukan sejumlah perusakan lingkungan, antara lain telah merubah bentang alam dalam skala yang sangat parah. Gunung Yet Segel Ongop Segel (Grasberg) menjadi lubang raksasa sedalam 700 meter. Padahal gunung ini dikisahkan sebagai kepala ibu bagi Suku Amungme, yang sangat menghormati wilayah keramat itu. Danau Wanagon, sebagai danau suci orang Amungme juga hancur, karena dijadikan tumpukan batuan limbah (overburden) yang sangat asam dan beracun. Freeport juga mencemari tiga badan sungai utama di wilayah Mimika, yaitu Sungai Aghawagon, Sungai Otomona dan Sungai Ajkwa sebagai tempat

pembuangan tailing (limbah pasir dan hasil produksi). Lebih dari 200.000 ton tailing dibuang setiap harinya ke Sungai Aghawagon, yang kemudian akan mengalir memasuki Sungai Otomona dan Sungai Ajkwa. Partikel tailing yang tidak mengendap di kemudian ikut mengalir sampai ke Laut Arafura. Dari sebuah studi menggunakan citra satelit Landsat-TM ditemukan bahwa pada tahun 2000, tailing dari operasi pertambangan tersebut telah mengkontaminasi wilayah daratan seluas 35.820 hektar, sementara Laut Arafura telah terkontaminasi seluas 84.158 hektar.

Pada tanggal 4 Mei 2000 terjadi longsor tumpukan batuan limbah di tempat pembuangan di Danau Wanagon yang menewaskan 4 pekerja sub-kontraktor Freeport. Kejadian jebolnya Danau Wanagon ini adalah yang ketiga kalinya, sejak kejadian Juni 1998 dan luapan lumpur akibat gempa tanggal 20-21 Maret 2000. Penggunaan Danau Wanagon menjadi tempat penimbunan limbah batuan sejak awal memang tidak memenuhi syarat, karena daya dukungnya yang tidak mampu menerima tumpukan limbah batuan dari produksi harian PTFI yang berskala lebih dari 200.000 ton per hari, bahkan terus ditingkatkan sampai 300.000 ton per hari. Kerentanan daerah tersebut juga sangat tinggi yang disebabkan oleh aktivitas seismic serta curah hujan yang mencapai 3-6 meter per tahun. Resiko lingkungan yang begitu besar ini sesungguhnya sudah diketahui PTFI sebagaimana tercantum dalam dokumen AMDAL, namun hal ini seolah diabaikan dengan menerapkan pengelolaan lingkungan yang tidak memadai.

Selain memiliki resiko lingkungan yang begitu tinggi, danau yang tadinya begitu indah dan sangat khas ini, sesungguhnya juga memiliki nilai keramat bagi suku Amungme. Danau Wanagon bagi masyarakat Amungme merupakan *isorei* (rumah laki-laki), yaitu tempat bersemayamnya arwah-arwah suku Amungme yang sudah meninggal dunia. Sehingga apabila danau tersebut dirusak secara otomatis merusak dan membunuh manusia yang berada di situ. Mereka meyakini pula bahwa selama ini *isorei* pula yang memberkahi mereka hingga selalu memperoleh rejeki atau keberuntungan. Sehingga dengan dijadikannya tempat pembuangan limbah batuan, otomatis nilai keramat tersebut akan tercemar. Danau Wanagon menjadi tempat

penimbunan limbah batuan telah melanggar Konvensi ILO 169 mengenai Bangsa Pribumi dan Masyarakat Adat di Negara-negara Merdeka. Insiden longsornya tumpukan batuan limbah kembali terjadi pada tanggal 9 Oktober 2003. Longsor terjadi di daerah tambang terbuka Grasberg. Akibatnya insiden ini, 8 orang pekerja tewas. (CEB WPNews, 25/2/2006. <http://www.melanesianews.org/cgi-bin/spm/exec/view.cgi?archive=7&num=1776>)

Keberatan dan protes atas keberadaan Freeport yang selama ini hanya menyengsarakan masyarakat setempat juga dilancarkan oleh tujuh suku yang mendiami kawasan Pegunungan Tengah Papua. Dalam siaran persnya pada 25 Februari 2006, mereka menyampaikan pernyataan sikap: *Pertama*, akan tetap memblokir PT. Freeport selama sehari-hari sampai Tom Beanal, James Moffet dan para pemegang SAHAM bersama Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat mengadakan dialog bersama dengan tujuh suku sebagai pemilik hak ulayat untuk mencabut MoU tentang PT Freeport dan memberhentikan pengeksploitasian Tambang Emas dan Tembaga. *Kedua*, mendesak kepada MRP dan DPRP segera mengadakan Sidang Paripurna demi menetapkan Dialog Nasional dan Internasional; selanjutnya MRP dan DPRP mendesak Pemerintah Indonesia, Belanda dan Amerika Serikat segera melakukan Dialog Nasional dan Internasional untuk menyelesaikan masalah Papua secara menyeluruh, utuh dan tuntas. *Ketiga*, menyeruhkan kepada suku-suku lain di Papua untuk segera menyatukan barisan perlawanan dalam mendukung penutupan Freeport yang didorong oleh tujuh suku pemilik hak ulayat dan mendesak lembaga-lembaga terkait (DPRP dan MRP) mendorong Dialog Nasional dan Internasional untuk membicarakan berbagai masalah di Papua secara komprehensif. *Keempat*, Sebelum pihak PT. Freeport (James Moffet), pemilik Saham, Indonesia dan Amerika Serikat tidak membuka dialog dengan tujuh suku pemilik hak ulayat dan membuka Dialog nasional dan Internasional dengan orang Papua, maka mereka kami akan mempertaruhkan nyawa kami memblokir PT Freeport Indonesia sampai pihak-pihak yang melacurkan diri (Indonesia, Amerika, Belanda dan PBB) datang dan duduk bersama dengan Massa rakyat Papua dalam penyelesaian masalah Papua secara menyeluruh, utuh dan tuntas berdasarkan prinsip

demokrasi, hukum, keadilan, kebenaran dan bermartabat. *Kelima*, apabila Tuntutan kami tidak ditanggapi, maka kami akan memboikot Pilkadaesung Gubernur/Wakil Gubernur Papua Periode 2006-2011 tanggal 10 Maret 2006 melalui Mogok Sipil Nasional Papua.<sup>53</sup>

Sudah terlalu banyak jiwa masyarakat Papua yang hilang akibat represi yang dilakukan tentara Indonesia. Wajar jika kemarahan dan mungkin dendam sudah terlalu dalam bersemayam di dalam hati masyarakat papua. Kemarahan itu antara lain terefleksi dalam ucapan Thom Beanal, pemimpin adat rakyat Amungme dan anggota Lembara Presidium Papua (LPP), ketika diterima Presiden BJ Habibie, di Jakarta pada, 26 Februari 1999. Saat itu ia mengatakan; *“Kami menuntut kemerdekaan karena kami tidak ingin terus menerus dibunuh seperti ini.”* Ungkapan ini mencerminkan sentimen luas di kalangan rakyat Papua yang memandang persoalan kemerdekaan sebagai tak terpisahkan dari perjuangan hidup rakyat Papua—baik dalam arti fisik maupun budaya. (Bonay & Gregory, 2005: 137)

#### 4.D.2. Upaya-upaya Penyelesaian

Berbagai upaya penyelesaian masalah Timor Timur terus dilakukan oleh pemerintah Jakarta. Salah satunya seperti ditunjukkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid yang memfasilitasi bagi berlangsungnya Kongres Rakyat Papua yang sempat tertunda-tunda pelaksanaannya. Pelaksanaan kongres yang dihadiri tidak kurang dari 5.000 rakyat Papua, pada akhir Mei 2000, tak lepas dari bantuan Presiden Abdurrahman Wahid. Presiden menyumbang dana Rp 1 milyar. Kongres itu semula dijadwalkan diadakan awal tahun. Tetapi dana belum terkumpul, sehingga diundur hingga dua kali. Sekretaris Presidium Dewan Papua Thaha Mohammad Alhamid mengakui besarnya peranan dana bantuan Presiden untuk penyelenggaraan kongres. Bahkan, sekalipun tidak diakui secara transparan, sebenarnya dana terbesar penggerak Kongres Rakyat Papua, adalah bantuan Presiden. (Kompas, 20

<sup>53</sup>Pernyataan sikap Tujuh Suku Pemilik Hak Ulayat ini ditandatangani oleh Thadeus Kwalik, direproduksi SPMNews Headquarters. Data diakses melalui. <http://www.melanesianews.org/cgi-bin/spm/exec/view.cgi?archive=7&num=1777>

Oktober 2000)

Sehari setelah kongres itu berakhir, Presiden Abdurrahman Wahid di Jakarta mengungkapkan kekecewaannya. "Tadinya saya membantu supaya terlaksana, karena panitia kongres menjanjikan dua hal, yakni tidak ada orang asing di dalamnya (kongres) dan semua orang (Papua) boleh ikut," kata Presiden (Kompas, 6 Juni 2000). Kekecewaan Presiden bukan cuma karena Kongres Rakyat Papua tak melibatkan masyarakat Papua yang mendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tetapi juga karena hasil kongres yang tidak sesuai harapan pemerintah. Dalam kesempatan itu, Kongres Rakyat Papua merekomendasikan supaya Provinsi Irian Jaya itu keluar dari NKRI. Bahkan, dalam rekomendasi yang dibacakan M Jusuf Tanawani dari Serui itu, ditegaskan rakyat Papua tak mau membentuk pemerintahan transisi Papua, melainkan pemerintahan *de facto*. Kehendak melepaskan diri dari NKRI itu semakin terbuka, karena dalam pidato penutupannya Ketua Presidium Dewan Papua Theys H Eluay dengan lantang menegaskan, Papua tidak pernah masuk sebagai bagian NKRI. "Jangan pergunakan lagi istilah Papua keluar dari Indonesia. Sebab tidak ada catatan sejarah yang menunjukkan Papua pernah masuk bagian Indonesia. Malahan NKRI yang menempel pada Papua," tegasnya. (Kompas, 4 Juni 2000). Resolusi Kongres Rakyat Papua tersebut diterima sebagai pernyataan merdeka oleh sebagian rakyat. Lagu "kebangsaan" Papua, *Hai Tanahku Papua* pun berkumandang dan bendera "kemerdekaan" Bintang Kejora berkibar di hampir setiap jengkal tanah di Papua. Tanah Papua pun seakan menjadi negeri yang merdeka, sekalipun secara formal memang tetap dikendalikan aparatur Indonesia.

Langkah Presiden memberikan bantuan pada Kongres Rakyat Papua bukan cuma dipersalahkan dan dikecam politisi di tingkat nasional, tetapi juga disayangkan sejumlah tokoh masyarakat Papua. Karena semenjak kongres itu berakhir, ketegangan antara aparat dan rakyat Papua yang mendukung kemerdekaan semakin memuncak. Tanah Papua pun berubah bagai bara yang panas, yang tidak nyaman lagi diinjak oleh terutama kaum pendatang. Ketegangan itu memuncak 6 Oktober 2000 di Wamena,

Kabupaten Jayawijaya sewaktu aparat kepolisian menurunkan sejumlah bendera bintang kejora. Rakyat Papua yang merasa sudah merdeka merasa keberatan bendera kebangsaan diturunkan begitu saja. Ketegangan berubah menjadi kerusuhan. Tidak kurang dari 26 jiwa, sebagian besar adalah warga pendatang melayang. Tragedi di Wamena itu membuat pemerintah bersikap tegas. Sikap pemerintah pun berbalik haluan. Presiden Abdurrahman Wahid dalam sidang kabinet pada pertengahan Oktober 2000 memutuskan, bendera bintang kejora, dianggap sebagai lambang separatisme serta bukan lagi bendera budaya seperti dimaui Presiden dilarang dikibarkan di seluruh wilayah Papua sejak bulan Oktober 2000. (Kompas, 20 Oktober 2000)

Upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah RI untuk mempertahankan keutuhan wilayah adalah melalui pendekatan diplomatik ke masyarakat internasional. Hasilnya antara lain tampak dalam pernyataan Pemerintah Papua Niugini (PNG), yang menegaskan akan tetap mendukung Irian Jaya berada dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Duta Besar PNG untuk Indonesia, Tarcisius Eri, mengemukakan hal itu dalam keterangan pers se usai penutupan pertemuan Joint Border Committee (JBC) ke-19 di Hotel Horison, Bandung, 13 Oktober 2000. Sementara itu, Iairo Lasaro MP, Menteri Urusan Pemerintahan Tingkat Lokal dan Provinsi (*Minister for Provincial and Local Level Government Affairs*) yang memimpin delegasi PNG dalam pertemuan tersebut juga menegaskan bahwa Pemerintah PNG tidak mengampuni, menolerir atau mengakui kegiatan apa pun yang menentang Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah perbatasan atau di seberangnya.

Menurut Lasaro, Pemerintah PNG tetap berpendirian bahwa Irian Jaya tetap menjadi bagian integral dari Indonesia. Karena itu, dalam pertemuan tersebut tidak dibahas secara khusus mengenai situasi keamanan Irian Jaya. "Masalah keamanan Irian Jaya diakui Pemerintah PNG sebagai masalah dalam negeri RI. Mereka mendukung posisi RI bahwa Irian Jaya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari NKRI. Oleh karena pertemuan PNG-RI ini tidak membicarakan masalah keamanan Irian Jaya," kata Mayjen (Purn) Benny Mandalika, Duta Besar RI untuk PNG yang mendampingi

## Matriks Diskursus Nasionalisme Indonesia Ditinjau Menurut Konsep Foucault

| FOUCAULT'S CONCEPTS | WACANA ORBA   | WACANA DI ACEH  | WACANA DI RIAU  | WACANA DI TIMOR TIMUR   | WACANA DI PAPUA   |
|---------------------|---|---|---|---|---|
| Power               | 'DOM, Menjaga Integritas NKRI, stabilitas politik,  | '...eksploitasi, pembantaian, penindasan'   | '...konflik pusat daerah selalu diselesaikan dengan senjata...'       | '...kolonialisme Indonesia pembantaian  | pembantaian   |
| Knowledge           | 'Pembangunan nasional, Pembaharuan dan modernisasi masyarakat'  | '...martabat Rakyat Aceh sudah diinjak-injak oleh ABRI'   | '...hak-hak demokrasi di Riau telah terkubur'                         | '...rakyat di Maubere telah mengenal siapa pemerintah Indonesia itu sebenarnya..tak ada bedanya dengan kolonialis di dunia lainnya...tangannya menumpahkan darah di bumi Maubere... | 'akumulasi dari berbagai rasa tidak puas dan kecewa terhadap dampak negatif pembangunan, serta realitas kemiskinan yang melilit kehidupan rakyat Irian jaya..merupakan faktor pendorong perlawanan di papua   |
| Games of Truth      | 'Melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, Demokrasi Pancasila, kepentingan rakyat di atas segalanya' | 'Berdasarkan UUD 1945, daerah-daerah luar Jawa sekarang ini dapat menuntut pemisahan dari NKRI' | 'Berdasarkan Preambule UUD 1945...Riau berhak mendapat kemerdekaan..' | '...bangsa yang memuliakan kemerdekaannya lewat UUD 1945 dan falsafah Pancasila...tak lebih dari gerombolan perompak di lautan Timor..'   | '...keuntungan proyek pertambangan ...milik pemerintah pusat, akibatnya..hanya sedikit hasilnya yang bisa dinikmati penduduk Irian Jaya..akibatnya, meski dari segi pendapatan perkapita Irian jaya adalah paling tinggi, namun kesejahteraan penduduknya lebih buruk dibanding daerah lainnya. |

|                 |   |   |  |  |  |
|-----------------|---|---|--|--|--|
| Discourse       | 'OPM, GPK, PKI, GAM, Gerakan Separatis'                         | 'Tuntutan penentuan nasib sendiri ( <i>self determination</i> ) merupakan hak warga Aceh...'  | '...tahulah saya bahwa secara politik Riau akan dilumatkan oleh pusat. Hilanglah hak-hak politik bangsa Riau..' To be or not to be.. inilah jalan yang ingin dicapai oleh Gerakan Riau Merdeka | 'apakah saya terus meyakini keadilan yang terus dipaksakan oleh pemerintah Indonesia sekarang ini? Kami dibuat miskin dan dirampas hak hidup kami, tetapi masih diharuskan mengatakan Indonesia negara republik yang berkeadilan dan berprikemanusiaan'. | '...cap OPM malah sering menjadi bumerang'. Ia menimbulkan efek trauma yang mendalam.  |
| Counter-history | 'NKRI Final'  | 'Baik secara historis maupun konstitusional Tidak ada landasan yang kuat bahwa Aceh merupakan bagian integral dari NKRI'  | 'setelah 37 tahun menjadi bagian diri Indonesia...Riau justru menjadi propinsi terburuk setelah Timor Timur.'  | '...kami rakyat Maubere telah merdeka pada 7 Oktober 1975...tetapi tiba-tiba tanggal 15 Juli 1976 Timor Timur diklaim menjadi bagian dari Indonesia tanpa mengindahkan kemerdekaan dan kedaulatan rakyat Timor Timur.                                    | '...aksi-aksi perlawanan yang bersifat sporadis...tidaklah dilandasi oleh tujuan sparatis... melainkan lebih karena faktor lain, misalnya ketidakpuasan sosial |
| Episteme        | 'Pembebasan Irian Barat, massa mengambang, Negara kekeluargaan' | '...demi martabatnya, apapun akan rela dikorbankan rakyat aceh selama pemerintahan tidak memberikan jalan keluar untuk menjawab nestapa dan ketertindasan Aceh selama ini.' | '...dengan UU No, 5/1979, pemerintah pusat mengubah sistem unitarian menjadi uniformitas dan selanjutnya menjadi otoritarian...'   | '...saya jadi teringat hujatan tuan-tuan Belanda pada para budaknya bangsa Indonesia. Sekarang hujatan tuan Belanda itulah yang dipakai oleh si budak pemerintah Indonesia yang sekarang menjadi tuan kepada kami rakyat di Maubere..'                   | 'Masalah ketidakadilan dan kemiskinan yang membuat warga Papua melawan'  |

Konsep Foucault yang lain: Order, archeology, historical rupture, subject objectification, panopticon, human disciplines, governmentality, microphysics of power, sexuality and subjectivity. (Allan, 2006: 290)

#### 4.E. ISU INTEGRASI NASIONAL DALAM WACANA NASIONALISME INDONESIA

Sebagaimana umumnya negara-negara baru, Indonesia sejak kemerdekaan pada tahun 1945 menghadapi problem integrasi nasional—dalam pengertian terbentuknya suatu keutuhan negara dan bangsa, termasuk di dalamnya, hubungan yang baik antara elite bangsa dengan keseluruhan penduduk, sehingga memiliki nasionalisme yang penuh, dan akhirnya seluruh penduduk rela memberikan loyalitasnya secara sukarela kepada negara. Problem ini, dalam tinjauan Liddle (1970: 3) memiliki akarnya di dalam periode kolonial, yaitu ketika terjadi proses urbanisasi dan meningkatnya taraf pendidikan, di kalangan masyarakat terjajah mulai muncul sejumlah elite. Awalnya, seperti layaknya masyarakat terjajah yang umumnya tradisional, para elite ini merasakan kebersamaan dengan masyarakatnya, dengan segala sukaduka perjuangan melawan kolonialisme. Namun pada tahap berikutnya, ketika perjuangan melawan kolonialisme telah usai, dan kemerdekaan tercapai, para elite masyarakat pasca kolonial ini menemukan diri mereka justru terpisah oleh serangkaian jurang yang nyaris tidak terjembatani, dengan posisi yang lebih jelas: antara rakyat dengan penguasa. Tidak hanya posisi, tetapi serangkaian struktur sosial, politik dan kebudayaannya pun terdapat jurang yang dalam. Mengutip Edward Shils, Liddle mengatakan:

In almost every aspect of their social structures, the societies on which the new states must be based are characterized by a 'gap'. It is the gap between the new, very rich and the mass of the poor, between the educated and uneducated, between the townsman and the villager, between the cosmopolitan or national and the local, between the modern and the traditional, between the rules and the ruled. It is the 'gap' between a small group of active, aspiring, relatively well-off, educated and influential persons in the big towns and an inert or indifferent, impoverished, uneducated and relatively powerless peasantry. (Shils, 1960: 281, direproduksi, dalam Liddle, 1970: 3-4)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Hampir dalam semua aspek struktur sosial mereka, di mana masyarakat seharusnya berdiri di atasnya, justru dikarakteristikan oleh 'jurang'. Yaitu jurang antara sedikit orang yang sangat kaya dengan masyarakat banyak yang sangat miskin, antara kaum terpelajar dan tidak terpelajar, antara orang kota dan orang desa, antara orang kosmopolit nasional dan lokal, antara orang modern dan orang kuno, antara penguasa dan rakyat. Yaitu jurang antara kelompok kecil yang

Karena itu, menurut Liddle, problem integrasi nasional yang dihadapi oleh sebagian besar negara-negara baru, termasuk Indonesia, berurusan dengan dua dimensi pokok: (1) dimensi horisontal, yang mencakup pertautan bersama dari kelompok-kelompok sosial yang terpisah—kekeluargaan, etnik, bahasa, agama, ras—di dalam satu kerangka kerja bersama institusi dan loyalitas nasional, dan (2) dimensi vertikal, yang mencakup penutupan jurang politik dan kebudayaan antara orang perkotaan, berpendidikan Barat, para elite politik nasional pada satu sisi, dengan massa rakyat banyak yang tradisional, di pedesaan dan sebagainya. Kemampuan elite negara baru dalam mengatur kedua dimensi ini akan sangat menentukan, apakah negara tersebut akan menjadi semakin terintegrasi, yang memungkinkan permasalahan kenegaraan bisa berjalan, dimana loyalitas kepada negara menjadi sesuatu yang tak bisa dihindarkan, dan jurang antara elite dan massa dapat dihilangkan, atau ia akan menjadi berantakan oleh gerakan-gerakan separatisme.

Untuk Indonesia yang memiliki wilayah begitu luas membentang dari barat ke timur sepanjang 5.000 kilometer, terdiri atas 13.000 pulau lebih, dengan penduduk lebih dari 200 juta orang, dan didalamnya hidup tidak kurang dari 200 suku dan etnis, dan wilayahnya melintasi tiga zona waktu, jelas persoalan integrasi nasional menjadi problem yang tidak mudah diwujudkan. Tak berlebihan bila Indonesianis dari Cornell University, Ruth McVey mengilustrasikan, membangun Indonesia sebagai sebuah negara kesatuan tak ubahnya mendirikan raksasa (*building behemoth*), sebuah gagasan yang nyaris tidak masuk akal (*the nation-state is a chimera*). (McVey, 1996). Inti dari persoalannya adalah, dengan cara seperti apa negara dan bangsa yang begitu luas dan kompleks itu ditata? Pertanyaan bernada skeptis ini belakangan semakin kuat bermunculan di kalangan pengamat Indonesia, bersamaan dengan maraknya pergolakan di berbagai daerah, khususnya pasca jatuhnya Soeharto pada 1998. Lepasnya Timor Timur pada

---

aktif, memiliki aspirasi, relatif kaya, orang terpelajar dan berpengaruh di kota besar dengan orang lemah, orang yang biasa, miskin, tidak terpelajar dan kaum petani yang relatif lemah.

1999 (hanya setahun setelah reformasi terjadi), munculnya deklarasi kedaulatan Riau (pada 15 Maret 1999), ditambah kerasnya tuntutan kemerdekaan di Aceh dan Papua, semakin kuat mengindikasikan apa yang disebut 'Negara Kesatuan Republik Indonesia' sedang menghadapi persoalan yang serius. Dan ini jelas merupakan persoalan integrasi nasional. Donald Emmerson (2001) pun lalu bertanya, 'Mampukah Indonesia bertahan sebagai negara kesatuan?' (*Can Indonesia survive as unitary state?*). Namun setelah mencermati berbagai perkembangan yang terjadi, Emmerson sampai pada kesimpulan; *Indonesia akan bertahan. Dan Indonesia akan bertahan lagi. Asalkan Jakarta mampu membekali dan memelihara dengan baik suatu kesatuan negara yang direlakan—bukan kesatuan negara yang dipaksakan.* (Emmerson, 2001: 666).

Upaya pemerintah Indonesia Orde Baru untuk membangun nasionalisme yang kuat di kalangan masyarakatnya, khususnya masyarakat lokal, tampaknya belum berhasil. Bahkan ada satu bentuk kegagalan yang cukup jelas yaitu lepasnya Timor Timur. Aceh, meski akhirnya menghentikan tuntutan kemerdekaannya setelah puluhan tahun berperang dengan tentara Indonesia, tetapi sudah terlalu banyak jiwa yang menjadi korban, dan untuk mengakhirinya pun harus melibatkan pihak ketiga. Di Riau, api kemarahan masyarakat setempat juga baru menyurut setelah berlangsungnya kebijakan baru menyangkut otonomi daerah. Sementara itu, di Papua hingga saat ini, pergolakan menuntut kemerdekaan yang dilakukan OPM belum juga reda. Bagaimana dinamika integrasi (dan disintegrasi) nasional itu terjadi selama ini, apa saja aspek-aspek penting yang ada (terjadi) di keempat wilayah tersebut yang menyebabkan menguatnya (ataupun mungkin juga melemahnya) integrasi akan dicoba bahas dalam paparan-paparan berikut ini.

Dibanding tiga daerah lain Aceh sebenarnya merupakan daerah yang memiliki ikatan sejarah paling kuat dengan Indonesia bangsa. Bahkan seperti dipaparkan pada bagian sebelumnya, Aceh telah memberikan kontribusinya yang luar biasa dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia melawan Belanda, sehingga Presiden Sukarno menggelari Aceh sebagai 'Daerah Modal'. Secara ideologis, Aceh juga memiliki kedekatan dengan saudaranya di Indonesia

yang mayoritas menganut agama Islam. Tetapi kedekatan ideologis, dan juga perasaan senasib sepenanggungan di masa perjuangan melawan kolonialisme Belanda, semakin meluruh seiring berjalannya waktu. Bahkan sepertinya kemudian lenyap nyaris tak berbekas, tak lebih dari sepuluh tahun kemudian. Pangkalnya adalah kekecewaan demi kekecewaan yang terus dirasakan oleh masyarakat Aceh akibat kebijakan pemerintah Indonesia (Jakarta) yang tidak aspiratif, dan dalam banyak hal sangat merugikan masyarakat Aceh. Mulai dari tiadanya pengakuan akan keistimewaan dan kekhasan budaya Aceh, eksploitasi kekayaan alam yang semena-mena, hingga pembantaian dan penghancuran kemanusiaan dalam skala yang tak bisa ditolehir lagi. Perilaku tentara yang mengerikan selama berlangsungnya status Daerah Operasi Militer (DOM) di wilayah itu selama sepuluh tahun (1989-1998), membuat masyarakat Aceh trauma terhadap Indonesia.<sup>2</sup> Bahkan salah seorang pemimpin Aceh Hasan di Tiro menyebut Indonesia adalah penguasa kolonial dengan orang Jawa sebagai pengganti Belanda-nya.<sup>3</sup> Jika ditinjau menggunakan konsep Liddle tentang integrasi nasional, maka akan tampak bahwa, mayoritas gangguan bagi terwujudnya integrasi nasional itu berada pada aspek atau dimensi vertikal. Dimana elite politik di Jakarta-lah yang menjadi faktor utama bagi terjadinya kesenjangan Indonesia-Aceh. Meski demikian ada juga aspek horisontal yang sebenarnya bisa menjadi perekat antara Aceh dan Indonesia, yaitu aspek ke-Islaman. Tetapi tampaknya faktor ini juga tidak mampu menjemtani kesenjangan yang terlanjur menganga dan dalam itu. Secara sederhana, beberapa persoalan yang muncul di Aceh, dalam kaitannya dengan integrasi nasional dapat diidentifikasi dalam tabel berikut:

---

<sup>2</sup> Di Aceh, tidak seperti yang digambarkan Ali Murtopo, dimana militer menjadi pihak yang paling depan menjaga integrasi, tetapi sebaliknya justru menjadi momok disintegrasi. Dalam buku yang barangkali telah menjadi *magnum opus* salah satu arsitek Orde Baru itu, Murtopo menulis, "Dari sejarah kehadiran ABRI, disintegrasi yang menjurus pada kehancuran negara berulang kali dapat ditanggulangi." (Murtopo, 1981: 242)

<sup>3</sup> "Indonesia is still an unliquidated colonial empire with Javamen replacing Dutchmen as enemies." (Kell, 1995: 62, direproduksi dalam, Mann, 2005: 494)

**IDENTIFIKASI PERSOALAN INTEGRASI NASIONAL  
DI ACEH**

| NO | JENIS MASALAH/ KASUS  | KLASIFIKASI:<br>VERTIKAL -<br>HORISONTAL |            | KETERANGAN  |
|----|---|--|------------|---|
| 1. | Pembagian/penataan wilayah (menurut UUD 1950 dan UU Desentralisasi) yang dianggap tidak aspiratif | Vertikal                                 |            | Diselesaikan dengan UU No. 18 Tahun 1965 tentang Keistimewaan Aceh  |
| 2. | Kebijakan yang tidak aspiratif (Keluarnya UU. No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan   | Vertikal                                 |            | Substansinya, UU No. 5/1974 ini meniadakan status Keistimewaan Aceh |
| 3. | Eksplorasi sumber daya alam besar-besaran, tetapi warga Aceh mendapat bagian yang sangat kecil    | Vertikal                                 |            | Khususnya tambang di Arun   |
| 4. | Kekerasan tentara (pembantaian, pemerkosaan, dll), eksekusi pelaksanaan DOM                       | Vertikal                                 |            |   |
| 5. | Kerusakan lingkungan akibat eksploitasi Sumber Daya Alam  | Vertikal                                 |            |   |
| 6. | Rusaknya struktur budaya/adat   | Vertikal                                 | Horisontal |   |
| 7. | Tidak ada penegakan hukum bagi pelanggar HAM berat  | Vertikal                                 |            |   |

Mirip dengan di Aceh, masyarakat Riau sebenarnya memiliki rasa kebersamaan dengan Indonesia dalam masa perjuangan panjang melawan kolonialisme, di samping juga ada kedekatan ideologis, dimana mayoritas masyarakat Riau adalah pemeluk Islam, seperti halnya mayoritas penduduk Indonesia. Kesenjangan antara Riau dengan Jakarta terjadi hampir bersamaan dengan masyarakat Aceh, yaitu dimulai dari adanya kebijakan-kebijakan penataan/pembagian daerah administrasi kewilayahan yang tidak aspiratif, bahkan merugikan masyarakat Riau. Disusul kemudian oleh cara-cara pengambilan keputusan politik yang sentralistis, yang seolah tidak mengindahkan keberadaan martabat masyarakat Riau. Perasaan dilecehkan itu mencapai puncaknya ketika terjadi eksploitasi sumber daya alam dalam jumlah yang sangat besar, tetapi masyarakat Riau hanya mendapat bagian

yang sangat kecil. Belum lagi harga sosial dan budaya (seperti yang dialami suku Sakai) yang dihancurkan yang tak ternilai harganya. Yang tertinggal di Riau, setelah selama puluhan tahun bersama Indonesia, hanyalah kelaparan, kebodohan dan ketertindasan masyarakatnya. Aspek-aspek inilah yang menyebabkan, apa yang disebut Liddle sebagai integrasi vertikal, sangat jauh dari terwujud. Demikian pula, pada dimensi horisontal, seperti kekerabatan budaya dan rasa kedekatan ideologis, alih-alih bisa diperkuat, sebaliknya justru merosot. Jika dibuat satu tabel identifikasi persoalan, maka apa yang terjadi di Riau akan tampak seperti di bawah ini:

**IDENTIFIKASI PERSOALAN INTEGRASI NASIONAL  
DI RIAU**

| NO | JENIS MASALAH/ KASUS   | KLASIFIKASI:<br>VERTIKAL -<br>HORISONTAL |            | KETERANGAN                                   |
|----|--|--|------------|--|
|    |  |  |            |  |
| 1. | Pembagian/penataan wilayah (menurut UUD 1950 dan UU Desentralisasi) yang dianggap tidak aspiratif                | Vertikal                                 |            |  |
| 2. | Pembekuan DPRST oleh Jakarta secara sepihak melalui UU No. 1/1951  | Vertikal                                 |            | Terjadi di masa kabinet M. Natsir            |
| 3. | Konfrontasi Jakarta dengan Malaysia, yang merusak struktur sosial, ekonomi, budaya dan kekerabatan sesama Melayu | Vertikal                                 | Horisontal |  |
| 4. | Lahirnya UU No. 5/ 1974 dan Kepmendagri No. 240/1980, yang menjadikan kebijakan otonomi daerah dirasa sia-sia    | Vertikal                                 |            | Dimana kantor-kantor dinas langsung ke pusat |
| 5. | Pengangkatan Gubernur yang tidak aspiratif, juga penggantian Gubernur yang menyalahi aturan hukum                | Vertikal                                 |            |  |
| 6. | Pelecehan (simbolik) struktur budaya lokal   | Vertikal                                 | Horisontal | Peristiwa Monumen Riau                       |
| 6. | Eksplorasi sumber daya alam yang tidak mengindahkan hak adat lokal   | Vertikal                                 |            |  |
| 7. | Pembagian hasil eksploitasi sumber daya alam yang tidak adil antara pemerintah Jakarta dengan warga Papua        | Vertikal                                 |            |  |

|     |   |          |            |  |
|-----|---|----------|------------|--|
| 8.  | Kerusakan lingkungan akibat eksploitasi SDA               | Vertikal |            |  |
| 9.  | Rusaknya struktur budaya/adat                             | Vertikal | Horisontal |  |
| 10. | Penyerobotan/perampasan tanah rakyat                      | Vertikal |            |  |
| 11. | Kekerasan tentara (pembantaian, pemerkosaan, dll)         | Vertikal |            |  |
| 12. | Tersingkirnya masyarakat lokal akibat proyek transmigrasi | Vertikal | Horisontal |  |
| 13. | Perampasan dan perusakan hutan lewat HPH                  | Vertikal |            |  |
| 14. | Illegal logging   | Vertikal |            |  |
| 15. | Kemelaratan, kelaparan, kebodohan                         | Vertikal | Horisontal |  |
| 16. | Tidak diakomodasinya tenaga kerja lokal                   | Vertikal |            |  |

Jauh berbeda dengan Aceh dan Riau, yang memiliki konteks sejarah (dan juga legitimasi hukum dan pengakuan internasional) yang begitu jelas dengan Indonesia, Timor Timur adalah daerah yang memang secara historis dan hukum tidak memiliki legitimasi yang kuat untuk dianggap sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu-satunya dasar yang dijadikan landasan pemerintah Indonesia memasukkan wilayah tersebut ke dalam NKRI adalah Deklarasi Balibo (yang ditandatangani pada 30 November 1975). Secara internal masyarakat Timor Timur, deklarasi ini tidak mendapatkan dukungan yang meyakinkan. Sementara di tingkat internasional, hanya ada dukungan Amerika Serikat dan Australia yang memberikan pengakuan secara *de facto* (tidak secara *de jure*) karena didorong oleh kepentingan ekonomi dan strategi pertahanannya masing-masing. Lemahnya landasan sejarah dan hukum ini, kemudian juga diperlemah oleh tidak ada upaya yang bersifat horisontal, seperti pendekatan ideologis dan budaya. Sebaliknya, pemerintah Indonesia justru menghancurkan struktur sosial dan budaya masyarakat Timor Timur dengan praktik-praktik militerisme barbarian, sembari membuat kamufase dengan pembangunan prasarana fisik dalam skala besar, sekadar untuk menunjukkan tingkat kemajuan pembangunan di wilayah itu pasca berintegrasi dengan Indonesia.

Selama 24 tahun Indonesia menghabiskan banyak biaya, pikiran dan juga korban di kalangan prajuritnya untuk mengintegrasikan Timor Timur ke

dalam NKRI. Tetapi semuanya itu pada akhirnya tidak menghasilkan capaian yang diinginkan. Sebaliknya justru telah menempatkan Indonesia pada posisi yang memalukan sebagai bangsa penjajah di mata publik internasional. Kegagalan Indonesia mengintegrasikan Timor Timur ke dalam cakupan wilayah kedaulatannya, ditandai oleh kegagalan dalam mengintegrasikan dua dimensi sekaligus, dimensi vertikal dan dimensi horisontal. Secara vertikal, menurut pendekatan politik dan hukum, Indonesia tidak berhasil meyakinkan pihak internasional maupun masyarakat Timor Timur bahwa daerah tersebut merupakan bagian dari kedaulatan NKRI. Sementara secara horisontal, terjadi penentangan luar biasa yang dilakukan oleh masyarakat Timor Timur terhadap politik integrasi Indonesia melalui jalur kultur, agama dan jaringan sosial kemasyarakatan.

Melalui jalur agama (terutama gereja Katolik), masyarakat Timor Timur dengan sangat intensif menjalankan perjuangannya di tingkat nasional maupun internasional. Dengan bendera misi kemanusiaan, perjuangan itu sangat efektif dalam mengkampanyekan kemerdekaan Timor Timur dari penguasaan Indonesia. Bahkan seiring dengan semakin brutalnya tentara Indonesia, sebagaimana dicatat Taylor (1998:281) gereja di Timor Timur telah menjadi unsur utama oposisi pendudukan Indonesia selama tahun 1980-an. Lewat pengumpulan fakta pelanggaran HAM terus-menerus, menyerukan referendum dan perlindungan terhadap mereka yang mengritik pendudukan, rohaniwan di Timor Timur memainkan peranan menentukan dalam membela hak rakyat serta menyiarkan keadaan buruk Timor Timur secara internasional. Tak kurang, Mayor Prabowo, menantu Presiden Suharto mengatakan, “Gereja, rohaniwan dan agama adalah tiga faktor yang mengancam integrasi Timor Timur ke dalam Indonesia. Rakyat harus menentang mereka”. (*Le Paixest Possible au Timor Oriental*, No. 38, Agustus 1989, direproduksi dalam, Taylor, 1998: 281)<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Secara simbolik, tidak diintegrasikannya dioses Timor Timur ke dalam KWI, sering dimaknai sebagai bentuk keengganan Vatikan untuk mengakui keberadaan Timor Timur sebagai bagian dari wilayah Indonesia. Tetapi pada tahun 1987, wakil diplomatik Vatikan di Jakarta pernah mengatakan, alasan tidak diintegrasikannya dioses Timor Timur ke dalam KWI hanyalah karena alasan legal, yaitu tidak ingin mendahului penyelesaian internasional tentang masalah Timor Timur.

Selain gereja (agama), aspek budaya juga turut memberikan andil penting bagi kegagalan integrasi Timor Timur dengan Indonesia.<sup>5</sup> Di Timor Timur, sejak zaman Portugis, ada istilah yang digunakan para penjajah untuk memberi nama bagi masyarakat Timor Timur, yaitu ‘Maubere’. Ketika Portugis dan Indonesia gagal memaknai kosakata ini bagi kepentingan integrasi, para anggota Fretlin justru berhasil mengangkat martabat budaya yang dipandang hina oleh Portugis itu menjadi bahasa baru yang bermakna kemerdekaan. Kata *Maubere*, dulunya digunakan oleh orang-orang pegunungan miskin, suku Mambai, yang berarti teman. Kata ini kemudian dipakai oleh Portugis untuk mencemarkan petani Timor—maubere, maknanya adalah ‘orang yang terbelakang, primitif, dari pedalaman’. Fretlin memungut kata ini dan membuatnya menjadi simbol gerakan. Seorang antropolog yang sudah lama bekerja di kalangan suku Mambai tersebut mengatakan:

“Istilah Maubere –saudaraku diulang terus menerus, merembes ke mana-mana, menjadi seruan bagi persatuan Timor. Menjadi maubere berarti menjadi putera Timor... menggunakan istilah ini untuk perempuan *bui bere*, berarti menegaskan keberadaan kebudayaan Timor dan perjuangan melawan kemiskinan dan tekanan kolonial. Begitu sukses mereka, sehingga kata itu sudah menjadi istilah umum dalam pidato-pidato pada pertengahan tahun 1975.” (Taylor, 77-78)

Kegagalan Indonesia dalam mengintegrasikan Timor Timur, seperti dikatakan Taylor (1998) karena sesungguhnya Indonesia berhadapan dengan satu masyarakat dengan dua ciri terpenting: *pertama*, struktur asli dengan ketahanan yang tinggi untuk terus menciptakan sesuatu di tingkat regional. *Kedua*, ini diperkuat dengan berdirinya lembaga-lembaga serta ideologi baru

---

Dari Indonesia sendiri pernah ada satu upaya untuk itu, yaitu ketika Frans Seda, seorang politisi Katolik Indonesia terkemuka dan anggota Komisi untuk Keadilan dan Perdamaian Kepausan Vatikan, menyerukan kepada gereja-gereja untuk mengakui secara resmi integrasi Timor Timur ke dalam Gereja Katolik Indonesia. (Taylor, 1998: 276-277)

<sup>5</sup> Aspek budaya dan kekerabatan tradisional, jarang menjadi wawasan yang dipandang penting untuk memahami konflik Timor Timur dengan Indonesia. Padahal, menurut Taylor, gambaran masyarakat Timor Timur yang paling penting adalah sistem kekerabatan dan aliansi sosial politik, yang merupakan inti dalam masyarakat maupun antar masyarakat. Sistem ini begitu besar mempengaruhi semua lapangan kehidupan, dari organisasi ekonomi sampai agama dan kebudayaan. Terjaganya sistem kekerabatan memungkinkan masyarakat mempertahankan perlawanan tinggi yang kohesif, terintegrasi terhadap gangguan dari luar. (Taylor, 1998: 347)

yang membentuk aspirasi nasional untuk kemerdekaan. Keadaan ini tak terbayangkan oleh militer Indonesia yang sudah disusupi pengertian bahwa secara ekonomi Timor Timur terbelakang, ‘primitif’ dan dipandang tidak masuk akal. Karena pandangan seperti itulah tentara Indonesia gagal memasuki basis utama masyarakat Timor Timur. Situasi ini berbanding terbalik dengan Fretilin, penantang utama tentara Indonesia, yang justru selalu menjadikan masyarakat pedesaan dan primitif itu sebagai basis programnya. Fretilin telah belajar mengungkapkan pandangan mereka dalam pengertian yang lebih langsung bertalian dengan pikiran awam orang Timor, dengan menggunakan idiom Tetum lokal. Model kepemimpinan Fretilin memiliki ciri-ciri yang bisa mempersatukan masyarakat Timor Timur. Rata-rata mereka berasal dari generasi yang sama, lahir pada masa Perang Pasifik atau tak berapa lama sesudahnya. Mereka semua dididik di sekolah-sekolah Katolik, dan beberapa diantaranya sempat menjalani pendidikan imam. Banyak pemimpin Fretilin yang mendasarkan kegiatannya pada ajaran Katolik. Beberapa pemimpin terpenting adalah anak *liurai* atau kepala *suco* dan tetap mempertahankan pertalian dengan daerah asal. Para pemimpin itu menekankan nilai-nilai pendidikan, kesamaan ras dan nasionalisme.

Tetapi, menurut Taylor, prestasi paling penting dari gerakan kemerdekaan Timor Timur yang dipimpin Fretilin adalah kemampuannya membangun sebuah organisasi, yang meskipun bersatu di bawah kebijakan politik umum dan mengacu pada nilai-nilai budaya umum, tetap mampu menekankan pentingnya otonomi regional dan kebudayaan lokal. Dengan mengidentifikasi nilai Mauberisme atau dengan memfokuskan pada isu nasionalisme dalam kampanye pemberantasan buta huruf, gerakan ini sanggup membangkitkan semangat kekerabatan atau afiliasi suku seperti Makassae atau Mambai. Persekutuan kekerabatan tradisional dan struktur politik terus diperbaharui selama masa sesudah penyerbuan Indonesia. Seperti itu juga yang terjadi di bawah kekuasaan Portugis pada abad ke-20. Dengan komposisi yang demikian, Taylor akhirnya berkesimpulan:

Keberadaan struktur tradisional dalam kerangka politik nasionalis inilah yang membuat sukses perlawanan terhadap pendudukan Indonesia pada periode awal tahun 1976-77. Sumber kekuatan organisasi didasarkan pada jaringan politik, ekonomi, militer antar daerah-daerah. Dengan jaringan ini pemimpin Fretilin mampu mengkoordinasi strategi perjuangan yang didasarkan pada kekokohan unit-unit lokal. Koordinasi ini ditunjukkan dalam keberhasilan strategi perlawanan selama musim kemarau 1976, dan dengan peristiwa seperti terselenggaranya pertemuan komite sentral bulan Mei dan diorganisirnya Palang Merah Timor Timur dalam hubungan antar daerah. (Taylor, 1998: 171)

Berbagai problem yang menjadi batu penghalang bagi terjadinya integrasi Timor Timur dengan Indonesia tersebut, bila diidentifikasi dalam sebuah tabel, akan tampak sebagai berikut:

#### IDENTIFIKASI PERSOALAN INTEGRASI NASIONAL

| NO | JENIS MASALAH/ KASUS   | KLASIFIKASI: |            | KETERANGAN  |
|----|--|--------------|------------|---|
|    |  | VERTIKAL -   | HORISONTAL |   |
| 1. | Secara historis, Deklarasi Balibo dianggap tidak merepresentasikan sikap rakyat Timor Timur secara keseluruhan, sehingga mosi integrasi dianggap tidak memiliki legitimasi | Vertikal     |            | Secara yuridis formal, integrasi tidak mendapat legitimasi di tingkat internasional |
| 2. | Eksplorasi sumber daya alam oleh Jakarta   | Vertikal     |            |   |
| 4. | Rusaknya struktur budaya/adat  | Vertikal     | Horisontal |   |
| 5. | Identitas Kekristenan/Katolik/Gereja   |              | Horisontal |   |
| 6. | Identitas 'Maubere' dari penghinaan menjadi energi perlawanan  |              |            |   |
| 7. | Kekerasan tentara (penyiksaan, pembantaian, pemerkosaan, dll)  | Vertikal     |            | Terutama kasus Santa Cruz   |
| 8. | Tersingkirnya masyarakat lokal akibat proyek transmigrasi  | Vertikal     | Horisontal |   |
| 9. | Tidak ada penegakan hukum bagi pelanggar HAM berat   | Vertikal     |            |   |

Sementara itu, pergolakan di Papua yang belum kunjung reda sejak tahun 60-an hingga saat ini, antara lain dikarenakan oleh landasan legitimasi hukum dan politik yang dirasakan oleh sebagian masyarakat Papua tidak *legitimate*. Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) atau *Act of Free Choice* dengan cara perwakilan melalui anggota Dewan Musyawarah Pepera sebanyak 1.025 orang (untuk mewakili jumlah penduduk sebesar 809.337 orang Papua saat itu), pada bulan Juli-Agustus 1969 tersebut, dianggap tidak sesuai dengan prosedur standard yang mengharuskan cara penentuan melalui keterlibatan semua orang untuk memberikan suara tanpa kecuali (*one man one vote*). Penolakan pengakuan itu misalnya diungkapkan oleh Ketua Presidium Dewan Papua Theys Hiyo Eluai pada tahun 2000, yang dengan lantang menyatakan: "*Jangan pergunakan lagi istilah Papua keluar dari Indonesia. Sebab tidak ada catatan sejarah yang menunjukkan Papua pernah masuk bagian Indonesia. Malahan NKRI yang menempel pada Papua.*"

Mungkin akan lebih tepat jika ungkapan Theys ini kita tempatkan dalam konteks sekarang, bukan untuk tahun 1960-an yang lalu, di sekitar masa ditandatanganinya Pepera. Karena pada saat itu, di samping telah ada hasil Pepera yang diawasi oleh lembaga internasional PBB, secara formal para pimpinan partai politik yang ada di Papua saat juga mengadakan musyawarah di Kotabaru, Jayapura pada 1 Desember 1963, dimana mereka lalu mengeluarkan pernyataan pengakuan bahwa Papua merupakan bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, sambil menyatakan pembubaran diri. Partai-partai tersebut adalah: Commite National Papua, Front National Papua (FNP), National Partij Papua (Nappa), Partai Nasional (Parna), Democratische Volks Partij (DVP), Partai Papua Merdeka (PPM), dan Kena U Embay (KUE). Dalam pengertian demikian, maka pengingkaran masa lalu Papua, sebagaimana diungkapkan Theys lebih disebabkan oleh kekecewaan dan kemarahan masyarakat Papua terhadap pemerintah Indonesia (Jakarta) yang telah menghancurkan sendi-sendi kehidupan masyarakat Papua.

Skala penghancuran telah dirasakan begitu besar oleh masyarakat Papua, dan terjadi dalam semua aspek kehidupan masyarakat. Secara adat, mereka diusir dari tanah mereka (seperti dirasakan Suku Amungme), dan oleh

program transmigrasi sumber pencaharian mereka dirampas, sekaligus mereka dipaksa menyingkir oleh kaum pendatang dari luar Papua (mayoritas dari Jawa dan Sulawesi). Kekerasan ekonomi terutama dirasakan masyarakat Papua sejak tahun 1967, dengan beroperasinya PT Freeport Indonesia. Sejumlah pelanggaran HAM pun telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia (TNI) dengan dukungan penuh PT Freeport Indonesia, terutama selama berlakunya Papua sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) sejak tahun 1978 hingga 5 Oktober 1998. Dari semua praktik ini, hanya segelintir warga Papua yang diuntungkan. Sebagai bentuk kekecewaan, rakyat Papua, khususnya Amungme dan enam suku lainnya di seputar Freeport, melakukan pemberontakan. Pada tahun 1977 mereka meledakkan jalur pipa milik perusahaan raksasa tersebut. Sebagai reaksinya, pasukan TNI melakukan serangan balik. Kebun-kebun dan rumah-rumah penduduk dihancurkan.

Di luar aspek-aspek hukum, politik dan ekonomi (yang bisa dikelompokkan sebagai bagian dari dimensi vertikal dalam integrasi nasional) aspek yang lain semakin mementahkan upaya integrasi Papua ke dalam Republik Indonesia, adalah tiadanya penghargaan terhadap kultur dan keyakinan masyarakat setempat. Hal itu antara lain terjadi ketika pada bulan Agustus 1983, masyarakat Kampung Ormu memprotes penembakan satwa terlarang oleh regu pengawal tim survei pertambangan yang berpangkalan di Ormu waktu itu. Menurut Laporan Soleman pada Menteri Emil Salim, para pengawal dari Yonif 751 Kodam XVII/Cendrawasih telah menembak mati tiga ekor Cendrawasih, enam ekor burung rangkong, dua ekor burung kakatua putih, seekor burung nuri, seekor kuskus, dan dua ekor anak penyu belimbing. Selain itu, para petugas dilaporkan telah memetik 30 buah kelapa tua dan muda dengan peluru senjata api mereka. Sebagian binatang itu ditembak untuk dimakan. Namun Cendrawasih, nuri dan penyu belimbing semuanya diawetkan dengan suntikan air keras. Padahal, tak ada yang lebih menyakitkan hati Tubwe Nari (pemimpin adat Kampung Ormu) beserta pemuda-pemuda pendukungnya, ketimbang penembakan burung-burung Cendrawasih itu. Sebab seperti diutarakan Nari dalam suratnya kepada Kakanwil Pertambangan Propinsi Papua Barat, tanggal 25 Agustus 1983, Burung Cendrawasih adalah

satu-satunya jenis burung yang khas, dan tak ada duanya di dunia, dan secara tradisional melambangkan mahkota atau lambang kebesaran sang Tubwe/Ondoafi.<sup>6</sup>

Akibat dari praktik kekerasan dan ketidakpedulian pemerintah Indonesia terhadap masyarakat Papua, telah menyebabkan sebagian warga Papua yang sudah menerima integrasi dengan Indonesia, justru berbalik arah membela OPM. Hal itu misalnya terjadi pada Titus Dansidan, seorang Pegawai Kantor Gubernur Papua, yang selama ini telah dipercaya pemerintah Indonesia untuk menjabat sebagai staf Biro Pembinaan Mental Spiritual Kantor Gubernur Papua Barat. Dansidan dikenal sebagai pejuang Indonesia untuk pembebasan Irian Jaya. Tetapi belakangan ia memilih membela OPM, karena kecewa terhadap pemerintah Indonesia yang selalu bertindak sewenang-wenang terhadap warga Papua. Dansidan kemudian ditangkap oleh tentara Indonesia pada tahun 1983. (Aditjondro, 2000: 218). Dan yang paling membuat masyarakat Papua merasa dilecehkan adalah peristiwa pembunuhan tentara terhadap Arnold Ap, sosok santun yang selama bertahun-tahun berjuang melalui jalur budaya untuk menghidupkan kesenian dan kebudayaan asli Papua di bawah nama Mambesak (yang artinya Burung Cendrawasih, atau Burung Kuning).

Berbeda dengan pada umumnya para pemrotes Indonesia yang selalu menyatakan penolakannya pada Indonesia, sejak awal Arnold Ap tidak pernah menyatakan penolakannya terhadap Indonesia. Sebagai seniman, ia hanya ingin agar kesenian dan kebudayaan Papua yang begitu kaya, dapat bertahan dan tumbuh dengan baik, tidak hilang begitu saja. Ap juga dipercaya sebagai Ketua Museum Universitas Cendrawasih, Papua. Upaya Ap ini mendapat apresiasi yang baik dari sejumlah intelektual Jakarta dan daerah lain Indonesia, seperti Prof. Koenjtaraningrat. Bahkan dari penguasa dan tentara Indonesia, Ap dengan kesenian Mambesaknya telah dikenal baik, dan

---

<sup>6</sup> Atas nama Dewan Musyawarah Adat Kampung Ormu, Soleman Nari melayangkan surat protes kepada Menteri Negara KLH dan Kakanwil Dep. Pertambangan & Energi Propinsi Irian Jaya. Tetapi protes ini sama sekali tidak diindahkan oleh pemerintah, dan para tentara pelaku penembakan satwa terlarang itu tidak pernah mendapat sanksi apapun. (Aditjondro, 2000: 215)

beberapa kali tampil di kantor Gubernur Papua Barat. Pada bulan November 1978, Mambesak bahkan diutus mewakili Propinsi Papua Barat dalam Pekan Tari Rakyat Tingkat Nasional di Jakarta. Meski tidak menjadi juara, mereka terpilih sebagai peserta teladan, sekaligus membuka jalan bagi kelompok-kelompok kesenian Papua untuk ikut bicara pada pentas nasional tahun-tahun berikutnya. Tetapi sangat disayangkan bahwa gairah masyarakat Papua oleh kemunculan kesenian Mambesak, kemudian pupus ketika pada 20 April 1984, Arnold Ap dibunuh oleh tentara Indonesia. Aditjondro (2000: 141) menggambarkan, upacara pemakamaman Arnold Ap laksana prosesi pemakanan Martin Luther King, di mana ribuan orang yang ikut dalam prosesi itu bergandengan tangan memenuhi jalan dengan diiringi lagu-lagu rohani. Pupusnya gairah berkesenian dan berkebudayaan masyarakat Papua oleh pembunuhan Arnold Ap, menandai satu bentuk kegagalan upaya integrasi nasional yang dilancarkan oleh pemerintah Indonesia, dalam perspektif horisontal. Seni budaya, yang mestinya bisa menjadi tali pengikat bagi integrasi nasional justru diputus dan dihancurkan berkeping-keping. Menurut Bertrand (2004: 147), gabungan antara tiadanya kebersamaan dalam sejarah dan pengalaman bersama, juga tidak adanya interaksi yang baik diantara elite Papua dengan elite dari daerah lain di wilayah Hindia Belanda telah menyebabkan tidak adanya ikatan yang kuat warga Papua dengan para nasionalis Indonesia.<sup>7</sup> Secara sederhana, problem integrasi nasional di Papua, bila dibuat satu tabel identifikasi akan tampak sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> The absence of a such history, common experience, or interaction with elites from other areas of the Dutch East Indies explains why the Papuans did not adhere to the Indonesian nationalist movement from the 1920 and 1930s. (Bertrand, 2004: 147)

**IDENTIFIKASI PERSOALAN INTEGRASI NASIONAL  
DI PAPUA**

| No. | JENIS MASALAH/ KASUS  | KLASIFIKASI:<br>VERTIKAL -<br>HORISONTAL |            | KETERANGAN   |
|-----|---|--|------------|--|
| 1.  | Aspek historis: Pepera dianggap tidak merepresentasikan sikap rakyat Papua secara keseluruhan, sehingga mosi integrasi dianggap tidak memiliki legitimasi             | Vertikal                                 |            | Secara yuridis formal hukum internasional, sudah selesai |
| 2.  | Munculnya rasa nasionalisme Papua (pada masa akhir kolonialisme Belanda), yaitu persaudaraan Melanesia yang berbeda dengan umumnya penduduk Indonesia yang ras Melayu |  | Horisontal |  |
| 3.  | Pembagian hasil eksploitasi sumber daya alam yang tidak adil antara pemerintah Jakarta dengan warga Papua   | Vertikal                                 |            | Khususnya eksploitasi oleh PT. Freeport                  |
| 4.  | Kerusakan lingkungan akibat eksploitasi SDA   | Vertikal                                 |            |  |
| 5.  | Rusaknya struktur budaya/adat   | Vertikal                                 | Horisontal | Khususnya suku Amungme                                   |
| 6.  | Penyerobotan tanah rakyat   | Vertikal                                 |            |  |
| 7.  | Kekerasan tentara (pembantaian, pemerkosaan, dll)   | Vertikal                                 |            |  |
| 8.  | Tersingkirnya masyarakat lokal akibat proyek transmigrasi   | Vertikal                                 | Horisontal |  |
| 9.  | Rendahnya akomodasi warga lokal dalam politik pemerintahan  | Vertikal                                 |            |  |
| 10. | Faktor gereja/kekristenan sebagai identitas pebeda dengan mayoritas penduduk Indonesia  |  | Horisontal |  |
| 11. | Politik pembatasan penduduk asli (program KB) dan mobilisasi jumlah pendatang   | Vertikal                                 |            |  |
| 12. | Ideologi Cargo Cult   |  | Horisontal |  |
| 13. | Pembunuhan tokoh budaya Arnold Ap   | Vertikal                                 | Horisontal |  |
| 14. | Tidak ada penegakan hukum bagi pelanggar HAM berat  | Vertikal                                 |            |  |
| 15. | Kemiskinan, Kebodohan, Kelaparan  | Vertikal                                 |            |  |

Pelajaran yang bisa diambil dari peristiwa lokal di Aceh, Riau, Timor Timur dan Papua, adalah bahwa isu integrasi nasional sebagai salah satu bentuk ekspresi nasionalisme ke-Indonesiaan berada dalam posisi yang sangat lemah. Mengacu pada konstruksi Liddle (1975), lemahnya integrasi nasional tersebut pada sisi vertikal terjadi karena terlalu dominannya pemerintahan pusat (Jakarta) dalam proses-proses pengambilan keputusan (politik, hukum dan ekonomi) menyangkut kehidupan masyarakat yang tanpa mengindahkan aspirasi daerah. Sikap ini telah menjadi batu penghalang utama bagi terjadinya integrasi nasional. Sementara dari perspektif horisontal, dimensi kebudayaan, ideologi, agama dan hubungan kekeluargaan yang hidup di tengah masyarakat sangat jarang disentuh untuk dijadikan sebagai 'perangkat lunak' pendukung terjadinya integrasi itu sendiri. Indonesia yang jelas-jelas dipenuhi oleh keragaman etnik, budaya, bahasa, agama dan sebagainya, adalah tidak masuk akal jika hendak membangun satu integrasi nasional yang sejati (dimana seluruh penduduknya memberikan loyalitasnya secara sukarela) tanpa adanya pengakuan terhadap keberagaman itu sendiri. Dalam konteks ini, penting untuk mengingat kembali ungkapan Jacques Bertrand berikut ini:

National models based on single nations or cultural criteria that exclude or marginalize groups may produce much violence. Political leaders sometimes choose to consolidate states first, before crafting nations or national models. In these circumstances, state repressive instruments are often used to quell secessionist rebellions or groups whose perspectives may differ from that of state leaders. In the ends, however, nationalist dreams cannot escape the realities of multi-ethnic or multicultural diversity. (Bertrand, 2004: 223)<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Model-model negara yang dibangun di atas kebangsaan atau kriteria kebudayaan yang tunggal, yang meminggirkan kelompok-kelompok lain hanya akan melahirkan sejumlah kekerasan. Para pemimpin politik mungkin pertama-tama harus melakukan konsolidasi ke dalam terlebih dahulu, sebelum membuat model-model negara atau kebangsaan. Dalam kondisi demikian, perangkat-perangkat represif negara seringkali digunakan untuk membasmi para pemberontak yang ingin memisahkan diri, atau kelompok-kelompok yang memiliki pandangan berbeda dengan para pemimpin negara. Pada akhirnya, impian para nasionalis tidak dapat lepas diri dari realitas akan adanya multietnik dan keberagaman kebudayaan.'

Abdurrahman Mattalitti, Direktur Jenderal Hubungan Sosial Budaya dan Penerangan Luar Negeri dalam keterangan pers setelah penutupan JBC ke-19. (Kompas, 14 Oktober 2000) Pertemuan JBC antara PNG-RI yang berlangsung 11-13 Oktober 2000 itu membahas masalah tindak lanjut pertemuan-pertemuan sebelumnya, khususnya menyangkut masalah teknis, antara lain tentang standar operasi prosedur pencarian dan penyelamatan (*search and rescue*), asuransi transportasi, pemulangan (repatriasi) pelintas batas, serta pembentukan pelayanan komunikasi di perbatasan PNG-RI. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Surjadi Soedirdja yang memimpin delegasi dari Indonesia mengatakan, Pemerintah RI telah membangun pos perbatasan dan memperluas jalan antara Jayapura dan Skou.

Di samping melakukan misi diplomatik ke dunia internasional, upaya lain juga ditempuh pemerintah RI untuk memperkuat integrasi di kalangan masyarakat Papua sendiri. Diantara hasilnya adalah penyerahan diri 42 anggota kelompok separatis bersenjata Organisasi Papua Mereka (OPM) dan Tentara Pembebasan Nasional (TPN) Papua, pada 30 Juni 2003. Mereka kemudian mengucapkan sumpah setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Terkait aktivitas OPM ini, jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Papua menyita 224 senjata api dan ribuan amunisi. Ikrar kesetiaan ke-42 anggota OPM/TPN ini berlangsung di Markas Kepolisian Daerah (Polda) Papua di Jayapura, Senin, di hadapan Gubernur Papua JP Solossa, Panglima Komando Daerah Militer (Kodam) Trikora Mayjen TNI Nurdin Zainal, Kepala Polda Papua Inspektur Jenderal Budi Utomo, dan Kepala Kejaksaan Tinggi Papua TH Panjaitan. Ikrar kesetiaan itu dibacakan Bernadus Fapiri, dalam jajaran OPM/TPN berpangkat Kolonel (laut) dengan jabatan sebagai Kepala Staf Angkatan Laut. (Kompas, 1 Juli 2003)

Fapiri adalah pegawai negeri sipil (PNS) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jayapura yang masih aktif. Anggota PNS lain, yang terlibat sebagai anggota OPM/TPN adalah Martha Teruway, sebagai guru Sekolah Dasar Inpres Dempta I, Jayapura. Ke-42 anggota OPM/TPN tersebut berasal dari Distrik Nimborang, Dempta, dan Depapre, Kabupaten Jayapura. Di hadapan musyawarah pimpinan daerah provinsi Papua,

Bernardus atas nama ke-42 anggota OPM/TPN lain mengatakan, ikrar dan sumpah kesetiaan kepada NKRI lahir dari kesadaran mereka sendiri, tanpa paksaan dan tekanan dari pihak mana pun. Bernardus juga menyatakan, setelah merefleksi perjuangan selama lebih kurang 40 tahun terakhir, dan tidak membuahkan hasil, selain penderitaan dan kesengsaraan, justru ada pihak tertentu memanfaatkan perjuangan itu demi kepentingan pribadi dan kelompok.

"Karena itu, kami dengan sadar dan bertanggung jawab mengatakan bergabung dengan Pemerintah RI dan setia kepada Negara Kesatuan RI, mengakui bendera Merah Putih, dan Undang-Undang Dasar 45 sebagai dasar negara RI. Kami berjanji mendukung pembangunan yang diprakarsai pemerintah daerah dan bekerja sama dengan aparat keamanan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat," kata Fapiri. (Kompas, 1 Juli 2003)

Gubernur Papua ketika menerima pernyataan penyerahan diri OPM/TPN ke dalam NKRI tersebut mengatakan, sumpah dan janji yang diikrarkan itu datang dari kesadaran pribadi anggota OPM/TPN sendiri tanpa paksaan dari pihak mana pun. Ikrar itu disaksikan Musyawarah Pimpinan Daerah setempat, unsur masyarakat, dan aparat keamanan. Karena itu, menurut Gubernur, ikrar tersebut harus dilanjutkan dengan tindak-tanduk sehari-hari sebagai bentuk kesetiaan kepada NKRI, dengan mendukung program pembangunan pemerintah dan menciptakan suasana yang aman dan kondusif di seluruh Papua. "Saya minta saudara-saudara menempatkan diri dalam masyarakat dengan mengikuti setiap peraturan mendukung pembangunan dan menjaga ketertiban masyarakat. Jangan membuat kegiatan-kegiatan yang melawan pemerintah, apalagi mendirikan negara baru di dalam NKRI," kata Solossa. (Kompas, 1 Juli 2003)

Tetapi apakah semua upaya itu cukup untuk memberikan garansi bahwa masyarakat Papua akan merasa nyaman berada di dalam negara kesatuan Republik Indonesia? Apakah ada jaminan bahwa di kemudian hari tidak akan muncul lagi gerakan-gerakan separatisme di tanah Papua. Manuel Kaisiepo, seorang jurnalis dari Papua yang kemudian menjadi Menteri Negara pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid mengatakan bahwa,

adalah penting untuk dipahami, aksi-aksi perlawanan yang muncul secara sporadis hingga beberapa tahun terakhir ini tidak lagi dilandasi oleh tujuan separatis ingin mewujudkan 'Negara Papua', melainkan lebih karena faktor-faktor lain, misalnya ketidakpuasan sosial. Dalam sebuah seminar tentang nasionalisme Indonesia Menjelang dan Pada Abad XXI' di Salatiga pada Juni 1993, Kaisiepo memaparkan pandangannya dalam sebuah makalah berjudul: 'Ke-Irian-an dan Ke-Indomnesia-an: Mengkaji Nasionalisme dalam konteks lokal' (dalam Bourchier & Hadiz, 2006: 346-350).

Kaisiepo antara lain mengatakan, gerakan-gerakan perlawanan yang bersifat sporadis itu walau pun masih menyandang nama OPM, namun sesungguhnya hanya 'OPM' (dalam tanda petik) yang tidak dilandasi oleh keyakinan, cita-cita dan tujuan politik yang jelas. Yang menjadi persoalan adalah, sekalipun eksistensi gerakan-gerakan perlawanan dengan nama 'OPM' itu tidak berarti lagi secara politik dan lebih-lebih secara militer, tetapi tetap perlu mendapat perhatian mengapa gerakan-gerakan itu masih ada hingga kini. Sebab tanpa pemahaman yang jelas akar persoalannya, kita senantiasa akan tergelincir dalam kesimpulan keliru mengenai aksi-aksi perlawanan tersebut. Menurut Kaisiepo, ada dua faktor yang tampaknya langsung atau tak langsung berkaitan dengan masih munculnya gerakan-gerakan perlawanan tersebut. *Pertama*, efek sampingan dari pendekatan keamanan yang untuk jangka waktu cukup lama dijalankan di daerah Irian Jaya. *Kedua*, dampak dari beberapa program pembangunan yang justru dirasakan rakyat setempat sebagai merugikan kepentingan mereka.

Berkaitan dengan masalah pertama, pendekatan keamanan dalam bentuk-bentuk operasi militer yang dijalankan secara intensif dan dalam waktu yang cukup lama di Irian Jaya, memang dimaksudkan untuk menumpas perlawanan OPM selama periode 1965 hingga 1970. Operasi-operasi militer yang intensif itu pada satu pihak bisa menghancurkan kekuasaan kelompok-kelompok perlawanan OPM, namun meninggalkan 'efek sampingan' berupa rasa takut yang mendalam dan berlarut-larut bahkan menjadi trauma di kalangan rakyat Irian. Mereka senantiasa dihantui trauma dicap sebagai 'OPM', suatu trauma yang mirip dengan apa yang dialami sebagian penduduk

pedesaan Jawa usai penumpasan G30S/PKI tahun 1965/1966, yaitu ketakutan dicap sebagai 'PKI'. Selanjutnya Kaisiepo menulis:

Celakanya, ketakutan akan cap 'OPM' itu seringkali justru dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu, baik dari aparat pemerintah maupun swasta, untuk menakut-nakuti rakyat. Apabila rakyat misalnya menolak melepaskan tanah-tanah mereka untuk keperluan pembangunan proyek-proyek pemerintah atau swasta, dengan mudah mereka akan dicap 'OPM'. Ketakutan dicap sebagai 'OPM' itulah yang sering menjadi faktor pendorong bagi sebagian rakyat Irian untuk melarikan diri ke hutan, atau malah menjadi pelintas batas menyeberang ke negara tetangga PNG. Sesungguhnya tindakan mereka melarikan diri ke hutan, atau menyeberang ke PNG hanyalah merupakan tindakan mencari selamat, atau semacam mekanisme pertahanan diri (*self defense mechanism*). Melarikan diri ke hutan, hanya karena takut dicap OPM, seringkali malah berbalik menjadi bumerang, karena dengan tindakan mereka seperti itu, akhirnya benar-benar dicap sebagai OPM, dan kembali menjadi sasaran operasi militer. Contoh dari kasus semacam ini adalah peristiwa 'eksodus' sejumlah besar rakyat Irian ke Papua Nugini awal tahun 1984. (Kaisiepo, dalam Bouchier & Hadiz, 2006: 347-348)

Masalah lain yang perlu diperhatikan, menurut Kaisiepo adalah bahwa pembangunan yang dijalankan pemerintah Indonesia di Irian Jaya sejak integrasi hingga kini, justru banyak dirasakan sebagai hal yang merugikan rakyat Irian, yang seterusnya menimbulkan rasa tidak puas, kecewa, bahkan pada titik ekstrem, mendorong mereka melakukan aksi-aksi perlawanan. Beberapa contoh untuk ini adalah mengenai pembebasan tanah-tanah adat milik rakyat untuk keperluan penebangan kayu (HPH), untuk program transmigrasi atau proyek-proyek lainnya tanpa menghiraukan hukum adat yang dianut rakyat setempat, sering menjadi pemicu timbulnya rasa tidak puas yang kemudian meningkat menjadi aksi perlawanan kepada pemerintah. Membanjirnya transmigran dari Jawa dan arus migran dari Sulawesi Selatan yang menguasai hampir seluruh sektor dari kelas menengah sampai kelas bawah, jelas dirasakan suatu yang tidak adil buat rakyat Irian Jaya. Menurut catatan Kanwil Transmigrasi Irian Jaya, jumlah transmigran dari Jawa sejak Pelita I hingga Pelita V terus meningkat, dan pada bulan April 1993, 23.947 KK atau sebanyak 102.941 jiwa. Sedangkan arus migran dari Sulawesi

Selatan yang datang ke Irian Jaya, menurut penelitian George J. Aditjondro, adalah sebesar 3.000-4.000 orang setiap tahun, sehingga dalam periode 1970-1985 diperkirakan ada sekitar 60.000 migran asal Sulsel yang menetap di Irian Jaya.

Perasaan tidak puas juga muncul di kalangan muda lulusan SLA dan Perguruan Tinggi yang menganggur, karena sebagian besar pekerjaan telah diduduki oleh 'pendatang' (suatu istilah yang punya konotasi negatif). Apalagi jumlah pengangguran cukup besar di wilayah ini. Data Kanwil Depnaker Irja tahun 1992, terungkap bahwa jumlah pencari kerja terbesar adalah lulusan SLTA sebanyak 67.418 orang, disusul SD sebanyak 23.018 orang, SLTP 15.369 orang dan sarjana/diploma sebanyak 5.902 orang. Jumlah besar generasi muda yang belum mendapat pekerjaan itu, jelas bisa melahirkan berbagai implikasi sosial yang cukup pelik. Begitu pula soal kemiskinan di kalangan rakyat Irian, khususnya yang tinggal di daerah pedesaan. Dari 11 Propinsi yang secara regional mempunyai persentase penduduk miskin yang berada di atas rata-rata nasional pada tahun 1987, Irian Jaya berada di urutan teratas (Booth:348)

Yang terasa sangat menyakitkan masyarakat Papua adalah mengenai pembagian hasil tambang. Investasi di daerah ini cukup besar di sektor pertambangan dan pengelolaan hutan. Dalam urutan komposisi PDRB Irian Jaya menurut Lapangan Usaha tahun 1990, sektor pertambangan adalah yang terbesar, yaitu 31,55 persen. Masalahnya keuntungan dari proyek pertambangan ini menjadi milik pemerintah pusat, sehingga hanya sedikit hasilnya yang bisa dinikmati penduduk Irian Jaya sendiri. Akibatnya ironis, dari segi pendapatan per kapita Irian Jaya adalah paling tinggi, namun kesejahteraan penduduknya lebih buruk dibandingkan daerah lainnya. Pendapatan per kapita Irian Jaya tahun 1985 sebesar 565.086 persen dan tahun 1990 sebesar 690.339 persen dengan rata-rata pertumbuhan 4,43 persen. Melihat angka-angka ini, Kaisiepo menyimpulkan:

Akumulasi dari berbagai rasa tidak puas dan kecewa terhadap dampak negatif pembangunan, serta realitas kemiskinan yang melilit kehidupan rakyat Irian Jaya, jelas merupakan faktor-faktor yang sering

menjadi pendorong bagi sebagian dari mereka untuk melarikan diri ke hutan, membentuk gerombolan-gerombolan bersenjata melawan pemerintah, atau melintas batas ke PNG. Jelas bahwa aksi-aksi perlawanan sejak tahun 1970 hingga saat ini yang dilatarbelakangi oleh rasa ketidakpuasan dan kemiskinan itu, bukanlah gerakan yang dilatarbelakangi oleh tujuan politik ingin membentuk 'Negara Papua' seperti halnya di tahun 1965 hingga 1970, walau pun dengan mudah mereka akan dicap 'OPM'. (Kaisiepo, dalam Bouchier & Hadiz, 2006: 350)

Pandangan senada dengan Kasiepo juga dikemukakan oleh salah seorang tokoh utama OPM Nicholaas Jouwe. Setelah 50 tahun lebih menjadi pelarian politik di Belanda, pada tanggal 23 Maret 2009 lalu ia kembali ke Indonesia didampingi dua anaknya Alexander Jouwe dan Nancy Leilani Jouwe. Sesampainya di Jayapura ia menemui Gubernur Papua Barnabas Suebu. Jouwe menyatakan senang sekali bisa kembali ke Papua dan bangga terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Barnabas Suebu. "Saya senang sekali bertemu dengan Bapak Gubernur. Memang saya seorang pejuang, dan semua orang tahu itu. Tetapi Bapak Gubernur ini seorang pelaksana. Dia lakukan semua tugas yang saya mimpikan. Itu bedanya antara kita berdua", kata Jouwe. Jouwe juga mengatakan, Barnabas Suebu telah duduk pada tempat yang benar. "Sebab apa yang saya perjuangkan dari luar, dia kerjakan dari dalam. Dan itu bagus, itu bedanya. Beliau lebih capek daripada saya, sebab kalau saya cuma kata-kata, tapi dia ini orang dari perbuatan. Jadi beda antara kata dan perbuatan, dan inilah orangnya, Bapak Gubernur Suebu," ujar Jouwe. Mengenai pertemuannya dengan Jouwe, Gubernur Barnabas Suebu menyatakan bahwa:

"Tadi saya menjelaskan, dalam payung otonomi khusus, kita membangun kampung, kita perbaiki makanan dan gizi, pendidikan, kesehatan, perumahan rakyat, air minum, serta menjelaskan pembangunan infrastruktur dan membangun Papua yang pemerintahannya bersih dari korupsi. Ini semua untuk kesejahteraan. Itu yang Bapak Nic katakan, saya berjuang secara politik karena isi dari kemerdekaan itu pada akhirnya untuk rakyat sejahtera, untuk pendidikan baik, kesehatan baik, dan sebagainya. Itu yang beliau maksudkan (Nicholaas Jouwe)," ujar Suebu. (<http://papuapost.com/2009/03/1051/>, didownload pada 25 Maret 2009)

Kedatangan Jouwe di Papua juga disambut dua orang tokoh OPM yang pernah mencari suaka ke Australia, tetapi sekarang berubah haluan politik dan memilih kembali ke pangkuan NKRI, Franzalbert Joku dan Nicholas Messet. Nicholas menyatakan ucapan terima kasihnya kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan para menteri yang sudah memberikan kesempatan untuk mengunjungi keluarga ke Papua, juga memberi bantuan Rp 100 juta pada gereja di sana. Ketika ditanya mengenai masih maraknya tuntutan kemerdekaan di Papua, Franz mengatakan bahwa, yang paling penting adalah memahami dalam arti apa kalimat tersebut diterjemahkan, mengingat saat ini, dari penerapan Otonomi Khusus di era reformasi sudah banyak yang dijawab. Menurut Franz, saat ini tidak perlu melihat Papua bergabung dengan negara mana, entah itu Papua New Guinea, Australia atau pun Negara mana, jika Indonesia sudah menjawab semuanya. “Dengan pemerintahan penuh, otonomi khusus dan struktur pemerintahan yang lain, bukanlah menjadi satu tujuan, tetapi sebaiknya dijadikan sarana untuk dikelola demi tujuan akhir yakni menjadikan masyarakat yang adil dan sejahtera tadi,” kata Franz. (<http://papuapost.com/2009/03/1051>)<sup>54</sup>

#### 4.D.3. Catatan

Proses integrasi Papua dengan Indonesia telah memakan waktu yang sangat panjang dan berliku. Ia juga telah melibatkan banyak pihak baik di

---

<sup>54</sup> Sekjen Tentara Revolusi Papua Barat (TRPB) Amunggut Tabi mengecam sikap Franzalbert Joku, Nicholas Messet dan Barnabas Suebu, yang dianggap telah menginjak-injak perjuangan Papua Merdeka. Kepada SPMNews, Tabi juga mengungkapkan adanya pesan tersembunyi di balik kedatangan Jouwe ke tanah Papua, yang tidak semua orang mampu membaca pesan itu dengan baik. Tabi mengatakan; “Kedatangan Nicholaas Jouwe sebagai satu-satunya pejuang Papua Merdeka di New Guinea Raad, pencetus Bintang Kejora sebagai Bendera Nasional dan Burung Mambruk sebagai Lambang Negara Papua Barat serta nama Negara West Papua, bukan Papua Barat, seperti tertulis dalam lambing Negara Burung Mambruk itu, bermakna sangat positif dan menjanjikan. Dengan mencium tanah itu, ada sesuatu telah terjadi, yang tidak terlihat dengan mata fisik, dengan menginjak kaki ke tanah itu sudah terjadi sesuatu yang Anda tidak lihat dan rasakan. Dengan berbicara di tempat yang pernah ia teriakkan Papua Merdeka seorang diri hampir lima puluh tahun lalu, itu memiliki dampak yang dahsyat, bukan main-main. Di dunia tidak kasat mata, telah terjadi kejadian-kejadian maha dahsyat, yang tidak Anda ketahui.” (<http://papuapost.com/2009/03/1052/>, didownload pada 25 Maret 2009)

tingkat nasional maupun internasional, dengan segala kepentingan masing-masing. Rangkaian panjang proses integrasi itu, sebagaimana yang telah dipaparkan di depan, secara sederhana dapat diringkas dalam tiga tahap; pertama, yaitu tahap transisi di mana status Papua berada di persimpangan jalan antara Belanda dan Indonesia; tahap kedua, adalah tahap integrasi yang secara formal ditandai dengan ditandatanganinya Pepera pada tahun 1969, dan dikuatkan posisinya secara hukum internasional pada tanggal 19 November 1969, ketika PBB mencatat untuk mengesahkan hasil 'plebisit' yang berarti memberikan pengakuan formal kedaulatan Indonesia atas wilayah Irian tersebut. Dan tahap ketiga adalah kemunculan perlawanan terhadap integrasi yang muncul pasca tahun 1969 itu, yang secara kuat diartikulasikan dengan kemunculan Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Dari ketiga tahap itu, yang sering muncul menjadi bahan perdebatan adalah mengenai proses integrasi yang dilakukan melalui jalur musyawarah (Pepera) yang oleh kalangan penentang dianggap tidak sah, sebagaimana antara lain di katakan oleh Ketua Presidium Dewan Papua Theys Hiyo Eluai pada tahun 2000, "*Jangan pergunakan lagi istilah Papua keluar dari Indonesia. Sebab tidak ada catatan sejarah yang menunjukkan Papua pernah masuk bagian Indonesia. Malahan NKRI yang menempel pada Papua.*" Secara historis pernyataan ini tidak sesuai dengan kenyataan. Karena di samping telah diakuinya hasil Pepera oleh lembaga internasional PBB, secara formal para pimpinan partai politik yang ada di Papua juga pernah mengadakan musyawarah di Kotabaru, Jayapura pada 1 Desember 1963, dimana mereka lalu mengeluarkan pernyataan pengakuan bahwa Papua merupakan bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selengkapnya pernyataan tersebut berbunyi:

1. Bahwa daerah Irian Barat adalah sebagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berwilayah dari Sabang sampai Merauke.
2. Bahwa hanya ada satu dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia ialah Undang-undang Dasar 1945, sedang Manipol merupakan haluan negara dan Pancasila merupakan ideologi negara.
3. Bahwa semua ideologi negara yang berhaluan lain atau tidak sesuai dengan dasar-dasar yang sah dari Negara Republik

Indonesia sebagai yang tersebut di atas, maka itu adalah merupakan alat pemecah kesatuan bangsa Indonesia.

Sesuai dengan apa yang telah ditandaskan di atas dan sesuai pula dengan keinginan rakyat Irian Barat untuk tetap bersatu padu dengan daerah-daerah lain di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak dipisah-pisahkan lagi, maka dengan ini kami menyatakan bahwa: (1) Semua partai-partai atau organisasi politik lainnya yang didirikan pada waktu penjajahan Belanda mulai terhitung tahun 1950 sampai dengan Agustus 1962, dinyatakan bubar, karena tidak sesuai lagi dengan keadaan politik pada dewasa ini. (2) Partai-partai politik dan organisasi-organisasi politik lainnya yang menyatakan bubar adalah: 1) Commite Nasional Papua. 2) Front National Papua (FNP). 3) National Partij Papua (Nappa). 4) Partai Nasional (Parna). 5) Democratische Volks Partij (DVP). 6) Partai Papua Merdeka (PPM). 7) Kena U Embay (KUE). Tanggal pembubaran mulai terhitung 1 Mei 1963, tepat dengan hari kembalinya Irian Barat ke wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Demikianlah pernyataan ini dibuat oleh kami bersama di Kotabaru pada tanggal yang tersebut di atas. Kotabaru/Irian Barat, 1 Desember 1962.<sup>55</sup>

Pembubaran partai politik tersebut merupakan suatu langkah penting yang berkaitan dengan usaha memantapkan proses integrasi dengan Indonesia, sebab partai-partai politik tersebut merupakan produk dari sistem pemerintahan Belanda. Bahkan pada saat itu banyak sekali pernyataan yang dikeluarkan rakyat Papua, yang intinya menegaskan keinginannya untuk bergabung dengan Indonesia. Tahun 1962 terdapat 21 pernyataan, tahun 1963 terdapat 25 pernyataan, tahun 1964 terdapat 7 pernyataan, tahun 1965 terdapat 4 pernyataan, tahun 1966 terdapat 3 pernyataan, tahun 1967 terdapat 23 pernyataan, tahun 1968 terdapat 35 pernyataan. Jadi jumlah keseluruhan pernyataan rakyat yang merupakan kebulatan tekad untuk berintegrasi dengan Indonesia ada 118 pernyataan rakyat. Berbagai pernyataan tersebut, menurut Djopari, tak lain merupakan hasil gemilang yang dicapai oleh pemerintah Indonesia melalui direktoral khusus atau direktorat sosial politik dan lembaga

---

<sup>55</sup> Tertanda: 1) Willem Inury, mantan Ketua Komite Nasional Papua. 2) Lodewick Ajamiseba, mantan Ketua Umum Front Nasional Papua (FNP). 3) Nicolaas MC Tangahma, mantan Anggota Nasional Partai Papua (Nappa). 4) Hermanus Wajoi, mantan Ketua Umum Partai Nasional (Parna). 5) Manuel Waromi, mantan Sekretaris Democratische Volks Partij (DVP). 6) Mozes Rumainum, mantan Ketua Umum Partai Papua Merdeka (PPM). 7) Pilatus Keratua, mantan Penasehat Kena U Embay (KUE). 8) Essau Ittar, mantan Ketua Kena U Embay (KUE). (Djopari, 1993: 72-73)

Operasi Khusus (OPSUS) Irian Barat untuk mencapai kemenangan pada *act of free choice* atau Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada tahun 1969. (Djopari, 1993: 74)

Tetapi semua langkah integrasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia ini tampaknya hanya berada di permukaan semata, sementara kondisi yang sesungguhnya menunjukkan sikap yang sebaliknya. Hal itu antara lain tampak sebagaimana ditunjukkan dengan kemunculan Organisasi Papua Merdeka (OPM) dengan segala bentuk perlawanannya, tak lama setelah pernyataan Pepera ditandatangani.<sup>56</sup> Nama OPM pertama kali diperkenalkan di Manokwari pada tahun 1964, yaitu pada saat penangkapan pimpinan 'Organisasi dan Perjuangan Menuju Kemerdekaan Papua Barat' Terianus Aronggear (SE) dan kawan-kawannya oleh pihak keamanan dan mengajukan mereka ke depan pengadilan. Nama itu semakin populer pada saat meletus pemberontakan bersenjata yang dipimpin oleh Permenas Ferry Awom pada tahun 1965 di Manokwari, serta berbagai pemberontakan lainnya di Irian Jaya. Dalam proses pemeriksaan oleh polisi, tentara maupun jaksa, para pemimpin pemberontakan menerima baik nama OPM yang diberikan oleh para pemeriksa tersebut, sebab menurut mereka nama ini tepat: singkat, mudah diingat dan lebih populer bila dibanding dengan nama organisasi yang mereka bentuk yang relatif panjang dan sulit diingat. (Djopari, 1993: 101).

Pada awal kelahirannya, OPM terdiri atas dua faksi. Faksi yang *pertama* didirikan dan dipimpin oleh Aser Demotekay pada tahun 1963 di Jayapura dan bergerak di bawah tanah. Faksi ini menempuh jalan kooperasi dengan pemerintah Indonesia serta mengaitkan perjuangannya dengan suatu kepercayaan agama yang bernama Cargo Cult, yang bercirikan spiritual, yaitu campuran antara agama adat dan agama Kristen. Organisasi ini muncul ke permukaan pada tahun 1970 setelah selesai Pepera dan terus aktif membina para pengikutnya di Kabupaten Jayapura, terutama di kecamatan-kecamatan Pantai Timur, Pantai Barat, Depapre, dan Genyem. Salah satu anak binaan

---

<sup>56</sup> Sebuah buku yang secara khusus membahas mengenai OPM dengan segala konstelasinya ditulis oleh John RG. Djopari, *Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka*. (Jakarta: Grasindo, 1993). Sebagian besar paparan mengenai OPM, dikutip dari buku ini.

Aser adalah Jacob Pray. Menurut pengakuan Aser Demotekay, bentuk perjuangan yang dilakukan untuk mencapai kemerdekaan Papua Barat atau Irian Jaya adalah kerjasama dengan Pemerintah Indonesia. Ia meminta kepada pemerintah Indonesia untuk menyerahkan kemerdekaan kepada Irian Jaya sesuai dengan janji Alkitab, janji leluhur dan janji tanah ini bahwa bangsa terakhir yang terbentuk dan menuju akhir zaman adalah bangsa papua Barat. Dalam pembinaan massa pengikutnya, ia selalu memberikan pengarahan yang berkaitan dengan agama, adat istiadat/gerakan cargo, dan melarang tindakan radikal dalam mencapai tujuan kemerdekaan papua Barat. Faksi *kedua* gerakan OPM didirikan di Manokwari pada tahun 1964 di bawah pimpinan Terianus Aronggear (SE) yang pada mulanya bergerak di bawah tanah untuk menyusun kekuatan melawan pemerintah Indonesia, baik secara politik maupun secara fisik bersenjata. Gerakan ini bernama 'Organisasi Perjuangan Menuju Kemerdekaan Negara Papua Barat', yang kemudian dikenal dengan nama OPM. (Djopari, 1993: 101-102).

Menurut Dinas Sejarah Militer Kodam XVII Cendrawasih, ada lima aspek penyebab timbulnya pemberontakan OPM ini. *Pertama*, aspek politik. Pemerintahan Belanda pernah menjanjikan pada rakyat Papua untuk mendirikan suatu negara Papua yang terlepas dari Republik Indonesia. Beberapa pemimpin putera daerah yang pro-Belanda mengharapkan akan mendapatkan kedudukan yang baik dalam Negara Papua tersebut. Janji ini tidak dapat direalisasikan, sebab Papua harus diserahkan kepada Indonesia melalui Perjanjian New York 1962. Walaupun dalam perjanjian itu terdapat pasal tentang hak untuk menentukan nasib sendiri, namun pelaksanaannya diserahkan kepada Indonesia dan disaksikan oleh pejabat PBB. Apalagi pada tahun 1965, Indonesia menyatakan keluar dari PBB, sehingga dukungan dari PBB tidak dapat diharapkan lagi.

*Kedua*, aspek ekonomi. Pada tahun 1964, tahun-tahun 1965 dan 1966, keadaan ekonomi Indonesia pada umumnya sangat buruk, dan memberikan pengaruh sangat yang sangat terasa di Papua. Penyaluran kebutuhan pangan dan sandang ke Papua macet dan sering terlambat. Ditambah pula dengan tindakan para petugas Indonesia yang ada di Papua yang sering memborong

barang yang ada di toko dan mengirimnya ke luar Papua untuk memperkaya diri masing-masing. Akibatnya Papua mengalami kekurangan pangan dan sandang. Kondisi ini tidak pernah dialami oleh warga Papua pada masa Belanda. *Ketiga*, aspek psikologis. Rakyat Papua pada umumnya berpendidikan rendah, sehingga kurang bisa berfikir kritis. Akibatnya mereka gampang sekali dipengaruhi, dan yang lebih mendorong dalam mengambil sikap, adalah emosi daripada rasio. Contohnya adalah sikap yang ditunjukkan oleh Mayor Tituler Lodewijk Mandatjan yang menyingkir dua kali ke pedalaman Manokwari, tetapi kembali lagi dan mengaku taat kepada pemerintah Indonesia.

*Keempat*, aspek sosial. Pada masa Belanda, para pejabat pemerintah lokal di Papua pada umumnya diangkat dari kalangan Kepala Suku (dibandingkan dengan di Jawa di mana Belanda mengangkat pegawai dari golongan priyayi). Kalau mereka itu memberontak maka mereka akan mendapat dukungan dan pengaruh dari sukunya serta dalam suasana yang genting pada kepala suku itu harus berada di tengah-tengah sukunya itu. *Kelima*, aspek ideologis. Di kalangan rakyat Papua, hidup suatu kepercayaan tentang seorang pemimpin besar sebagai Ratu Adil yang mampu membawa masyarakatnya kepada kehidupan yang lebih baik atau makmur. Gerakan ini di Biak disebut gerakan Koreri (*heilstaat*) atau Manseren Manggundi. Kepercayaan ini yang memberikan motivasi bagi pemberontakan yang dipimpin oleh M Awom di Biak, dimana ia dianggap oleh pengikutnya sebagai nabi. (Djopari, 1993: 105-106)

Menurut sejumlah tokoh OPM sendiri, sebagaimana yang dituturkan kepada Djopari<sup>57</sup>, ada beberapa penyebab munculnya pemberontakan: *Pertama*, rasa nasionalisme Papua, rasa senasib dan seperjuangan untuk berjuang bagi kemerdekaan bangsa dan negara Papua Barat. *Kedua*, hendak meningkatkan dan mewujudkan janji Belanda yang tidak sempat direalisasikan akibat integrasi dengan Indonesia secara paksa dan tidak adil. *Ketiga*,

---

<sup>57</sup> Wawancara dilakukan oleh Djopari kepada sejumlah tokoh OPM: Viktor Kaisepo, Julian Nunaki, Samuel Asmuruf, Fred Athabu (di Belanda), Andreas Ajamiseba dan Dirk Ajamiseba (di Australia) tahun 1989; Trianus Aronggear, Melkianus Watofa dan Aser Demotekay (di Jayapura), tahun 1991. (Djopari, 1993: 132)

persetujuan politik antara Belanda dan Indonesia yang melahirkan perjanjian New York 1962 itu tidak melibatkan bangsa Papua (wakilnya) sebagai bangsa dan tanah air yang dipersengketakan. *Keempat*, latar belakang sejarah yang berbeda antara rakyat Papua Barat dan bangsa Indonesia. *Kelima*, masih terdapat perbedaan sosial, ekonomi dan politik antara bangsa Papua dan bangsa Indonesia. *Keenam*, Eksploitasi kekayaan alam Papua oleh Indonesia secara besar-besaran, dan tidak memberikan bagian yang semestinya bagi bangsa Papua. *Ketujuh*, tekanan yang terhadap rakyat Papua yang dilakukan oleh Indonesia sejak awal integrasi hingga saat ini. *Kedelapan*, hendak mewujudkan cita-cita dari gerakan cargo, yaitu suatu bangsa dan negara Papua Barat yang makmur di akhir zaman. Djopari akhirnya menyimpulkan bahwa, pemberontakan di Papua atau pemerontakan OPM itu terjadi, karena 'ketidakpuasan terhadap keadaan, kekecewaan, dan telah tumbuh suatu kesadaran nasionalisme papua Barat'. (Djopari, 1993: 107). Puncak dari ekspresi perlawanan rakyat Papua tercermin dalam proklamasi kemerdekaan Papua yang dibacakan oleh Seth J. Rumkorem pada 1 Juli 1971.<sup>58</sup>

Jika demikian, maka tampaknya apa yang disebut dengan integrasi nasional Papua (ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia), belumlah bisa dikatakan berhasil. Karena integrasi nasional, sebagaimana ditunjukkan oleh Liddle (1970: 205) secara mendasar adalah merupakan masalah loyalitas. Secara spesifik, menurut Liddle, suatu lembaga modern dapat dikatakan telah terintegrasi apabila; (1) sebagian besar penduduk telah menerima batas-batas teritorial negara-bangsa sebagaimana yang telah diberikan oleh kehidupan politik dan tidak berupaya untuk membuat diri mereka kurang lebih bersifat eksklusif, dan (2) ketika sebagian besar penduduk telah menerima struktur pemerintahan dan aturan-aturan mengenai proses politik sebagai sesuatu yang

---

<sup>58</sup> Naskah Proklamasi tersebut berbunyi: "*Proklamasi. Kepada Rakyat Papua sekalian, dari Numbay sampai dengan Merauke, dari Sorong sampai Baliem (Pegunungan Bintang) dan dari Biak sampai Pulau Adi: dengan berkat dan pertolongan Tuhan kami mendapatkan kesempatan hari ini, menyampaikan kepada kamu sekalian berdasarkan keinginan luhur bangsa Papua, bahwa Bangsa dan Tanah Papua hari ini, 1 Juli 1971, menjadi satu bangsa dan Tanah Air yang merdeka dan berdaulat penuh. Kiranya Tuhan menyertai kita dan dengan ini dunia menjadi maklum, bahwa keinginan luhur Bangsa Papua untuk merdeka atas Tanah Airnya Papua Barat telah menjadi nyata. Vitoria, 1 Juli 1971. Atas nama Rakyat dan Pemerintah Papua Barat, Presiden, Seth J. Rumkorem. Brigadir Jendral.*" (Djopari, 1993: 116)

legitimate dan memiliki otoritas atas keseluruhan masyarakat. Jadi, integrasi nasional mencakup adanya konsensus mengenai batas-batas komunitas politik dan konsensus mengenai sifat dari rezim politik. Dalam konteks ini, ada dua hambatan utama yang menghadang terjadinya integrasi nasional. *Pertama*, hambatan yang diakibatkan oleh adanya serangkaian perpecahan horisontal yang berbasiskan pada etnik, ras, agama, daerah, dan berbagai perbedaan lain yang bersaing dengan negara bangsa sebagai fokus tertinggi bagi loyalitas politik. Rintangan yang *kedua* untuk mencapai integrasi politik, adalah keberadaan elite nasional yang secara mendasar belum bisa merepresentasikan apa yang diinginkan dan dirasakan warga masyarakatnya. Nuansa ketidakpuasan dan sekaligus kegagalan integrasi nasional tersebut secara nyata tercermin dalam pernyataan tokoh Papua Thom Beanal di hadapan Presiden BJ Habibie pada 26 Februari 1999 lalu, yang mengatakan; “*Kami menuntut kemerdekaan karena kami tidak ingin terus menerus dibunuh seperti ini.*”

Dari keempat teks yang diproduksi masyarakat lokal di Aceh, Riau, Timor Timur dan Papua di atas (yang pada hakikatnya merupakan respons atas wacana yang dikonstruksi oleh Orde Baru), maka jika ditinjau menurut beberapa konsep Foucault akan tampak dalam tabel berikut ini:

#### 4.E. ISU INTEGRASI NASIONAL DALAM WACANA NASIONALISME INDONESIA

Sebagaimana umumnya negara-negara baru, Indonesia sejak kemerdekaan pada tahun 1945 menghadapi problem integrasi nasional—dalam pengertian terbentuknya suatu keutuhan negara dan bangsa, termasuk di dalamnya, hubungan yang baik antara elite bangsa dengan keseluruhan penduduk, sehingga memiliki nasionalisme yang penuh, dan akhirnya seluruh penduduk rela memberikan loyalitasnya secara sukarela kepada negara. Problem ini, dalam tinjauan Liddle (1970: 3) memiliki akarnya di dalam periode kolonial, yaitu ketika terjadi proses urbanisasi dan meningkatnya taraf pendidikan, di kalangan masyarakat terjajah mulai muncul sejumlah elite. Awalnya, seperti layaknya masyarakat terjajah yang umumnya tradisional, para elite ini merasakan kebersamaan dengan masyarakatnya, dengan segala sukaduka perjuangan melawan kolonialisme. Namun pada tahap berikutnya, ketika perjuangan melawan kolonialisme telah usai, dan kemerdekaan tercapai, para elite masyarakat pasca kolonial ini menemukan diri mereka justru terpisah oleh serangkaian jurang yang nyaris tidak terjembatani, dengan posisi yang lebih jelas: antara rakyat dengan penguasa. Tidak hanya posisi, tetapi serangkaian struktur sosial, politik dan kebudayaannya pun terdapat jurang yang dalam. Mengutip Edward Shils, Liddle mengatakan:

In almost every aspect of their social structures, the societies on which the new states must be based are characterized by a 'gap'. It is the gap between the new, very rich and the mass of the poor, between the educated and uneducated, between the townsman and the villager, between the cosmopolitan or national and the local, between the modern and the traditional, between the rules and the ruled. It is the 'gap' between a small group of active, aspiring, relatively well-off, educated and influential persons in the big towns and an inert or indifferent, impoverished, uneducated and relatively powerless peasantry. (Shils, 1960: 281, direproduksi, dalam Liddle, 1970: 3-4)<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Hampir dalam semua aspek struktur sosial mereka, di mana masyarakat seharusnya berdiri di atasnya, justru dikarakteristikan oleh 'jurang'. Yaitu jurang antara sedikit orang yang sangat kaya dengan masyarakat banyak yang sangat miskin, antara kaum terpelajar dan tidak terpelajar, antara orang kota dan orang desa, antara orang kosmopolit nasional dan lokal, antara

Karena itu, menurut Liddle, problem integrasi nasional yang dihadapi oleh sebagian besar negara-negara baru, termasuk Indonesia, berurusan dengan dua dimensi pokok: (1) dimensi horisontal, yang mencakup pertautan bersama dari kelompok-kelompok sosial yang terpisah—kekeluargaan, etnik, bahasa, agama, ras—di dalam satu kerangka kerja bersama institusi dan loyalitas nasional, dan (2) dimensi vertikal, yang mencakup penutupan jurang politik dan kebudayaan antara orang perkotaan, berpendidikan Barat, para elite politik nasional pada satu sisi, dengan massa rakyat banyak yang tradisional, di pedesaan dan sebagainya. Kemampuan elite negara baru dalam mengatur kedua dimensi ini akan sangat menentukan, apakah negara tersebut akan menjadi semakin terintegrasi, yang memungkinkan permasalahan kenegaraan bisa berjalan, dimana loyalitas kepada negara menjadi sesuatu yang tak bisa dihindarkan, dan jurang antara elite dan massa dapat dihilangkan, atau ia akan menjadi berantakan oleh gerakan-gerakan separatisme.

Untuk Indonesia yang memiliki wilayah begitu luas membentang dari barat ke timur sepanjang 5.000 kilometer, terdiri atas 13.000 pulau lebih, dengan penduduk lebih dari 200 juta orang, dan didalamnya hidup tidak kurang dari 200 suku dan etnis, dan wilayahnya melintasi tiga zona waktu, jelas persoalan integrasi nasional menjadi problem yang tidak mudah diwujudkan. Tak berlebihan bila Indonesianis dari Cornell University, Ruth McVey mengilustrasikan, membangun Indonesia sebagai sebuah negara kesatuan tak ubahnya mendirikan raksasa (*building behemoth*), sebuah gagasan yang nyaris tidak masuk akal (*the nation-state is a chimera*). (McVey, 1996). Inti dari persoalannya adalah, dengan cara seperti apa negara dan bangsa yang begitu luas dan kompleks itu ditata? Pertanyaan bernada skeptis ini belakangan semakin kuat bermunculan di kalangan pengamat Indonesia, bersamaan dengan maraknya pergolakan di berbagai daerah,

---

orang modern dan orang kuno, antara penguasa dan rakyat. Yaitu jurang antara kelompok kecil yang aktif, memiliki aspirasi, relatif kaya, orang terpelajar dan berpengaruh di kota besar dengan orang lemah, orang yang biasa, miskin, tidak terpelajar dan kaum petani yang relatif lemah.

khususnya pasca jatuhnya Soeharto pada 1998. Lepasnya Timor Timur pada 1999 (hanya setahun setelah reformasi terjadi), munculnya deklarasi kedaulatan Riau (pada 15 Maret 1999), ditambah kerasnya tuntutan kemerdekaan di Aceh dan Papua, semakin kuat mengindikasikan apa yang disebut ‘Negara Kesatuan Republik Indonesia’ sedang menghadapi persoalan yang serius. Dan ini jelas merupakan persoalan integrasi nasional. Donald Emmerson (2001) pun lalu bertanya, ‘Mampukah Indonesia bertahan sebagai negara kesatuan?’ (*Can Indonesia survive as unitary state?*). Namun setelah mencermati berbagai perkembangan yang terjadi, Emmerson sampai pada kesimpulan; *Indonesia akan bertahan. Dan Indonesia akan bertahan lagi. Asalkan Jakarta mampu membekali dan memelihara dengan baik suatu kesatuan negara yang direlakan—bukan kesatuan negara yang dipaksakan.* (Emmerson, 2001: 666).

Upaya pemerintah Indonesia Orde Baru untuk membangun nasionalisme yang kuat di kalangan masyarakatnya, khususnya masyarakat lokal, tampaknya belum berhasil. Bahkan ada satu bentuk kegagalan yang cukup jelas yaitu lepasnya Timor Timur. Aceh, meski akhirnya menghentikan tuntutan kemerdekaannya setelah puluhan tahun berperang dengan tentara Indonesia, tetapi sudah terlalu banyak jiwa yang menjadi korban, dan untuk mengakhirinya pun harus melibatkan pihak ketiga. Di Riau, api kemarahan masyarakat setempat juga baru menyurut setelah berlangsungnya kebijakan baru menyangkut otonomi daerah. Sementara itu, di Papua hingga saat ini, pergolakan menuntut kemerdekaan yang dilakukan OPM belum juga reda. Bagaimana dinamika integrasi (dan disintegrasi) nasional itu terjadi selama ini, apa saja aspek-aspek penting yang ada (terjadi) di keempat wilayah tersebut yang menyebabkan menguatnya (ataupun mungkin juga melemahnya) integrasi akan dicoba bahas dalam paparan-paparan berikut ini.

Dibanding tiga daerah lain Aceh sebenarnya merupakan daerah yang memiliki ikatan sejarah paling kuat dengan Indonesia bangsa. Bahkan seperti dipaparkan pada bagian sebelumnya, Aceh telah memberikan kontribusinya yang luar biasa dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia melawan Belanda, sehingga Presiden Sukarno menggelari Aceh sebagai ‘Daerah Modal’. Secara

ideologis, Aceh juga memiliki kedekatan dengan saudaranya di Indonesia yang mayoritas menganut agama Islam. Tetapi kedekatan ideologis, dan juga perasaan senasib sepenanggungan di masa perjuangan melawan kolonialisme Belanda, semakin meluruh seiring berjalannya waktu. Bahkan sepertinya kemudian lenyap nyaris tak berbekas, tak lebih dari sepuluh tahun kemudian. Pangkalnya adalah kekecewaan demi kekecewaan yang terus dirasakan oleh masyarakat Aceh akibat kebijakan pemerintah Indonesia (Jakarta) yang tidak aspiratif, dan dalam banyak hal sangat merugikan masyarakat Aceh. Mulai dari tiadanya pengakuan akan keistimewaan dan kekhasan budaya Aceh, eksploitasi kekayaan alam yang semena-mena, hingga pembantaian dan penghancuran kemanusiaan dalam skala yang tak bisa ditolehir lagi. Perilaku tentara yang mengerikan selama berlangsungnya status Daerah Operasi Militer (DOM) di wilayah itu selama sepuluh tahun (1989-1998), membuat masyarakat Aceh trauma terhadap Indonesia.<sup>60</sup> Bahkan salah seorang pemimpin Aceh Hasan di Tiro menyebut Indonesia adalah penguasa kolonial dengan orang Jawa sebagai pengganti Belanda-nya.<sup>61</sup> Jika ditinjau menggunakan konsep Liddle tentang integrasi nasional, maka akan tampak bahwa, mayoritas gangguan bagi terwujudnya integrasi nasional itu berada pada aspek atau dimensi vertikal. Dimana elite politik di Jakarta-lah yang menjadi faktor utama bagi terjadinya kesenjangan Indonesia-Aceh. Meski demikian ada juga aspek horisontal yang sebenarnya bisa menjadi perekat antara Aceh dan Indonesia, yaitu aspek ke-Islaman. Tetapi tampaknya faktor ini juga tidak mampu menjemtani kesenjangan yang terlanjur menganga dan dalam itu. Secara sederhana, beberapa persoalan yang muncul di Aceh, dalam kaitannya dengan integrasi nasional dapat diidentifikasi dalam tabel berikut:

---

<sup>60</sup> Di Aceh, tidak seperti yang digambarkan Ali Murtopo, dimana militer menjadi pihak yang paling depan menjaga integrasi, tetapi sebaliknya justru menjadi momok disintegrasi. Dalam buku yang barangkali telah menjadi *magnum opus* salah satu arsitek Orde Baru itu, Murtopo menulis, "Dari sejarah kehadiran ABRI, disintegrasi yang menjurus pada kehancuran negara berulang kali dapat ditanggulangi." (Murtopo, 1981: 242)

<sup>61</sup> "Indonesia is still an unliquidated colonial empire with Javamen replacing Dutchmen as enemies." (Kell, 1995: 62, direproduksi dalam, Mann, 2005: 494)

**IDENTIFIKASI PERSOALAN INTEGRASI NASIONAL  
DI ACEH**

| <b>NO</b> | <b>JENIS MASALAH/ KASUS</b>   | <b>KLASIFIKASI:<br/>VERTIKAL -<br/>HORISONTAL</b> |            | <b>KETERANGAN</b>   |
|-----------|---|---|------------|---|
| 1.        | Pembagian/penataan wilayah (menurut UUD 1950 dan UU Desentralisasi) yang dianggap tidak aspiratif | Vertikal  |            | Diselesaikan dengan UU No. 18 Tahun 1965 tentang Keistimewaan Aceh  |
| 2.        | Kebijakan yang tidak aspiratif (Keluarnya UU. No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan)  | Vertikal  |            | Substansinya, UU No. 5/1974 ini meniadakan status Keistimewaan Aceh |
| 3.        | Eksplorasi sumber daya alam besar-besaran, tetapi warga Aceh mendapat bagian yang sangat kecil    | Vertikal  |            | Khususnya tambang di Arun   |
| 4.        | Kekerasan tentara (pembantaian, pemerkosaan, dll), eksekusi pelaksanaan DOM                       | Vertikal  |            |   |
| 5.        | Kerusakan lingkungan akibat eksploitasi Sumber Daya Alam  | Vertikal  |            |   |
| 6.        | Rusaknya struktur budaya/adat   | Vertikal  | Horisontal |   |
| 7.        | Tidak ada penegakan hukum bagi pelanggar HAM berat  | Vertikal  |            |   |

Mirip dengan di Aceh, masyarakat Riau sebenarnya memiliki rasa kebersamaan dengan Indonesia dalam masa perjuangan panjang melawan kolonialisme, di samping juga ada kedekatan ideologis, dimana mayoritas masyarakat Riau adalah pemeluk Islam, seperti halnya mayoritas penduduk Indonesia. Kesenjangan antara Riau dengan Jakarta terjadi hampir bersamaan dengan masyarakat Aceh, yaitu dimulai dari adanya kebijakan-kebijakan penataan/pembagian daerah administrasi kewilayahan yang tidak aspiratif, bahkan merugikan masyarakat Riau. Disusul kemudian oleh cara-cara pengambilan keputusan politik yang sentralistis, yang seolah tidak mengindahkan keberadaan martabat masyarakat Riau. Perasaan dilecehkan itu mencapai puncaknya ketika terjadi eksploitasi sumber daya alam dalam

jumlah yang sangat besar, tetapi masyarakat Riau hanya mendapat bagian yang sangat kecil. Belum lagi harga sosial dan budaya (seperti yang dialami suku Sakai) yang dihancurkan yang tak ternilai harganya. Yang tertinggal di Riau, setelah selama puluhan tahun bersama Indonesia, hanyalah kelaparan, kebodohan dan ketertindasan masyarakatnya. Aspek-aspek inilah yang menyebabkan, apa yang disebut Liddle sebagai integrasi vertikal, sangat jauh dari terwujud. Demikian pula, pada dimensi horisontal, seperti kekerabatan budaya dan rasa kedekatan ideologis, alih-alih bisa diperkuat, sebaliknya justru merosot. Jika dibuat satu tabel identifikasi persoalan, maka apa yang terjadi di Riau akan tampak seperti di bawah ini:

#### IDENTIFIKASI PERSOALAN INTEGRASI NASIONAL DI RIAU

| NO | JENIS MASALAH/ KASUS   | KLASIFIKASI:             |            | KETERANGAN                                   |
|----|--|--------------------------|------------|--|
|    |  | VERTIKAL -<br>HORIZONTAL |            |  |
| 1. | Pembagian/penataan wilayah (menurut UUD 1950 dan UU Desentralisasi) yang dianggap tidak aspiratif                | Vertikal                 |            |  |
| 2. | Pembekuan DPRST oleh Jakarta secara sepihak melalui UU No. 1/1951  | Vertikal                 |            | Terjadi di masa kabinet M. Natsir            |
| 3. | Konfrontasi Jakarta dengan Malaysia, yang merusak struktur sosial, ekonomi, budaya dan kekerabatan sesama Melayu | Vertikal                 | Horisontal |  |
| 4. | Lahirnya UU No. 5/ 1974 dan Kepmendagri No. 240/1980, yang menjadikan kebijakan otonomi daerah dirasa sia-sia    | Vertikal                 |            | Dimana kantor-kantor dinas langsung ke pusat |
| 5. | Pengangkatan Gubernur yang tidak aspiratif, juga penggantian Gubernur yang menyalahi aturan hukum                | Vertikal                 |            |  |
| 6. | Pelecehan (simbolik) struktur budaya lokal   | Vertikal                 | Horisontal | Peristiwa Monumen Riau                       |
| 6. | Eksplorasi sumber daya alam yang tidak mengindahkan hak adat lokal   | Vertikal                 |            |  |
| 7. | Pembagian hasil eksploitasi sumber daya alam yang tidak adil antara pemerintah Jakarta                           | Vertikal                 |            |  |

|     |   |          |            |  |
|-----|---|----------|------------|--|
|     | dengan warga Papua  |          |            |  |
| 8.  | Kerusakan lingkungan akibat eksploitasi SDA               | Vertikal |            |  |
| 9.  | Rusaknya struktur budaya/adat                             | Vertikal | Horisontal |  |
| 10. | Penyerobotan/perampasan tanah rakyat                      | Vertikal |            |  |
| 11. | Kekerasan tentara (pembantaian, pemerkosaan, dll)         | Vertikal |            |  |
| 12. | Tersingkirnya masyarakat lokal akibat proyek transmigrasi | Vertikal | Horisontal |  |
| 13. | Perampasan dan perusakan hutan lewat HPH                  | Vertikal |            |  |
| 14. | Illegal logging   | Vertikal |            |  |
| 15. | Kemelaratan, kelaparan, kebodohan                         | Vertikal | Horisontal |  |
| 16. | Tidak diakomodasinya tenaga kerja lokal                   | Vertikal |            |  |

Jauh berbeda dengan Aceh dan Riau, yang memiliki konteks sejarah (dan juga legitimasi hukum dan pengakuan internasional) yang begitu jelas dengan Indonesia, Timor Timur adalah daerah yang memang secara historis dan hukum tidak memiliki legitimasi yang kuat untuk dianggap sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu-satunya dasar yang dijadikan landasan pemerintah Indonesia memasukkan wilayah tersebut ke dalam NKRI adalah Deklarasi Balibo (yang ditandatangani pada 30 November 1975). Secara internal masyarakat Timor Timur, deklarasi ini tidak mendapatkan dukungan yang meyakinkan. Sementara di tingkat internasional, hanya ada dukungan Amerika Serikat dan Australia yang memberikan pengakuan secara *de facto* (tidak secara *de jure*) karena didorong oleh kepentingan ekonomi dan strategi pertahanannya masing-masing. Lemahnya landasan sejarah dan hukum ini, kemudian juga diperlemah oleh tidak ada upaya yang bersifat horisontal, seperti pendekatan ideologis dan budaya. Sebaliknya, pemerintah Indonesia justru menghancurkan struktur sosial dan budaya masyarakat Timor Timur dengan praktik-praktik militerisme barbarian, sembari membuat kamufase dengan pembangunan prasarana fisik dalam skala besar, sekadar untuk menunjukkan tingkat kemajuan pembangunan di wilayah itu pasca berintegrasi dengan Indonesia.

Selama 24 tahun Indonesia menghabiskan banyak biaya, pikiran dan juga korban di kalangan prajuritnya untuk mengintegrasikan Timor Timur ke dalam NKRI. Tetapi semuanya itu pada akhirnya tidak menghasilkan capaian yang diinginkan. Sebaliknya justru telah menempatkan Indonesia pada posisi yang memalukan sebagai bangsa penjajah di mata publik internasional. Kegagalan Indonesia mengintegrasikan Timor Timur ke dalam cakupan wilayah kedaulatannya, ditandai oleh kegagalan dalam mengintegrasikan dua dimensi sekaligus, dimensi vertikal dan dimensi horisontal. Secara vertikal, menurut pendekatan politik dan hukum, Indonesia tidak berhasil meyakinkan pihak internasional maupun masyarakat Timor Timur bahwa daerah tersebut merupakan bagian dari kedaulatan NKRI. Sementara secara horisontal, terjadi penentangan luar biasa yang dilakukan oleh masyarakat Timor Timur terhadap politik integrasi Indonesia melalui jalur kultur, agama dan jaringan sosial kemasyarakatan.

Melalui jalur agama (terutama gereja Katolik), masyarakat Timor Timur dengan sangat intensif menjalankan perjuangannya di tingkat nasional maupun internasional. Dengan bendera misi kemanusiaan, perjuangan itu sangat efektif dalam mengkampanyekan kemerdekaan Timor Timur dari penguasaan Indonesia. Bahkan seiring dengan semakin brutalnya tentara Indonesia, sebagaimana dicatat Taylor (1998:281) gereja di Timor Timur telah menjadi unsur utama oposisi pendudukan Indonesia selama tahun 1980-an. Lewat pengumpulan fakta pelanggaran HAM terus-menerus, menyerukan referendum dan perlindungan terhadap mereka yang mengkritik pendudukan, rohaniwan di Timor Timur memainkan peranan menentukan dalam membela hak rakyat serta menyiarkan keadaan buruk Timor Timur secara internasional. Tak kurang, Mayor Prabowo, menantu Presiden Suharto mengatakan, “Gereja, rohaniwan dan agama adalah tiga faktor yang mengancam integrasi Timor Timur ke dalam Indonesia. Rakyat harus menentang mereka”. (*Le Paixest Possible au Timor Oriental*, No. 38, Agustus 1989, direproduksi dalam, Taylor, 1998: 281)<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Secara simbolik, tidak diintegrasikannya dioses Timor Timur ke dalam KWI, sering dimaknai sebagai bentuk keengganan Vatikan untuk mengakui keberadaan Timor Timur sebagai

Selain gereja (agama), aspek budaya juga turut memberikan andil penting bagi kegagalan integrasi Timor Timur dengan Indonesia.<sup>63</sup> Di Timor Timur, sejak zaman Portugis, ada istilah yang digunakan para penjajah untuk memberi nama bagi masyarakat Timor Timur, yaitu ‘Maubere’. Ketika Portugis dan Indonesia gagal memaknai kosakata ini bagi kepentingan integrasi, para anggota Fretlin justru berhasil mengangkat martabat budaya yang dipandang hina oleh Portugis itu menjadi bahasa baru yang bermakna kemerdekaan. Kata *Maubere*, dulunya digunakan oleh orang-orang pegunungan miskin, suku Mambai, yang berarti teman. Kata ini kemudian dipakai oleh Portugis untuk mencemarkan petani Timor—maubere, maknanya adalah ‘orang yang terbelakang, primitif, dari pedalaman’. Fretlin memungut kata ini dan membuatnya menjadi simbol gerakan. Seorang antropolog yang sudah lama bekerja di kalangan suku Mambai tersebut mengatakan:

“Istilah Maubere –saudaraku diulang terus menerus, merembes ke mana-mana, menjadi seruan bagi persatuan Timor. Menjadi maubere berarti menjadi putera Timor... menggunakan istilah ini untuk perempuan *bui bere*, berarti menegaskan keberadaan kebudayaan Timor dan perjuangan melawan kemiskinan dan tekanan kolonial. Begitu sukses mereka, sehingga kata itu sudah menjadi istilah umum dalam pidato-pidato pada pertengahan tahun 1975.” (Taylor, 77-78)

Kegagalan Indonesia dalam mengintegrasikan Timor Timur, seperti dikatakan Taylor (1998) karena sesungguhnya Indonesia berhadapan dengan satu masyarakat dengan dua ciri terpenting: *pertama*, struktur asli dengan

---

bagian dari wilayah Indonesia. Tetapi pada tahun 1987, wakil diplomatik Vatikan di Jakarta pernah mengatakan, alasan tidak diintegrasikannya dioses Timor Timur ke dalam KWI hanyalah karena alasan legal, yaitu tidak ingin mendahului penyelesaian internasional tentang masalah Timor Timur. Dari Indonesia sendiri pernah ada satu upaya untuk itu, yaitu ketika Frans Seda, seorang politisi Katolik Indonesia terkemuka dan anggota Komisi untuk Keadilan dan Perdamaian Kepausan Vatikan, menyerukan kepada gereja-gereja untuk mengakui secara resmi integrasi Timor Timur ke dalam Gereja Katolik Indonesia. (Taylor, 1998: 276-277)

<sup>63</sup> Aspek budaya dan kekerabatan tradisional, jarang menjadi wawasan yang dipandang penting untuk memahami konflik Timor Timur dengan Indonesia. Padahal, menurut Taylor, gambaran masyarakat Timor Timur yang paling penting adalah sistem kekerabatan dan aliansi sosial politik, yang merupakan inti dalam masyarakat maupun antar masyarakat. Sistem ini begitu besar mempengaruhi semua lapangan kehidupan, dari organisasi ekonomi sampai agama dan kebudayaan. Terjaganya sistem kekerabatan memungkinkan masyarakat mempertahankan perlawanan tinggi yang kohesif, terintegrasi terhadap gangguan dari luar. (Taylor, 1998: 347)

ketahanan yang tinggi untuk terus menciptakan sesuatu di tingkat regional. *Kedua*, ini diperkuat dengan berdirinya lembaga-lembaga serta ideologi baru yang membentuk aspirasi nasional untuk kemerdekaan. Keadaan ini tak terbayangkan oleh militer Indonesia yang sudah disusupi pengertian bahwa secara ekonomi Timor Timur terbelakang, ‘primitif’ dan dipandang tidak masuk akal. Karena pandangan seperti itulah tentara Indonesia gagal memasuki basis utama masyarakat Timor Timur. Situasi ini berbanding terbalik dengan Fretilin, penantang utama tentara Indonesia, yang justru selalu menjadikan masyarakat pedesaan dan primitif itu sebagai basis programnya. Fretilin telah belajar mengungkapkan pandangan mereka dalam pengertian yang lebih langsung bertalian dengan pikiran awam orang Timor, dengan menggunakan idiom Tetum lokal. Model kepemimpinan Fretilin memiliki ciri-ciri yang bisa mempersatukan masyarakat Timor Timur. Rata-rata mereka berasal dari generasi yang sama, lahir pada masa Perang Pasifik atau tak berapa lama sesudahnya. Mereka semua dididik di sekolah-sekolah Katolik, dan beberapa diantaranya sempat menjalani pendidikan imam. Banyak pemimpin Fretilin yang mendasarkan kegiatannya pada ajaran Katolik. Beberapa pemimpin terpenting adalah anak *liurai* atau kepala *suco* dan tetap mempertahankan pertalian dengan daerah asal. Para pemimpin itu menekankan nilai-nilai pendidikan, kesamaan ras dan nasionalisme.

Tetapi, menurut Taylor, prestasi paling penting dari gerakan kemerdekaan Timor Timur yang dipimpin Fretilin adalah kemampuannya membangun sebuah organisasi, yang meskipun bersatu di bawah kebijakan politik umum dan mengacu pada nilai-nilai budaya umum, tetap mampu menekankan pentingnya otonomi regional dan kebudayaan lokal. Dengan mengidentifikasi nilai Mauberisme atau dengan memfokuskan pada isu nasionalisme dalam kampanye pemberantasan buta huruf, gerakan ini sanggup membangkitkan semangat kekerabatan atau afiliasi suku seperti Makassae atau Mambai. Persekutuan kekerabatan tradisional dan struktur politik terus diperbaharui selama masa sesudah penyerbuan Indonesia. Seperti itu juga yang terjadi di bawah kekuasaan Portugis pada abad ke-20. Dengan komposisi yang demikian, Taylor akhirnya berkesimpulan:

Keberadaan struktur tradisional dalam kerangka politik nasionalis inilah yang membuat sukses perlawanan terhadap pendudukan Indonesia pada periode awal tahun 1976-77. Sumber kekuatan organisasi didasarkan pada jaringan politik, ekonomi, militer antar daerah-daerah. Dengan jaringan ini pemimpin Fretilin mampu mengkoordinasi strategi perjuangan yang didasarkan pada kekokohan unit-unit lokal. Koordinasi ini ditunjukkan dalam keberhasilan strategi perlawanan selama musim kemarau 1976, dan dengan peristiwa seperti terselenggaranya pertemuan komite sentral bulan Mei dan diorganisirnya Palang Merah Timor Timur dalam hubungan antar daerah. (Taylor, 1998: 171)

Berbagai problem yang menjadi batu penghalang bagi terjadinya integrasi Timor Timur dengan Indonesia tersebut, bila diidentifikasi dalam sebuah tabel, akan tampak sebagai berikut:

#### IDENTIFIKASI PERSOALAN INTEGRASI NASIONAL

| NO | JENIS MASALAH/ KASUS   | KLASIFIKASI:<br>VERTIKAL -<br>HORISONTAL |            | KETERANGAN  |
|----|--|--|------------|---|
|    |  |  |            |   |
| 1. | Secara historis, Deklarasi Balibo dianggap tidak merepresentasikan sikap rakyat Timor Timur secara keseluruhan, sehingga mosi integrasi dianggap tidak memiliki legitimasi | Vertikal                                 |            | Secara yuridis formal, integrasi tidak mendapat legitimasi di tingkat internasional |
| 2. | Eksplorasi sumber daya alam oleh Jakarta   | Vertikal                                 |            |   |
| 4. | Rusaknya struktur budaya/adat  | Vertikal                                 | Horisontal |   |
| 5. | Identitas Kekristenan/Katolik/Gereja   |  | Horisontal |   |
| 6. | Identitas 'Maubere' dari penghinaan menjadi energi perlawanan  |  |            |   |
| 7. | Kekerasan tentara (penyiksaan, pembantaian, pemerkosaan, dll)  | Vertikal                                 |            | Terutama kasus Santa Cruz   |
| 8. | Tersingkirnya masyarakat lokal akibat proyek transmigrasi  | Vertikal                                 | Horisontal |   |
| 9. | Tidak ada penegakan hukum bagi pelanggar HAM berat   | Vertikal                                 |            |   |

Sementara itu, pergolakan di Papua yang belum kunjung reda sejak tahun 60-an hingga saat ini, antara lain dikarenakan oleh landasan legitimasi hukum dan politik yang dirasakan oleh sebagian masyarakat Papua tidak *legitimate*. Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) atau *Act of Free Choice* dengan cara perwakilan melalui anggota Dewan Musyawarah Pepera sebanyak 1.025 orang (untuk mewakili jumlah penduduk sebesar 809.337 orang Papua saat itu), pada bulan Juli-Agustus 1969 tersebut, dianggap tidak sesuai dengan prosedur standard yang mengharuskan cara penentuan melalui keterlibatan semua orang untuk memberikan suara tanpa kecuali (*one man one vote*). Penolakan pengakuan itu misalnya diungkapkan oleh Ketua Presidium Dewan Papua Theys Hiyo Eluai pada tahun 2000, yang dengan lantang menyatakan: "*Jangan pergunakan lagi istilah Papua keluar dari Indonesia. Sebab tidak ada catatan sejarah yang menunjukkan Papua pernah masuk bagian Indonesia. Malahan NKRI yang menempel pada Papua.*"

Mungkin akan lebih tepat jika ungkapan Theys ini kita tempatkan dalam konteks sekarang, bukan untuk tahun 1960-an yang lalu, di sekitar masa ditandatanganinya Pepera. Karena pada saat itu, di samping telah ada hasil Pepera yang diawasi oleh lembaga internasional PBB, secara formal para pimpinan partai politik yang ada di Papua saat juga mengadakan musyawarah di Kotabaru, Jayapura pada 1 Desember 1963, dimana mereka lalu mengeluarkan pernyataan pengakuan bahwa Papua merupakan bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, sambil menyatakan pembubaran diri. Partai-partai tersebut adalah: Commite National Papua, Front National Papua (FNP), National Partij Papua (Nappa), Partai Nasional (Parna), Democratische Volks Partij (DVP), Partai Papua Merdeka (PPM), dan Kena U Embay (KUE). Dalam pengertian demikian, maka pengingkaran masa lalu Papua, sebagaimana diungkapkan Theys lebih disebabkan oleh kekecewaan dan kemarahan masyarakat Papua terhadap pemerintah Indonesia (Jakarta) yang telah menghancurkan sendi-sendi kehidupan masyarakat Papua.

Skala penghancuran telah dirasakan begitu besar oleh masyarakat Papua, dan terjadi dalam semua aspek kehidupan masyarakat. Secara adat, mereka diusir dari tanah mereka (seperti dirasakan Suku Amungme), dan oleh

program transmigrasi sumber pencaharian mereka dirampas, sekaligus mereka dipaksa menyingkir oleh kaum pendatang dari luar Papua (mayoritas dari Jawa dan Sulawesi). Kekerasan ekonomi terutama dirasakan masyarakat Papua sejak tahun 1967, dengan beroperasinya PT Freeport Indonesia. Sejumlah pelanggaran HAM pun telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia (TNI) dengan dukungan penuh PT Freeport Indonesia, terutama selama berlakunya Papua sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) sejak tahun 1978 hingga 5 Oktober 1998. Dari semua praktik ini, hanya segelintir warga Papua yang diuntungkan. Sebagai bentuk kekecewaan, rakyat Papua, khususnya Amungme dan enam suku lainnya di seputar Freeport, melakukan pemberontakan. Pada tahun 1977 mereka meledakkan jalur pipa milik perusahaan raksasa tersebut. Sebagai reaksinya, pasukan TNI melakukan serangan balik. Kebun-kebun dan rumah-rumah penduduk dihancurkan.

Di luar aspek-aspek hukum, politik dan ekonomi (yang bisa dikelompokkan sebagai bagian dari dimensi vertikal dalam integrasi nasional) aspek yang lain semakin mementahkan upaya integrasi Papua ke dalam Republik Indonesia, adalah tiadanya penghargaan terhadap kultur dan keyakinan masyarakat setempat. Hal itu antara lain terjadi ketika pada bulan Agustus 1983, masyarakat Kampung Ormu memprotes penembakan satwa terlarang oleh regu pengawal tim survei pertambangan yang berpangkalan di Ormu waktu itu. Menurut Laporan Soleman pada Menteri Emil Salim, para pengawal dari Yonif 751 Kodam XVII/Cendrawasih telah menembak mati tiga ekor Cendrawasih, enam ekor burung rangkong, dua ekor burung kakatua putih, seekor burung nuri, seekor kuskus, dan dua ekor anak penyu belimbing. Selain itu, para petugas dilaporkan telah memetik 30 buah kelapa tua dan muda dengan peluru senjata api mereka. Sebagian binatang itu ditembak untuk dimakan. Namun Cendrawasih, nuri dan penyu belimbing semuanya diawetkan dengan suntikan air keras. Padahal, tak ada yang lebih menyakitkan hati Tubwe Nari (pemimpin adat Kampung Ormu) beserta pemuda-pemuda pendukungnya, ketimbang penembakan burung-burung Cendrawasih itu. Sebab seperti diutarakan Nari dalam suratnya kepada Kakanwil Pertambangan Propinsi Papua Barat, tanggal 25 Agustus 1983, Burung Cendrawasih adalah

satu-satunya jenis burung yang khas, dan tak ada duanya di dunia, dan secara tradisional melambangkan mahkota atau lambang kebesaran sang Tubwe/Ondoafi.<sup>64</sup>

Akibat dari praktik kekerasan dan ketidakpedulian pemerintah Indonesia terhadap masyarakat Papua, telah menyebabkan sebagian warga Papua yang sudah menerima integrasi dengan Indonesia, justru berbalik arah membela OPM. Hal itu misalnya terjadi pada Titus Dansidan, seorang Pegawai Kantor Gubernur Papua, yang selama ini telah dipercaya pemerintah Indonesia untuk menjabat sebagai staf Biro Pembinaan Mental Spiritual Kantor Gubernur Papua Barat. Dansidan dikenal sebagai pejuang Indonesia untuk pembebasan Irian Jaya. Tetapi belakangan ia memilih membela OPM, karena kecewa terhadap pemerintah Indonesia yang selalu bertindak sewenang-wenang terhadap warga Papua. Dansidan kemudian ditangkap oleh tentara Indonesia pada tahun 1983. (Aditjondro, 2000: 218). Dan yang paling membuat masyarakat Papua merasa dilecehkan adalah peristiwa pembunuhan tentara terhadap Arnold Ap, sosok santun yang selama bertahun-tahun berjuang melalui jalur budaya untuk menghidupkan kesenian dan kebudayaan asli Papua di bawah nama Mambesak (yang artinya Burung Cendrawasih, atau Burung Kuning).

Berbeda dengan pada umumnya para pemrotes Indonesia yang selalu menyatakan penolakannya pada Indonesia, sejak awal Arnold Ap tidak pernah menyatakan penolakannya terhadap Indonesia. Sebagai seniman, ia hanya ingin agar kesenian dan kebudayaan Papua yang begitu kaya, dapat bertahan dan tumbuh dengan baik, tidak hilang begitu saja. Ap juga dipercaya sebagai Ketua Museum Universitas Cendrawasih, Papua. Upaya Ap ini mendapat apresiasi yang baik dari sejumlah intelektual Jakarta dan daerah lain Indonesia, seperti Prof. Koenjtaraningrat. Bahkan dari penguasa dan tentara Indonesia, Ap dengan kesenian Mambesaknya telah dikenal baik, dan

---

<sup>64</sup> Atas nama Dewan Musyawarah Adat Kampung Ormu, Soleman Nari melayangkan surat protes kepada Menteri Negara KLH dan Kakanwil Dep. Pertambangan & Energi Propinsi Irian Jaya. Tetapi protes ini sama sekali tidak diindahkan oleh pemerintah, dan para tentara pelaku penembakan satwa terlarang itu tidak pernah mendapat sanksi apapun. (Aditjondro, 2000: 215)

beberapa kali tampil di kantor Gubernur Papua Barat. Pada bulan November 1978, Mambesak bahkan diutus mewakili Propinsi Papua Barat dalam Pekan Tari Rakyat Tingkat Nasional di Jakarta. Meski tidak menjadi juara, mereka terpilih sebagai peserta teladan, sekaligus membuka jalan bagi kelompok-kelompok kesenian Papua untuk ikut bicara pada pentas nasional tahun-tahun berikutnya. Tetapi sangat disayangkan bahwa gairah masyarakat Papua oleh kemunculan kesenian Mambesak, kemudian pupus ketika pada 20 April 1984, Arnold Ap dibunuh oleh tentara Indonesia. Aditjondro (2000: 141) menggambarkan, upacara pemakaman Arnold Ap laksana prosesi pemakanan Martin Luther King, di mana ribuan orang yang ikut dalam prosesi itu bergandengan tangan memenuhi jalan dengan diiringi lagu-lagu rohani. Pupusnya gairah berkesenian dan berkebudayaan masyarakat Papua oleh pembunuhan Arnold Ap, menandai satu bentuk kegagalan upaya integrasi nasional yang dilancarkan oleh pemerintah Indonesia, dalam perspektif horisontal. Seni budaya, yang mestinya bisa menjadi tali pengikat bagi integrasi nasional justru diputus dan dihancurkan berkeping-keping. Menurut Bertrand (2004: 147), gabungan antara tiadanya kebersamaan dalam sejarah dan pengalaman bersama, juga tidak adanya interaksi yang baik diantara elite Papua dengan elite dari daerah lain di wilayah Hindia Belanda telah menyebabkan tidak adanya ikatan yang kuat warga Papua dengan para nasionalis Indonesia.<sup>65</sup> Secara sederhana, problem integrasi nasional di Papua, bila dibuat satu tabel identifikasi akan tampak sebagai berikut:

---

<sup>65</sup> The absence of a such history, common experience, or interaction with elites from other areas of the Dutch East Indies explains why the Papuans did not adhere to the Indonesian nationalist movement from the 1920 and 1930s. (Bertrand, 2004: 147)

**IDENTIFIKASI PERSOALAN INTEGRASI NASIONAL  
DI PAPUA**

| No. | JENIS MASALAH/ KASUS  | KLASIFIKASI:<br>VERTIKAL -<br>HORIZONTAL |            | KETERANGAN   |
|-----|---|--|------------|--|
| 1.  | Aspek historis: Pepera dianggap tidak merepresentasikan sikap rakyat Papua secara keseluruhan, sehingga mosi integrasi dianggap tidak memiliki legitimasi             | Vertikal                                 |            | Secara yuridis formal hukum internasional, sudah selesai |
| 2.  | Munculnya rasa nasionalisme Papua (pada masa akhir kolonialisme Belanda), yaitu persaudaraan Melanesia yang berbeda dengan umumnya penduduk Indonesia yang ras Melayu |  | Horisontal |  |
| 3.  | Pembagian hasil eksploitasi sumber daya alam yang tidak adil antara pemerintah Jakarta dengan warga Papua   | Vertikal                                 |            | Khususnya eksploitasi oleh PT. Freeport                  |
| 4.  | Kerusakan lingkungan akibat eksploitasi SDA   | Vertikal                                 |            |  |
| 5.  | Rusaknya struktur budaya/adat   | Vertikal                                 | Horisontal | Khususnya suku Amungme                                   |
| 6.  | Penyerobotan tanah rakyat   | Vertikal                                 |            |  |
| 7.  | Kekerasan tentara (pembantaian, pemerkosaan, dll)   | Vertikal                                 |            |  |
| 8.  | Tersingkirnya masyarakat lokal akibat proyek transmigrasi   | Vertikal                                 | Horisontal |  |
| 9.  | Rendahnya akomodasi warga lokal dalam politik pemerintahan  | Vertikal                                 |            |  |
| 10. | Faktor gereja/kekristenan sebagai identitas pebeda dengan mayoritas penduduk Indonesia  |  | Horisontal |  |
| 11. | Politik pembatasan penduduk asli (program KB) dan mobilisasi jumlah pendatang   | Vertikal                                 |            |  |
| 12. | Ideologi Cargo Cult   |  | Horisontal |  |
| 13. | Pembunuhan tokoh budaya Arnold Ap   | Vertikal                                 | Horisontal |  |
| 14. | Tidak ada penegakan hukum bagi pelanggar HAM berat  | Vertikal                                 |            |  |
| 15. | Kemiskinan, Kebodohan, Kelaparan  | Vertikal                                 |            |  |

Pelajaran yang bisa diambil dari peristiwa lokal di Aceh, Riau, Timor Timur dan Papua, adalah bahwa isu integrasi nasional sebagai salah satu bentuk ekspresi nasionalisme ke-Indonesiaan berada dalam posisi yang sangat lemah. Mengacu pada konstruksi Liddle (1975), lemahnya integrasi nasional tersebut pada sisi vertikal terjadi karena terlalu dominannya pemerintahan pusat (Jakarta) dalam proses-proses pengambilan keputusan (politik, hukum dan ekonomi) menyangkut kehidupan masyarakat yang tanpa mengindahkan aspirasi daerah. Sikap ini telah menjadi batu penghalang utama bagi terjadinya integrasi nasional. Sementara dari perspektif horisontal, dimensi kebudayaan, ideologi, agama dan hubungan kekeluargaan yang hidup di tengah masyarakat sangat jarang disentuh untuk dijadikan sebagai 'perangkat lunak' pendukung terjadinya integrasi itu sendiri. Indonesia yang jelas-jelas dipenuhi oleh keragaman etnik, budaya, bahasa, agama dan sebagainya, adalah tidak masuk akal jika hendak membangun satu integrasi nasional yang sejati (dimana seluruh penduduknya memberikan loyalitasnya secara sukarela) tanpa adanya pengakuan terhadap keberagaman itu sendiri. Dalam konteks ini, penting untuk mengingat kembali ungkapan Jacques Bertrand berikut ini:

National models based on single nations or cultural criteria that exclude or marginalize groups may produce much violence. Political leaders sometimes choose to consolidate states first, before crafting nations or national models. In these circumstances, state repressive instruments are often used to quell secessionist rebellions or groups whose perspectives may differ from that of state leaders. In the ends, however, nationalist dreams cannot escape the realities of multi-ethnic or multicultural diversity. (Bertrand, 2004: 223)<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> Model-model negara yang dibangun di atas kebangsaan atau kriteria kebudayaan yang tunggal, yang meminggirkan kelompok-kelompok lain hanya akan melahirkan sejumlah kekerasan. Para pemimpin politik mungkin pertama-tama harus melakukan konsolidasi ke dalam terlebih dahulu, sebelum membuat model-model negara atau kebangsaan. Dalam kondisi demikian, perangkat-perangkat represif negara seringkali digunakan untuk membasmi para pemberontak yang ingin memisahkan diri, atau kelompok-kelompok yang memiliki pandangan berbeda dengan para pemimpin negara. Pada akhirnya, impian para nasionalis tidak dapat lepas diri dari realitas akan adanya multietnik dan keberagaman kebudayaan.'